

Ritual yang Terbelah

Agama pasti memerintahkan pemeluknya menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Tuhan dan sesama. Agama bahkan mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sayangnya, ada kecenderungan pada sebagian orang yang memahami ajaran agama secara parsial. Dikiranya beragama hanya berkaitan dengan ibadah ritual, sehingga lahirlah sosok yang rajin ibadah ritual sekaligus rajin bermaksiat.

Orang yang melaksanakan amalan baik dan jelek secara bersamaan dapat dikatakan mengalami kepribadian terbelah (*split of personality*). Orang seperti ini sejatinya sedang sakit mental karena tidak satu agama pun yang mengajarkan agar pemeluknya berkepribadian ganda. Di sinilah pentingnya mengembangkan pemahaman agar setiap pemeluk agama senantiasa berikhtiar menyelaraskan ibadah ritual dan sosial.

ISBN 978-602-8217-43-9



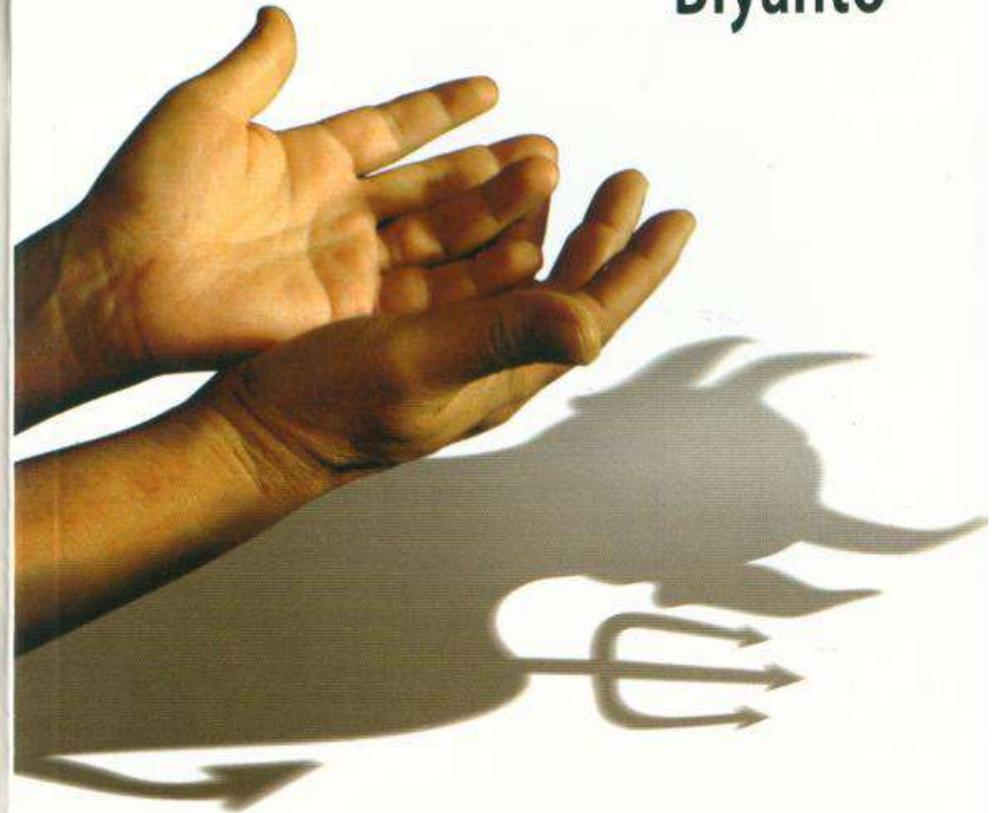
9 786028 217439

Biyanto



Biyanto

Ritual yang Terbelah
MEWASPADAI PENYAKIT KEAGAMAAN KEKINIAN



Ritual yang Terbelah

Mewaspadaai Penyakit Keagamaan Kekinian

RITUAL YANG TERBELAH

Mewaspada! Penyakit Keagamaan Kekinian

Hikmah Press
2012

RITUAL YANG TERBELAH

Mewaspadai Penyakit Keagamaan Kekinian

Penulis : Biyanto

Editor : Muh Kholid AS
Desain Cover : Rihad Humala
Desain Isi : Edy
ISBN : 978-602-8217-43-9

Cetakan I: November 2012

Ukuran: 15 x 23 cm

viii, 264 hlm.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Hikmah Press

Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya

Telp. 031-8471412 Fax. 031-8420848

Email: matan_pwm@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, akhirnya buku berjudul *Ritual yang Terbelah* ini dapat diterbitkan. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan dari tulisan yang pernah dipublikasikan di media massa seperti *Jawa Pos*, *Seputar Indonesia*, *Kompas*, *Surya*, *Radar Surabaya*, dan *Surabaya Post*. Karena topik yang dihadirkan bersifat ensiklopedis, maka penulis berharap agar pembaca dapat memahami konten tulisan sesuai dengan konteksnya. Hal ini karena umumnya tulisan yang dipublikasikan di media massa berupaya untuk merespon wacana yang sedang *on the topic*.

Secara keseluruhan tulisan yang dihimpun dalam buku ini membahas wacana yang berkaitan dengan topik sosial keagamaan. Buku ini diberi judul *Ritual yang Terbelah*, merujuk pada salah satu tulisan yang pernah dimuat koran *Jawa Pos* pada 21 April 2010. Konteksnya, saat itu terjadi fenomena yang menggelisahkan perasaan dan pemikiran penulis terkait dengan pemberitaan di media tentang seorang hakim yang tertangkap menerima suap dari terdakwa kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam pemeriksaan di pengadilan, Pak Hakim memberi pengakuan yang mengejutkan semua orang, bahwa uang hasil suap itu sebagian digunakan untuk beribadah umrah. Pengakuan ini sontak membuat perasaan publik menjadi miris. *Kok* ada orang beribadah umrah dengan menggunakan uang hasil suap.

Pertanyaannya, apa kata akhirat? Mungkinkah kita akan mencuci pakaian dengan air najis? Ternyata kisah memilui-

kan tersebut tidak hanya terjadi pada diri Pak Hakim seorang. Modus orang korupsi kemudian menggunakan sebagian hasil korupsi untuk beribadah ternyata dilakukan banyak orang. Hal ini menunjukkan betapa orang sering memisahkan ibadah ritual dengan amal sosial. Padahal semestinya ibadah ritual itu berdampak pada perbaikan amal sosial. Dalam konteks ini korupsi sejatinya merupakan perbuatan dosa yang dapat berdampak luas terhadap buruknya kehidupan sosial. Karena itulah penting dikembangkan pemahaman agar setiap pemeluk agama senantiasa berikhtiar untuk menyelaraskan ibadah ritual dan sosial.

Akhirnya, penulis mengucapkan selamat membaca. Banyak pihak yang telah berbaik hati untuk membantu penerbitan buku ini. Diantaranya Mas Kholid, Pemimpin Redaksi *Matan*, majalah bulanan yang diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dengan tekun Mas Kholid telah menghimpun tulisan yang sebelumnya berserakan di banyak tempat. Selanjutnya tulisan itu diedit dan dikelompokkan dalam beberapa topik. Penulis juga berterima kasih pada Mas Edy yang telah me-*layout* buku ini sehingga layak untuk diterbitkan. Terakhir, pada Mas Najib dari Hikmah Press, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas perkenannya menerbitkan buku ini.

Pada istri tercinta, Maurin Damajanti, penulis selayaknya berterima kasih karena memberi kelonggaran untuk memanfaatkan sebagian waktu di komputer. Anak-anak tercinta, Muhammad Wildan Abyan dan Hanum Salsabila, dengan caranya masing-masing juga telah memberikan inspirasi pada penulis. Semoga karya ini menjadi amal baik penulis di hadapan Allah SWT, amin.

Surabaya,
November 2012
Biyanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bagian Satu: Agar Ritual Tak Terbelah	1
Gejala Ritual yang Terbelah	3
Selaraskan Ibadah Ritual dan Amal Sosial	7
Saatnya Melakukan Aksi Kemanusiaan	10
Hidup Berorientasi Prestasi	14
Urban Sufism.....	17
Entrepreneur Pasar Spiritual.....	21
Mempromosikan Wisata Rohani Jatim	25
Strategi Berdakwah ala sang Pencerah	29
Menjaga Kedekatan dengan Allah	33
Merangkul Kembali Pengikut Aliran Sesat.....	36
Ramadan Bukan Bulan Sweeping	39
Berhaji secara Bermartabat.....	42
Ibadah Haji Cukup Sekali	45
Ibadah Haji dan Teladan Ibrahim	48
Cermin Hilangnya Akal Sehat	51
Bagian Dua: Memperkuat Civil Society	55
Memperkuat Civil Society	57
Kiprah Ormas dalam Pilkada	61
Beda Sikap Muhammadiyah dan NU	65
Posisi Kritik Muhammadiyah	68
Ujian Kemandirian Muhammadiyah	72

Apa Kabar Saudagar Muhammadiyah.....	76
Intelektual di Balik Pilpres.....	79
Peran Agama Mencegah HIV/AIDS.....	83
Menanti Kebangkitan Kaum Muda.....	87
Kemerdekaan RI dan Spirit Ramadan.....	90
Mendorong Munculnya Calon Perempuan.....	93
Zakat untuk Produktifitas Umat.....	98
Mengevaluasi Program Pengentasan Kemiskinan.....	101
Mewaspada Komunisme Gaya Baru.....	106
Dampak Sistemik Fatwa Haram Merokok.....	111
Bagian Tiga: Hidup Bersama Beda Paham.....	115
Pluralisme, Pengakuan Keragaman yang Inklusif.....	117
Membumikan Nilai-nilai Pluralisme.....	122
Mengembangkan Pluralisme Positif.....	125
Menyikapi Perbedaan Paham Beragama.....	128
Menumbuhkan Civic Values Melalui Dakwah.....	131
Pembauran sebagai Bagian Ketahanan Bangsa.....	134
Membubarkan Ormas Anarkistis.....	140
Jalan Tengah Pemikiran Islam.....	143
Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah.....	148
Meneguhkan Semangat Modernisasi dan Purifikasi.....	151
Pemberdayaan Perempuan dalam Kerukunan Umat.....	155
Memerangi Ideologi Terorisme.....	159
Menjaga Spirit Intelektualisme Kang Moeslim.....	162
Bagian Empat: Korupsi Mengorupsi Indonesia.....	165
Korupsi Mengorupsi Indonesia.....	167
Mewaspada Penyakit Moral Illiteracy.....	171
Hedonisme dan Kehancuran Negara.....	174
Oase Pemberantasan Korupsi.....	177
Sanksi Sosial pada Koruptor.....	180
Ekspose Kunker Pejabat Publik.....	183
Marilah Berkata Jujur.....	187
Pendidikan Antikorupsi.....	190
Pencitraan No, Kinerja Yes.....	193
Menghabiskan Anggaran di Akhir Tahun.....	196

Kiprah Ormas dalam Pemberantasan Korupsi	200
Integritas Departemen “Suci” Dipertanyakan	204
Bagian Lima: Pudarnya Idealisme Politik	207
Masa Depan Partai Islam	209
Imaginasi Mendirikan Negara Islam.....	213
Nasionalisme versus Gerakan Trans-Nasional.....	217
Menyoal Idealisme Berpolitik.....	221
Tatkala Orang Berebut Kekuasaan.....	224
Memahami Budaya Kontrak Politik.....	227
Mendambakan Legislatif Well Educated	231
Pencalonan Figur Non Kader dalam Pilkada	234
Perlu Rekonsiliasi Pasca Pilwali.....	238
Menentukan Branding Kota Surabaya	242
Golput, Pemenang Pilgub Jatim	245
Makna Penghapusan Nomor Urut Caleg	248
Bangun Koalisi Strategis, Mencari Figur Alternatif	252

BAGIAN SATU
AGAR RITUAL
TAK TERBELAH

GEJALA RITUAL YANG TERBELAH

Dalam ajaran Islam, ibadah haji, termasuk di dalamnya umrah, merupakan rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Tentu saja, yang diwajibkan dalam ibadah haji ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran: 97). Kemampuan dalam hal ini meliputi fisik dan materi. Bahkan juga dipersyaratkan adanya jaminan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.

Karena persyaratan yang begitu berat, maka Allah menempatkan mereka yang berhaji dan berumrah dalam posisi yang sangat terhormat. Allah menyebut mereka sebagai tamu-tamu Allah (*wafduallah*). Allah berjanji, jika mereka berdoa maka akan dikabulkan dan jika memohon ampunan akan diampuni. Allah juga memuliakan mereka dengan janji akan menghapuskan dosa dan kesalahan sehingga menjadi seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Janji Allah ini jelas bersyarat, yakni jika mereka yang berhaji dan berumrah tidak melakukan perbuatan yang tercela selama beribadah.

Tampaknya, janji-janji tersebut telah mendorong sebagian besar umat Islam untuk menjadi tamu-tamu Allah. Karena itu tidak mengherankan jika pendaftar haji terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan untuk memastikan diri mendapatkan giliran berangkat, seseorang harus terlebih dulu mendaftar dan melunasi biaya yang ditentukan. Selanjutnya ia harus bersabar untuk menunggu hingga beberapa tahun.

Orang pun lantas bertanya; mengapa jumlah pendaftar jamaah haji yang terus bertambah tidak sebanding dengan pengu-

rangan jumlah orang miskin? Ini berarti fenomena pendaftaran ibadah haji yang terus membludak tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat. Pertanyaan selanjutnya; jika tujuan berhaji adalah menjadikan orang lebih baik, tapi mengapa praktik korupsi dan suap di negeri ini terus bertambah? Bukankah mayoritas pejabat publik di negeri ini Muslim dan sudah berhaji? Ini berarti ada yang salah dengan cara kita dalam mempraktikkan ajaran agama.

Beberapa pertanyaan tersebut salah satunya dapat ditemukan jawabannya melalui kasus Gayus Tambunan (GT) yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam salah satu pengakuannya, GT mengatakan bahwa sebagian uang hasil korupsi itu telah digunakan untuk membiayai ibadah umrah seorang hakim. Kebetulan Pak Hakim ini adalah orang yang menangani perkaranya. Meski pengakuan ini bersifat kasuistik karena dilakukan oleh oknum, tetapi kejadian ini jelas dapat menyisakan kerisauan bagi agamawan.

Bagi Pak Hakim, ibadah umrah jelas merupakan perintah agama yang harus ditunaikan. Tetapi, persoalan menjadi kompleks jika uang yang digunakan beribadah itu ternyata bersumber dari dana yang diduga kuat hasil korupsi. Maka, saya kira persoalannya bukan hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut. Sebab, penentuan sah atau tidaknya beribadah hanya Allah yang tahu. Yang patut dipertanyakan adalah layakkah seseorang menjalankan ibadah dengan jalan yang salah? Ibarat kita ingin mencuci pakaian maka tidak mungkin pakaian itu dicuci dengan menggunakan air najis. Sebab, jika ini yang dilakukan maka bukan kebersihan pakaian yang akan diperoleh.

Jadi, beribadah jelas tidak dapat menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Selain tidak sah, cara beribadah ini jelas tidak akan berdampak pada peningkatan keberagamaan seseorang. Pertanyaannya, buat apa beribadah jika tidak mampu menghadirkan keshalehan bagi diri dan masyarakat di sekitarnya?

Ritual yang Terbelah

Istilah “ritual yang terbelah” disadur dari disertasi Muslim Abdurrahman berjudul; *On Hajj Tourism: In Search of Pity and Iden-*

tity in The New Order Indonesia (2000). Karya ini menggambarkan betapa ritual haji di Indonesia sejak masa Orde Baru tidak hanya berfungsi sebagai media untuk meneguhkan identitas keagamaan seseorang. Dengan kata lain, ibadah haji seharusnya merupakan perjalanan transformasional atau *rite the passage*. Ini berarti para tamu Allah harus merevisi identitas keagamaannya sehingga menjadi lebih baik.

Tetapi, ritual haji oleh sebagian kalangan ternyata telah digunakan sebagai alat untuk mempertegas identitas kelas. Indikatornya, seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, terutama yang berasal dari kelas menengah ke atas, biasanya memilih layanan plus. Maka, mereka pun memilih untuk beribadah dengan ONH plus. Dengan biaya yang hampir dua kali lipat dari ONH biasa, layanan yang diberikan oleh biro perjalanan haji dan umrah jelas berkelas.

Alasan yang dikemukakan mereka ini sangat beragam. Misalnya, keinginan untuk beribadah dengan lebih khuyuuk dan nyaman. Di samping itu, juga ada keinginan untuk menjalankan ibadah secara lebih efektif dan efisien. Sebab, haji dengan model biasa pasti membutuhkan waktu yang relatif lama. Sementara dengan haji plus mereka dapat menghemat waktu sehingga dapat lebih awal kembali ke tanah air.

Bermula dari budaya inilah pergeseran makna beribadah itu lambat laun terjadi. Seseorang yang berhaji dan berumrah tidak hanya sekedar beribadah. Mereka pada tingkat tertentu juga ingin menunjukkan kelas sosialnya. Dalam perspektif dunia modern kita dapat melihat betapa kuat pengaruh kapitalisme dalam beribadah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kapitalisme telah begitu jauh mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menjalankan ibadah, termasuk berhaji dan berumrah.

Dalam kasus GT yang menghebohkan tersebut, sangat mungkin Pak Hakim berniat tulus untuk beribadah sebagaimana layaknya kebanyakan umat Islam. Sepulang melaksanakan ibadah umrah Pak Hakim pun berharap untuk memperoleh pengampunan terhadap dosa dan kesalahan yang telah dijalani. Yang sangat disayangkan, Pak Hakim telah menempuh jalan yang salah karena beribadah dengan sumber biaya yang tidak bersih.

Maka, dalam konteks ini Pak Hakim berarti telah mengalami gejala *split of personality*. Pak Hakim jelas tahu bahwa bersekongkol untuk melakukan tindak korupsi adalah perbuatan melanggar hukum. Sebagai orang beragama, Pak Hakim pun pasti tahu bahwa beribadah dengan memanfaatkan sumber dana hasil korupsi jelas tidak ada manfaatnya. Tetapi, pengetahuan Pak Hakim ternyata belum mampu menghindarkan diri dari godaan yang mengitarinya. Akibatnya, ia terjebak dalam permainan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Harus diakui bahwa apa yang dilakukan Pak Hakim ini tampaknya juga menjadi tren pejabat publik dan selebriti kita. Mereka begitu rajin menjalankan ibadah haji dan umrah. Bahkan sedapat mungkin ibadah haji dan umrah itu dijalankan setiap tahun dengan menggunakan layanan plus. Persoalan sumber dana yang menjadi biaya perjalanan pun seringkali kurang begitu diperhatikan. Bahkan niatan beribadah pun seringkali tumpang tindih dengan usaha menunjukkan status kelas dan keinginan rekreasi. Maka, jangan heran jika sepulang menjalankan ibadah haji dan umrah mereka tidak kunjung memperlihatkan diri sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

SELARASKAN IBADAH RITUAL DAN AMAL SOSIAL

S elalu muncul pertanyaan dari sebagian orang mengenai keterkaitan ibadah ritual dan amal sosial. Pertanyaan ini menarik direnungkan karena dalam agama apa pun pasti ditemukan ajaran yang menyatakan bahwa tujuan dari orang melakukan ibadah ritual adalah untuk memperbaiki akhlak. Bukan hanya kepada Tuhan, melainkan juga dengan sesama manusia dan alam sekitar.

Itu berarti jika ada orang yang rajin menjalankan ibadah ritual, seharusnya baik pula amal sosialnya. Ajaran Islam jelas sangat menekankan keterkaitan ibadah ritual dan amal sosial. Salah satu contoh ibadah ritual yang dapat dimaknai mengajarkan hal itu adalah shalat. Seperti diketahui, ibadah shalat merupakan peristiwa menghadap Allah. Karena itu, ibadah shalat dapat dianalogikan sebagai mi'raj seorang mukmin.

Dalam shalat diajarkan bahwa seorang mukmin hanya diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan Allah. Itulah yang disimbolkan dari ajaran *takbiratul ihram* tatkala seseorang memulai shalat dengan mengangkat tangan seraya membaca; Allah Akbar (Allah Maha Besar). Meski dimulai dengan *takbiratul ihram*, shalat selalu diakhiri dengan salam. Ajaran salam merupakan simbol bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama.

Dalam perspektif agama, bacaan salam berarti doa keselamatan yang ditujukan pada umat manusia. Jika dicermati dari seluruh bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam shalat, sesungguhnya ada banyak pelajaran yang dapat dipetik. Substansi pesan yang diajarkan adalah agar kita menjalin hubungan baik dengan Allah (*hablun*

minallah) dan sesama umat manusia (*hablun minannas*).

Perbincangan mengenai keselarasan ibadah ritual dan amal sosial penting karena ada kecenderungan pada sebagian orang yang memahami ajaran agama secara parsial. Dikiranya beragama hanya berkaitan dengan ibadah ritual. Padahal jika dipahami secara mendalam, semua ajaran agama memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat jelas.

Marilah kita perhatikan, ibadah haji selalu diakhiri dengan perintah untuk berkorban. Demikian juga ibadah puasa diakhiri dengan perintah untuk membayar zakat fitrah. Ibadah shalat pun diakhiri dengan perintah untuk mengucapkan salam. Perintah berkorban, mengeluarkan zakat fitrah, dan mengucapkan salam, jelas menunjukkan bahwa tujuan akhir dari ibadah ritual adalah memerintahkan pelakunya untuk beramal sosial yang baik. Karena itu, jika ada orang yang rajin melakukan ibadah ritual sementara amal sosialnya jelek, berarti orang tersebut tidak memahami substansi ajaran agama secara utuh.

Ini penting ditekankan karena ada kalanya orang itu shalatnya rajin, tetapi juga rajin berbuat maksiat. Orang seperti ini barangkali dapat dikategorikan sebagai muslim shalat terus maksiat jalan (STMJ). Begitu juga kalau ada orang yang rajin menunaikan ibadah haji dan umrah, tetapi anehnya setiap pulang dari Tanah Suci selalu berbuat korup. Orang seperti ini pasti tidak memahami makna dari amaliah yang dilakukan.

Yang lebih mengherankan, ada juga orang yang berhaji dan umrah dengan menggunakan uang hasil korupsi dan suap. Harapannya adalah agar dengan berhaji dan umrah itu, dosa dan kesalahannya diampuni. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad memang menjanjikan bahwa orang yang berhaji dan umrah itu akan diampuni dosanya. Saat pulang ke Tanah Air, para tamu Allah itu bahkan digambarkan bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir. (HR Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)

Dalam sudut pandang psikologi, orang yang melaksanakan amalan baik dan jelek secara bersamaan dapat dikatakan mengalami kepribadian terbelah (*split of personality*). Orang seperti ini sejatinya sedang sakit mental (*mental illness*). Sebab, agama apa pun pasti tidak mungkin mengajarkan agar pemeluknya berkepribadian ganda. Ajaran agama pasti memerintahkan agar pemeluknya menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Tuhan dan sesama.

Dalam kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, agama bahkan mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.

Adanya kecenderungan orang membedakan kesalehan ritual dan sosial setidaknya dapat dibaca dalam penelitian *Global Advisor* berjudul *Views Globalization and Faith* (2011). Di antara negara yang diteliti adalah Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan seputar pentingnya menjalankan ajaran agama. Umumnya responden penelitian memandang penting untuk menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Hampir tidak ada responden yang menyatakan bahwa ajaran agama itu tidak penting. Jawaban tersebut sejalan dengan meningkatnya gairah orang untuk beribadah. Itu dapat diamati melalui jumlah jamaah shalat di masjid dan musala yang selalu penuh sesak.

Apalagi saat Ramadan datang, gairah spiritual umat dipastikan mengalami peningkatan yang luar biasa. Pengajian-pengajian agama juga dijubeli jamaah. Demikian juga dengan jumlah antrean ibadah haji di beberapa wilayah yang kini telah mengular hingga puluhan, bahkan belasan tahun. Itu semua menunjukkan betapa telah terjadi peningkatan religiusitas di kalangan umat. Pertanyaannya, jika ibadah dianggap penting, mengapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di negeri ini terus mengalami peningkatan.

Bukankah mereka sejatinya umat beragama yang semestinya juga memandang penting ajaran agamanya? Jawabannya, sangat mungkin ajaran agama itu dipahami secara parsial. Mereka berpandangan bahwa beragama itu urusan privat sehingga tidak ada kaitannya dengan kehidupan sosial. Pemahaman ini jelas salah karena dimensi ajaran agama sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam al-Quran, Allah pun mengutuk orang yang shalat, tetapi lalai. Mereka yang dikatakan lalai itu adalah yang tidak tulus (*riya'*) dan tidak mau menolong orang lain (QS. al-Ma'un: 5-7). Peringatan ini layak direnungkan agar kita tidak termasuk orang yang dianggap mendustakan agama. Para pendusta agama itu adalah mereka yang tidak mampu menerjemahkan ajaran ibadah ritual dalam kehidupan sehari-hari.

SAATNYA MELAKUKAN AKSI KEMANUSIAAN

Bencana alam berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai tsunami, dan letusan gunung merapi, sepertinya tidak pernah berhenti melanda berbagai daerah di penjuruan tanah air. Akibatnya sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kepala keluarga yang harus kehilangan tempat tinggal, harta benda, pekerjaan, dan bahkan anggota keluarganya. Tidak itu saja, bencana juga telah menghadirkan trauma yang mendalam bagi penderitanya.

Beberapa daerah juga diindikasikan rawan gempa. Hal ini berarti bencana alam masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini jelas harus menimbulkan keprihatinan. Pada konteks inilah komitmen kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya sedang dipertaruhkan.

Jika merujuk pada kejadian sebelumnya, barangkali kita layak berbangga diri. Sebab, nilai-nilai kegotongroyongan, kebersamaan, kedermawanan, dan empati sosial, masih tampak terlihat. Tengoklah komitmen kemanusiaan saudara kita ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa bumi di Bantul, Jogjakarta. Hampir semua masyarakat seperti tanpa komando telah melakukan aksi kemanusiaan.

Masyarakat dengan tanpa pamrih menyumbangkan sebagian dari apa yang dimiliki untuk meringankan mereka yang tertimpa musibah. Bahkan kita juga menyaksikan relawan dari berbagai kelompok anak muda berada di jalanan untuk mengumpulkan sumbangan dari pengguna jalan. Reaksi spontan dan tulus dari

berbagai elemen masyarakat untuk membantu saudaranya ini jelas menunjukkan betapa budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa ini masih terpelihara.

Yang menarik, bencana alam juga telah dijadikan sarana bagi para aktivis partai politik untuk meraih simpati masyarakat. Hampir semua partai besar dan kecil turun ke lokasi bencana untuk menunjukkan rasa empatinya. Bahkan tidak jarang kita melihat ada banyak aktivis partai yang hilir mudik membawa bendera dan aksesoris partainya untuk sekedar menunjukkan komitmen kemanusiaan pada rakyat yang sedang tertimpa musibah.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri, organisasi sosial keagamaan, dan relawan kampus pun juga tidak mau ketinggalan. Mereka bahu-membahu dengan pemerintah untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Selain menghimpun dan mendistribusikan berbagai kebutuhan korban bencana, lembaga dan relawan tersebut juga mengumpulkan dana bantuan dari masyarakat.

Tentu saja kita berharap agar aksi-aksi kemanusiaan tersebut tidak dinodai berita miring mengenai korupsi dan penyelewengan dana bantuan yang telah dengan susah payah dihimpun dari masyarakat. Seperti yang pernah terjadi pasca kejadian musibah tsunami di Aceh kita telah dikejutkan berita mengenai penyelewengan dana yang dilakukan beberapa lembaga pengelola bantuan. Berita ini jelas sangat ironi dan menjadi pembenar hasil survei dari lembaga independen nasional dan internasional mengenai maraknya praktek korupsi di Indonesia.

Coba bayangkan, dana bantuan yang diperoleh dari sumbangan *Non-Governmental Organization* (NGO) internasional dan nasional, termasuk dari seluruh elemen masyarakat, yang seharusnya disalurkan kepada mereka yang tertimpa musibah, masih juga dikorupsi. Ini menunjukkan betapa praktik korupsi di negeri ini telah menggurita dan mendarah daging. Layaknya virus, korupsi seakan telah menyebar ke hampir seluruh lembaga pemerintah dan swasta di negeri ini.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bencana alam juga merupakan tragedi kemanusiaan. Ini karena bencana alam memang tidak pernah pandang bulu. Bencana alam menerjang se-

mua orang, tidak peduli etnis, agama, kaya dan miskin, pribumi dan non-pribumi, orang baik dan orang jahat, anak-anak dan orang tua, serta laki-laki dan perempuan. Semua orang berpotensi menjadi korban bencana alam.

Karena merupakan tragedi kemanusiaan, maka yang dibutuhkan saat bencana alam terjadi adalah aksi-aksi kemanusiaan. Barangkali usaha mencari sebab bencana alam itu penting dilakukan untuk menentukan langkah-langkah preventif. Tetapi yang jauh lebih penting adalah melakukan tindakan nyata dengan cara memobilisasi segala sumber daya masyarakat untuk memberikan bantuan bagi mereka yang terkena musibah.

Masyarakat di lokasi terjadinya bencana jelas sangat membutuhkan bantuan. Jadi, biarkan para elit politik menjadikan bencana alam sebagai alat mengkritisi kebijakan pemerintah dan meraih simpati masyarakat. Biarkan juga para ahli agama dengan logika teologisnya berusaha mengaitkan bencana alam dan perbuatan dosa besar. Semua itu jelas penting agar kita mampu melakukan koreksi total dalam menjalani kehidupan ini untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tragedi bencana alam juga menyadarkan pada kita betapa penting menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sekitar. Tetapi, sekali lagi yang terpenting untuk kita lakukan saat ini adalah menumbuhkan rasa empati sosial dalam bentuk tindakan nyata. Mari kita buktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang telah melekat pada masyarakat tidak pernah tergerus oleh perkembangan zaman.

Di dalam al-Qur'an jelas sekali dikemukakan ajaran yang sangat menyentuh hati nurani umat manusia. Misalnya, Allah menyatakan bahwa barangsiapa yang membunuh seorang, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Dan, barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (QS. al-Maidah: 32). Ajaran ini jelas menunjukkan betapa penting arti menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memberikan pertolongan pada mereka yang tertimpa bencana alam.

Dengan menggunakan bahasa yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, Allah menyamakan upaya menyelamatkan diri seseorang seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebaliknya, jika kita mengabaikan keselamatan seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai komitmen bersama, rasanya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah dapat digunakan sebagai media untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Semua orang tanpa mempedulikan latar belakang agama, etnis, dan budaya, dapat bersatu padu melakukan aksi kemanusiaan.

HIDUP BERORIENTASI PRESTASI

Peringatan tahun baru Islam pada setiap 1 Muharram selalu dirayakan dengan cara yang sangat beragam. Ini berarti perayaan tahun baru Islam termasuk dalam kategori budaya agama. Karena tergolong budaya agama maka cara merayakannya pun didasarkan pada tafsiran terhadap nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Di samping itu, aspek lokalitas dalam bentuk adat istiadat dan budaya lokal juga turut mewarnai. Tentu saja, keragaman tradisi umat dalam menyambut tahun baru Islam dapat menjadi khazanah. Semua itu dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ajaran tauhid.

Penentuan tahun baru Islam secara historis dimulai pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas. Para pemimpin di daerah kekuasaan Islam pun datang silih berganti memberikan laporan pada khalifah. Umar melihat ada yang membingungkan dari laporan-laporan ini karena tidak disertai tanggal dan waktu.

Umar pun berijtihad dengan mengundang para sahabat untuk menentukan kalender Islam. Berbagai usulan disampaikan, seperti ada yang menghendaki agar kalender Islam dimulai pada saat Muhammad dilahirkan. Usulan lain menghendaki agar wafatnya Nabi dijadikan patokan. Kedua usulan ini ditolak Umar. Umar lantas mengajukan usulan agar kalender Islam dihitung sejak peristiwa hijrah Nabi. Setelah melalui perdebatan usulan ini pun disepakati para sahabat. Akhinya, hijrah Nabi dijadikan awal perhitungan kalender Islam.

Pilihan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal kalender Islam memberikan dua makna penting. Pertama, sebagai pengakuan terhadap prestasi

Nabi dan para sahabat. Kedua, untuk menumbuhkan spirit optimisme. Dikatakan pengakuan terhadap prestasi karena pada saat hijrah, Nabi dan para sahabat telah menunjukkan capaian penting dalam perjalanan dakwah Islam di Makkah. Hijrah Nabi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan optimisme dalam diri para sahabat setelah mengalami masa-masa sulit di Makkah. Dengan berhijrah ke Madinah berarti ada harapan bahwa Islam akan berkembang lebih baik.

Maknanya jelas berbeda jika kelahiran Nabi dijadikan patokan kalender Islam. Sebab, ketika Muhammad dilahirkan belum menunjukkan prestasi apa pun. Bahkan Muhammad juga belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kelahiran Muhammad dari segi peristiwa dan waktu juga tergolong biasa-biasa saja. Kelahiran Muhammad tidak seperti Isa al-Masih yang lahir tanpa ayah. Jadi, tidak ada makna yang dapat memberi kesan mendalam dalam peristiwa kelahiran Muhammad.

Peristiwa kematian Muhammad pun tidak dapat dijadikan patokan kalender Islam. Karena kematian justru merupakan simbol dari akhir perjalanan hidup seseorang. Dengan kata lain, kematian seseorang sekaligus menjadi akhir dari capaian prestasinya.

Peristiwa hijrah jelas berbeda konteksnya dengan kelahiran dan kematian Nabi. Hijrah Nabi menandai era baru kehidupan umat yang lebih menjanjikan. Melalui peristiwa hijrah, Nabi dan para sahabat berhasil menumbuhkan optimisme untuk menapaki kehidupan yang lebih baik. Sejarah telah membuktikan kebenaran optimisme Nabi. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sangat antusias. Bahkan mereka bergantian menawarkan agar Nabi berkenan singgah di rumahnya.

Dengan dukungan masyarakat yang begitu ramah, maka dalam waktu singkat Nabi berhasil membangun tatanan masyarakat yang mengagumkan. Karena itu tidak berlebihan ketika orang berbicara mengenai praktik kehidupan Islami, atau yang populer dinamakan masyarakat madani (*civil society*), maka rujukan historisnya adalah masyarakat Madinah.

Sejarah penentuan kalender Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah telah mengajarkan bahwa yang dipentingkan dalam hidup ini adalah prestasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pada amal perbuatan. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa yang terpenting dari manusia itu adalah apa yang dikerjakan.

Allah berfirman, “Dan bahwa manusia tidak mendapatkan apa pun selain apa yang telah diusahakannya. Dan apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan kepadanya” (QS. al-Najm: 39-40). Inilah ajaran yang sangat sentral dalam agama Islam. Ajaran ini menegaskan bahwa keberadaan seseorang dinilai bukan berdasar prestise, status sosial, dan keturunan, melainkan prestasi kerjanya.

Karena yang penting dari seseorang adalah prestasi, maka setiap pribadi dituntut untuk melahirkan amal perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui prestasi inilah seseorang akan senantiasa dikenang oleh orang lain meskipun telah meninggal dunia. Itulah yang kita lakukan pada pribadi-pribadi agung semacam Muhammad dan Isa al-Masih. Nama mereka selalu dikenang karena telah melakukan perubahan besar dalam sejarah peradaban umat. Kita juga mengenang jasa tokoh-tokoh besar dunia karena mereka telah meninggalkan prestasi yang membanggakan dan bermanfaat bagi kehidupan umat.

Ini berarti jika kita ingin dikenang generasi mendatang maka yang harus ditunjukkan adalah prestasi. Filosof Barat, Rene Descartes, pernah mengajarkan prinsip *cogito ergo sum* yang berarti aku berpikir maka aku ada. Jika ajaran ini digunakan sebagai inspirasi, maka prinsip Descartes dapat diubah menjadi *labora ergo sum* (aku beramal maka aku ada). Dengan demikian maka ukuran eksistensi seseorang itu terletak pada prestasi amal perbuatannya.

Memeringati tahun baru Islam akan lebih bermakna jika disertai komitmen untuk menjalani hidup dengan berorientasi pada prestasi. Semangat hidup berorientasi prestasi (*achievement orientation*) harus senantiasa dipupuk agar setiap pribadi dapat menunjukkan capaian amal perbuatan yang bermanfaat. Ini berarti seorang pejabat publik, apa pun jabatannya, dituntut bukan hanya berpikir untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Yang jauh lebih penting adalah menunjukkan prestasi pada saat ia berkuasa. Kalau ini yang dilakukan berarti sejarah akan mencatatkan namanya dengan tinta emas. Rakyat pun pasti senantiasa mengenang jasanya.

URBAN SUFISM: POTRET KEBERAGAMAAN WARGA METROPOLIS

U*rban Sufism* barangkali merupakan terminologi yang relatif baru. Istilah ini sengaja digunakan untuk menunjukkan fenomena keberagaman masyarakat Muslim perkotaan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Fenomena ini tentu menarik dicermati. Kegandrungan warga metropolis untuk belajar agama setidaknya dapat diamati dari semakin ramainya kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh berbagai kelompok pengajian.

Tengoklah kegiatan tabligh, dzikir, dan kajian keagamaan di beberapa masjid seperti Al-Akbar, Al-Falah, dan Muhammad Cheng Hoo, yang selalu dihadiri oleh ribuan orang. Belum lagi paket-paket pelatihan seperti *Emotional Spiritual Quotion* (ESQ), Manajemen Qalbu (MQ), Shalat Tahajud, Shalat Khusyuk, dan Dzikir. Meski untuk mengikuti paket pelatihan ini seseorang harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, namun tetap saja menarik minat warga metropolis.

Yang menarik diamati, ternyata kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya diikuti oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan agama dan dari kalangan santri, melainkan banyak di antara mereka justru berasal dari kelompok yang telah mapan secara sosial-ekonomi dan bahkan mereka yang terdidik secara modern sekalipun. Bahkan menurut survei di beberapa toko buku di kota Surabaya, buku-buku agama, terutama tasawuf dan tarekat, termasuk yang paling laris.

Fenomena ini jelas memunculkan pertanyaan sosiologis. Mengapa dalam situasi yang diwarnai oleh kemajuan di bidang sains dan teknologi, justru semakin banyak orang yang tertarik kepada agama?

Apakah ini hanya sekedar gejala eskapisme dalam dunia modern?

Jawaban beberapa pertanyaan tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene, suami istri yang dikenal sebagai futurolog melalui karya *Megatrend 2000: Ten New Direction for the 1990's* (1990). Dikatakannya, bahwa kebangkitan agama merupakan wujud penolakan yang tegas terhadap kepercayaan buta kepada sains dan teknologi. Karena itu, bukanlah fenomena yang mengherankan jika terjadi peningkatan religiusitas di kalangan warga metropolis dalam bentuk keikutsertaan dalam pengajian, dzikir, tasawuf, dan tarekat. Bahkan mungkin banyak warga metropolis yang secara autodidak belajar dengan membaca langsung pada buku-buku agama.

Kebutuhan manusia terhadap agama adalah sesuatu yang bersifat asasi. Dalam hal ini, agama diyakini mampu memberikan kehidupan yang lebih bermakna bagi pemeluknya. Faktanya, agama tetap menjadi kebutuhan yang bersifat alamiah bagaimanapun perkembangan peradaban manusia. Kenyataan tersebut jelas menjadi antitesa teori yang menyatakan bahwa modernisme dan modernisasi merupakan lonceng kematian bagi agama. Teorinya adalah bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin jauh pula mereka dari agama. Agama diprediksi tidak akan pernah bangkit lagi dalam arus modernisasi dan sekularisasi.

Bahkan ada yang berpandangan sangat pesimistik terhadap agama. Misalnya, dikatakan agama dianggap candu masyarakat (Karl Marx), agama sebagai biang kerok keonaran di muka bumi (A. N. Wilson), dan Tuhan pun dikatakan telah mati (F. Nietszhe). Suatu ungkapan yang hampir menjadi *stereotip* dalam percakapan sehari-hari juga menggambarkan seolah-olah agama merupakan hambatan terhadap proses modernisasi dan industrialisasi.

Tetapi, apa yang terjadi justru sebaliknya. Modernisme dan modernisasi sepanjang menyangkut makna, telah mengantarkan manusia menuju jalan buntu. Era modern hanya menghasilkan kecemasan, keterasingan, kekerasan dan egoisme, hingga menyebabkan masyarakat modern membutuhkan agama. Kondisi inilah yang dialami warga metropolis sehingga mereka menengok kepada agama yang diyakini mampu memberikan ketenangan, kedamaian dan kehidupan yang penuh makna (*meaning full*).

Fenomena meningkatnya religiusitas masyarakat Muslim perkotaan telah menjadi bukti asumsi tersebut. Barangkali penting kiranya dilakukan penelitian yang komprehensif mengenai motivasi masyarakat Muslim kota Surabaya mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Apakah misalnya, fenomena tersebut dikarenakan adanya kesadaran providensi (keilahian), yang memang bersifat fitrah dalam diri manusia. Ataukah seperti yang dikatakan Allen Bergin (1994), bahwa fenomena ini disebabkan adanya kegagalan *organized religion*. Pada konteks inilah agama-agama yang telah mapan, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi sosial keagamaannya, tidak lagi dihargai peranannya.

Jika asumsi tersebut benar adanya, maka peranan elit agama telah mengalami pergeseran. Tokoh-tokoh yang berasal dari ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, tidak lagi dilirik peranannya sebagai pembimbing keberagamaan umat. Pada konteks inilah peranan mereka banyak digantikan oleh figur-figur yang relatif baru. Sebut saja misalnya mereka yang telah dikenal luas sebagai figur alternatif seperti AA Gym, Muhammad Arifin Ilham, Ustadz Haryono, Jefri al-Buchori, dan Ary Ginanjar Agustian (*trainer* ESQ).

Sementara di Surabaya kini juga mulai dikenal figur seperti PMohammad Sholeh (penulis buku dan *trainer* shalat tahajud), Abu Sangkan (penulis buku dan *trainer* shalat khusyuk), dan Agus Mustofa (penggiat Padma Aura, sebuah pelatihan berbasis pada dzikir dan kecanggihan kamera aura). Bahkan Agus Mustofa melalui karya-karya bertajuk serial diskusi tasawuf modern telah mendapat tempat tersendiri karena kecanggihannya dalam mendialogkan nilai-nilai agama dengan modernitas. Karena itulah setiap mereka menawarkan paket-paket pelatihan keagamaan selalu menarik minat warga metropolis. Pelatihan tersebut bagi warga metropolis dapat dijadikan sebagai meditasi tertinggi dalam Islam dan juga menjadi langkah-langkah praktis menemukan relaksasi dan meningkatkan kebahagiaan.

Untuk membuat eksplanasi terhadap fenomena peningkatan religiusitas Muslim kota kiranya dapat digunakan pandangan Emile Durkheim, sosiolog Perancis yang amat terkenal dengan teori tentang bunuh diri (*suicide*). Menurut Durkheim, semua agama pasti mengajarkan doktrin tentang dua domain, yakni hal-hal yang dianggap suci (*sacred*) atau keakhiratan dan hal-hal yang bersifat ke-

duniaan (*profane*). Manifestasi dua domain ini dapat tampak secara bersama-sama maupun terpisah, atau bahkan saling meniadakan. Misalnya, orang yang bosan terhadap masalah-masalah *profane*, akan berpaling dan menekuni aspek yang *sacred* saja, dengan cara bertapa atau meninggalkan apa pun urusan duniawi.

Realitasnya dapat diamati dalam kelompok-kelompok agama eksklusif atau kelompok sufi tradisional yang lebih mementingkan kesalehan individual daripada kesalehan sosial. Mereka umumnya menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat. Di negara-negara maju, untuk mengatasi problem-problem yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek berupa alienasi kemanusiaan, banyak orang memilih mengasingkan diri dengan aktifitas pemujaan kepada Tuhan secara eksklusif.

Bahkan tidak mustahil sikap ini kemudian menimbulkan perilaku yang tragis seperti bunuh diri massal (misalnya dalam kasus *clan David Cores*). Mereka juga melakukan konfrontasi terhadap apa saja yang ada di sekelilingnya. Karena itulah, persepsi agama yang memisahkan dua dimensi: *sacred* dan *profane*, diharapkan dapat diintegrasikan sehingga saling melengkapi. Sebab, jika memilih salah satunya, berarti meninggalkan yang lain.

Semangat religiusitas Muslim kota Surabaya juga dapat ditempatkan dalam konteks keinginan untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang bersifat *sacred* dan *profane*. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan duniawi semata, ternyata tidak memberikan kepuasan, apalagi menyangkut kepuasan batin. Karena itulah muncul kesadaran di kalangan warga metropolis untuk menempuh kehidupan yang sepenuhnya diwarnai oleh nilai-nilai religius.

Kita tentu berharap, semoga fenomena peningkatan religiusitas warga metropolis bukan sekedar sublimasi (pelarian), tetapi betul-betul diikuti dengan semangat baru untuk mewujudkan perilaku yang lebih agamis. Di sini penting ditekankan bahwa kehidupan religius merupakan tuntutan yang bersifat alamiah bagi setiap pribadi. Inilah sesungguhnya sisi positif dari meningkatnya gairah religiusitas warga metropolis. Bukankah masyarakat yang baik itu selalu diawali dengan terbentuknya pribadi-pribadi yang baik pula?

ENTREPRENEUR PASAR SPIRITUAL

Era modern ditandai adanya dominasi nilai simbol barang, proses estetisasi kehidupan, dan melemahnya sistem referensi tradisional. Ciri-ciri itu ditandai Mike Featherstone dalam *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity* (1991). Agama juga tidak lepas dari jamahan modernitas itu.

Ajaran agama yang bersifat sakral sekalipun dapat dinilai dari sisi komersial dan materialnya. Karena itu, tidak mengherankan jika nilai-nilai agama kemudian dikemas begitu rupa sehingga memiliki nilai komersial sebagaimana dipasarkan para penggiat training spiritual. Sebagaimana diketahui, di beberapa kota besar, kegiatan training spiritual ternyata memiliki nilai komersial yang sangat tinggi.

Beberapa kajian keagamaan dan paket pelatihan spiritual telah menjadi gejala di beberapa kota besar. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, training spiritual itu telah menjadi fenomena global era 1990-an. Tepatnya, sejak Daniel Goleman memublikasikan temuan para neurosaintis dan psikolog tentang kecerdasan emosi (*emotional intelligence*). Dikatakan Goleman bahwa dengan kecerdasan emosi, seseorang dapat mengerti perasaan orang lain sehingga muncul kemampuan untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan diri, berempati, termotivasi, dan berinteraksi dengan baik.

Selanjutnya, Danah Zohar dan Ian Marshall pada awal 2000-an juga mempromosikan temuan mengenai kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*). Melalui kecerdasan spiritual, seseorang memiliki kemampuan untuk memperoleh nilai-nilai, pengalaman, dan kenikmatan spiritual. Dengan kecerdasan emosi dan spiritual, ukuran kesuksesan hidup seseorang tidak lagi ditentukan melalui kemampuan IQ (*intelligence quotient*) yang sepan-

jang era modern begitu dominan. Sejak buku-buku karya Daniel Goleman, Danah Zohar, dan Ian Marshall diterbitkan dalam edisi Indonesia, kesadaran terhadap usaha untuk mengoptimalkan kecerdasan akal, emosi, dan spiritual untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan menjadi tren berbagai kalangan.

Beberapa penulis produktif dalam negeri juga menghasilkan banyak karya mengenai spiritualitas dan tasawuf. Sebagai contoh, Ary Ginanjar (*ESQ Power*), Agus Mustofa (*Seri Dialog Tasawuf dan Modernitas*), Mohammad Sholeh (*Training Shalat Tahajud*), dan Abu Sangkan (*Training Shalat Khusyu*). Yang mengagumkan, ternyata karya-karya tersebut masuk kategori *best seller*. Respons luar biasa itulah yang kemudian mengilhami beberapa penulisnya untuk melakukan terobosan dengan menawarkan berbagai paket pelatihan. Anehnya, paket pelatihan tersebut ternyata juga sangat diminati, terutama keluarga muslim di metropolis. Training-training keagamaan itu selanjutnya menjadi bisnis bagi *entrepreneur* spiritual.

Komodifikasi Agama

Dengan meminjam istilah Peter Corrigan dalam *The Sociology of Consumption* (1998), apa yang dilakukan penggiat training spiritual itu dapat dinamakan komodifikasi nilai-nilai agama. Istilah komodifikasi (*commodification*) merupakan perpaduan dari dua kosakata; komoditas dan modifikasi, yang berarti usaha untuk menawarkan kemasan barang atau jasa sehingga memiliki nilai komersial dan material. Dikatakan Corrigan bahwa di era kapitalisme sekarang ini segala sesuatu memiliki nilai komoditas. Karena itulah, segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, harus dikemas sebaik mungkin agar bernilai tinggi.

Entrepreneur training spiritual, tampaknya, berhasil menyinerjikan nilai-nilai keagamaan dan modernitas. Mereka benar-benar telah menyelami suasana hati kalangan Muslim perkotaan yang mengalami dahaga spiritual akibat kehidupan modern yang individualistis dan materialistis. Dalam situasi ini, kehidupan yang bermakna (*meaningful*) menjadi kebutuhan utama.

Pada konteks itulah, keberadaan training spiritual menemukan momentum yang tepat. Training spiritual juga dapat menjadi benteng dari pengaruh dunia mistik, klenik, dan perdukunan yang juga

menjadi tren kehidupan modern. Sebab, training spiritual yang diadakan penggiatnya pasti memiliki rujukan normatif dalam ajaran agama.

Mengutip hasil workshop tentang *Urban Sufism: Alternative Paths to Liberalism and Modernity in Contemporary Islam*, yang diselenggarakan oleh Griffith University, Brisbane, Australia dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2001), dikatakan bahwa terdapat lima kecenderungan masyarakat kota terhadap sufisme atau spiritualitas pada umumnya. Yakni; (1) *searching for meaningful life* (pencarian makna hidup), (2) *intellectual exercise and enrichment* (perdebatan intelektual dan peningkatan wawasan), (3) *psychological escape* (solusi problem psikologis), (4) *religious justification* (mengikuti tren keagamaan), dan (5) *economic interest* (kepentingan ekonomi).

Jika lima indikator tersebut digunakan untuk mengamati tren spiritualitas Muslim perkotaan, tampaknya ada kecenderungan umum di kalangan mereka yang mengikuti kajian keagamaan dan training spiritual dikarenakan ingin meraih kehidupan bermakna, belajar agama, dan mengatasi problem psikologis. Ini memang dapat dimaklumi sebab masyarakat kota yang secara langsung terimbas akibat modernitas. Sementara problem terbesar yang dialami masyarakat modern adalah persoalan kemanusiaan, seperti keterasingan, individualistik, materialistik, dan moralitas.

Berkaitan dengan adanya kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang menyertai kegiatan training spiritual, maka itu harus diakui sebagai dampak dari modernisasi dan industrialisasi yang salah satu di antaranya menuntut seseorang berlaku profesional. Karena itu, di tengah budaya industri dan pengaruh global, training spiritual harus dikelola layaknya bisnis yang nilai keuntungannya dapat dikalkulasi secara ekonomis. Dengan demikian, apa yang dilakukan *entrepreneur* spiritual yang melaksanakan training di hotel-hotel berbintang dengan menawarkan harga mahal adalah absah jika dilihat dari perspektif ekonomi-bisnis.

Para *entrepreneur* spiritual pun mengemas training agar memiliki daya tarik dengan memanfaatkan kecanggihan informasi dan teknologi (IT). Dengan cara tersebut, seorang *entrepreneur* spiritual seperti Ary Ginanjar selalu memanfaatkan IT guna memainkan

emosi keagamaan peserta training. Demikian juga halnya dengan Agus Mustofa yang menjadikan foto dan video aura sebagai salah satu daya tarik. Juga Mohammad Sholeh dengan kecanggihan pendekatan agama dan medis telah membuktikan adanya korelasi positif shalat Tahajud dan daya imunitas tubuh seseorang. Bahkan, Mohammad Sholeh telah menjadikan training shalat Tahajud sebagai media penyembuhan berbagai penyakit.

Untuk urusan penataan ruangan, *soundsystem*, dan cahaya lampu juga menjadi bagian yang sangat diperhatikan *entrepreneur* spiritual. Sebab, dengan itu semua, emosi keagamaan peserta training dapat dikondisikan sehingga mampu menghadirkan rasa penyesalan, kesedihan, dan kesyahduan yang mendalam. Puncaknya, ketika peserta training spiritual larut dalam penyesalan, tanpa terasa air mata mereka menetes.

Pertanyaannya, apakah dengan cara seperti itu seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu dibutuhkan konfirmasi kepada mereka yang mengikuti training spiritual. Tetapi, apa pun jawabannya, rasanya kita layak memberikan apresiasi kepada para *entrepreneur* spiritual. Sebab, mereka telah membantu kalangan Muslim perkotaan yang ingin merasakan kenikmatan spiritual (*the taste of spirituality*).

MEMPROMOSIKAN WISATA ROHANI JATIM

Di Jatim setidaknya ada empat kabupaten/kota yang biasa dijadikan rujukan masyarakat untuk melakukan ziarah wali songo, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Ini karena di kota-kota tersebut terdapat makam para wali seperti Sunan Ampel (Surabaya), Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri (Gresik), Sunan Drajat (Lamongan), serta Sunan Bonang (Tuban). Di beberapa makam wali songo inilah kita sering menyaksikan rombongan orang dari berbagai daerah. Tujuan utama yang ingin dilakukan adalah berziarah sekaligus berwisata ke tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat. Fenomena perjalanan masyarakat ini biasa disebut wisata rohani atau ziarah spiritual.

Wisata dengan mengunjungi lima makam wali di empat kabupaten/kota yang ada di Jatim tersebut dikenal dengan nama ziarah wali lima. Penamaan ini merujuk pada lima makam dari anggota wali songo yang banyak dikunjungi masyarakat. Meski masyarakat mengetahui bahwa jumlah wali yang menyebarkan Islam di Jawa berjumlah sembilan orang, namun dengan alasan ekonomis dan efisien, ziarah wali lima tetap menjadi pilihan utama. Sebab, untuk mengambil paket ziarah wali sembilan tentu dibutuhkan biaya dan waktu yang berlebih karena harus mengunjungi semua makam wali yang ada di Jawa.

Sebagai fenomena sosial keagamaan, wisata rohani termasuk gejala yang menarik diamati. Sebab, untuk melakukan perjalanan wisata rohani seseorang harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Bukan hanya biaya, tetapi juga waktu dan tenaga.

Bahkan mereka juga harus meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Mengenai motivasi yang melatarbelakangi para penziarah untuk melakukan wisata rohani barangkali dapat dijawab melalui analisis *The Sunday Times* (2000). Motivasi utama di balik wisata rohani adalah untuk pencerahan dan pengayaan spiritual (*the quest for spiritual enlightenment is a prime motivation for travel*). Mereka para peziarah rohani umumnya berharap dapat memperbaiki (*tune up*) diri pada tingkat fiskal, spiritual, dan emosional.

Di kalangan masyarakat, tradisi wisata rohani juga dilakukan dengan berbagai motivasi. Sebagian orang ada yang benar-benar ingin menapaktilasi dan mengenang perjalanan kehidupan para wali. Sementara yang lain ada yang sekedar ingin memperoleh manfaat praktis dan pragmatis, seperti kelancaran usaha, jabatan, kenaikan pangkat, ketenangan hidup, bahkan keinginan mendapatkan jodoh dan anak.

Biasanya, selama perjalanan wisata rohani, setiap rombongan dipandu seorang tokoh agama. Tokoh agama inilah yang berperan mengurus persoalan teknis dan non-teknis seperti memimpin zikir dan shalawat, berdo'a, serta menerangkan manfaat wisata rohani dengan mengunjungi makam para wali. Begitulah, ternyata wisata rohani kini telah menjadi tradisi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Bahkan tidak tertutup kemungkinan wisata rohani ke makam para wali juga telah menjadi tradisi masyarakat lintas budaya, etnis, dan agama.

Harus diakui, sebagian masyarakat ada yang memandang sinis tradisi wisata rohani. Mereka biasanya melontarkan beberapa pertanyaan kritis. Misalnya, mengapa orang harus bersusah payah datang ke makam para wali jika hanya untuk berdo'a? Bukankah Allah itu ada di mana saja, Maha Dekat, dan Maha Mendengar do'a setiap hamba-Nya. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada dua urat lehernya (QS. Qaf: 16). Karena Tuhan Maha Dekat dan Maha Mendengar maka tidak perlu bersusah payah datang ke tempat-tempat keramat, berbagai situs sejarah, dan makam para wali yang dikemas dalam rangkaian kegiatan wisata rohani.

Beberapa pertanyaan tersebut wajar diajukan. Apalagi dalam praktiknya tidak jarang seorang penziarah telah menjadikan zi-

arah makam para wali sebagai sarana untuk ber-*tawassul* (memohon kepada Allah melalui orang yang diyakini memiliki derajat kemuliaan). Melakukan *tawassul* berarti ada keinginan menjadikan seseorang, seperti para nabi, wali, dan ulama, sebagai *wasilah* (mediator atau perantara) dalam berdo'a kepada Allah. Praktik keagamaan ini jelas sangat rentan dengan perilaku syirik. Padahal dalam ajaran agama dikatakan bahwa syirik termasuk perbuatan yang paling besar dosanya di hadapan Allah.

Menurut Munawar A. Fattah dalam *Tradisi Orang-orang NU* (2006) dikatakan bahwa budaya *tawassul* dan *wasilah* sesungguhnya bermula dari adanya kesadaran seseorang yang merasa sangat rendah di hadapan Allah karena tidak memiliki bekal amal dan ilmu yang cukup. Akibatnya orang tersebut merasa tidak sanggup menghadap dan memohon secara langsung kepada Allah. Diumamakan, jika seseorang berkeinginan menghadap presiden, sementara dirinya tidak memiliki akses sama sekali --karena hanya rakyat jelata--, maka dalam keadaan seperti ini orang tersebut jelas membutuhkan mediator agar keinginannya tercapai.

Meski penjelasan tersebut dapat diperdebatkan, tetapi tampaknya tradisi *tawassul* dan *wasilah* telah begitu mendominasi praktik berziarah ke makam para wali dan ulama. Tradisi mutakhir yang menunjukkan fenomena tersebut juga dapat dijumpai melalui kebiasaan para penziarah ke makam Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang. Di area makam Gus Dur ini tampak para penziarah selain khushyuk berdo'a juga mengambil sebagian tanah dan bunga dengan harapan akan memperoleh berkah. Tradisi ini memang tidak dapat dilihat dalam kaca mata hitam putih. Sebab, selain sudah merupakan budaya masyarakat, praktik *tawassul* dan *wasilah* juga menjadi bagian dari teologi para penziarah.

Mencermati fenomena wisata rohani yang telah menjadi *trend* bagi sebagian masyarakat maka pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang memiliki aset makam para wali dan ulama yang berpengaruh, perlu melakukan berbagai terobosan dengan membuat seperangkat peraturan. Langkah ini penting untuk menjamin pengelolaan yang lebih profesional terhadap tempat-tempat yang potensial dijadikan obyek wisata rohani.

Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan masalah ini. *Pertama*, pemerintah harus mengelola aset wisata rohani yang secara langsung berkaitan dengan kelengkapan fasilitas, seperti situs para wali, tempat ibadah, lahan parkir, dan kebersihan. Kondisi ini akan melahirkan rasa nyaman dan aman bagi para penziarah. Hal-hal kecil seperti ini penting diperhatikan. Sebab, ada kalanya dalam waktu tertentu tempat-tempat ziarah wali itu sering kali tidak cukup memberikan rasa aman dan nyaman.

Kedua, seiring dengan adanya beberapa praktik keagamaan yang berpotensi merusak akidah dan keyakinan, rasanya pemerintah perlu melengkapi fasilitas tempat wisata rohani dengan tenaga-tenaga profesional yang bertugas memberikan layanan informasi mengenai kehidupan dan perjuangan para wali dan ulama. Tenaga profesional ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk membimbing pemahaman keagamaan para penziarah. Melalui cara ini para penziarah dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kehidupan tokoh yang diziarahi. Para peziarah juga memperoleh layanan bimbingan keagamaan ketika berdo'a, berzikir, membaca al-Qur'an, dan beribadah dalam pengertian yang luas.

Beberapa langkah tersebut penting karena selama ini para penziarah hanya memperoleh penjelasan dari juru kunci makam para wali dan ulama. Apalagi penjelasan yang diberikan seringkali jauh dari yang diharapkan. Bahkan tidak jarang penjelasan tersebut bersifat *a historis*, tidak rasional, dan berbau klenik.

Jika pemerintah mau mengelola pusat-pusat wisata rohani yang ada di Jatim secara sungguh-sungguh rasanya bukan hanya nilai keuntungan ekonomi yang akan diperoleh. Lebih dari itu, melalui situs makam para wali dan ulama ini pemerintah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap usaha untuk mencerahkan pemahaman keagamaan umat. Selamat mempromosikan wisata rohani di Jatim.

STRATEGI BERDAKWAH ALA SANG PENCERAI

Sidang tanwir Muhammadiyah 2012 yang dilaksanakan di Bandung telah usai. Din Syamsuddin dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa spirit yang ingin diusung dalam sidang tanwir adalah bekerja dan bekerja. Jika dikaitkan dengan makna kata tanwir yang berarti pencerahan (*enlightenment*), agenda Muhammadiyah ini jelas menekankan pentingnya beramal sosial yang mencerahkan. Itu berarti sesuai dengan jati dirinya, Muhammadiyah ingin menjadi gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar yang mencerahkan.

Sejauh ini dakwah Muhammadiyah dirasa kurang bisa mengakomodasi tradisi, budaya, dan adat istiadat lokal. Rasanya sudah banyak kritik dikemukakan pengamat terutama berkaitan dengan kurangnya apresiasi Muhammadiyah terhadap seni dan budaya. Karena itu Muhammadiyah sering dikatakan miskin budaya. Akibatnya, dakwah Muhammadiyah hanya dapat diterima kelas sosial tertentu; terdidik, rasional, dan modern. Padahal potret keberagaman masyarakat sangat beragam sehingga membutuhkan metode yang berbeda-beda.

Karakter dakwah Islamiyah juga menekankan sifat fleksibel dengan mempertimbangkan latar belakang sosial sasaran dakwah. Tetapi, inilah yang menjadi tantangan juru dakwah (mubalig) Muhammadiyah. Yang ironi, mubalig Muhammadiyah seringkali menghantam budaya lokal sebagai sesuatu yang berkonotasi takhayul, bid'ah, dan churafat (TBC). Maka, tidak mengherankan jika dakwah Muhammadiyah kurang dapat di-

terima masyarakat pedesaan,

Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah hingga kini telah menunjukkan kiprah yang membanggakan. Tetapi, harus diakui bahwa dalam tingkat tertentu kiprah dakwah Muhammadiyah belum mampu menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Hal itu sesuai dengan penilaian Mitsuo Nakamura yang pernah menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan perkotaan (*urban phenomenon*). Kesimpulan itu didasarkan kepada fakta bahwa dakwah Muhammadiyah terasa mudah diterima masyarakat perkotaan, tetapi sulit menembus basis massa di pedesaan.

Meski kini dakwah Muhammadiyah telah menunjukkan hasil sebagaimana tampak dalam perkembangan jumlah ranting di desa/kelurahan, kemasam dakwah Muhammadiyah tetap membutuhkan sentuhan. Kalangan *insider* secara jujur juga mengakui bahwa pengemasan (*packaging*) dakwah Muhammadiyah harus diperbaiki agar mudah diterima masyarakat.

Karena itu, ada keinginan kuat untuk mengubah strategi dakwah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Model dakwah tersebut dikenal dengan dakwah kultural. Secara diame-tral, dakwah kultural dapat dibandingkan dengan dakwah struk-tural yang menekankan aspek larangan dan ancaman berdasar ketentuan akidah, akhlak, ibadah, dan fikih. Keinginan mene-rapkan pendekatan kultural dalam menyampaikan dakwah ke-pada masyarakat jelas memiliki arti penting bagi perkembangan Muhammadiyah. Sebab, dakwah Muhammadiyah selama ini dinilai kurang mengakomodasi budaya lokal. Bahkan, juru dak-wah (mubalig) Muhammadiyah sering kali menghantam budaya lokal sebagai perilaku yang berbau takhayul, bidah, dan *churafat* (TBC).

Dengan menggunakan pendekatan yang bercorak kultural, itu berarti adat, tradisi, dan budaya lokal harus dipelajari untuk dijadikan media berdakwah. KH Ahmad Dahlan, sang pencerah pendiri Muhammadiyah, sejatinya dapat dijadikan teladan da-lam menyikapi adat, tradisi, dan budaya lokal. Ahmad Dahlan digambarkan sebagai figur yang sangat tegas sekaligus akomodatif terhadap budaya lokal. Beliau telah meluruskan arah kiblat Masjid Keraton Jogjakarta, mengadakan salat *'idain* (Idul Fitri

dan Idul Adha) di lapangan, menyampaikan khotbah dengan bahasa lokal, dan membentuk badan amil zakat yang sebelumnya merupakan hak prerogatif kiai. Karena ketegasan beliau dalam meluruskan pemahaman agama disertai penggunaan strategi dakwah yang tepat, Muhammadiyah berkembang dengan pesat.

Seni Itu Mubah

Dakwah kultural menuntut kreativitas mubalig tatkala berhadapan dengan budaya lokal. Pada konteks itulah, mubalig Muhammadiyah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seni dan budaya. Sebab, rasa seni sebagai penjelmaan sifat keindahan dalam diri manusia merupakan fitrah yang dianugerahkan Tuhan sehingga harus dipelihara dengan baik sesuai dengan jiwa ajaran agama.

Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Majelis Tarjih pada 1995 telah menetapkan bahwa karya seni itu hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengakibatkan fasad (kerusakan), *dlarar* (berbahaya), *'isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id 'anillah* (terjauhkan dari Allah). Itu berarti aktivis Muhammadiyah seharusnya tidak boleh antipati terhadap seni dan budaya.

Dakwah kultural juga harus menempatkan kelompok abangan, sinkretik, tradisional, dan modern sebagai sasaran berdakwah. Sebab, harus dipahami, tingkat religiusitas seseorang merupakan sebuah pengumpulan yang tidak pernah selesai. Dengan demikian, setiap kelompok keberagamaan di masyarakat harus dilihat sebagai komunitas yang sedang berproses menjadi pemeluk agama yang baik.

Karena itu, misi dakwah harus dikemas secara mudah dan menggembirakan. Jika model dakwah tersebut yang dikembangkan, Muhammadiyah akan menjadi tenda besar, tempat berhimpun bagi berbagai aliran/mazhab keagamaan. Muhammadiyah juga berpotensi menjadi rumah yang ramah bagi kelompok abangan dan sinkretis yang selama ini kurang dapat menerima kemasan dakwah Muhammadiyah.

Pendekatan kebudayaan jelas bertujuan menjadikan dakwah lebih lentur dan fleksibel. Untuk mencapai tujuan itu rasanya Muhammadiyah perlu mempertimbangkan beberapa hal. *Perta-*

ma, selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang puritan dengan menempatkan motto kembali kepada al-Qur'an dan Hadits (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Dalam praktiknya, motto tersebut berpotensi untuk diartikulasikan secara berlebihan dalam memandang adat, tradisi, dan budaya lokal.

Kedua, masih kuatnya resistansi sebagian kalangan Muhammadiyah terhadap adat, tradisi, dan budaya lokal. Bahkan, secara jujur harus diakui bahwa di kalangan Muhammadiyah tema dakwah menghapus TBC masih sangat dominan. Model dakwah anti-TBC barangkali sangat relevan bagi aktivis, namun dapat dipandang kurang cocok untuk kalangan abangan dan sinkretis.

Ketiga, hingga kini Muhammadiyah belum memiliki media yang cukup untuk mengembangkan dakwah, khususnya media yang berkaitan dengan seni dan budaya. Beberapa pengamat bahkan ada yang menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan antikebudayaan.

Karena itulah, mubaligh Muhammadiyah sebagai ujung tombak dakwah harus dibekali dengan wawasan yang luas agar mampu melihat seni dan budaya dari sisi dalam (*from within*), bukan dari sisi luarnya. Jika ini yang terjadi maka jangkauan dakwah Muhammadiyah akan berdampak lebih luas. Dakwah Muhammadiyah akan bersifat lintas golongan dan mampu menrobos batas kelas sosial keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dengan perspektif semacam ini, tidak tertutup kemungkinan bermunculan mubaligh Muhammadiyah yang menekankan pentingnya kearifan lokal (*local wisdom*). Bahkan perspektif dari dalam ini akan sangat bermanfaat bagi mubaligh Muhammadiyah sehingga tidak ada halangan psikologis untuk menjadikan berbagai tradisi lokal sebagai media dalam berdakwah. Maka menjadi menarik dilihat bagaimana Muhammadiyah dan warga persyarikatan mengkreasi gagasan dakwah kultural.

MENJAGA KEDEKATAN DENGAN ALLAH

Tanpa terasa kita berjumpa kembali dengan Ramadan 1433 hijriah. Sebagai rasa syukur marilah kita ucapkan *marhaban ya Ramadan*. Rasa syukur ini harus disertai usaha menyambut tamu agung, bulan Ramadan, dengan kelapangan dada dan penuh kebahagiaan. Dengan begitu maka ada komitmen untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan mengasah jiwa dengan banyak beramal. Kita meyakini, jika puasa dijalani dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka Allah akan menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Derajat ketakwaan inilah yang dicari setiap pribadi yang menjalani ibadah puasa (QS. al-Baqarah: 183).

Tentu banyak pengalaman keagamaan yang kita peroleh selama menjalankan puasa. Salah satunya adalah perasaan senantiasa dekat dengan Allah. Hal ini setidaknya tercermin dari aktivitas kita selama berpuasa. Hampir tidak ada waktu luang yang disia-siakan. Seluruh waktu dimanfaatkan untuk beribadah. Fenomena ini dapat diamati melalui gairah umat untuk beribadah. Hampir setiap masjid penuh sesak jamaah. Mereka setiap hari juga mendapatkan siraman rohani. Kita selalu mendengar lantunan pembacaan ayat al-Qur'an. Gairah orang kaya mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah, juga meningkat selama Ramadan.

Dalam perspektif ajaran Islam, perasaan dekat dengan Allah disebut *muraqabah*. Merasa dekat dengan Allah inilah sesungguhnya esensi dari nilai ketakwaan yang menjadi tujuan orang berpuasa. Puasa telah mengajarkan kepada kita mengenai makna kehadiran Allah dalam hidup. Melalui puasa kita merasa Allah benar-benar bersifat *omnipresent*. Dengan cara pandang seperti ini orang yang berpuasa mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang

dapat membatalkan atau merusak ibadah puasa. Pertanyaan penting yang harus dijawab; dapatkah setiap individu menjaga amalan baik yang telah dilakukan selama Ramadan untuk ditradisikan dalam beberapa bulan atau bahkan sepanjang tahun?

Seiring dengan datangnya Ramadan, umat Islam terutama yang berada di daerah perantauan biasanya mulai disibukkan dengan persiapan mudik ke kampung halaman. Uniknya tradisi mudik telah menjadi ritual bagi semua kalangan, tidak peduli dari kelompok kaya atau miskin. Berbagai motivasi turut menyertai pemudik, seperti rindu kampung halaman, sungkem orang tua, silaturahmi dengan sanak saudara, *nyekar* anggota keluarga yang telah wafat, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama.

Karena didorong keinginan tersebut biasanya pemudik rela mengeluarkan uang banyak, bersusah payah, berdesak-desakan, dan bahkan terkadang tidak memedulikan keselamatan diri. Tengoklah ketika mereka harus berdesak-desakan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Bahkan tidak sedikit pemudik yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anggota keluarga dan segudang barang bawaan. Fenomena mudik ini dikatakan Andre Moller dalam *Ramadan di Jawa* (2002) sebagai aktivitas yang khas di Indonesia untuk menyambut Ramadan dan lebaran.

Yang jarang disadari, ternyata tradisi mudik untuk menyambut Ramadan dan lebaran memiliki sumbangan yang sangat besar untuk menggerakkan perekonomian pedesaan. Apalagi realitas menunjukkan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di pedesaan. Keterkaitan mudik dengan pertumbuhan perekonomian pedesaan dapat dijelaskan melalui kebiasaan pemudik saat membawa hasil kerja di perantauan. Mereka datang dengan berbagai profesi. Mereka biasanya membagi oleh-oleh kepada keluarga dan tetangga terdekat. Dengan motivasi yang berbeda-beda maka tidak mengherankan jika pemudik harus menyediakan bekal yang banyak. Bahkan sebagian orang terkadang harus menggadaikan barang berharga yang dimiliki atau dengan berhutang untuk digunakan keperluan mudik.

Secara spiritual tradisi mudik dalam pengertian kembali kepada ampunan Allah sesungguhnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Allah berfirman; *Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang*

yang bertakwa (Q.S. Ali Imran: 133). Pada ayat ini kita diperintahkan untuk sesegera mungkin kembali kepada ampunan Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah kita akan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan berupa surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah tersebut berbicara mengenai perintah agar kita segera “mudik” dengan cara kembali kepada ampunan Tuhan. Jika dalam tradisi mudik Ramadan dan lebaran kita harus mempersiapkan bekal yang begitu banyak, maka untuk kembali kepada Allah jelas dibutuhkan bekal yang lebih. Derajat ketakwaan sebagai hasil ibadah puasa dapat dijadikan bekal yang sangat berharga untuk kembali kepada Allah. Tetapi harus disadari bahwa tidak semua orang mampu mencapai derajat ketakwaan dikarenakan gagal menangkap pesan puasa.

Salah satu pesan puasa adalah agar kita menjadi hamba yang memiliki sifat kasih sayang (*rahmah*). Aktualisasi sifat ini dapat diwujudkan melalui sikap senantiasa berempati kepada orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi. Selama Ramadan kita berlatih untuk menahan lapar, haus, dan nafsu biologis. Di tengah situasi masyarakat yang sedang berkesusahan, pesan puasa terasa sangat relevan untuk membangun spirit solidaritas sosial. Jika nilai-nilai puasa ini dipahami dengan baik, maka akan selalu muncul semangat berbagi dengan sesama.

Melalui tradisi mudik saat Ramadan kita memperoleh pelajaran betapa pemudik telah mengamalkan pesan puasa. Mereka datang dari tempat yang jauh karena didorong keinginan untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Mereka juga mengajarkan cara berbagi kesenangan dengan sesama melalui pemberian uang, pakaian, dan jajanan. Sebagian pemudik memang ada yang sangat konsumtif. Bahkan ada yang terkesan dipaksakan.

Budaya konsumtif dalam menyambut Ramadan jelas sangat bertentangan dengan pesan puasa yang mengajarkan kesederhanaan. Bahkan saat merayakan lebaran pun kita harus tetap sederhana. Ini sejalan dengan ajaran; *laysal 'id liman labisal jadid wa lakinnal 'id liman takwahu yazid* (Esensi perayaan 'idul fitri itu tidak terletak pada pakaian yang baru, melainkan ketakwaan yang terus bertambah).

MERANGKUL KEMBALI PENGIKUT ALIRAN SESAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam acara rapat kerja nasional (rakernas) yang berakhir pada 6 November 2007 telah menetapkan beberapa kriteria aliran yang dipandang sesat. Hal ini dilakukan untuk merespon kegelisahan sebagian masyarakat terhadap perkembangan berbagai ajaran dari aliran sesat yang kian semarak. Meski mungkin keabsahan kriteria tersebut dapat diperdebatkan, tetapi dengan kategori ini masyarakat dapat menilai apakah sebuah aliran layak dihukumi sesat atau tidak.

Di samping membuat kategorisasi aliran sesat, Komisi Fatwa juga menyatakan bahwa sejak 1980-an hingga kini MUI telah mengeluarkan fatwa 10 aliran sesat. Di antara aliran yang difatwa sesat adalah Inkarus Sunnah, Ahmadiyah, Islam Jamaah, shalat dua bahasa, Ajaran Lia Eden, Salamullah, dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Satu aliran lagi yang saat ini sedang diteliti MUI adalah Wahidiyah yang berkembang pesat di Jombang dan Kediri. Dalam scruannya, MUI juga mengajak agar penganut aliran sesat kembali ke jalan yang benar dan bagi yang tidak mau harus diberikan sanksi hukum.

Apa yang dilakukan MUI tersebut jelas menunjukkan adanya keinginan untuk menjadi pengadil terhadap silang pendapat mengenai berbagai faham keagamaan yang berkembang di Indonesia. MUI sebagai bagian dari lembaga keagamaan yang dibentuk pemerintah memang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa. Meski harus diakui bahwa fatwa MUI baru sebatas seruan moral dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hanya saja terasa ada yang kurang dari

fatwa-fatwa keagamaan tersebut, terutama jika MUI menetapkan suatu aliran tertentu difatwa sesat.

Dalam hal ini, seringkali fatwa tersebut tidak disertai himbauan agar masyarakat tidak main hakim sendiri dengan misalnya melakukan pengejaran terhadap pengikutnya serta merusak rumah dan tempat ibadah. Jika hal ini yang dilakukan, maka MUI jelas telah mengajarkan kewajiban untuk menghormati hak-hak kemanusiaan pada siapa pun. Sikap berempati dan mengayomi terhadap pengikut aliran sesat mutlak diperlukan. Sebab, dalam banyak kasus kekerasan terhadap pengikut aliran sesat hampir selalu berkaitan dengan fatwa lembaga-lembaga yang memiliki otoritas keagamaan.

Aliran sesat (*splinter group*) secara historis dan sosiologis selalu muncul di tengah dominasi budaya keberagamaan yang mayoritas. Dalam kultur seperti ini aliran sesat dan para pengikutnya akan menjadi kelompok marginal yang seringkali tersudutkan. Maka dalam relasi dominasi budaya mayoritas terhadap kelompok minoritas itulah dibutuhkan kesadaran betapa nilai-nilai kemanusiaan tetap penting dihargai. Maka tidak boleh ada kekerasan atas nama apa pun. Agama memang mengajarkan prinsip *amar makruf nahi munkar*. Tetapi harus diingat bahwa dalam agama juga diajarkan prinsip hidup kasih sayang, saling menghargai dan menghormati. Karena itu, prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran tidak harus disertai dengan melakukan kemunkaran juga.

Pemerintah melalui kejaksaan dan kepolisian berdasarkan laporan masyarakat juga berhak mengambil tindakan terhadap aliran sesat. Apalagi pemerintah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1965 tentang proses melarang ajaran agama (tata cara larangan kepercayaan). Bahkan melalui peraturan ini pemerintah dapat menetapkan bahwa keberadaan aliran sesat dianggap telah melakukan penistaan agama. Tetapi, agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar HAM, aparat pemerintah juga harus tetap memberikan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat dan memeluk agama (Pasal 28 UUD 1945). Berkaca pada ketentuan ini, aparat pemerintah dalam bertindak juga harus mengindahkan hak-hak kemanusiaan dari para pemimpin dan pengikut aliran sesat.

Terlepas dari adanya faktor-faktor politik yang melatarbelakangi, kemunculan berbagai aliran sesat dapat menjadi pelajaran berharga

bagi lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Fenomena tersebut menunjukkan betapa dakwah keagamaan yang selama ini dilakukan oleh para da'i dan mubalig belum berhasil menyentuh pada semua lapisan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan realita bahwa para penyebar dan pengikut aliran sesat ternyata bukan kelompok orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai. Mereka umumnya baru pada taraf mengenal dan mempelajari ajaran agama. Dalam situasi seperti ini dapat dibayangkan jika kemudian ada seseorang yang menawarkan paham baru apalagi didukung argumentasi yang logis. Sangat mungkin mereka yang terpicat mengikuti aliran sesat merupakan orang yang sedang mencari paham keagamaan yang diyakini paling benar.

Untuk menjadi pemeluk agama yang baik pasti dibutuhkan waktu relatif lama. Bahkan seringkali dalam pergumulan menjadi muslim sesungguhnya itulah, seseorang terkadang harus membandingkan satu mazhab pemikiran dengan pemikiran lain. Maka dalam dialektika pemikiran itulah seseorang seringkali tergodanya dengan aliran baru yang dipandang lebih kritis, rasional, praktis, dan pragmatis. Dalam tingkat tertentu pengalaman keagamaan seperti ini barangkali juga pernah dialami setiap orang. Karena itulah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya keberagaman seseorang selalu berproses (*becoming*).

Karena perilaku keberagaman itu berproses maka yang penting dilakukan adalah memberikan pembinaan secara terus-menerus agar seseorang mau berubah menjadi lebih baik. Termasuk yang perlu dibina dalam hal ini adalah para pemimpin dan pengikut aliran yang telah difatwa MUI sesat. Mengajak mereka untuk berdiskusi (*sharing*) dan mempelajari ajaran agama yang benar merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan. Selanjutnya, yang juga penting dilakukan adalah menghormati hak-hak kemanusiaan mereka. Bukankah mereka yang menjadi pemimpin dan pengikut aliran sesat juga memiliki keluarga yang berhak untuk dihormati?

RAMADAN BUKAN BULAN SWEEPING

Anjuran pemerintah, sebagaimana dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali, agar umat Islam menghormati bulan suci Ramadan rasanya sudah sangat tepat. Pemerintah juga menganjurkan agar umat Islam tidak melakukan *sweeping* ke tempat-tempat hiburan malam. Himbauan ini penting dilakukan karena keutamaan bulan suci Ramadan seringkali dinodai aksi kelompok-kelompok radikal dalam Islam. Mereka biasanya melakukan aksi *sweeping* dan tindakan anarkis terhadap orang-orang yang dianggap merusak keutamaan bulan Ramadan.

Umumnya aksi *sweeping* dan anarkisme ini dilakukan di tempat hiburan malam dan lokasi lain yang dianggap sebagai sumber maksiat. Padahal seharusnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam ini menyerahkan persoalan tersebut pada pihak keamanan. Aparat keamananlah yang seharusnya bertindak untuk menertibkan tempat-tempat hiburan malam yang melanggar peraturan. Hal ini karena aparat keamanan memiliki landasan hukum untuk bertindak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan setiap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah mengeluarkan seperangkat peraturan mengenai keharusan masyarakat, termasuk pengelola hiburan malam, untuk menghormati bulan Ramadan.

Umat Islam sudah seharusnya menghormati Ramadan karena bulan ini menjanjikan nilai-nilai yang berbeda dari bulan lain. Misalnya, dikatakan bahwa pahala orang yang beribadah pada bulan Ramadan akan dilipatgandakan oleh Allah. Allah juga menjanjikan ampunan bagi mereka yang mau bertaubat dengan sepuh hati. Mengenai beberapa keutamaan bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersabda; Ketika Ramadan tiba, semua ger-

bang surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan semua setan dibelenggu. Juga dikatakan; Seandainya umatku mengetahui keistimewaan Ramadan niscaya mereka mengharap agar semua bulan menjadi Ramadan. Hadits tersebut memberikan keyakinan mengenai keutamaan Ramadan sehingga umat Islam harus memanfaatkannya untuk beribadah secara maksimal.

Anjuran menghormati bulan Ramadan sejatinya juga perlu diserukan pada orang-orang yang tidak berpuasa, baik dengan alasan yang dibenarkan syari'at atau tidak. Anjuran ini tentu harus dipahami dalam konteks untuk menghargai mereka yang sedang berpuasa. Bahkan pada pemeluk non Islam pun perlu dianjurkan untuk menghormati bulan Ramadan dalam rangka menghargai keyakinan pemeluk agama lain. Jika sikap saling menghargai ini dapat dilakukan dengan baik, maka Ramadan akan menjadi bulan yang memberikan rahmat bagi siapa pun.

Kelompok-kelompok radikal dalam Islam selalu beralasan bahwa aksi anarkis yang dilakukan di tempat-tempat yang potensial menjadi sumber perbuatan maksiat merupakan rangkaian dari tugas *amar makruf nahi munkar*. Pandangan ini tentu harus dikritisi karena tugas ber-*amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dilakukan sembarang orang. Jalaluddin al-Suyuthi, ulama besar dan mujadid Islam, menyatakan bahwa tidak semua orang dapat menyuruh pada yang *ma'ruf* (apa saja yang dipandang baik dan diperintahkan syara') dan melarang yang *munkar* (apa saja yang dipandang buruk, diharamkan, dan dibenci syara').

Dikatakannya, hanya ulama dan penguasa yang dapat melakukan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Ulama dikatakan memiliki tugas tersebut karena memiliki ilmu. Sedang penguasa dipandang dapat menunaikan tugas tersebut karena memiliki kekuasaan. Bahkan salah satu tugas pemerintah yang penting adalah untuk membawa bangsa kearah kemuliaan dan menyelamatkannya dari kerusakan. Tugas ini akan dapat dilakukan dengan syarat pemerintah harus memerintahkan yang baik serta melarang dan menghukum pelaku kemunkaran.

Kelompok-kelompok dalam Islam juga harus menyadari bahwa untuk menjadi pemeluk agama yang baik memang dibutuhkan waktu relatif lama. Karena perilaku keberagamaan itu berproses, maka yang penting dilakukan adalah memberikan pembinaan secara terus-menerus agar seseorang mau berubah menjadi lebih

baik. Termasuk yang perlu dibina dalam hal ini adalah mereka yang belum terbuka hatinya dengan memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah. Tugas pembinaan inilah yang mestinya diemban oleh tokoh-tokoh agama dan pimpinan organisasi sosial keagamaan. Mereka yang masih berproses menjadi orang baik harus terus-menerus dibina agar menjadi Muslim yang sesungguhnya.

Yang perlu ditekankan, bahwa dalam proses *amar makruf nahi munkar* adalah kesediaan untuk mengajak mereka dengan cara yang memudahkan bukan mempersulit dan menggembirakan bukan menakut-nakuti. Metode ini perlu dikembangkan agar dakwah yang dilakukan bersifat merangkul sebanyak mungkin kelompok keagamaan di masyarakat. Ramadan adalah bulan dakwah Islam. Di setiap masjid dan mushala selalu disediakan layanan ceramah. Bahkan media cetak dan elektronik pun tidak pernah sepi dari acara dakwah. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira.

Para ulama selalu menggunakan kata “marhaban” untuk menyambut tamu agung, bulan Ramadan. Akar kata marhaban, *rahb*, berarti luas atau lapang. Karena itu, ungkapan “marhabanya Ramadan” sesungguhnya menggambarkan bahwa bulan Ramadan merupakan tamu yang harus disambut dengan lapang dada, penuh kegembiraan, dan disertai usaha untuk mempersiapkan diri melakukan apa pun yang berkaitan dengan usaha mengasah jiwa sehingga menjadi bersih dan suci.

Yang harus disiapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah jiwa yang suci dan niat yang kuat untuk memerangi hawa nafsu serta menghiasi siang dan malam hari dengan beribadah. Ini berarti tidak dibenarkan jika ada sekelompok orang yang ingin melakukan perbuatan anarkis atas nama apa pun. Ramadan jelas bukan bulan *sweeping*, melainkan bulan penuh rahmat dan ampunan.

BERHAJI SECARA BERMARTABAT

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), jumlah calon jamaah haji (CJH) secara nasional pada tahun 2012 mencapai 212.000 dengan perincian 194.000 CJH reguler dan 17.000 CJH plus. Di samping mengumumkan kuota CJH, juga dipaparkan data bahwa hingga saat ini CJH yang telah masuk daftar tunggu mencapai 1,6 juta. Akibatnya masa tunggu CJH pun kian panjang, mencapai 3–12 tahun, bergantung pada jumlah daftar tunggu di setiap provinsi. Masa tunggu CJH ini tidak hanya terjadi pada haji reguler, melainkan juga haji plus.

Meningkatnya minat umat untuk beribadah haji rasanya patut disyukuri. Karena itu berarti menunjukkan perbaikan kesejahteraan umat sekaligus gairah dalam beribadah. Yang harus dilakukan Kemenag adalah membuat regulasi yang dapat memperpendek masa tunggu. Pada konteks inilah ikhtiar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu untuk mengkampanyekan ibadah haji cukup sekali dalam seumur hidup harus didukung. Tokoh agama perlu terlibat dalam kampanye ini. Apalagi fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa beliau hanya berhaji sekali.

Ibadah haji memang selalu memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam. Allah pun memanggil jamaah haji dengan sebutan yang menyentuh hati nurani, tamu Allah (wafdulah). Dengan panggilan sebagai tamu Allah berarti Dia yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu dikatakan bahwa jamaah haji berkunjung ke rumah Allah (Baitullah, Kakbah). Sebagai tuan rumah, berarti Allah yang akan menyambut, melayani, dan memberikan rasa aman bagi jamaah haji.

Berkaitan dengan keutamaan ibadah haji Rasulullah juga menyatakan bahwa haji yang mabrur pahalanya tiada lain kecuali surga. Disebutkan pula bahwa pahala orang berhaji sama dengan berjihad di jalan Allah. Secara keseluruhan praktik ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari Nabi Ibrahim. Karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa jamaah haji sedang menapaktilasi apa yang pernah dilaksanakan Ibrahim.

Dengan kata lain, sejatinya jamaah haji sedang bermain peran. Lakon yang dimainkan adalah perjalanan rohani Ibrahim hingga mencapai kesempurnaan hidup sebagai hamba Allah. Pertanyaannya, apakah setiap jamaah haji berhasil menjalankan peran dengan baik? Jawabnya tentu berpulang pada kemampuan setiap jamaah. Tapi umumnya jamaah haji berhasil menjalani peran dengan baik. Buktinya, tidak pernah terdengar ada jamaah haji yang “kapok” berkunjung ke Baitullah.

Bahkan sebaliknya, mereka selalu merindukan untuk berkunjung kembali ke Baitullah. Karena ibadah haji itu laksana seni berperan, bekal ketakwaan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak berbekal ketakwaan, jamaah haji pasti akan bertanya-tanya, bahkan mungkin tertawa, tatkala menjalankan seluruh proses ibadah haji.

Betapa tidak, protokoler dalam ibadah haji mengharuskan jamaah mengelilingi Kakbah (*thawaf*), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwa (*sa'i*), berkumpul di Arafah (*wuquf*), melontar dengan batu-batu kecil (*jumrah*), menggunting atau mencukur rambut (*tahallul*), mencium batu hitam (*hajar aswad*), pakaian yang dikenakan pria tidak boleh berjahit, alas kaki tidak boleh menutup mata kaki, dan apabila pakaian ihram telah dikenakan tidak boleh berhias lagi. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda.

Terlebih jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Prosesi ibadah haji yang demikian jika tidak dihayati sebagai perintah Allah tentu akan mengundang pertanyaan. Karena itulah yang pertama kali perlu diluruskan adalah niat. Jamaah haji harus menata niat. Harus diyakini bahwa ibadah haji merupakan bagian dari proses menuju kesempurnaan dalam beragama. Dengan niat yang lurus, jamaah haji akan menyadari bahwa apa yang dilihat dan dilakukan merupakan simbol-simbol yang sarat makna.

Apabila dihayati dengan baik, semua itu akan mampu mengantarkan jamaah haji dalam kehidupan yang diwarnai kesadaran mengenai keberadaan Allah. Sebagai contoh, Baitullah yang mengarah ke segala penjuru jelas melambangkan bahwa Allah berada di mana saja. Ketika kesadaran ini muncul, para tamu Allah tanpa segan akan mencium atau paling tidak melambaikan tangan ke Kakbah. Berpakaian serbaputih (ihram) jika dipahami dengan baik dapat menanamkan kesadaran mengenai persamaan manusia di hadapan Allah.

Para tamu Allah diajari untuk menanggalkan pakaian kebesaran yang seringkali melahirkan sikap angkuh atau sombong di hadapan orang lain. Pakaian kebesaran juga dapat membedakan status sosial antarpribadi. Pakaian ihram yang digunakan tamu Allah melambangkan persamaan dan tiadanya perbedaan antarumat manusia. Untuk mendukung agar jamaah dapat memahami peran yang dimainkan dengan penuh penghayatan hingga mencapai haji yang bermartabat (mabrur), jelas dibutuhkan peranan Kemenag.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah haji, Kemenag harus meningkatkan pelayanan. Ini penting ditekankan karena selalu ada keluhan dan kritik dari jamaah berkaitan dengan pengelolaan ibadah haji. Di antara fase krusial yang menjadi sumber kritik adalah pendaftaran, transparansi pengantrean, pelunasan, karantina di asrama haji, penerbangan, pemondokan, ritual ibadah haji, makanan, dan pemulangan. Permasalahan penempatan jamaah di Makkah, Mina, dan Madinah yang selalu berubah karena harus diundi juga menjadi sumber kritik.

Jika Kemenag mampu menghadirkan pelayanan prima, hal itu akan sangat berarti bagi jamaah. Tapi jika sebaliknya, sekali lagi jamaah haji dan publik pasti akan berlogika dengan sudut pandang masing-masing. Misalnya, sangat mungkin ada jamaah yang berpikiran bahwa BPIH yang besar ternyata masih diselewengkan.

Dugaan korupsi yang akhir-akhir ini terjadi di Kemenag dapat menjadi pembenar bagi sebagian jamaah yang berpikiran negatif tersebut. Inilah momentum yang tepat bagi Kemenag untuk menunjukkan integritasnya dalam mengelola haji secara bermartabat. Apalagi jajaran Kemenag telah mendapat suntikan energi sekelas Anggito Abimanyu. Semoga!

IBADAH HAJI CUKUP SEKALI

Melihat tren orang yang mendaftar sebagai calon jamaah haji (CJH), terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Berarti, antrean menjadi sangat panjang. Bahkan, di beberapa daerah, telah terjadi antrean hingga belasan tahun. Artinya, jika mendaftar haji pada tahun ini, seseorang harus rela menunggu hingga belasan tahun untuk berangkat.

Gairah umat Islam untuk berhaji merupakan fenomena yang menarik diamati. Selain menunjukkan peningkatan kesadaran dalam menunaikan ajaran agama, panjangnya antrean haji bisa dimaknai adanya perbaikan kesejahteraan umat. Hal itu bisa dimaklumi karena ibadah haji mempersyaratkan kesiapan modal finansial yang tidak sedikit. Bahkan, bukan sekadar dana, CJH juga harus mempersiapkan fisik serta mentalnya secara prima.

Karena itulah, agama mewajibkan ibadah haji hanya bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Selain itu, dipersyaratkan adanya jaminan keamanan untuk kelancaran beribadah (QS Ali Imran: 97). Faktanya, persyaratan yang begitu berat tidak mengurangi motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji.

Peningkatan jumlah CJH merupakan sekadar contoh untuk menunjukkan gairah keagamaan umat Islam Indonesia. Itu sejalan dengan hasil penelitian Global Advisor bertajuk Views on Globalization and Faith (2011) yang menyatakan bahwa agama memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bagi umat Islam Indonesia.

Umat Islam Indonesia juga menyatakan pentingnya usaha untuk menjalankan ajaran agama secara benar. Pertanyaannya, jika agama dan pengamalan ritual keagamaan dirasa sangat

penting, mengapa masih banyak terjadi perilaku yang menyimpang dari ajaran agama? Salah satu yang selalu menjadi perhatian publik adalah budaya korupsi. Ibarat pepatah, hilang satu tumbuh seribu, kasus korupsi pun terus bermunculan.

Idealnya, peningkatan ritual keagamaan itu berbanding lurus dengan perbaikan kehidupan umat. Apalagi, ajaran agama menekankan pentingnya hubungan ibadah ritual dengan kehidupan sosial. Contohnya, shalat. Allah mencela orang yang shalat karena tidak mau menolong anak yatim dan fakir miskin (QS al Ma'un: 1-7). Itu berarti, kesalehan individual saja belum cukup.

Seseorang yang rajin menjalankan ritual keagamaan dalam rangka membangun hubungan baik dengan Allah (*hablun minallah*) juga harus berkomitmen untuk berbuat yang terbaik bagi umat (*hablun minannas*). Jadi, ibadah ritual yang bersifat individual itu harus selalu berdimensi sosial.

Ibadah haji sebagai salah satu wujud ritual keagamaan juga harus memiliki dimensi sosial. Karena itu, penting dipahami makna sosial dari pelaksanaan ibadah haji. Jika merujuk pada keistimewaan Nabi Ibrahim, dapat dikatakan ibadah haji ternyata memiliki dimensi kemanusiaan yang luar biasa.

Empati sosial CJH paling tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kesadaran untuk melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Jika itu dilakukan, masa antrean ibadah haji akan bisa diperpendek. Sebagian orang menyatakan, beribadah haji lebih dari sekali itu dimaksudkan untuk menyempurnakan ibadah dan mendapat kepuasan spiritual. Argumentasi tersebut dapat dipahami karena ibadah haji selalu memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam sehingga menghadirkan kerinduan untuk kembali memenuhi panggilan Allah.

Berbekal pengalaman spiritual itulah, motivasi orang datang ke Baitullah untuk beribadah haji dan umrah terus muncul. Apalagi, Allah menyebut para jamaah haji dan umrah dengan panggilan yang sangat menyentuh hati nurani, yakni sebagai tamu-tamu Allah (*wafdullah*). Itu berarti, Allah akan menjadi tuan rumah dan melayani mereka yang datang ke Baitullah.

Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi jamaah haji. Dikatakan dalam sebuah hadis: Barang siapa berhaji, kemudian

ia tidak melakukan perbuatan tercela, maka akan diampuni seluruh dosanya layaknya bayi yang baru lahir (HR Bukhari, Muslim, dan Nasa'i). Motivasi keagamaan itulah yang terus mendorong CJH untuk berebut menjadi tamu Allah.

Karena antrean jamaah haji terus meningkat, rasanya, kesadaran kewajiban berhaji itu hanya sekali dalam seumur hidup penting ditekankan. Bukankah Nabi Muhammad hanya berhaji sekali dalam seumur hidup? Ibadah haji yang dijalani Nabi itu kemudian dikenal dengan haji wada' (haji perpisahan).

Jika kita mau meneladani kehidupan Nabi, ibadah haji pun cukup ditunaikan sekali. Hanya, untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal tersebut, jelas dibutuhkan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Karena itulah, pemerintah harus membuat regulasi yang tegas berkaitan dengan terus meningkatnya motivasi umat untuk beribadah haji.

Tokoh agama juga perlu memberikan pencerahan kepada umat dalam masalah kewajiban melaksanakan ibadah haji. Umat perlu disadarkan bahwa biaya ibadah haji yang kedua atau yang kesekian itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menangani persoalan kemanusiaan. Bukankah masih banyak persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang membutuhkan perhatian?

IBADAH HAJI DAN TELADAN IBRAHIM

Berhaji ke Baitullah merupakan idaman bagi setiap pribadi muslim. Itu jelas sangat beralasan karena orang yang menunaikan ibadah haji berarti telah menyempurnakan rukun Islam. Kesempurnaan dalam beragama memberikan kepuasan tersendiri. Apalagi jika berhasil mengantarkan seseorang pada derajat *mabrur*, haji yang diterima Allah. Ibadah haji juga memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam sehingga senantiasa dirindukan setiap pribadi muslim.

Secara keseluruhan ibadah haji itu tidak dapat dilepaskan dari figur Nabi Ibrahim. Karena itu, ibadah haji tidak dapat dipahami secara baik jika kita tidak mengenal sosok Nabi Ibrahim dan keistimewaan yang dimilikinya. Quraish Shihab dalam *Lentera Hati* (2000) menjelaskan bahwa ada tiga keistimewaan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan sekaligus dicerminkan dalam haji.

Pertama, Ibrahim menemukan Tuhan melalui pencarian dan pengalaman rohani yang luar biasa. Karena itu dalam sejarah agama-agama, Ibrahim dikenal sebagai Bapak Monoteisme. Artinya, Ibrahim berperan penting mengajarkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Pengalaman rohani Ibrahim tatkala menemukan pelajaran tauhid itu secara metaforis dapat dibaca dalam al-Qur'an Surat al-An'am (6) ayat 76-79.

Jika dalam sejarah peradaban umat manusia dari dulu hingga kini telah ada sekian banyak temuan, rasanya "penemuan" Ibrahim tentang me-Mahaesa-kan Tuhan dapat dipandang sebagai temuan terbesar. Ajaran *tauhid* yang dikumandangkan Ibrahim jelas sangat fundamental. Tuhan yang dimaksud Ibrahim adalah Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan satu ras atau bangsa, juga

bukan Tuhan yang terbatas untuk satu periode tertentu.

Kedua, melalui Ibrahim kebiasaan mengorbankan manusia sebagai sesaji atau tumbal dibatalkan oleh Allah. Tentu bukan karena manusia terlalu mulia untuk dikorbankan, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab, jika Allah telah berkehendak maka apa pun yang ada pada kita harus diserahkan. Harta benda, jabatan, keluarga, bahkan nyawa kita sekalipun, jika Allah telah meminta maka harus diikhhlaskan.

Mengenai kisah penyembelihan Ismail oleh Ibrahim dapat kita baca dalam al-Qur'an Surat al-Shaffat (37) ayat 100-107. Dikisahkan dalam rangkaian ayat ini, bahwa setelah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail. Untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Selanjutnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang sangat dianjurkan pada setiap hari raya haji.

Ketiga, Ibrahim merupakan satu-satunya nabi dan rasul yang bermohon pada Allah agar ditunjukkan cara membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan, permohonan Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 260.

Menurut Abu Muslim al-Ashfahani, pengertian ayat di atas adalah bahwa Allah memberikan penjelasan kepada Ibrahim tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ibrahim disuruh mengambil empat burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika apabila dipanggil. Kemudian burung-burung yang sudah pandai itu diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor. Lalu burung-burung itu dipanggil dengan satu tepukan, niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera meskipun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan.

Keseluruhan prosesi ibadah haji memberikan penekanan mengenai pentingnya ajaran tauhid, kemanusiaan, dan kepercayaan pada Hari Akhir. Pelajaran tauhid menekankan pentingnya penghayatan dalam keseluruhan amalan ibadah haji. Tanpa penghayatan, ibadah haji pasti tidak akan memiliki banyak arti bagi upaya untuk memperbaiki jiwa manusia. Tanpa pondasi

niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, ibadah haji akan terasa laksana perjalanan wisata yang tak bermakna. Maka, lurusnya niat dan dengan berbekal takwa, jamaah haji akan memperoleh pengalaman keagamaan yang mendalam.

Keyakinan yang benar terhadap tauhid pasti akan melahirkan kesadaran bahwa semua manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah. Inilah ajaran mendasar Islam mengenai kemanusiaan. Melalui ibadah haji kita juga diajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu di antaranya dicerminkan melalui pakaian ihram yang digunakan jamaah haji. Dengan berpakaian ihram, kesamaan antar pribadi menjadi sangat terasa. Semetara dengan berpakaian “biasa” manusia seringkali masih menunjukkan perbedaan status sosial. Pakaian biasa juga memberikan efek psikologi yang dapat membuat jarak antar pribadi. Itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam mengenai persamaan antar umat manusia.

Dengan mendasarkan pada ajaran tauhid dan kemanusiaan, maka setiap pribadi Muslim, termasuk jamaah haji, berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Tetapi, kita sering menyaksikan bahwa di dunia ini keadilan ternyata begitu sulit ditegakkan. Ketakadilan dan ketidakjujuran malah dengan mudah dapat kita jumpai dimana-mana. Tatkala neraca keadilan sulit ditegakkan di dunia ini maka kita membutuhkan alam akhirat. Pada konteks inilah keyakinan bahwa Hari Akhir pasti datang merupakan kepercayaan yang sangat fundamental.

Hari Akhir itu penting untuk tegaknya keadilan karena pada saat itu Allah akan membalas seluruh amalan umat manusia. Bahkan Allah Yang Maha Adil sendiri yang akan bertindak sebagai hakim. Jika Allah yang menjadi hakim, pertanyaannya; dengan apa kita mau menyogok dan menyuap? Bukankah Allah Dzat Yang Maha Kaya? Karena itulah Allah menyatakan bahwa pada Hari Akhir nanti seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun. Juga tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya (QS. al-Baqarah/2: 48). Yang akan menjadi syafaat (penolong) adalah amal ibadah kita tatkala hidup di dunia.

HEBOH DUKUN CILIK PONARI: CERMIN HILANGNYA AKAL SEHAT

Ponari, bocah berusia 10 tahun dari Dusun Kedungsari, Megaluh, Jombang, kini tidak lagi dapat menikmati kebebasan untuk bermain layaknya anak seusianya. Ponari telah tersandera kepercayaan masyarakat yang begitu besar. Masyarakat percaya bahwa Ponari adalah juru selamat yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Ribuan orang telah berdatangan untuk mendapatkan berkah pengobatan ala Ponari. Cara Ponari mengobati pasien yang datang pun terasa sangat unik hingga tidak dapat dinalar.

Sebagian orang bertanya, bagaimana mungkin penyakit dapat disembuhkan hanya dengan cara minum air yang sebelumnya telah dicelupi batu ajaib Ponari? Antara percaya dan tidak, tetapi fakta menunjukkan bahwa gelombang masyarakat terus berdatangan ke lokasi praktik Ponari. Hebatnya, sebagian pasien datang dari luar kota dan harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pengobatan. Bahkan perilaku pasien pun kian heboh. Misalnya, mereka rela berebut air bekas mandi Ponari yang dipercaya dapat dijadikan obat penyakit.

Pertanyaannya, bagaimana fenomena dukun cilik Ponari ini harus dijelaskan? Bagaimana mungkin dalam era modern seperti ini masih berkembang kepercayaan yang khurafat dan primitif? Berkaitan dengan fenomena Ponari ini, akademisi dan praktisi medis dituntut mengambil langkah taktis. Misalnya, dengan menguji kualitas air yang telah dicelupi batu ajaib Ponari. Tokoh agama pun berkewajiban memberikan penjelasan yang mencerahkan dan menyejukkan.

Demikian juga dengan aparat pemerintah, khususnya kepolisian, harus bertindak tegas untuk melokalisir kejadian. Sebab, sejak kasus Ponari ini mengemuka telah berjatuh korban meninggal dunia dan luka-luka. Bahkan jika dipandang perlu praktik Ponari harus ditutup secara permanen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa langkah ini perlu diambil karena hingga kini praktik buka-tutup penyembuhan Ponari justru semakin mengundang daya tarik masyarakat yang kian menggunung.

Umumnya pasien yang datang ke tempat praktik Ponari hanya berbekal informasi dari mulut ke mulut. Belum ada penjelasan resmi berapa persen dari pasien yang berobat mengalami sembuh dari penyakit yang diderita. Jika memang benar ada pasien yang sembuh, maka apakah ini dikarenakan minum air yang telah dicelupi batu ajaib Ponari. Atau mereka sembuh karena tersugesti oleh keyakinan bahwa Allah telah menyembuhkan penyakit melalui cara pengobatan Ponari.

Variabel sugesti inilah yang sangat mungkin mampu mengobarkan semangat pasien untuk menjadi sembuh. Apalagi jika melihat pasien yang datang, umumnya mereka adalah warga miskin yang telah mengalami rasa putus asa karena belum mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga terjangkau dari rumah sakit dan puskesmas.

Bahwa sugesti memang sangat penting dalam memperoleh kesembuhan merupakan pendapat yang dapat dibenarkan. Tetapi, pengobatan dengan cara yang tidak lazim, bahkan terkesan berbau klenik, jelas bertentangan dengan akal sehat. Karena itulah masyarakat perlu disadarkan bahwa dalam berobat penting juga dipertimbangkan aspek nalar. Melalui penalaran inilah masyarakat dapat terhindar dari kesesatan yang lebih jauh.

Harus juga diyakinkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi, untuk mengetahui obat dari suatu penyakit, seseorang harus datang pada orang yang berilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal inilah, di masyarakat berkembang pandangan bahwa berobat itu dapat dilakukan melalui jalan medis dan alternatif.

Meski pengobatan dapat dilakukan melalui cara medis dan alternatif, namun dua model pengobatan ini tetap mengedepankan aspek nalar dalam praktiknya. Karena itu dipersyaratkan bagi dokter dan

orang yang membuka jasa pengobatan alternatif untuk memiliki izin dari pemerintah. Persoalan izin ini penting untuk memastikan bahwa praktik pengobatan yang dilakukan tidak akan merugikan pasien.

Pihak yang membuka layanan kesehatan pun dipastikan telah memenuhi standar yang dibutuhkan sebagai tenaga medis. Dilihat dari aspek perizinan dapat dikatakan bahwa praktik pengobatan alternatif yang dilakukan Ponari menyalahi aturan. Tetapi, Ponari juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan kejadian yang dialami Ponari berlangsung begitu cepat, tanpa dapat diduga, dan di luar kontrol. Kondisi semakin kompleks karena diduga kuat ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik Ponari.

Berdasarkan cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, kasus heboh dukun cilik Ponari bermula ketika ia mendapat batu ajaib dengan cara yang aneh. Yakni ketika hujan petir datang dan bersamaan dengan itu sebuah batu menghantam kepala Ponari yang sedang bermain hujan-hujan bersama temannya. Batu ini kemudian dibawa pulang Ponari. Keluarga Ponari pun bermaksud membuang batu ajaib ini sebagai pertanda menjauhkan nasib sial.

Anehnya, beberapa kali dibuang, batu ini kembali ke rumah Ponari. Sejak itu terbangun pandangan bahwa “watu gludug”, sebutan sebagian masyarakat untuk batu ajaib Ponari, akan membawa keberuntungan. Dan, keberuntungan pertama pun datang ketika ada tetangga yang sakit dan sembuh setelah minum air yang sebelumnya dicelupi batu ajaib Ponari. Dari sinilah kisah kehebatan Ponari yang dikatakan mampu mengobati berbagai penyakit terus menggelinding ibarat bola salju.

Hilangnya Akal Sehat

Praktik pengobatan Ponari jelas menunjukkan banyak keganjilan. Bahkan kejadian ini bagi sebagian orang terasa sulit diterima akal sehat. Sebab, terasa ganjil jika masih ada orang yang percaya dengan hal-hal klenik di era modern ini. Dalam perspektif ini fenomena Ponari jelas menjadi cermin hilangnya akal sehat sebagian masyarakat, terutama ribuan pasien yang sedang antri menunggu pengobatan.

Tetapi, sejujurnya masyarakat sudah terlalu lama dikondisikan untuk mengabaikan akal sehat. Tayangan di media massa cetak dan elektronik, rendahnya pendidikan, memudarnya nilai-nilai religiusitas,

serta munculnya peramal yang kian berani menawarkan jasa melalui layanan *Short Message Service* (SMS). Semua ini telah memberikan kontribusi bagi menipisnya pertimbangan akal sehat masyarakat dalam setiap mengambil keputusan. Masyarakat menjadi ingin serba instan; cepat sembuh, cepat kaya, dan cepat menjabat, tanpa mau mengalami proses jatuh bangun dan kerja keras.

Pertimbangan akal sehat ini seringkali juga diabaikan oleh masyarakat yang sedang mengalami perasaan putus asa dan tidak lagi berdaya menghadapi keadaan. Kondisi sosial-ekonomi yang semakin terpuruk menjadi alasan kuat sebagian orang untuk mempercayai hal-hal di luar jangkauan akal sehat manusia. Apalagi jika ada warga miskin yang menderita penyakit akut, sementara keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk berobat ke dokter. Dalam kondisi seperti ini tentu yang ada dalam pikiran adalah mendapat kesembuhan dengan jalan yang mudah dan murah. Secercah harapan itu pun muncul dengan kehadiran dukun cilik Ponari.

Logika masyarakat sudah tidak lagi berfungsi manakala ditanya apakah layak seorang bocah kelas tiga SD harus menanggung amanah setinggi itu. Ponari kecil pun akhirnya terbelenggu oleh tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan kata lain, Ponari sesungguhnya telah dieksploitasi oleh masyarakat. Inilah rasanya yang perlu dikomunikasikan pada masyarakat sehingga kita dapat melihat Ponari menjalani kehidupan normal layaknya anak kecil biasa.

Fenomena pengobatan alternatif Ponari juga menjadi tampan bagi pemerintah karena dapat dianggap belum mampu memberikan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas bagi rakyat miskin. Tengoklah pengakuan sebagian pasien yang sedang mengantri pengobatan Ponari. Mereka menyatakan bahwa pengobatan Ponari merupakan berkah dari Tuhan bagi rakyat miskin. Untuk mendapat pengobatan dari dokter atau rumah sakit pemerintah dan swasta mereka harus mengeluarkan biaya yang mahal. Bandingkan dengan pengobatan model Ponari. Para pasien hanya mengeluarkan uang seikhlasnya. Semoga pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kasus Ponari.

BAGIAN DUA:
MEMPERKUAT
CIVIL SOCIETY

MEMPERKUAT CIVIL SOCIETY

Terma *civil society* dalam pengertian yang asli merupakan warisan wacana yang berkembang di Eropa Barat sejak pertengahan abad XVIII. AS. Hikam (1999), mengutip pendapat de Tocquville, menyatakan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), mandiri jika berhadapan dengan negara, serta memiliki keterkaitan dengan norma dan nilai hukum yang diikuti warganya.

Nilai-nilai *civil society* akan menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan kelembagaan politik resmi. Pendek kata, *civil society* menekankan pentingnya ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai sarana transaksi komunikasi yang dilakukan antarwarga.

Sejak pertengahan 1990-an konsep *civil society* berkembang menjadi salah satu tema yang banyak dibicarakan. Oleh beberapa ahli, *civil society* pun dicarikan padanan istilah agar lebih membumi, bernuansa islami, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya, terdapat istilah masyarakat madani (Dato Seri Anwar Ibrahim), masyarakat sipil (Mansour Fakih), serta masyarakat kewargaan (Ryas Rasyid dan Riswanda Immawan).

Meski berbeda terma, namun beberapa istilah tersebut secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan negara yang cenderung memosisikan warga sebagai subyek yang lemah. Sebagai kekuatan pengimbang dan pengontrol kebijakan pemerintah *civil society* harus menunjukkan kemandirian. Jika

modal kemandirian telah terpenuhi rasanya kekuatan *civil society* akan dapat memainkan peran menyuarakan aspirasi dan kritik pada penguasa dan negara untuk kepentingan masyarakat.

Tetapi, sangat disayangkan karena dalam kenyataannya kekuatan *civil society* belum sepenuhnya mandiri ketika berhadapan dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, kekuatan *civil society* masih menunjukkan ketergantungan yang kuat pada negara. Jika kultur bergantung pada negara terus terjadi maka kemandirian *civil society* layak dipertanyakan. Sebab, ketergantungan *civil society* pada pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam tingkat tertentu pasti akan mengurangi sikap independensinya.

Apalagi jika ketergantungan itu berupa bantuan pendanaan untuk memberdayakan kekuatan *civil society*. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kekuatan *civil society* dapat berdiri dengan tegak dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan kegiatan selalu meminta belas kasihan? Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka perasaan tidak enak dan kikuk pasti akan berkecamuk dalam setiap usaha mengkritisi kebijakan yang dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pada konteks inilah kemandirian kekuatan-kekuatan *civil society* mutlak diperlukan.

Saat ini, kiprah *civil society* sebagai kekuatan kontrol pemerintah sangat diperlukan. Eksistensi *civil society* diharapkan banyak kalangan dapat memainkan peran penting di tengah kondisi sosial politik di mana partai-partai besar telah mengambil posisi untuk berkoalisi mendukung pemerintah. Dukungan partai-partai besar pada pemerintah pada saatnya jelas dapat mengebiri budaya *check and balances*. Padahal dalam alam demokrasi yang sehat jelas diperlukan adanya kelompok oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Kelompok oposisi inilah yang berkewajiban menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat.

Tetapi, realitas politik pasca pemilu 2009 telah menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Syahwat politik kelompok elit terhadap kekuasaan tampak demikian besar. Akibatnya, kelompok elit pun disibukkan dengan politik dagang sapi dengan harapan dapat memperoleh pembagian kue kekuasaan. Bahaya

yang barangkali kurang disadari akibat sikap politik yang rakus kekuasaan ini adalah masa depan demokrasi.

Dapat dipastikan bahwa kehidupan alam demokrasi di negeri ini akan terus tergerus jika tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang mampu tampil sebagai pengontrol. Padahal untuk tumbuh suburnya demokrasi sangat dibutuhkan kekuatan penyeimbang. Jika partai-partai besar sudah mengambil sikap berkoalisi dengan pemerintah maka kita tinggal berharap pada kekuatan *civil society*. Pada konteks inilah sesungguhnya kita banyak berharap pada organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan pilar *civil society* lainnya di luar partai politik untuk menampilkan diri sebagai kekuatan penyeimbang.

Kita layak berharap pada kiprah ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, untuk bersama-sama menyemai pohon demokrasi agar terus tumbuh subur di negeri ini. Selain mengandalkan kekuatan ormas, kita juga berharap pada media massa. Apalagi kekuatan media massa cetak dan elektronik sejauh ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi kontrol.

Di luar ormas dan media massa kita juga dapat mengandalkan lembaga pendidikan mulai dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Demikian juga dengan asosiasi profesi, NGO, dan kelompok *civic forum* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua kelompok tersebut jelas dapat dijadikan pilar bagi tegaknya *civil society*. Untuk menjadikan kelompok-kelompok tersebut bebas dari intervensi pihak mana pun persyaratan yang harus dipenuhi adalah menunjukkan kemandirian. Sebab, selama masih ada kepentingan maka independensi pasti tidak akan pernah terjadi.

Akhir-akhir ini kekuatan *civil society* telah menunjukkan kiprah yang luar biasa. Perlawanan rakyat melalui dukungan moral dari jamaah *facebookers* pada dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dalam kasus yang populer disebut "Cicak versus Buaya" telah berhasil memberikan tekanan pada kejaksaan dan kepolisian. Gerakan "Koin untuk Prita" dalam rangka membantu Prita Mulyasari lepas dari jeratan hukum juga menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan. Dua kejadian penting ini cukup menjadi

bukti betapa kesadaran masyarakat sudah demikian tinggi. Yang patut dibanggakan, ternyata dukungan berbagai kelompok *civil society* itu bersifat lintas agama, budaya, etnis, dan generasi.

Karena itu tidak mengherankan jika anak-anak TK dan SD pun mengenal figur Prita Mulyasari dengan sangat baik setelah terlibat dalam proses penggalangan koin untuk Prita. Bahkan anak-anak TK dan SD juga dapat menjelaskan dengan sangat fasih perihal dana talangan (*bailout*) yang dikucurkan pemerintah pada Bank Century.

Pertanyaannya, akankah perlawanan dalam bentuk dukungan *facebookers*, gerakan koin untuk Prita, dan perhatian masyarakat pada skandal Bank Century, dapat menjadi penanda munculnya *people power* dalam bentuk yang lain? Apa pun jawabannya, yang jelas fenomena tersebut telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kekuatan di luar pemerintah untuk mengontrol kebijakan.

Lebih dari itu, ternyata *civil society* dapat menjadi kekuatan penekan yang sangat efektif untuk memberikan daya dobrak (*the striking force*) pada pemerintah agar menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas kita sekarang adalah memperkuat pilar-pilar *civil society* dengan cara mendorong agar dapat mandiri sehingga terbebas dari kepentingan negara.

KIPRAH ORMAS DALAM PILKADA

Posisi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dikatakan memiliki daya pikat yang luar biasa. Hal ini dapat dipahami karena ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh berpengaruh dan struktur organisasi hingga pelosok desa/kelurahan. Lebih dari itu, untuk ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Ini berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi pasangan calon dalam pilkada. Karena alasan inilah hampir semua calon yang akan berlaga dalam pilkada berupaya sekuat tenaga untuk meraih dukungan ormas. Atau paling tidak, dukungan itu dapat diberikan melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang dimiliki ormas.

Maka, tidak mengherankan jika para calon harus rela melakukan “sowan” ke pimpinan ormas sebagai “kulonuwun politik”. Budaya sowan ini dijalani untuk memperoleh restu dan dukungan politik. Bagi para calon, restu dan dukungan dari tokoh ormas atau kyai berpengaruh akan dapat memberikan energi dan kepercayaan diri untuk mengarungi kompetisi yang begitu ketat dalam pilkada langsung. Budaya sowan politik ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah dijalankan para politisi yang ingin maju dalam pilkada. Sebab, dalam pilkada langsung jelas dibutuhkan dukungan banyak pihak, terutama mereka yang memiliki basis massa.

Di samping harus menjalani safari politik ke pimpinan organisasi, strategi yang sering dilakukan para calon adalah dengan mengidentifikasi diri sebagai anggota atau simpatisan ormas tertentu.

tu. Tampaknya, cara ini sangat efektif untuk mempengaruhi emosi pimpinan dan anggota ormas. Dengan strategi ini para calon dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan emosional dengan ormas.

Apalagi dalam proses identifikasi diri itu kemudian diikuti dengan janji-janji politik. Misalnya, akan membantu pelaksanaan program kerja ormas. Strategi lain yang juga dilakukan adalah dengan merekrut pimpinan ormas yang memiliki basis massa untuk menjadi pasangannya. Jika strategi ini tidak berhasil maka cara yang ditempuh adalah dengan merekrut pimpinan ormas yang berpengaruh untuk dijadikan tim sukses.

Fenomena tersebut umumnya kita jumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dalam situasi seperti ini ormas dituntut menentukan sikap politik yang tegas. Sebab, perekrutan pimpinan dan anggota ormas sebagai pasangan calon maupun tim sukses dalam tingkat tertentu dapat mempengaruhi soliditas organisasi. Dapat dibayangkan jika dalam satu ormas ada beberapa pimpinan yang turut bertarung dalam pilkada maka pasti akan memunculkan friksi di internal organisasi. Akibatnya, semangat kebersamaan dan ukhuwah yang telah terjalin akan terganggu oleh kepentingan politik setiap calon.

Seperti dalam pertarungan pilkada 2010 di 18 kabupaten/kota se-Jatim, dipastikan muncul beberapa calon yang berlatar belakang ormas berbeda. Bahkan di suatu kabupaten/kota dapat muncul beberapa pasangan calon dan tim sukses yang berasal dari satu ormas. *Nah*, dalam situasi persaingan memperebutkan posisi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota ini gesekan yang melibatkan kelompok elit di suatu ormas sangat rentan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi jika gesekan kepentingan elit berlanjut hingga di tingkat akar rumput. Jika ini yang terjadi maka harmonisasi dalam kehidupan sosial keberagaman pasti akan terganggu.

Pilihan Sikap Politik

Menurut saya, ada beberapa alternatif yang dapat diambil pimpinan ormas dalam merespon dinamika politik menjelang pilkada. *Pertama*, pimpinan ormas dapat bersikap mendukung

terhadap salah satu calon. Dengan sikap ini berarti ormas akan berusaha memaksimalkan sumberdaya, mulai pimpinan, kyai, anggota, hingga amal usaha untuk mendukung dan bahkan mengampanyekan calon tertentu. Sikap ini jelas sangat beresiko. Apalagi jika calon tersebut tidak memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas tinggi. Di samping itu, sikap politik ini sangat rawan dan memunculkan pro kontra di internal organisasi.

Faktanya, dalam setiap pemilu aspirasi politik anggota dan pimpinan ormas dapat dipastikan tersebar di banyak partai politik. Jika saja partai-partai politik tersebut manjagokan calon yang berbeda maka dapat dibayangkan ongkos sosial yang harus ditanggung ormas. Karena itulah sikap politik anggota ormas sesungguhnya tidak dapat diarahkan dengan hanya memilih satu pasangan calon tertentu.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi dalam hubungan kyai dan santri. Dalam urusan keagamaan biasanya santri masih mendengarkan fatwa kyai. Tetapi, dalam urusan politik hubungan keduanya sangat longgar. Artinya, pilihan politik kyai sangat mungkin berbeda dengan santrinya. Dengan demikian, alternatif pertama ini seharusnya dihindari oleh pimpinan ormas.

Kedua, pimpinan ormas dapat bersikap dengan berdiam diri dan masa bodoh terhadap perkembangan politik di daerah. Alternatif kedua ini tentu sama ekstrimnya dengan yang pertama. Jika alternatif yang pertama mendukung salah satu calon, sikap yang kedua menunjukkan bahwa ormas bersikap seolah apatis dan tidak mau peduli dengan pilkada. Jika sikap ini yang diambil, berarti pimpinan ormas tidak berusaha memberikan kontribusi terhadap dinamika politik di daerah. Padahal, dukungan politik itu sangat penting bagi ormas untuk menjalankan kegiatan dakwahnya. Lebih dari itu, ormas seharusnya menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga keagamaan yang salah satu fungsinya adalah dakwah amar makruf nahi munkar.

Ketiga, pimpinan ormas dapat bersikap *dual position*. Sikap ini mengharuskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi ini ormas dapat ikut "bermain" guna memperoleh keuntungan dari beberapa pasang-

an calon potensial. Posisi *dual position* juga dapat ditempuh ormas melalui kerjasama dengan partai politik dan anggota DPRD yang memiliki kedekatan emosional. Dalam hal ini ormas secara organisatoris dapat menyatakan tidak mendukung calon tertentu, tetapi cukup menegosiasikan aspirasi politiknya pada partai politik dan para legislator.

Sikap *dual position* ini mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara. Meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, ormas harus mampu membedakan penampilan dalam dua domain, panggung depan (*front region*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah tempat melakukan pertunjukan. Sedang panggung belakang merupakan wajah sesungguhnya. Melalui panggung belakang inilah sikap politik sesungguhnya dari ormas dikemukakan.

Keempat, pimpinan ormas dapat bersikap kritis dan konstruktif. Ini berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Dalam posisi ini ormas harus melihat secara cermat *track record* semua calon. Selanjutnya ormas cukup memberikan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Jika posisi ini yang diambil, maka ormas akan lebih leluasa dan tidak memiliki beban politik ketika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik agar proses pilkada dapat terlaksana secara adil dan berkeadaban.

Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi yang paling mungkin diambil pimpinan ormas adalah bersikap kritis dan konstruktif. Sikap kritis dan konstruktif ini akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga dapat memainkan peran pada level *high politics* dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

BEDA SIKAP MUHAMMADIYAH DAN NU

Terasa sekali ada perbedaan gaya Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, tampak sangat kritis pada pemerintah, terutama Presiden SBY. Sikap kritis Din biasanya diutarakan dengan bahasa yang jelas, vulgar, dan tidak berbelit. Salah satu wacana yang seringkali digulirkan adalah bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pilihan kata inilah yang banyak dipersoalkan pendukung Presiden SBY dan elit di pemerintahan. Sebab, jika dikatakan telah melakukan kebohongan, maka itu berarti tidak lagi kehormatan (*marwa*) yang dapat dibanggakan oleh pemerintah.

Din menjelaskan bahwa kata kebohongan publik itu dipilih karena ada banyak ketakjujuran pemerintah dalam memperbaiki kondisi bangsa. Yang paling disorot adalah kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi. Apalagi kasus korupsi kini telah menyentuh orang-orang yang sangat dekat dengan istana. Indikatornya, elit dan anggota DPR dari partai Demokrat banyak yang terseret dalam kasus korupsi. Di antara menteri yang menjabat di pemerintahan SBY juga mulai dikaitkan dengan kasus korupsi yang kini menjadi perhatian publik. Fenomena ini menandakan bahwa korupsi benar-benar telah menggerogoti negeri ini hingga ke pusat kekuasaan.

Perihal sikap kritis Din, sebagian orang mengaitkan dengan latar belakangnya sebagai mantan politisi. Gaya komunikasi Din juga dikaitkan dengan fakta bahwa beliau bukan orang Jawa. Karena itu di kalangan warga Muhammadiyah sejatinya ada yang menganjurkan agar Din meneladani KH. Abdurrazaq Fakhruddin (Pak AR). Di zaman Orde

Baru, Pak AR bisa menampilkan model dakwah amar makruf nahi munkar yang sangat sejuk pada pemerintah. Dengan gaya bahasa yang santun, Pak AR biasa memberikan kritik pada Presiden Suharto. Kritik Pak AR ternyata sangat manjur sehingga tidak menimbulkan amarah penguasa Orde Baru tersebut. Hubungan Muhammadiyah dan pemerintah Orde Baru pun terasa sangat hangat.

Sikap kritis Muhammadiyah pada pemerintah ternyata bukan hanya monopoli Din. Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga menunjukkan sikap yang sama. Bahkan Buya Syafii pernah membuat pernyataan yang sangat mungkin menjadikan Presiden SBY dan pendukungnya marah. Itu terjadi saat SBY menjabat presiden pada periode pertama. Saat itu Buya Syafii menyatakan bahwa "the real president" adalah Jusuf Kalla (JK). Pernyataan ini dikemukakan dengan berdasar pada kinerja luar biasa JK saat mendampingi SBY. Gara-gara pernyataan ini pula hubungan pribadi antara SBY dan Buya Syafii memburuk.

Yang lebih mencolok, gedung PP Muhammadiyah juga sering digunakan tempat pertemuan tokoh-tokoh nasional. Umumnya mereka adalah tokoh yang selama ini dikenal sangat kritis dan lawan politik SBY. Meski dikemas dalam acara silaturahmi untuk memperbincangkan masalah bangsa, kegiatan yang dihelat di gedung PP Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai simbol sikap kritis pada pemerintah. Para kritikus yang hadir pun sangat nyaman mengutarakan keprihatinannya terhadap perjalanan bangsa di bawah kepemimpinan SBY.

Sementara itu, NU melalui Ketua Umum PBNU, Prof. Said Aqil Siraj, menunjukkan sikap yang jauh lebih bersahabat dengan pemerintah. Dalam beberapa kali kesempatan Said menegaskan bahwa NU tidak akan ikut-ikutan mendiskreditkan pemerintah. Dikatakan Said, NU tidak akan larut dalam gerakan tokoh agama yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. NU memilih strategi dengan mengingatkan secara langsung pada penguasa. Bagi Said, strategi itu merupakan representasi dakwah amar makruf nahi munkar model NU. Tetapi karena lebih sering mengamini kebijakan pemerintah daripada mengkritisnya, elit NU pun banyak menuai kritik terutama dari kalangan muda. Bahkan ada guyonan, bahwa PBNU saat ini adalah "PBNU Plat Merah", yang berarti pengawal kebijakan pemerintah.

Perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi kebijakan pemerintah telah mengundang pertanyaan. Publik menduga bahwa ada kepentingan yang melatarbelakangi perbedaan sikap elit dua organisasi keislaman tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa sikap kritis Din disebabkan kekecewaan Muhammadiyah terhadap presiden SBY. Sebab, masih segar dalam ingatan warga Muhammadiyah tatkala presiden SBY tidak menghadiri muktamar Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010 silam. SBY juga dinilai kurang mengakomodasi kader-kader Muhammadiyah untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sementara dengan NU, SBY menunjukkan kemesraan luar biasa. SBY juga mengomodasi kader-kader NU untuk menduduki jabatan di kementerian.

Penjelasan tersebut mungkin ada benarnya. Tetapi, sebagai bagian dari pilar *civil society*, tentu sangat disayangkan jika perbedaan sikap itu dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat. Karena itu sudah seharusnya Muhammadiyah dan NU bersinergi dengan menampilkan diri sebagai kekuatan *checks and balances* pada pemerintah. Posisi ini perlu diambil karena keduanya memiliki sejarah panjang sebagai *civil society*. Bahkan keduanya telah lahir dan berkiprah dalam banyak bidang kehidupan jauh sebelum negeri ini merdeka. Tetapi untuk menjadi organisasi yang bebas dari kepentingan maka yang dibutuhkan keduanya adalah kemandirian. Sayang sekali, spirit kemandirian ini tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi keduanya.

Dengan menjadi organisasi yang mandiri maka Muhammadiyah dan NU dapat menempatkan diri sebagai pilar *civil society* yang independen, bebas dari kepentingan politik kekuasaan. Keduanya juga tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, terutama dalam urusan pendanaan untuk menggerakkan roda organisasi. Jika memang pemerintah memberikan bantuan maka itu harus dipahami sebagai bagian dari tugasnya. Sebab, jika melihat kiprahnya maka jelas sekali keduanya telah banyak membantu tugas pemerintah. Keduanya telah menunjukkan kiprah yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi umat.

POSISI KRITIK MUHAMMADIYAH

Banyak pihak berspekulasi bahwa sikap kritis Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terhadap pemerintah didasarkan pada kalkulasi politik tertentu. Diantaranya beredar pandangan yang menyatakan bahwa sikap kritis Din Syamsuddin ini dimaksudkan sebagai investasi politik untuk meraih kekuasaan pada pemilu 2014. Tentu saja analisis seperti ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dalam politik semua serba mungkin. Apalagi dunia politik juga selalu menghadirkan kejutan. Tetapi, melihat kiprah seseorang hanya dalam sudut pandang politik juga tidak dapat dibenarkan.

Sebagai *insider*, saya tentu memahami sikap kritis Din Syamsuddin ini dalam konteks sedang menerjemahkan rumusan politik kebangsaan Muhammadiyah. Rumusan konsep politik kebangsaan ini tertuang dalam dokumen resmi organisasi yang telah diundangkan Muhammadiyah. Keputusan resmi organisasi jelas memberikan amanat agar Muhammadiyah senantiasa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan seruan ini selalu menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga awal kemerdekaan. Sebagai organisasi yang lebih tua dari negeri ini kiprah Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa jelas tidak diragukan lagi.

Posisi kritik Din Syamsuddin akhir-akhir ini memang terasa menonjol. Apalagi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah sering dijadikan pertemuan sejumlah kelompok kritis dan oposisi. Yang mutakhir tentu saja adalah pertemuan tokoh lintas agama yang menghasilkan ikrar tahun tanpa kebohongan. Bermula dari pertemuan inilah gerakan anti kebohongan yang disuarakan berba-

gai kelompok terus menggelinding. Dalam berbagai kesempatan Din Syamsuddin telah memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tokoh lintas agama itu sesungguhnya kegiatan *Maarif Institute* (LSM yang didirikan Buya Syafii Maarif). Jadi, sebenarnya tidak ada hubungan dengan aktivitas Muhammadiyah. Tetapi, karena tempat acaranya di Muhammadiyah maka Din Syamsuddin pun disorot dan dianggap penggagas gerakan anti kebohongan.

Inilah resiko bagi seorang ketua organisasi sosial keagamaan. Dalam perkembangannya, sorotan tidak hanya ditujukan pada Din Syamsuddin secara pribadi, melainkan juga Muhammadiyah. Bahkan ada yang menduga sikap kritis ini disebabkan karena Presiden SBY tidak menghadiri muktamar Muhammadiyah. Tentu saja spekulasi ini tidak benar jika orang memahami sifat gerakan Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang menekankan ajaran dakwah amar makruf nahi munkar. Karena itu berbagai kritik yang diutarakan Din Syamsuddin harus dipahami dalam konteks melaksanakan dakwah amar makruf dan nahi munkar. Sejauh ini Muhammadiyah sudah membuktikan selalu mendukung pemerintah, siapa pun yang berkuasa, asalkan berada dalam jalan yang benar. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan maka Muhammadiyah tidak pernah ragu untuk mengingatkan. Inilah cara Muhammadiyah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah memahami bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui dua jalur. Pertama, melalui kegiatan politik praktis sebagaimana dijalankan partai-partai politik. Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk pemberdayaan dan pembinaan. Manifestasi jalur kedua ini juga dapat ditempuh dengan cara politik tidak langsung. Misalnya, dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui perjuangan moral (*moral force*) agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Strategi perjuangan inilah yang disebut dengan politik tingkat tinggi (*high politics*).

Dalam usia lebih dari satu abad, Muhammadiyah konsisten menentukan pilihan perjuangan politik melalui jalur *high politics*.

Manifestasi *high politics* ini mengharuskan Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua organisasi politik. Pilihan strategi ini membawa resiko karena Muhammadiyah tidak memiliki saluran utama dalam menyuarakan aspirasi politik. Tetapi, sejauh ini Muhammadiyah masih dapat menitipkan aspirasi melalui kadernya yang bertebaran di beberapa partai politik.

Persoalan menjadi kompleks tatkala sebagian besar partai politik mengambil sikap mendukung pemerintah dengan kompensasi mendapat bagian kekuasaan. Kultur politik seperti ini jelas membahayakan masa depan demokrasi. Karena dalam alam kehidupan demokrasi yang sehat, posisi kekuatan kontrol yang memainkan peran *checks and balances* terhadap pemerintah sangat dibutuhkan.

Jika peran *checks and balances* tidak dapat dimainkan dengan baik oleh partai politik dan lembaga politik formal di negara, maka kekuatan organisasi sosial keagamaan sebagai salah satu pilar *civil society* dapat menjadi alternatif. Dalam konteks inilah Muhammadiyah terdorong untuk turut serta mengawal perjalanan bangsa agar terwujud kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat dan bernegara. Tampaknya, posisi inilah yang sedang dimainkan Din Syamsuddin.

Banyak pihak berspekulasi bahwa gerakan kritis yang sedang didorong Din Syamsuddin telah masuk dalam ranah politik praktis. Spekulasi ini kemudian dikaitkan dengan latar belakang Din Syamsuddin yang pernah memimpin departemen penelitian dan pengembangan partai Golkar. Jalan pikiran ini memang efektif untuk memojokkan gerakan moral yang kini sedang terjadi. Tetapi, agar terhindar dari polemik mengenai adanya politisasi terhadap gerakan kritis ini maka semua pihak, terutama pemerintah, seharusnya mencermati substansi kritik yang telah dikumandangkan berbagai pihak. Berbagai kritik ini harus diposisikan sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan para pengkritik terhadap negeri ini.

Din Syamsuddin sebagai pemimpin salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar jelas sangat merindukan keadaan negeri yang bebas dari berbagai problem. Bagi Din Syamsuddin, kalau bangsa ini terus terpuruk maka yang akan menderita ada-

lah rakyat. Jika ini yang terjadi maka Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa ini juga pasti terkena dampaknya. Peringatan akademisi yang beranggotakan rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta mengenai potensi Indonesia untuk menjadi negara gagal patut menjadi perhatian (*JP*, 5/2). Agar keadaan tidak semakin memburuk maka pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap berbagai kritik konstruktif.

Yang harus ditunjukkan pemerintah kini adalah meningkatkan kinerja. Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* jelas sangat berkepentingan dengan perbaikan kinerja pemerintah sehingga terwujud negara yang adil dan makmur. Dalam perspektif Muhammadiyah negara ini dilukiskan dengan ungkapan; *baladatan thayyibatun wa rabbun ghafur* (negara yang baik dan berada dalam ampunan Tuhan). Tentu saja, untuk mencapai keadaan yang demikian diperlukan kerja keras. Bahkan kerja keras saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kesiapan pemimpin dan rakyat di negeri ini untuk mendekatkan diri pada Allah.

UJIAN KEMANDIRIAN MUHAMMADIYAH

Muktamar satu abad Muhammadiyah akan diselenggarakan mulai 3-8 Juli 2010 di kota kelahirannya, Yogyakarta. Yang agak berbeda dari muktamar kali ini adalah ketidakhadiran Presiden SBY secara langsung. SBY dipastikan tidak menghadiri muktamar karena melakukan kunjungan kenegaraan di Turki dan Kanada. Setelah menjalankan tugas kenegaraan itu SBY langsung melaksanakan ibadah umrah. Sebagai gantinya, SBY akan membuka muktamar melalui sambungan telepon satelit dari Madinah.

Ketidakhadiran SBY ini pun memunculkan sejumlah spekulasi. Sebagian warga persyarikatan menduga bahwa ini adalah pertanda SBY kecewa dengan sikap kelewat kritis yang selama ini diperlihatkan elit Muhammadiyah. Bahkan ada yang berpikiran lebih jauh, bahwa SBY sudah tidak lagi menempatkan Muhammadiyah sebagai mitra dalam menyukseskan program pemerintahannya.

Spekulasi tersebut langsung dimentahkan oleh Din Syamsudin. Ia meyakini bahwa tidak ada niatan SBY untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah. Karena itu, ketidakhadiran SBY secara fisik di Yogyakarta seharusnya disikapi positif oleh warga Muhammadiyah. Meski penjelasan telah dikemukakan, tapi ketidakhadiran SBY tetap menyisakan pertanyaan dan kekecewaan sebagian warga Muhammadiyah. Kekecewaan ini dapat dipahami karena dalam sejarahnya, Muhammadiyah selalu memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan kelompok profesional berlatar belakang Muhammadiyah dalam sejumlah jabatan penting di pemerintahan.

Permintaan Din Syamsuddin untuk tidak mempersoalkan ketidakhadiran SBY rasanya sudah tepat. Muhammadiyah harus tetap menatap masa depan dengan rasa optimis sehingga dapat terus melahirkan amal sosial sesuai dengan karakter ideologinya yang berprinsip pada gerakan amal (*a faith with action*). Apalagi muktamar ke-46 akan menjadi momentum untuk mengantarkan Muhammadiyah memasuki abad kedua. Bahkan Muhammadiyah juga harus mulai terbiasa melaksanakan acara resmi organisasi meski tanpa dihadiri perwakilan pemerintah.

Bukankah muktamar satu abad Muhammadiyah ini jauh telah dirancang untuk mandiri? Bahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah me-*launching* program Gerakan Infaq Rp. 2000,- (GI 2000) untuk muktamar mandiri. Sasaran program GI 2000 adalah siswa, guru, karyawan, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mengajak simpatisan dan dermawan untuk beramal melalui gerakan tersebut. Melalui program GI 2000 Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan muktamar mandiri dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Meski banyak kalangan mempersepsi bahwa program GI 2000 diluncurkan sebagai konsekuensi sikap kritis Muhammadiyah pada berbagai kebijakan pemerintah. Sikap kritis ini bahkan dipahami sebagai bentuk kekecewaan Muhammadiyah karena tidak diakomodasi pemerintah dalam pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Bahkan jika ditilik ke belakang, terutama pada saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak sekali arah dukungan politik elit Muhammadiyah.

Terlepas dari adanya faktor sosial politik yang melatarbelakangi, rasanya niatan Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri layak diapresiasi. Sebab, sudah menjadi tradisi di kalangan pimpinan ormas untuk senantiasa meminta dukungan pemerintah berbentuk bantuan dana dan kehadiran pada saat ormas menyelenggarakan berbagai acara. Bahkan ada kesan rasa kurang percaya diri dari pimpinan dan anggota ormas ketika acara-acara resmi organisasi tidak dihadiri wakil pemerintah. Kehadiran wakil pemerintah bahkan seringkali dijadikan semacam restu. Realitas ini menunjukkan betapa ketergantungan ormas pada pemerintah begitu besar.

Jika kultur bergantung pada pemerintah tersebut terus terjadi maka kemandirian ormas jelas patut dipertanyakan. Sebab, ketergantungan ormas pada pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam tingkat tertentu pasti akan mengurangi sikap independensinya. Apalagi jika ketergantungan itu berupa bantuan pendanaan untuk menggerakkan kegiatan organisasi.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin ormas dapat berdiri tegak dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan acara selalu meminta belas kasihan? Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka perasaan tidak enak pasti akan berkecamuk dalam setiap usaha mengkritisi kebijakan yang dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan. Pada konteks inilah kemandirian ormas, termasuk Muhammadiyah, menjadi mutlak diperlukan.

Muhammadiyah sebagai salah satu pilar *civil society* diharapkan banyak kalangan dapat memainkan peran penting di tengah kondisi sosial politik di mana partai-partai besar telah mengambil posisi untuk berkoalisi dengan pemerintah. Akibatnya, kelompok elit pun disibukkan dengan politik dagang sapi dengan harapan dapat memperoleh pembagian kue kekuasaan. Kondisi ini pada saatnya jelas dapat mengebiri budaya *checks and balances*.

Padahal dalam alam demokrasi yang sehat jelas dipersyaratkan adanya kelompok oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Kelompok oposisi inilah yang berkewajiban menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Pada konteks inilah sesungguhnya kita banyak berharap pada ormas dan pilar *civil society* lainnya di luar partai politik untuk menampilkan diri sebagai kekuatan penyeimbang.

Karena itu, kesempatan muktamar satu abad ini sesungguhnya dapat dijadikan momentum untuk meneguhkan semangat kemandirian Muhammadiyah. Inilah saat yang tepat bagi Muhammadiyah untuk keluar dari beban psikologis yang telah dijalani bertahun-tahun. Selama ini dalam tingkat tertentu Muhammadiyah merasa *ewuh pakewuh* ketika harus mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satu sebab yang sangat mungkin terjadi adalah karena Muhammadiyah masih sering bergantung pada pemerintah.

Dengan bersikap mandiri Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan daya dobrak (*the striking force*) yang lebih kuat pada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukankah sudah sekian lama Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang secara konsisten menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar?

Dengan usia yang lebih tua dari negeri ini, Muhammadiyah berarti sudah berpengalaman dan teruji mengelola organisasi. Muhammadiyah tetap eksis dan tidak pernah mengubah jati diri gerakan. Jadi, kalau hanya untuk memenuhi keperluan menyelesaikan program maka sudah saatnya Muhammadiyah tidak lagi meminta belas kasihan pemerintah. Jika pemerintah memberikan fasilitas maka itu harus dipahami sebagai timbal balik karena Muhammadiyah telah membantu tugas negara untuk turut mencerdaskan dan menyejahterahkan rakyat.

Yang penting diingat, bahwa komitmen untuk mandiri itu tidak harus diekspresikan dengan membusungkan dada karena itu menunjukkan kesombongan. Muhammadiyah harus tetap bersinergi dengan pemerintah untuk terus berkarya, terus memberi, dan tanpa berharap kembali. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Semoga muktamar satu abad ini dapat memberikan spirit bagi Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri.

APA KABAR SAUDAGAR MUHAMMADIYAH

Tema besar yang diusung Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Berbagai kiat telah dicanangkan. Salah satunya adalah bekerjasama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi Persyarikatan. Berkaitan dengan ini Muhammadiyah telah mencanangkan penyatuan rekening amal usaha ke beberapa bank syariah. Rencana ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan beberapa bank syariah.

Ikhtiar ini tentu diharapkan mampu membangun hubungan yang saling menguntungkan Muhammadiyah dan perbankan. Dengan ribuan amal usaha bidang pendidikan, keschatan, dan ekonomi, potensi Muhammadiyah sesungguhnya sangat besar. Sayangnya rekening amal usaha Muhammadiyah sejauh ini masih tercecce di banyak bank tanpa ada ikatan perjanjian yang saling menguntungkan. Karenanya, gagasan menyatukan rekening di beberapa bank yang berlabel syariah patut diapresiasi.

Sebagai salah satu pilar *civil society*, Muhammadiyah dituntut terus berkarya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal sosial. Seperti matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar mencerahkan umat. Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya.

Konsistensi perjuangan Muhammadiyah sejauh ini dapat diamati melalui amal usaha yang didirikan, seperti sekolah, rumah sakit, unit ekonomi, dan panti asuhan. Capaian di bidang

amal usaha telah mengundang kekaguman banyak pihak. Muhammadiyah pun dikatakan sebagai bagian dari cerita sukses, bukan hanya organisasi Islam di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Sejak didirikan, Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang sangat mementingkan amal sosial. Karena itu tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (*a faith with action*).

Jika diamati, implementasi ajaran agama yang dipraktikkan generasi Muhammadiyah periode awal menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik." Itu dibuktikan Ahmad Dahlan dan murid-muridnya yang sangat perhatian pada fakir miskin dan anak yatim. Melalui kajian yang mendalam terhadap surat al-Ma'un, Kiai Dahlan menunjukkan teladan dengan memberikan sabun, beras, dan pakaian bagi masyarakat lemah (*mustadl'afin*).

Metode memahami ajaran agama dalam sudut pandang Kiai Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan Kiai Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (*al-Maunisme*). Keseriusan Kiai Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Oemoem (PKO) untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya Muhammadiyah terus berusaha menampilkan diri sebagai gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini tidak sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi. Padahal untuk menjadi kekuatan *civil society*, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk masuk dalam kepengurusan. Kelompok saudagar ini diperlukan untuk memperkuat sektor ekonomi umat, utamanya warga Muhammadiyah.

Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, maka Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi organisasi

kemasyarakatan (ormas) umumnya kurang mampu menjalankan fungsi *checks and balances* pada pemerintah dan partai-partai politik. Jika ditelisik penyebabnya dapat dikatakan bahwa ternyata ormas itu masih banyak yang bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama dalam bantuan pendanaan. Karena itulah ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial ekonomi agar dapat mandiri dan terbebas dari kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Muhammadiyah juga harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi ini harus diambil jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dakwah amar makruf nahi munkar. Ini berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat. Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi itulah diperlukan kelompok saudagar. Aktifis berlatar belakang saudagar ini diharapkan dapat menumbuhkan spirit enterpreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Bukankah kelompok entrepreneur kini sangat dibutuhkan bangsa untuk meminimalkan jumlah pengangguran?

Pelibatan kelompok saudagar Muhammadiyah diharapkan dapat menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat. Yang harus selalu diingat, Kiai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi sekaligus juru dakwah. Itu berarti sejarah Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar.

Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang. Saudagar Muhammadiyah bertugas untuk mencerahkan umat agar mampu mengentaskan diri dari keadaan yang miskin dan lemah. Tentu tidak cukup dengan pencerahan, saudagar Muhammadiyah juga harus memberikan bantuan modal dan pendampingan. Tugas ini akan terlaksana dengan baik jika saudagar Muhammadiyah juga menyediakan pusat-pusat kegiatan ekonomi umat. Dengan cara ini maka Muhammadiyah dapat terus berkontribusi untuk memperbaiki keadaan bangsa.

INTELEKTUAL DI BALIK PILPRES

Fenomena yang menarik diamati dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini adalah keterlibatan kaum intelektual. Posisi kaum intelektual dalam pilpres layak disorot karena kiprahnya sangat menentukan capaian keberhasilan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk memenangkan pertarungan menuju istana. Sejak era reformasi, posisi kaum intelektual dari beberapa LSM dan perguruan tinggi mulai dipandang penting oleh elit partai seiring dengan kebutuhan untuk melakukan marketing politik.

Elit partai politik tentu sangat berkepentingan dapat membangun citra pasangan capres dan cawapres yang didukung sehingga dapat diterima oleh rakyat. Dalam konteks inilah lembaga-lembaga survei dan konsultan politik laris manis. Para akademisi pun, terutama yang berlatar belakang sosial politik, banyak yang menekuni lahan baru sebagai konsultan politik bagi partai politik dan anggota legislatif. Profesi yang juga laris saat ini adalah survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon kepala daerah.

Seakan tidak mau ketinggalan, setiap pasangan capres dan cawapres yang berlaga dalam pemilu 8 Juli 2009 juga merekrut kaum intelektual dalam barisan tim sukses. Pasangan Mega-Prabowo merekrut intelektual sekaliber Imam Sugema, M. Prakosa, dan Moeslim Abdurrahman sebagai tim ahli dan peneliti. Pasangan SBY-Boediono juga merekrut Malarangeng bersaudara (Rizal dan Zulkarnain), Deny J. A, dan Bima Aria Sugiharto, sebagai konsultan politik. Sementara pasangan JK-Wiranto menggandeng Ahmad Erani Yustika, Indra J. Piliang, Fadhil Hasan, dan Arie Batubara, sebagai tim kajian dan pencitraan.

Keterlibatan kaum intelektual dalam pilpres tentu harus dipahami sebagai fenomena yang wajar sepanjang tidak terjadi bias kepentingan. Hal ini berarti kaum intelektual harus tetap menjaga kredibilitasnya sebagai insan akademis yang jauh dari kepentingan sesaat. Apalagi kepentingan itu bernama politik dan kekuasaan yang tidak akan pernah langgeng.

Kaum intelektual harus bekerja secara profesional sebagai konsultan politik dan peneliti sehingga nasihat dan hasil penelitiannya bukan hanya bermanfaat untuk kesuksesan pasangan capres dan cawapres tertentu. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah menjadikan hasil kajian itu bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Tegasnya, kaum intelektual harus bekerja dengan dilandasi oleh komitmen moral dan kemanusiaan, bukan sekedar kepentingan jangka pendek.

Harapan untuk menjadikan kaum intelektual bekerja secara obyektif, profesional, dan tidak partisan tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Kaum intelektual yang terlibat dalam berbagai kegiatan tim sukses pasangan capres dan cawapres pada saat tertentu jelas mengalami kebimbangan antara menjadi akademisi murni atau akademisi sekaligus politisi. Apalagi mereka telah mendapat berbagai fasilitas dan penghasilan yang tinggi.

Tetapi, inilah ujian sesungguhnya bagi seorang intelektual. Jika ia memilih menjadi intelektual independen maka seringkali posisi ini tidak cukup menguntungkan karena pemikirannya pasti berada di luar sistem sehingga tidak dapat mewarnai kebijakan. Akan sangat berbeda jika ia masuk dalam pusaran kekuasaan. Dalam posisi ini kaum intelektual akan dapat merealisasikan gagasannya sebagai wujud tanggung jawab sosial keilmuan.

Pilihan menjadi intelektual-politisi akan menjadikan seorang akademisi tidak hanya berada di puncak menara gading, melainkan langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan banyak orang. Tampaknya alasan inilah yang dipilih oleh kaum intelektual untuk terlibat dalam proses politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini maka para akademisi yang berada di balik capres dan cawapres tidak dapat dianggap melakukan pengkhianatan intelektual.

Yang perlu diingatkan pada kaum intelektual adalah agar tetap menjaga kredibilitasnya sebagai akademisi. Sebab, prinsip kerja dalam dunia keilmuan jelas berbeda dengan dunia politik. Dikatakan bahwa seorang ilmuwan itu bisa saja melakukan kesalahan dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan terhadap suatu fenomena.

Tetapi seorang ilmuwan tidak diperbolehkan berbohong, apalagi berusaha menyembunyikan fakta yang terjadi. Sementara dunia politik mentolelir seorang politisi untuk berbohong. Yang tidak boleh dilakukan politisi adalah berbuat salah. Dunia keilmuan juga mengharuskan seseorang untuk berbicara dengan bahasa yang jelas. Sementara dunia politik mentradisikan seseorang untuk berbicara dengan bahasa bersayap dan multitafsir.

Berkaitan dengan sikap dasar keilmuan yang tidak boleh mentolelir kebohongan itulah publik dikejutkan fenomena perang survei menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Publik telah disuguhi hasil survei beberapa lembaga mengenai elektabilitas pasangan capres dan cawapres dengan perbandingan yang sangat jauh. Padahal waktu pelaksanaan survei sangat berdekatan.

Terlepas adanya perbedaan metodologi yang digunakan, tetapi mencermati hasil survei yang dipublikasikan sepertinya patut dipertanyakan keakuratannya. Hasil survei pertama dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan pasangan SBY-Boediono unggul dengan raihan suara 70 persen, disusul Mega-Prabowo (18 persen), dan JK-Wiranto (7 persen). Untuk diketahui, survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia yang sekaligus menjadi lembaga konsultan politik pasangan SBY-Boediono.

Hasil survei LSI tersebut berbeda jauh dengan temuan Lembaga Riset Informasi (LRI) yang meski menempatkan pasangan SBY-Boediono unggul, tetapi keunggulan ini sangat tipis (33,02 persen) dibanding JK-Wiranto (29,28 persen). Pelaksana survei LRI ini adalah Johan Silalahi, yang masuk dalam tim pencitraan pasangan JK-Wiranto. Tim Kampanye Nasional (TKN) Megawati-Prabowo juga melakukan riset serupa. Meski tidak menyebut angka pasti, tetapi hasil riset TKN menunjukkan urutan peringkat, yakni SBY-Boediono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto.

Ditambahkan oleh TKN bahwa raihan suara tiga pasangan ini berbeda sangat tipis. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah hasil survei mana yang layak dipercaya? Apakah survei yang sejatinya dijalankan oleh kaum intelektual yang tergabung dalam tim konsultan, kajian, dan periset dari pasangan capres dan cawapres telah tereduksi oleh kepentingan politik kekuasaan?

Beberapa pertanyaan tersebut seharusnya tidak muncul ke permukaan jika kaum intelektual mampu menjaga tradisi akademisnya. Karena itu patut dipesankan pada kaum intelektual yang terlibat dalam tim sukses pasangan capres dan cawapres agar tidak merekayasa data dan fakta. Sebab, pemutarbalikan data dan fakta merupakan pelanggaran moral yang sangat duku-
tuk oleh dunia keilmuan.

Seorang intelektual dalam bekerja juga tidak boleh mengabdikan pada suatu golongan tertentu, melainkan harus mengabdikan pada kemanusiaan. Sementara masalah kemanusiaan bagi seorang ilmuwan jelas tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karakter inilah yang menjadikan ilmu bersifat universal.

PERAN AGAMA MENCEGAH HIV/AIDS

Tanggal 1 Desember selalu diperingati oleh berbagai elemen masyarakat sebagai hari AIDS dunia. Ada baiknya momentum ini digunakan untuk menyadarkan kita betapa penyakit HIV/AIDS kian berbahaya. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2011, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penularan HIV tercepat di Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memaparkan data penderita HIV kini mencapai 66.600 orang, serta 26.400 penderita AIDS.

Yang menyedihkan, 70 persen penderita HIV/AIDS adalah mereka yang berusia produktif. Data ini hanya berdasarkan pada kasus yang terekam di rumah sakit dan puskesmas. Padahal kasus HIV/AIDS sering diibaratkan seperti fenomena gunung es. Artinya, kasus yang tidak terkemuka dipastikan lebih banyak.

Untuk mencegah penyebaran virus HIV jelas dibutuhkan pendekatan yang holistik. Salah satunya adalah pendekatan agama. Pendekatan agama disini harus mampu memberikan perspektif baru terhadap fenomena HIV/AIDS. Sebab, sejauh ini jika agama digunakan untuk memahami fenomena HIV/AIDS maka yang muncul adalah pandangan hitam putih. Misalnya, dikatakan bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Akibatnya berkembang stigma negatif terhadap penderita HIV/AIDS. Selanjutnya muncul marginalisasi penderita HIV/AIDS dari kehidupan masyarakat.

Dalam ajaran moral agama (Islam) dikemukakan banyak tuntunan agar kita berakhlak mulia. Misalnya, dikatakan bahwa kita harus menghindari seks bebas (*walau taqrabuu al-zinaa inna-*

huu kaana faakhisyah wa saa'a sabiilaa); setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap yang memabukkan itu haram (*kullu muskir khamr wa kullu muskir haram*); dan janganlah kamu mencampakan dirimu ke dalam kerusakan (*walaa tulquu bi aydikum ilaa al-tahlukah*). Beberapa ajaran ini jika ditaati tentu sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan. Sebab, jika dicermati maka penyebab utama penyebaran virus HIV/AIDS adalah seks bebas dan narkoba.

Persoalannya, belum semua orang mampu menjadikan agama sebagai rujukan dalam berperilaku. Yang ideal tentu dengan beragama orang akan menjadi lebih baik. Tetapi secara jujur harus diakui bahwa keberagamaan seringkali merupakan proses yang panjang. Ini berarti, untuk menjadi baik seseorang seringkali mengalami jalan berliku. Dalam proses menjadi orang baik itulah seseorang terkadang tergoda melakukan perbuatan maksiat.

Realitas juga menunjukkan sebagian umat beragama bersifat nominalis. Mereka mengaku beragama tetapi dalam kenyataannya belum berperilaku yang baik. Tipologi masyarakat ini berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama sehingga terkena virus HIV. Ini berarti umat harus diajak untuk mengamalkan ajaran agama secara sungguh-sungguh. Sebab, agama mengajarkan apa yang disebut *'uqubat al-fitrah* (hukuman atas pelanggaran fitrah). Dalam hal ini, HIV/AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ajaran agama dan fitrah manusia.

Sebagian tokoh agama ada yang menganjurkan untuk menggunakan kondom sebagai usaha mengurangi penyebaran virus HIV. Wacana ini kemudian menimbulkan kontroversi. Pandangan ulama pun terbelah menjadi dua. Pandangan pertama menyatakan bahwa penggunaan kondom haram hukumnya karena dapat menyuburkan seks bebas. Dengan kondom orang akan merasa aman dari penyakit sehingga bebas datang ke prostitusi. Bahkan kampanye penggunaan kondom yang digunakan bukan dari pasangan suami istri dapat dikategorikan; *amar munkar nahi makruf* (mendorong kemunkaran dan mencegah kebaikan).

Pandangan *kedua* menyatakan bahwa penggunaan kondom dapat digunakan mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam perspektif kelompok ini penggunaan kondom merupakan keniscayaan untuk menanggulangi HIV/AIDS. Seorang ulama dari Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut, termasuk yang berpandangan demikian. Ia menyatakan bahwa hubungan di luar nikah dengan tidak menggunakan kondom tergolong *haramun ghairu amin* (haram yang membahayakan). Sedangkan hubungan seksual di luar nikah dengan menggunakan kondom termasuk *haramun amin* (haram yang aman). Meski mengundang kontroversi, tetapi dalam menyikapi perkembangan HIV/AIDS pandangan ini dapat menjadi alternatif jangka pendek.

Dalam kasus HIV/AIDS yang perlu dicegah adalah agar penyakit ini tidak menyebar ke banyak orang. Karena itu penggunaan kondom menjadi jalan keluar. Apalagi sejauh ini secara teoritis kondom merupakan alat yang dapat digunakan untuk meminimalisir penularan virus HIV. Sebagian orang menyatakan bahwa untuk mencegah penyebaran virus yang mematikan ini dapat ditempuh dengan jalan pembinaan keagamaan. Tetapi yang juga perlu diingat, bahwa dalam proses pembinaan itu seringkali dijumpai kelompok masyarakat yang terlalu longgar pada nilai-nilai moral keagamaan.

Menunggu agar orang bertaubat sehingga menjadi orang yang taat dan religius tentu membutuhkan waktu. Sementara waktu terus berjalan dan virus HIV pun memakan banyak korban. Apalagi penderita HIV/AIDS tidak selalu orang yang jahat. Dalam banyak kasus, orang yang baik pun terserang virus HIV karena secara tidak disadari tertular dari orang lain. Bahkan anak-anak juga berpotensi terkena virus HIV karena tertular dari ibunya yang lebih dulu dinyatakan positif sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dalam situasi dilematis ini pilihan menggunakan kondom menjadi alternatif. Dikatakan oleh Malik Badri, seorang doktor bidang psikologi dari Sudan, bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang secara total mampu menghilangkan hubungan seks ilegal. Karena itu, sikap menolak penggunaan kondom secara total berarti sama saja dengan membiarkan seseorang dengan mudah

terjangkit virus HIV. Pandangan Malik Badri ini sejalan dengan kaidah dalam ushul fikih yang menyatakan bahwa jika ada dua kerusakan maka perlu diperhatikan adalah mana yang lebih besar kerusakannya, kemudian diambil yang paling ringan kerusakannya.

Ajaran agama yang juga perlu dikedepankan adalah sikap terhadap orang yang terkena HIV/AIDS. Dalam ajaran agama ditemukan banyak tuntunan agar seseorang bersikap saling menolong dan mencintai terhadap sesama. Ini berarti kita harus mengembangkan sikap empati pada penderita HIV/AIDS. Harus dipahami, bahwa virus HIV tidak akan menular melalui interkasi sosial seperti berjabat tangan, bermain bersama, berenang bersama, dan menggunakan alat makan minum secara bergantian. Karena itu, tidak ada halangan bagi kita untuk berinteraksi sosial dengan ODHA.

MENANTI KEBANGKITAN KAUM MUDA

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional (Harkitnas). Peringatan Harkitnas didasarkan pada pendirian organisasi Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908. Meski banyak menunjukkan sifat Jawa dan baru pada 1930 mulai membukakan pintunya bagi orang-orang dari luar Jawa, namun tanggal pendirian Budi Utomo dianggap sebagai permulaan kebangkitan nasional. Yang menarik disimak adalah kiprah kaum muda yang terlibat dalam gerakan kebangsaan melalui organisasi Budi Utomo.

Fakta tersebut membuka kesadaran kita betapa kaum muda selalu berperan dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa. Bahkan melalui teori siklus 20 tahunan kita menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Hal ini dapat diamati melalui beberapa peristiwa bersejarah yang menunjukkan peran penting kaum muda sebagai pendorong perubahan. Siklus 20 tahunan itu dapat diamati mulai era kebangkitan nasional (1908), sumpah pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998).

Meski baru menunjukkan hasil pada 1998, kiprah kaum muda sesungguhnya telah dimulai sejak pertengahan 1980-an. Saat itu, kaum muda yang direpresentasikan oleh kekuatan mahasiswa seakan tidak pernah lelah untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap rezim Orde Baru. Era reformasi yang kemudian menggantikan Orde Baru dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai akumulasi dari berbagai koreksi dan kritik tersebut.

Kiprah kaum muda yang tergambar dalam siklus 20 tahunan tersebut menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki kul-

tur keilmuan serta keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan yang sangat hebat. Sangat disayangkan, kultur tersebut seakan tenggelam dalam hiruk pikuk politik sepanjang era reformasi. Bahkan kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda. Kaum muda masa kini lebih menunjukkan minat dalam bidang politik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, dan tim sukses calon dalam pemilihan kepala daerah. Sementara kiprah kaum muda yang bergerak melalui jalur kultural terasa sekali kurang mendapat tempat.

Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Bahkan dinamika politik lokal di daerah juga memberikan ruang yang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini telah terjadi peningkatan “syahwat politik” di kalangan kaum muda. Peningkatan syahwat politik ini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga dalam skala nasional. Di antara indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam kepengurusan partai politik. Padahal mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual muda yang independen. Elit partai pun seakan berlomba mengajak kaum muda dengan memberikan jabatan penting. Targetnya, mereka dapat dijadikan sumber energi untuk menarik pemilih pemula.

Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, maka kiprah dan perjuangan mereka pun banyak disalurkan melalui berbagai aktivitas politik. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa sebagian kaum muda telah tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus.

Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interes politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah sebagai konsekuensi dari perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis-jangka pendek.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan melalui jalur kultural tidak terlalu

menonjol. Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas sangat sempit dengan peminat yang sangat banyak. Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki cakupan area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Maka, setiap orang yang ingin berjuang di jalur kultural pasti mendapatkan peran.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah di ranah politik jelas merupakan hak yang paling asasi. Karena itu, pilihan mereka untuk menjadi aktivis partai harus dipandang sebagai hak politiknya. Tetapi, persoalan akan muncul jika pilihan kaum muda yang berkiprah di bidang politik praktis menjadi yang terutama (*mainstream*). Sebab, dalam kondisi seperti ini perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik-menarik kepentingan politik. Akibatnya, akan terjadi peningkatan mobilisasi sumber daya kaum muda untuk kepentingan politik praktis.

Tentu saja keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan kaum muda di masa mendatang. Hal ini karena dalam politik praktis selalu terdapat kultur berpecah dan memecah. Kultur semacam ini terbangun melalui pandangan politisi yang selalu menyatakan bahwa Si A adalah kawan dan Si B adalah lawan. Hampir tidak pernah dijumpai politisi yang berpandangan Si A adalah kawan dan Si B adalah sahabat. Di dalam politik juga ada hukum yang tak terelakkan, bahwa tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.

Sebagian kaum muda juga berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik akan dapat memberikan harapan yang instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi. Sementara berjuang melalui jalur kultural seringkali dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian.

Menyikapi berbagai pilihan tersebut, maka tidak seharusnya seluruh energi kaum muda dihabiskan untuk berkiprah melalui jalur politik. Harus ada komitmen sebagian dari mereka untuk tetap berkiprah di jalur kultural sebagai intelektual, peneliti, dan pekerja sosial lainnya. Melalui peringatan Harkitnas kita layak berharap agar kaum muda bangkit dan berbagai peran untuk menekuni perjuangan dalam ranah politik dan kultural.

KEMERDEKAAN RI DAN SPIRIT RAMADAN

Di antara karya besar bangsa ini yang lahir pada Ramadan adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Diceritakan bahwa Sukarno-Hatta yang saat itu diakui sebagai pemimpin terkemuka telah menjadi sasaran penculikan para pemuda. Dwitunggal itu dipaksa bertindak “Atas Nama Bangsa Indonesia” untuk menyatakan kemerdekaan.

Jika melihat kilas balik perjuangan bangsa, maka jelas sekali kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan seluruh komponen bangsa. Dalam sudut pandang sejarah Indonesia modern dikatakan bahwa kemerdekaan itu diraih melalui proses yang sangat panjang. Perjuangan telah dimulai sejak masa kebangkitan nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan puncaknya adalah keberhasilan meraih kemerdekaan (1945).

Proklamasi kemerdekaan pada bulan Ramadan dapat dijadikan spirit agar kita tidak bermalas-malasan. Ini penting ditekankan karena Ramadan seringkali dijadikan alasan sebagian orang untuk mengurangi produktifitas. Padahal Ramadan secara bahasa berarti membakar atau mengasah. Dimaknai demikian karena ia dapat dijadikan umat untuk membakar dosa dan kesalahan dengan cara mendekatkan diri pada Allah.

Menurut Quraish Shihab (2000), Ramadan dapat diibaratkan tanah subur yang siap ditaburi benih-benih kebaikan. Semua orang dipersilahkan menabur hingga pada saatnya menuai hasil sesuai dengan benih yang ditanamnya. Sejalan dengan semangat

Ramadan berarti kita harus mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras dan berkreasi.

Spirit untuk bekerja keras dan berkreasi terasa sejalan dengan pernyataan Allah bahwa Dia terus berada dalam kesibukan (QS. al-Rahman: 29). Melalui kerja keras inilah kita menyaksikan banyak karya besar yang dihasilkan Nabi Muhammad dan sahabat pada bulan Ramadan: kemenangan Perang Badar dan penaklukan Kota Makkah. Sejarah keemasan Islam juga diwarnai prestasi hebat yang terjadi pada Ramadan, seperti keberhasilan menaklukkan Spanyol dan kemenangan dalam Perang Salib. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kerja keras dan produktivitas.

Jika bercermin pada kondisi yang dihadapi bangsa ini, tampak bahwa masih banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Karena itulah kita perlu meneladani Rasul dan para sahabat tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu Perang Badar. Pada Ramadan tahun kedua hijriah, Nabi memimpin pasukan yang berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta meninggalkan Madinah menuju Badar.

Jarak perjalanan diperkirakan 150 kilo meter. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi pun mendapatkan bagian yang sama dengan sahabat lain. Selama perjalanan para sahabat beberapa kali menawari Nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tetapi, tawaran itu ditolak Nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan.

Rasanya inilah teladan yang perlu dijadikan spirit bagi pemimpin dalam menghadapi persoalan bangsa yang demikian kompleks. Teladan Nabi jelas menunjukkan bahwa tidak pantas seorang pemimpin meminta fasilitas saat rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan. Ini berarti pemimpin harus berempati pada keadaan rakyatnya, terutama mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi.

Dalam Perang Badar juga diungkapkan betapa penting dukungan rakyat pada pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan masa depan. Tatkala pasukan muslim berhadapan dengan

pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1000 orang dengan fasilitas transportasi unta yang berlimpah, Nabi sempat meminta pendapat pada sahabat. “Wahai para sahabat, berikanlah padaku saran dan pertimbangan. Kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?”

Seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amir maju dan berkata; “Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil pada Nabi Musa yang mengatakan; Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah”. Komitmen serupa juga ditegaskan Sa’ad bin Mu’adz dari golongan Anshar. Dukungan para sahabat terhadap Nabi ini penting dijadikan teladan. Kita harus memberikan dukungan pada pemimpin sepanjang berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, kita harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga dan kelompoknya.

Bermodalkan dukungan para sahabat itulah Nabi memimpin Perang Badar dengan penuh semangat. Bahkan untuk menguatkan keyakinan dalam berjuang, sejenak Nabi menghadapkan wajah ke kiblat guna bermohon pada Allah agar diberikan pertolongan. Dengan perjuangan dan bantuan Allah maka Nabi dan para sahabat pun berhasil menaklukkan Quraisy (QS. al-Anfal: 9).

Kejadian dalam Perang Badar memberikan pelajaran bahwa untuk mengatasi problem yang dihadapi, seorang pemimpin harus senantiasa mendekati diri pada Tuhan. Kedekatan pada Tuhan ini penting karena dapat memberikan keyakinan dan energi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai persoalan. Bukankah saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik? Rasanya jika kita tidak segera berhasil mengatasi problem tersebut maka bangsa ini akan benar-benar menjadi negara gagal (*failed state*).

Karena itulah kita berharap semoga para pejabat publik negeri ini dapat menjadikan Ramadan sebagai spirit untuk mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras berasaskan kebersamaan dan kedekatan pada Tuhan. Jika itu yang dilakukan maka dukungan rakyat, baik diminta atau tidak, pasti akan diberikan.

MENDORONG MUNCULNYA CALON PEREMPUAN

Membincangkan peran sosial kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kini sudah tidak lagi tabu. Faktanya, sudah banyak contoh perempuan yang telah berhasil meraih kesuksesan dengan menempati posisi penting dalam urusan publik (*public sphere*). Misalnya, sebagai politisi, pebisnis, pendidik, aktivis sosial, dan kelompok profesional lain. Ini berarti kaum perempuan telah merambah jauh dengan menekuni bidang di luar urusan domestik (*domestic sphere*).

Fenomena tersebut jelas menjadi antitesa dari gambaran perempuan yang sering ditampilkan dalam posisi termarginalkan, tersubordinasi, dan inferior, jika dibandingkan laki-laki. Perempuan seringkali dikatakan sebagai korban dalam banyak kasus kekerasan rumah tangga dan dieksploitasi oleh media. Perempuan juga dicitrakan sebagai makhluk yang lemah lembut, irasional, mendahulukan perasaan, tidak berdaya, pasrah, mudah menangis, dan *nrimo*. Bahkan perempuan sering digambarkan dalam masyarakat tradisional sebagai kaum yang hanya bekerja di sekitar sumur, dapur, dan kasur. Sudut pandang yang patriarkhi ini tentu tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, konstruk kaum perempuan dalam kaitan dengan usaha membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ternyata harus diperhitungkan. Perempuan dengan kelebihan yang dimilikinya, diyakini dapat memainkan perana yang cukup signifikan. Apalagi kaum perempuan telah diberi anugerah oleh Allah berupa struktur biologis dan psikologis yang berbeda dengan kaum laki-laki.

Bermodal dari kelebihan yang dimiliki inilah diharapkan dapat membantu tugas kaum perempuan. Bahkan dengan kelembutannya, perempuan dapat dikatakan memiliki kekuatan lunak (*soft power*) yang sangat dasyat. Ini berarti sesungguhnya kaum perempuan dapat diposisikan sebagai salah satu kekuatan untuk melakukan perubahan sosial melalui keikutsertaannya dalam proses politik. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara langsung.

Pilihan Strategi

Menurut agenda KPU Jatim, pada 2010 akan digelar pilkada di 18 kabupaten/kota. Salah satu yang menarik ditunggu adalah pemilihan walikota (pilwali) Surabaya. Dengan model pemilihan langsung oleh rakyat maka siapa pun dapat maju, baik melalui kendaraan partai politik maupun jalur independen. Termasuk dalam hal ini adalah figur perempuan yang selama ini disebut warga metropolis layak maju dalam pilwali Kota Surabaya. Misalnya, Tri Rismaharini, Efie Findiarti, Yulyani, Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad (*Metropolis JP*, 28/12/2009). Mereka ini jelas sangat layak diperhitungkan jika mau maju dalam pilwali Kota Surabaya, baik sebagai wali kota maupun wakil wali kota.

Sebagian dari mereka sudah sangat populer di kalangan warga metropolis. Misalnya, Tri Rismaharini yang pernah sukses memimpin Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Karya Tri Rismaharini yang sangat dirasakan warga kota adalah pengadaan hutan kota dan pertamanan. Saat ini posisi Tri Rismaharini pun sangat vital, yakni Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya.

Nama populer yang juga pantas disebut adalah Yulyani, mantan anggota DPRD Surabaya (1999-2004) yang terbilang vokal dan bersih. Sementara, Efie Findiarti, Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad, terdengar masih asing. Sebenarnya, ada nama lain yang juga layak diperhitungkan. Yakni, Esti Martiana Rachmie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kapasitas Esti Martiana Rachmie dalam memimpin Dinas Kesehatan tidak diragukan lagi. Bahkan bagi media, ia menjadi salah satu *news maker* sehingga sangat populer.

Persoalannya kini berpulang pada keseriusan para srikandi tersebut untuk maju dalam pilwali Kota Surabaya. Menurut saya,

paling tidak ada tiga variabel penting yang harus dilakukan agar figur yang menjadi *inspiring woman* tersebut sukses. *Pertama*, mereka harus diusung oleh partai-partai besar dan memiliki jaringan mesin politik yang kuat hingga ke basis massa.

Untuk menentukan partai-partai besar, maka cara mudah yang dapat dilakukan adalah dengan melihat perolehan kursi DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Ini berarti partai besar seperti Demokrat, PDIP, PKB, PKS, dan Golkar, layak dipertimbangkan sebagai kendaraan politik. Perolehan suara pada saat pemilu legislatif dan kekuatan jaringan merupakan jaminan bahwa siapa pun yang diusung partai-partai besar berpotensi menang.

Kedua, figur-figur perempuan tersebut harus menggandeng atau berpasangan dengan calon yang merepresentasikan simbol-simbol ideologi yang berbeda. Misalnya, representasi ideologi nasionalis-agamis. Betapapun, politik ideologi ini masih relevan dipertimbangan dalam mempengaruhi emosi calon pemilih. Ini berarti pasangan yang menunjukkan representasi ideologi diharapkan dapat mengakomodasi pemilih yang masih menunjukkan ikatan emosional.

Ketiga, figur-figur perempuan tersebut harus mendapat dukungan dari sebanyak mungkin kelompok yang ada di masyarakat. Misalnya, paguyuban, asosiasi profesi, organisasi sosial keagamaan, NGO, dan kelompok primordial. Semakin banyak mendapat dukungan dari kelompok masyarakat maka akan memberi peluang bagi figur perempuan untuk memenangkan pilwali Kota Surabaya.

Mengapa Perempuan?

Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab berkaitan dengan pilwali Kota Surabaya dan pilkada di beberapa kabupaten/kota Jatim adalah mengapa figur perempuan layak diperhitungkan? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan beberapa sudut pandang.

Pertama, secara sosial budaya pandangan masyarakat terhadap perempuan sudah banyak berubah. Saat ini telah terjadi perkembangan sikap hidup yang mendorong terwujudnya egali-

tarianisme dan kesetaraan peran kaum perempuan dan laki-laki. Dalam posisi seperti ini kaum perempuan juga memiliki peran yang penting untuk ikut serta menentukan perubahan sosial. Kaum perempuan kini dapat berkiprah secara lebih leluasa dalam ranah publik dan domestik. Apalagi beberapa figur perempuan telah menunjukkan prestasi luar biasa jika diberikan amanah untuk memimpin lembaga publik tanpa harus melupakan tanggung jawabnya dalam urusan domestik.

Kedua, secara politik keterlibatan perempuan pun terbuka lebar. Bahkan sistem politik kita mengusung mekanisme representatif gender di legislatif. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah mengamanatkan agar setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ketentuan dalam perundang-undangan ini jelas menjadi jaminan bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik.

Ketiga, kiprah perempuan di dunia politik telah menunjukkan nilai marketing yang luar biasa. Fenomena Khofifah Indarparawansa dalam pemilihan Gubernur Jatim 2008 telah menjadi bukti betapa kaum perempuan dapat menjadi ancaman bagi dominasi kaum laki-laki dalam dunia politik dan pemerintahan. Demikian juga dengan kemenangan mutlak Prof. Istibsyaroh dalam pemilu 2009 untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Jatim. Dua fenomena ini jelas dapat menjadi pelajaran politik yang berharga betapa perempuan layak dipertimbangkan dalam pilkada.

Keempat, dalam banyak hal perempuan telah terbukti memiliki kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi kaum laki-laki. Kaum perempuan dapat menjadi pusat perhatian bagi lawan jenisnya. Faktanya, dalam banyak kegiatan periklanan selalu menempatkan kaum perempuan sebagai model yang dijadikan daya tarik.

Kelima, dalam kenyataannya total populasi kaum perempuan jauh melebihi kaum laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai sensus penduduk. Seiring dengan fakta ini, jumlah

pemilih perempuan pun menunjukkan angka yang lebih banyak dibanding laki-laki.

Keenam, bahwa sedikit sekali kaum perempuan yang berpikir individualistik. Mereka umumnya memiliki sikap hidup yang komunalistik. Perempuan biasanya sangat mudah dikenali melalui keterlibatannya dalam perubahan mode sesuai dengan perkembangan *style* dan *fashion*. Meski tidak saling mengenal, perempuan sesungguhnya telah berkenalan dan saling menyapa melalui *fashion* tersebut. Kaum perempuan juga memiliki tabiat senang berkumpul dan berorganisasi. Tabiat dasar ini jelas menjadi modal berharga untuk memobilisasi potensi perempuan.

Beberapa alasan ini kiranya dapat menjelaskan mengapa calon perempuan perlu diperhitungkan dalam pilkada. Tugas kita sekarang adalah mendorong figur-figur perempuan terbaik untuk ikut *running* dalam pilkada kabupaten/kota di Jatim.

ZAKAT UNTUK PRODUKTIFITAS UMAT

Di antara ibadah yang dianjurkan selama Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Anjuran ini termaktub dalam beberapa hadits Nabi Muhammad. Misalnya, beliau menyatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan pada Ramadan. Pada kesempatan lain, Nabi juga menyatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik dari tangan di bawah (peminta-minta). Islam mencela orang yang bermalasan, meminta-minta, dan tidak mau bekerja keras. Beberapa ajaran ini tentu dapat dijadikan spirit umat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadan.

Jika kita amati praktik pengeluaran ZIS di tengah-tengah masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pembayar zakat (*muzakki*) secara langsung membagikan ZIS pada mereka yang berhak (*mustahiq*). Meski terkesan konvensional, cara ini masih menjadi pilihan sebagian orang. Tetapi, pembagian zakat model ini menyisakan persoalan karena dapat menimbulkan korban akibat penumpukan massa.

Kedua, pembayar zakat menyalurkan ZIS melalui lembaga amal. Cara ini dipandang lebih sesuai dengan spirit ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat. Distribusi melalui amal juga dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pembagian ZIS. Dengan demikian pembayar zakat dapat memercayakan penyaluran ZIS pada amal. Apalagi kini telah tersedia banyak amal zakat yang amanah, bertanggung jawab, transparan, dan profesional.

Berdasarkan hasil riset *Islamic Development Bank* (IDB) dikatakan bahwa potensi zakat di Indonesia pada 2010 mencapai

Rp. 100 triliun. Sementara pada 2011 potensi zakat diestimasi mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik keluarga muslim.

Meski potensinya sangat besar, namun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan bahwa realisasi pembayaran zakat pada 2010 baru mencapai Rp. 1,5 triliun. Ini berarti masih jauh dari potensi zakat sesungguhnya. Padahal pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tetapi lagi-lagi kita menyaksikan betapa Undang-undang ini belum mampu melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat.

Karena itu untuk mengoptimalkan potensi zakat selama Ramadan, beberapa amil memilih cara lebih aktif dengan menyediakan *counter* zakat di kantor pemerintahan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan bank. Cara ini dapat dikatakan terobosan karena berupaya menjemput zakat dari pembayar zakat. Di *counter* tersebut pembayar zakat juga dapat berkonsultasi mengenai beberapa persoalan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan zakat. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan ZIS. Cara ini juga berbeda dari kebanyakan amil zakat yang pasif dengan hanya membuka penerimaan ZIS di masjid.

Jika hasil riset IDB dijadikan pijakan, berarti potensi zakat tergolong sangat besar. Ini jelas menjadi tantangan bagi Baznas serta Badan Amil Zakat (BAZ) setiap provinsi, kabupaten dan kota, untuk mencari cara yang tepat guna memaksimalkan potensi zakat. Sebab, optimalisasi potensi zakat sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan umat, terutama untuk menangani problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 30,02 juta (Maret 2011).

Hingga mendekati akhir Ramadan, lembaga amil zakat pasti lebih sibuk karena harus juga mengelola zakat fitrah. Jika dikelola profesional, penerimaan ZIS dan zakat fitrah selama bulan Ramadan tentu sangat besar manfaatnya untuk memberdayakan umat. Sayangnya, pemanfaatan ZIS dan zakat fitrah sejauh ini masih banyak yang digunakan untuk kepentingan konsum-

tif. Penerima zakat cenderung menggunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lembaga amil juga belum banyak yang mengarahkan pemanfaatan zakat untuk peningkatan produktifitas seperti pemberian modal usaha, pengembangan unit produksi, dan pemberian beasiswa pendidikan.

Ironinya, ada sebagian orang kaya yang merasa bangga melihat fenomena terus bertambahnya kerumunan orang miskin yang antri menerima zakat di depan rumahnya. Fenomena ini dapat diamati di beberapa daerah saat orang-orang kaya itu membagikan zakatnya. Ini tentu menjadi potret yang aneh karena masih ada orang yang justru senang melihat peningkatan jumlah orang miskin. Bahkan dengan bangga mereka mengundang orang miskin datang ke rumahnya untuk diberi zakat. Hal ini jelas menjadi fenomena yang bertentangan dengan tradisi Islam. Karena seharusnya orang kaya itulah yang mendatangi fakir miskin untuk diberi zakat.

Sudah saatnya lembaga amil berusaha memaksimalkan pengelolaan zakat dengan cara yang lebih produktif. Harus diakui, bahwa menghilangkan tradisi pemanfaatan zakat untuk kepentingan konsumtif jelas membutuhkan waktu. Apalagi realitas menunjukkan bahwa masih banyak warga miskin yang membutuhkan penanganan langsung karena problem yang dihadapi bersifat riil.

Tetapi, harus diingat bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan yang pragmatis. Strategi ini jelas tidak akan berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Bahkan boleh jadi masyarakat miskin akan merasa nyaman dengan kemiskinannya. Sebab, dalam pikiran mereka pasti ada pihak yang memberi bantuan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Pada konteks inilah lembaga amil perlu mengalokasikan dana dari zakat untuk memberdayaan perekonomian umat. Masyarakat miskin harus didorong untuk cepat keluar dari kemiskinan dengan memberikan dana yang diambilkan dari zakat sebagai modal usaha atau pinjaman lunak. Dana ini harus digunakan sebagai modal usaha yang bermanfaat bagi kelanjutan kehidupannya. Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sebagaimana mestinya, lembaga amil perlu mengajak elemen masyarakat guna mendampingi warga miskin hingga benar-benar berdaya.

MENGEVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2006 tentang RKPD Jatim 2007 dikatakan bahwa prioritas program pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 17 persen dan pemenuhan kebutuhan pangan sebesar 78 persen. Berdasarkan pada peraturan ini persoalan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda yang harus dilakukan pemerintah provinsi. Untuk menunjukkan komitmen di bidang ini beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan program PAM-DKB (Program Aksi Menanggulangi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan).

Sesuai dengan namanya program tersebut dimaksudkan untuk mengatasi problem kemiskinan yang melanda di berbagai daerah di Jatim sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan rencana kegiatan program ini akan digulirkan dan di-*launching* secara massif di 38 kabupaten/kota di Jatim. Hingga kini program ini telah mulai berjalan efektif di beberapa kabupaten/kota. Untuk mengimplementasikan program ini, dana yang dibutuhkan berasal dari sumber yang dialokasikan APBD Jatim serta dana *sharing* dari daerah kabupaten/kota dan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Tentu saja program PAM-DKB ini akan melengkapi program-program serupa yang telah ada atau sedang berjalan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Raskin, Subsidi Kesehatan, dan lain-lain. Banyak pihak tentu berharap agar program-program pengentasan kemiskinan tersebut dapat mengurangi jumlah keluarga miskin yang tersebar di seluruh Jatim.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jatim, tampak jelas bahwa jumlah keluarga miskin pada tahun 2006 mengalami kenaikan pesat dibanding tahun 2005. Untuk diketahui, berdasarkan hasil sensus per September 2005 jumlah kepala keluarga miskin (Gakin) di Jatim terdata sebanyak 2.728.629 KK. Sementara data keluarga miskin per Januari 2006 dikatakan berjumlah sekitar 3.311.903 KK. Jika data tersebut dikelompokkan menjadi keluarga miskin bekerja dan keluarga miskin pengangguran, maka perbandingannya adalah 2.914.837 [bekerja] dan 397.066 [pengangguran] (*Data Base BPS Jatim, 13 Januari 2006*). Tentu saja jumlah Gakin di Jatim tersebut sudah tergolong sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan solusi secepatnya.

Berkaitan dengan program PAM-DKB, dapat dikatakan bahwa program ini memang diharapkan dapat langsung menyentuh kebutuhan keluarga miskin di tingkat desa/kelurahan. Harapan tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan jika konsep yang dicanangkan program ini berjalan optimal. Apalagi dari segi struktur organisasi pelaksana, program ini telah melibatkan banyak elemen masyarakat mulai dari pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot, kecamatan, kepala desa/kelurahan hingga kelompok-kelompok keluarga miskin (Pok-Gakin) di setiap desa/kelurahan. Di samping itu juga dilibatkan lembaga-lembaga lain (LSM) sebagai pendamping/komite, yang turut melaksanakan, melakukan pendampingan, dan mengontrol kegiatan.

Sasaran dari program PAM-DKB adalah keluarga-keluarga miskin yang penentuannya dilakukan secara selektif berdasarkan usulan dari desa/kelurahan. Mereka yang termasuk keluarga miskin adalah Gakin pengangguran, Gakin setengah pengangguran, Gakin pekerja, dan Gakin dengan masalah khusus. Mereka inilah yang akan memperoleh berbagai fasilitas yang diluncurkan melalui program ini, seperti: (1) Padat Karya Desa (PKD) untuk menciptakan lapangan kerja; (2) Investasi (semacam modal ber-

gulir dan modal pinjaman dengan bunga rendah); (3) Penguatan pasar sebagai usaha membangun kemitraan yang kuat dan sehat antara UKM dan Gakin; serta (4) Pembinaan khusus bagi kelompok keluarga miskin usia lanjut dan cacat permanen (*permanent disability*).

Semua program PAM-DKB diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip; *pertama* adalah aksestabel berarti bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antarpelaku. Melalui prinsip ini diharapkan ada partisipasi aktif dari kelompok Gakin yang menjadi sasaran kegiatan. Sehingga dengan demikian mereka akan terberdayakan dan memberikan dukungan maksimal. Prinsip *kedua* adalah transparan yang berarti bahwa pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat terkendali dan terwujud.

Prinsip *ketiga* adalah akuntabel yang berarti bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat. Prinsip *keempat* adalah keterpaduan yang berarti bahwa semua kegiatan melibatkan antar komponen sehingga dapat saling menunjang dan melengkapi. Prinsip terakhir adalah keberlanjutan yang berarti bahwa hasil kegiatan harus dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu relatif panjang.

Tetapi sangat disayangkan jika konsep implementasi program PAM-DKB yang demikian baik kemudian memunculkan aroma politik yang sangat kuat. Nuansa politis program ini misalnya dapat diamati dari individu-individu atau kelompok LSM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program PAM-DKB. Bahkan dalam hal proses rekrutmen kelompok LSM yang dijadikan *associate member* pun tidak pernah dilakukan melalui proses lelang (tender) yang transparan dan akuntabel. Padahal program ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp. 425 miliar. Dana sebesar itu jelas merupakan uang rakyat karena sebagian besar memang diambilkan dari sumber APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten/Kota di seluruh Jatim.

Kesan lain yang bernuansa politis dari program PAM-DKB juga dapat diamati dari konteks pelaksanaan program yang memang sangat berdekatan dengan masa persiapan pemilihan gu-

bernur di Jawa Timur. Bahkan jika mengamati struktur organisasi pelaksana kegiatan, program ini jelas menampilkan figur yang sangat potensial menjadi salah satu calon gubernur. Apalagi figur tersebut dalam berbagai kesempatan telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub.

Memang bisa saja dikatakan bahwa berdasarkan kultur birokrasi kita, penempatan seorang pejabat dalam sebuah even kegiatan menghendaki adanya penyesuaian dengan jabatannya di pemerintahan. Tetapi, langkah tersebut jelas akan menjadi *conflict of interest*. Sebab, tidak tertutup kemungkinan jika individu dan kelompok LSM yang terlibat dalam kegiatan ini kemudian memiliki agenda tersembunyi (*hidden agenda*) untuk kepentingan pragmatis-jangka pendek.

Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul pertanyaan kritis; Apakah keterlibatan individu dan kelompok LSM dalam program PAM-DKB tersebut tidak dimaksudkan sebagai persiapan dalam rangka *running* Pilgub? Jawaban terhadap persoalan ini menurut hemat saya memang sangat sulit. Sebab, tradisi yang berkembang di masyarakat kita terkadang masih sulit membedakan hak milik pribadi dan hak milik publik. Sejak awal dikatakan bahwa program ini jelas didanai dari uang rakyat. Maka sudah selayaknya jika kita berharap agar program ini steril dari kepentingan politik (*political interest*) siapa pun.

Tetapi inilah inti persoalan yang sedang kita hadapi bersama bahwa seringkali ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kelompok-kelompok berkepentingan sering menunjukkan sikap yang kurang dapat membedakan urusan pribadi dan urusan publik. Mereka bahkan dengan mudah memanfaatkan berbagai fasilitas negara sebagai pejabat publik untuk kepentingan diri maupun kelompok. Ironinya kondisi ini masih diperparah dengan belum maksimalnya pengawasan publik.

Berkenaan dengan adanya program PAM-DKB yang sedang digulirkan untuk kelompok Gakin di seluruh desa/kelurahan di Jatim, tentu kita diharapkan dapat turut berperan aktif melakukan fungsi kontrol. Posisi masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa program ini memang untuk memberdayakan Gakin, dan bukan malah membuat mereka

menjadi semakin bergantung. Sebab, terkadang ada kultur yang aneh pada sebagian masyarakat yang di antaranya ditunjukkan melalui sikap merasa *enjoy* dengan keadaannya yang miskin. Kondisi inilah yang barangkali dapat dinamakan dengan kemiskinan kultural. Tentu saja, tipikal masyarakat yang demikian tidak dapat dipersalahkan. Karena bisa jadi kondisi tersebut tercipta akibat kesalahan pendekatan yang dipilih dalam setiap program pengentasan kemiskinan.

Karena itulah kita sangat berharap agar program PAM-DKB pada akhirnya dapat menjauhkan kelompok Gakin dari kondisi kemiskinan kultural. Sehingga mereka merasa berdaya, serta memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi untuk dapat keluar dari keadaannya yang miskin. Berkaitan dengan keinginan tersebut, rasanya menjadi tugas kita semua untuk melakukan pengawasan. Sebab, sudah sekian banyak program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, tetapi anehnya jumlah warga miskin dan pengangguran tetap saja meningkat pesat. Dan untuk kepentingan itu semua, *last but not least*, marilah kita mengawasi program PAM-DKB ini agar benar-benar bersih dari berbagai kepentingan politik.

MEWASPADAI KOMUNISME GAYA BARU

Secara historis, komunisme dapat dikatakan terlahir untuk merespon kebobrokan kapitalisme yang pada awal abad XX telah menimbulkan kesengsaraan luar biasa dalam masyarakat Eropa dan Amerika. Kapitalisme telah melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi, keterasingan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Tegasnya, kapitalisme telah melahirkan tipologi masyarakat yang bebas memiliki alat-alat produksi secara pribadi, pemilik perusahaan bebas mencari keuntungan ekonomi melalui penghematan uang, mekanisme persaingan, dan rasionalisasi dalam mengelola perusahaan (Rodinso, 1982: 29).

Kapitalisme, seperti dikatakan Adam Smith, sangat menekankan pada persaingan dan permainan bebas pasar yang memiliki peraturan tersendiri. Bahkan kepentingan-kepentingan ekonomi harus dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangannya berlangsung tanpa kendali pemerintah dan dengan regulasi sedikit mungkin (Bagus, 2000: 391).

Ideologi kapitalis tersebut mendapatkan kritik keras dari komunisme yang dalam doktrinnya sangat mendambakan suatu struktur sosial yang diurus secara bersama. Tema-tema seperti sosialisme, humanisme, tanpa kelas, dan kesejahteraan rakyat telah menjadi slogan komunisme. Ideologi komunisme dikaitkan dengan pikiran-pikiran Marx dan Engels. Keduanya menyatakan bahwa komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat; suatu keadaan yang akan tercipta setelah tercapainya sosialisme.

Dalam pokok-pokok ajaran Marx dikatakan bahwa masya-

rakat berkembang dari komunisme primitif dan akan berakhir dengan digulingkannya negara. Jalan untuk mencapai keinginan tersebut harus menggunakan revolusi dan kediktatoran proletariat (Marx, 2004). Idealita komunisme tersebut ternyata hanya utopia. Yang dimaksud utopia di sini adalah keinginan yang tidak mungkin dapat direalisasikan kapan pun dan di mana pun (Mannheim, 1991: xix).

Disebut utopis, karena dalam kenyataannya janji manis komunisme tidak pernah terwujud. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, komunisme telah melahirkan persoalan baru dalam bentuk konflik sosial, kekejaman, dan perampasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Keadaan inilah yang terjadi di banyak negara yang berideologi komunis.

Sejarah perkembangan ideologi komunis di Indonesia dapat dilacak sejak awal abad XX melalui tokoh-tokoh seperti Semaun, Alimin, Muso, dan Darsono. Mereka tergabung dalam *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV, Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Bahkan, Semaun berhasil menyusup ke Syarikat Islam (SI) dan melakukan *brainwashing* terhadap kader-kader SI. Ketika ISDV berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei 1920, perjuangan dan manuver politiknya terus digalakkan.

Banyak tokoh dari berbagai latar belakang sosial mulai terpesona dengan ideologi komunis. Bahkan dalam sejarah perjuangan politik, PKI telah mencatatkan diri sebagai salah peserta Pemilu 1955 dengan raihan suara mencapai 16,36 persen dan menempati posisi empat besar di bawah PNI [22,32 persen], Masyumi [20,92 persen], dan NU [18,41 persen] (M. Asfar, 2006: 72). Dengan dukungan yang relatif besar itulah PKI mulai berusaha menanamkan pengaruh di berbagai elemen dengan jalan menjanjikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih baik.

Tetapi, faktanya PKI di Indonesia justru telah melahirkan keadaan yang sangat mengerikan. Sebagai bukti, pemberontakan PKI pada 1948 diwarnai dengan pembunuhan terhadap banyak tokoh agama. Padahal ketika itu bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. Pemberontakan G 30S/PKI pada 1965 juga menunjukkan kekejaman kaum komunis. Pada saat itu, beberapa peting-

gi TNI Angkatan Darat telah dibunuh secara keji. Tentu saja, pengalaman sejarah yang demikian tidak boleh dilupakan begitu saja. Seluruh elemen bangsa harus belajar dari pengalaman tersebut agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji ideologi komunis.

Peringatan tersebut layak diberikan, sebab memberangus ideologi bukan pekerjaan mudah. Ideologi adalah seperangkat nilai yang dijadikan pedoman suatu gerakan yang merefleksikan moral, kepentingan, komitmen sosial, dan politik suatu gerakan (Ball dan Dagger, 1995: 9). Karena ideologi berkaitan dengan nilai-nilai yang dipedomani maka sifatnya menjadi laten dan sewaktu-waktu jika situasi dan kondisi memungkinkan akan bermanifes dalam bentuk gerakan. Bahaya laten ideologi komunis inilah yang harus diwaspadai.

PKI sebagai manifestasi ideologi komunis memang telah berhasil dibubarkan, tetapi ideologi komunis dapat tetap hidup langgeng di masyarakat melalui proses internalisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Apalagi jika belajar pada pengalaman sejarah kita mengamati bahwa komunisme telah mampu berkembang dengan pesat dan merambah pada semua kelompok masyarakat. Beberapa organisasi massa telah dibentuk PKI, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Melalui organisasi-organisasi massa inilah ideologi komunis disebarluaskan dan disemaikan pada saat kejayaan PKI di Indonesia (*Matan*, 2006).

Dengan jangkauan gerakan yang demikian luas, rasanya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk meniadakan ideologi komunis. Maka yang dapat dilakukan adalah usaha preventif agar bahaya laten ideologi komunis tidak sampai bermanifes. Tetapi, usaha ini juga sangat berat terutama jika melihat kehidupan riil masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera dan berkeadilan dalam banyak hal.

Umumnya masyarakat masih mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang luar biasa. Padahal situasi demikian sangat didambakan oleh para penganut ideologi komunis. Sebab, komunisme justru akan dapat hidup subur di tengah situasi masyarakat yang mengalami kesulitan dan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan menjan-

jikan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, tanpa kelas, semua aset ekonomi menjadi milik bersama, dan lain-lain, masyarakat akan sangat mudah terpengaruh.

Para ideolog komunis tentu tidak akan menunjukkan jati diri gerakannya yang tidak ber-Tuhan (ateisme). Mereka menyadari bahwa jika ateisme yang menyertai ideologi komunis diketahui maka masyarakat dapat mengambil sikap kontra produktif. Apalagi beberapa daerah di Indonesia menunjukkan keadaan masyarakat yang sangat religius.

Era reformasi juga menjadi angin surga bagi penganut ideologi komunis. Kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin undang-undang dan dibuka lebar pasca era Orde Baru telah memberikan semangat tersendiri bagi mereka. Beberapa tuntutan pun mulai disuarakan, misalnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27/1999 tentang KUHP, yang salah satu poinnya adalah melarang kegiatan komunis. Para eks tahanan politik juga telah berani menggugat presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta (Agustus, 2005). Mereka mengklaim 20 juta anggota PKI telah menjadi korban tragedi G 30 S PKI dan karena itu mereka menuntut ganti rugi.

Kisah pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965 juga sempat terhapus dari salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah. Buku sejarah ini bahkan sudah dicetak dan beredar luas. Karena diprotes masyarakat, buku tersebut akhirnya ditarik dari peredaran. Yang lebih heboh lagi dikatakan bahwa tidak kurang dari 86 orang anggota DPR periode 2004-2009 adalah keturunan PKI. Bahkan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariati (salah satu Ketua Komisi DPR dari FPD) dengan bangga menulis buku; *Aku Bangga Jadi Anak PKI (Matan, 2006)*. Yang paling aktual adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai diperbolehkannya eks tahanan politik menjadi presiden dan pejabat publik lainnya (*Jawa Pos, 12 Desember 2007*).

Menurut Arukat Djaswadi, seorang penggiat yang sangat gigih dalam menentang komunisme, bahwa beberapa organisasi massa juga menunjukkan aliansi dan kedekatan ideologi dengan komunisme. Di antara organisasi yang dimaksud adalah LPKP '65, Pakorba, LPR-KROB, YLBHI, PBHI, LNMD, PRD, Forum Kota, Jaringan Miskin Kota, Walhi, GRI, dan Partai Buruh pimpi-

nan Mochtar Pakpahan. Arukat juga mensinyalir beberapa nama di LIPI dan BUMN sebagai keturunan PKI. Data-data tersebut, meski secara akademik dapat diperdebatkan, telah menunjukkan betapa komunisme dapat terus hidup dan perlu diwaspadai.

Dengan meminjam istilah almarhum KH Yusuf Hasyim (Pak Ud), kita harus mewaspadai segala bentuk Komunisme Gaya Baru (KGB). Barangkali patut juga dipertanyakan, apakah kemunculan aliran sesat (*splinter group*) dalam agama Islam juga menjadi bagian dari strategi perjuangan para ideologi komunis? Pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Tetapi, beberapa sumber di Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensinyalir keterkaitan aliran-aliran sesat dengan ideologi komunis. Bahkan MUI telah mengambil langkah preventif dengan memberikan fatwa sesat terhadap 10 aliran yang berkembang sejak pertengahan 1980-an (*Matan, 2007*).

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menyatakan bahwa sesungguhnya ideologi komunis pasti tidak akan laku di masyarakat jika seluruh elemen bangsa menunjukkan kesungguhan untuk mewujudkan kehidupan sosial ekonomi yang lebih berkeadaban dan berkeadilan. Maka di sini fungsi ideologi Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dengan benar. Memang, harus disadari bahwa selama era Orde Baru nilai-nilai ideologi Pancasila telah banyak diselewengkan. Hal ini tentu akan menjadi beban tersendiri. Tetapi dengan semangat reformasi, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus direalisasikan.

Paham ateisme yang menjadi bagian dari ajaran komunisme dalam perspektif agama (Islam) juga dipandang tidak relevan. Karena tidak mungkin orang dapat hidup tanpa ada sesuatu yang dipandang agung, sehingga layak dituhankan. Jadi, dalam ajaran agama dan nilai-nilai yang ada di Pancasila jelas menunjukkan sikap yang sama; menentang komunisme. Bahwa komunisme lengkap dengan paham ateisnya sesungguhnya tidak lagi relevan dengan kebutuhan umat manusia.

DAMPAK SISTEMIK FATWA HARAM MEROKOK

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 di Universitas Muhammadiyah Malang pada 1-4 April 2010. Tentu saja, acara ini akan menarik perhatian masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Sebab, beberapa saat yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010, MTT telah mengeluarkan fatwa hukum merokok.

Dalam pandangan MTT merokok hukumnya haram karena: (a) perbuatan *khaba'its* [buruk], (b) menyebabkan kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, (c) membahayakan diri sendiri dan orang lain, (d) mengandung zat adiktif dan unsur racun yang berbahaya, (e) perbuatan mubazir [pemborosan], dan (f) bertentangan dengan tujuan penetapan syari'ah. Meski argumentasi tersebut terbuka untuk diperdebatkan, tetapi masyarakat sesungguhnya tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan. Persoalannya, cukup bijaksanakah fatwa haram merokok tersebut dikeluarkan dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kita?

Karena merokok bagi sebagian orang sudah dianggap budaya dan bahkan kebutuhan, maka keputusan tersebut dianggap terlalu keras. Hal ini karena mayoritas umat Islam memahami hukum merokok tidak lebih dari makruh. Pandangan resmi Muhammadiyah sebelumnya juga memutuskan bahwa merokok pada dasarnya termasuk perbuatan *ibahah* (mubah).

Karena itu, tidak mengherankan jika di kalangan warga Muhammadiyah fatwa ini disikapi dengan cara beragam. Sebagian memahami fatwa ini sudah tepat. Argumentasi yang diajukan pun sudah melingkupi berbagai aspek, termasuk agama, medis, sosial, dan ekonomi. Sementara yang lain menganggap fatwa haram merokok terlalu berlebihan, kurang bijaksana, dan tidak berempati pada petani dan industri tembakau. Apalagi hukum haram merokok secara *qath'iy* tidak ditemukan dalam berbagai teks keagamaan. Keberatan terhadap fatwa ini sangat beralasan karena budaya merokok berkaitan dengan banyak sektor kehidupan seperti pertanian, perindustrian, perekonomian, dan kebijakan.

Dampak Sistemik

Jika ditelisik lebih jauh, fatwa haram merokok –meminjam istilah yang marak dalam skandal Bank Century- sesungguhnya dapat berdampak sistemik. Dampak sistemik fatwa haram merokok ini dapat diamati dari mata rantai yang panjang dan melibatkan banyak sektor yang berkaitan dengan rokok. Misalnya, petani tembakau, buruh tani yang bekerja di lahan tembakau, pelaku jual beli tembakau, karyawan pabrik rokok, pemilik pabrik rokok, pelaku jual-beli rokok, dan pembuat regulasi industri rokok.

Fatwa haram rokok dikatakan berdampak sistemik karena di dalam Hadits Nabi Muhammad saw ditemukan adanya larangan orang memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan. Meskipun konteks hadits ini berkaitan dengan minuman keras (*khamr*) dan babi, tetapi sangat mungkin terjadi analogi hukum untuk menjelaskan kedudukan orang yang memproduksi dan memperjualbelikan rokok. Dengan logika hukum ini maka siapa pun yang berkaitan dengan industri rokok patut khawatir. Sementara para petani tembakau juga khawatir karena dapat dianggap memproduksi bahan baku rokok.

Harus diakui, bahwa fatwa MTT tentang hukum merokok memang belum menjadi keputusan resmi Muhammadiyah. Karena untuk menjadi keputusan resmi organisasi fatwa ini perlu terlebih dulu diajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MTT. Jika disepakati dalam Munas, fatwa tersebut juga harus menunggu untuk ditanfidz (disahkan) oleh Pimpinan Pusat. Sete-

lah ditanfidz itulah fatwa tersebut baru menjadi keputusan resmi. Tegasnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan fatwa hukum merokok sebagai keputusan tetap organisasi. Ini berarti masih terbuka peluang munculnya revisi fatwa hukum merokok yang lebih arif, bijaksana, dan solutif.

Tetapi, masyarakat sudah terlanjur tahu fatwa haram merokok yang diputuskan MTT. Karena itu, terbayang pertanyaan dalam pikiran saya bagaimana jika keputusan resmi organisasi nanti memperkuat fatwa MTT? Jika ini yang terjadi maka patut dilihat efektivitas fatwa tersebut. Bukan saja, bagi masyarakat luas tetapi juga di kalangan warga Muhammadiyah.

Bagi masyarakat umum, fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh MTT ini bukan yang pertama. Sebab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa serupa. Tetapi, kita dapat mengamati perbuatan merokok rasanya tetap menjadi budaya masyarakat. Ini berarti fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga keagamaan seringkali kurang efektif karena tidak memiliki kekuatan hukum positif. Barangkali karena itu, beberapa pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perbuatan merokok di tempat umum. Sekali lagi, kita menyaksikan betapa regulasi yang dibuat pemerintah tersebut kurang bergigi.

Revitalisasi Fungsi Tembakau

Agar fatwa haram merokok tidak berdampak sistemik maka yang perlu dipikirkan adalah merevitalisasi fungsi tembakau. Cara ini menurut hemat saya lebih adil karena tidak akan mematikan rangkaian industri tembakau. Masyarakat, terutama para petani tembakau dan kalangan industri, perlu diberikan alternatif. Misalnya, dengan menyatakan bahwa tembakau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar rokok. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tembakau bisa diekstrak dan direkayasa sehingga bermanfaat untuk kepentingan kesehatan. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan umum yang senantiasa menyatakan bahwa daun tembakau tidak bermanfaat bagi kesehatan.

Penelitian Arief Budi Witarto (2003) dari Pusat Bioteknologi LIPI menunjukkan manfaat daun tembakau sebagai reaktor peng-

hasil protein *Growth Colony Stimulating Factor* (GCSF), suatu hormon yang penting untuk menstimulasi produksi darah. Dikatakan juga bahwa protein GCSF bisa digunakan sebagai vaksin untuk mencegah penyakit kanker.

Beberapa ilmuwan kini juga berhasil menggunakan tembakau yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memproduksi obat penyakit diabetes. Daun tembakau pun dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk kekebalan tubuh. Prof. Pezzotti dari Universitas Verona juga menemukan manfaat daun tembakau sebagai penghasil protein obat *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang menyebabkan penyakit AIDS.

Beberapa temuan tersebut jelas menjadi angin segar bagi dunia keilmuan. Sebab, tanaman tembakau dapat memperbaiki citra di mata para ahli kesehatan. Tembakau yang selama ini hanya diambil manfaatnya untuk bahan baku rokok, ternyata dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia. Rasanya, pengkajian yang mencoba untuk merekayasa manfaat tembakau perlu terus dilakukan. Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan kalangan industri, perlu melakukan kerjasama yang sinergis untuk mengemban tugas mulia ini.

Semakin banyak temuan yang menunjukkan manfaat tembakau selain untuk rokok, maka para petani dan industri yang memanfaatkan tembakau sebagai bahan baku tidak akan gulung tikar dengan adanya fatwa haram merokok. Bahwa merokok dapat merusak kesehatan adalah pandangan yang secara *common sense* diakui kebenarannya oleh masyarakat. Tetapi, fatwa hukum merokok haram yang tidak diikuti dengan solusi pasti akan menimbulkan persoalan lain. Maka, dalam konteks inilah fatwa yang dikeluarkan MTT perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga lebih berempati pada petani dan dunia industri.

BAGIAN TIGA
HIDUP BERSAMA
BEDA PAHAM

PLURALISME, PENGAKUAN KERAGAMAN YANG INKLUSIF

Pluralisme keagamaan (*religious pluralism*) di Indonesia saat ini masih menjadi wacana yang sensitif dan kontroversial. Apalagi sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat pada sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dalam Musyawarah Nasional tanggal 26-29 Juli 2005. Di kalangan para pendukung fatwa MUI, tiga paham tersebut dinamakan “Sipilis”.

Sejak fatwa MUI digulirkan, pluralisme telah menjadi tema dalam banyak diskusi, seminar, dan berbagai forum ilmiah. Bahkan para mubaligh juga telah menjadikan pluralisme sebagai tema dalam berbagai kesempatan khotbah. Di samping itu, di beberapa daerah juga terjadi kekerasan sosial yang melibatkan antarpenganut agama dan paham keagamaan. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa pluralisme telah menjadi tantangan bukan saja intern umat beragama, melainkan juga semua pemeluk agama.

Perbedaan perayaan Idul Fitri telah membuka mata kita betapa paham keagamaan dalam Islam terus tumbuh subur di beberapa daerah. Di kala pemerintah dan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti NU dan Muhammadiyah sepakat menetapkan hari raya dalam waktu bersamaan, beberapa paham keagamaan justru menentukan hari yang berbeda. Sebagai contoh, Hibur Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah al-Nadzir (Sulawesi), Aliran Aboge (Madiun), serta beberapa tarekat lokal dan jamaah pengajian.

Uniknya, setiap penganut paham keagamaan ini memiliki argumentasi yang beragam. Misalnya, ada yang mendasarkan pada hisab dan rukyat internasional, gejala alam, dan hitungan tahun Jawa. Tentu saja, eksistensi beberapa paham keagamaan ini harus disikapi dengan arif sehingga menghadirkan kultur untuk saling menghormati dan menghargai keragaman pandangan. Pada konteks inilah nilai-nilai pluralisme perlu dikembangkan.

Pluralisme biasanya dibicarakan dalam konteks hubungan antaragama. Dalam perspektif ini, sejarah Islam telah menunjukkan contoh betapa Nabi Muhammad dan para sahabat bersikap sangat toleran pada masyarakat Madinah yang plural. Dalam Piagam Madinah jelas dikemukakan pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas suku dan agama.

Pluralisme juga dikatakan merupakan kelanjutan dari model keberagaman yang bercorak inklusif. Inklusivisme meniscayakan adanya pemahaman bahwa agama lain memiliki kesamaan-kesamaan sehingga ada keinginan untuk mencari titik temu (*kalimah sawa*). Berbeda dari inklusivisme, pluralisme justru mengaku adanya perbedaan-perbedaan. Pluralisme memandang bahwa setiap agama memiliki realitas yang unik. Hal ini berarti pluralisme dibutuhkan dalam rangka membangun kehidupan keberagaman yang koeksisten dan toleran di tengah perbedaan dan keragaman agama dan paham keagamaan.

Merujuk pada konsep Diana L. Eck (1993), pluralisme dikatakan berbeda dengan pluralitas atau diversitas. Pluralisme juga bukan sekedar toleransi pasif. Bahkan pluralisme tidak mesti dipahami sebagai relativisme, sebagaimana dikemukakan MUI dan para penolak paham ini. Lebih dari itu semua, pluralisme merupakan paham yang mengajarkan agar setiap pemeluk agama mengakui keberadaan agama lain dan paham keagamaan yang berbeda. Pluralisme juga meniscayakan agar setiap orang terlibat aktif dalam memahami perbedaan dan berkomitmen menemukan kesamaan dan perbedaan.

Di samping itu, pluralisme jelas menuntut kesediaan antarpe-meluk agama dan paham keagamaan melakukan dialog, saling berbicara, dan saling mendengar. Dialog yang perlu dikembangkan menurut Mukti Ali (1989) bukan semata dialog teologi, tetapi

juga dialog dalam kehidupan, dialog untuk kegiatan sosial, *sharing* pengalaman keagamaan, dan doa bersama.

Sikap dialogis ini menunjukkan ada kesediaan dan keterbukaan setiap pemeluk agama dan paham keagamaan untuk saling mengkritik dan dikritik. Keterbukaan ini mencerminkan adanya kesadaran mengenai kenisbian pandangan dan penafsiran terhadap teks keagamaan. Melalui pemahaman inilah klaim kebenaran (*truth claim*) dapat diminimalisir. Bahkan pertemuan-pertemuan informal melalui pertunjukan seni, teater, musik, dan olahraga, dapat dijadikan sarana mengembangkan dialog lintas agama dan budaya. Melalui perjumpaan-perjumpaan informal tersebut hubungan individu dan komunitas lintas agama dan budaya dapat mencair.

Para penolak pluralisme biasanya memahami paham ini dalam pengertian yang negatif, pesimis, dan terbatas pada pemahaman yang bersifat filosofis dan teologis. Dalam pemahaman mereka pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengajarkan relativisme kebenaran agama. Menurut mereka pemahaman seperti ini secara akademik telah sesuai dengan pengertian yang ada dalam kamus dan ensiklopedi, khususnya yang berkaitan dengan teologi agama-agama. Mereka juga mendasarkan pemahamannya pada pandangan yang dikemukakan para pengusung pluralisme seperti John Hick, Wilfred Cantwell Smith, Huston Smith, dan Harvey Cox.

Definisi pluralisme sebagai relativisme, memang masih menjadi pandangan umum teolog Muslim. Pemahaman seperti ini tentu tidak dapat disalahkan. Sebab, dalam beberapa literatur filsafat dan teologi, pluralisme memang diartikan dengan relativisme. Pengertian ini juga dikatakan telah sesuai dengan makna akademik sebagaimana yang dikemukakan para penggagas dan pengusung pluralisme.

Para penolak pluralisme bahkan mengaitkan kemunculan sejarah paham ini dalam konteks kultur Barat-Kristen. Akibatnya, pemahaman pluralisme sebagai relativisme pun semakin kuat. Tetapi, yang harus diingat adalah bahwa sesungguhnya pengertian pluralisme telah berkembang pesat. Intinya, pluralisme bukan hanya menjadi wacana teologi. Saat ini pluralisme telah di-

makna dalam konteks sosial, budaya, dan politik.

Pergeseran pemaknaan pluralisme dari wacana keagamaan hingga memasuki ranah sosial, budaya, dan politik ternyata tidak hanya terjadi di kalangan pemikir Barat. Beberapa pemikir Muslim juga memahami pluralisme dalam konteks non-teologi. Sebagai contoh, Fathi Usman (2006), memahami pluralisme sebagai bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan sebagai sebuah keniscayaan. Menurutnya, pluralisme lebih dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif.

Sachedina (2002) juga menyatakan bahwa pluralisme merupakan kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga negara terpanggil untuk hidup damai dalam keragaman. Beberapa pandangan ini jelas menunjukkan apresiasi yang positif terhadap pluralisme. Bahkan telah muncul kesadaran bahwa pluralisme dapat menjadi tantangan semua umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang saling menghargai setiap bentuk perbedaan.

Sementara Diana L. Eck (1993) menegaskan bahwa pluralisme menuntut kesediaan antarpemeluk agama untuk saling berbicara dan mendengar secara dialogis. Sikap dialogis ini menunjukkan ada kesediaan dan keterbukaan setiap pemeluk agama untuk saling mengkritik dan dikritik.

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pluralisme jelas bukan sesuatu yang bersifat pemberian (*given*), melainkan merupakan capaian (*achievement*) sehingga harus terus diusahakan. Karena itu pemaknaan pluralisme dalam pengertian yang positif harus terus didorong agar terlahir pribadi yang terbuka, toleran, optimistik, dan pluralis. Hal ini tentu sangat relevan dengan tantangan pluralitas agama dan paham keagamaan yang kini tumbuh subur di tanah air.

Dengan memahami pluralisme dalam banyak perspektif berarti seseorang akan turut mendorong penerapan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan keagamaan yang sangat plural. Seseorang tidak harus memahami pluralisme hanya dalam pengertian teologis, sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sep-

erti diketahui, MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa yang dimaksud pluralisme adalah paham yang menyatakan bahwa semua agama sama. Secara substansi fatwa MUI jelas dapat dibenarkan.

Tetapi, yang menjadi persoalan adalah ketika MUI membatasi pengertian pluralisme hanya dalam satu perspektif; relativisme. Padahal perkembangan makna pluralisme menunjukkan pengertian yang berbeda dari relativisme. Karena itu, rasanya akan lebih tepat jika yang dianggap sesat oleh MUI adalah relativisme dan bukan pluralisme.

Mencermati keragaman pandangan terhadap pluralisme kiranya dapat dikemukakan bahwa secara konseptual paham ini dapat dimaknai dalam pengertian yang bersifat positif dan negatif. Dikatakan pluralisme positif jika paham ini dimaknai secara terbuka (*outward-looking, open-minded*), toleran, dan optimistik sehingga mampu menghadirkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya dan agama. Pandangan yang positif terhadap pluralisme ini jelas akan melahirkan pribadi yang inklusif dan pluralis.

Sebaliknya, sebutan pluralisme negatif merujuk pada pemaknaan pluralisme dalam pengertian yang terbatas dan tertutup (*inward-looking, close-minded*) pada relativisme. Akibatnya, tidak ada komitmen dari orang yang berpaham demikian untuk terlibat aktif dalam dialog-dialog kemanusiaan yang seharusnya menjadi keprihatinan semua agama. Jika ada dialog antaragama yang dilakukan maka seringkali dialog ini dikembangkan dalam konteks perdebatan teologis. Kondisi inilah yang turut menyebabkan seseorang menjadi eksklusif dan militan.

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI PLURALISME

Salah satu pekerjaan besar yang patut menjadi perhatian kita sebagai bangsa yang multibudaya, etnis, dan agama adalah membumikan nilai-nilai pluralisme. Agenda ini mutlak dilakukan karena masih sering terjadi kasus radikalisme sosial di beberapa daerah. Umumnya radikalisme sosial itu diakibatkan oleh ketidaksiapan setiap individu atau kelompok untuk hidup dalam lingkungan masyarakat yang plural. Padahal pluralitas merupakan suatu keniscayaan.

Dalam perspektif agama, pluralitas bahkan disebut sebagai bagian dari ketetapan Allah (*sunnatullah*). Faktanya, negara kita memiliki tidak kurang dari 17.667 pulau besar dan kecil. Meski menggunakan bahasa nasional yang sama, bahasa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 350 kelompok etnis, budaya, dan adat istiadat.

Posisi strategis Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik yang sejak dulu menjadi lalu lintas perdagangan dunia juga turut membentuk karakteristik negara kita hingga menjadi multiagama dan kepercayaan. Di antara penyebab terjadinya radikalisme sosial, terutama yang bernuansa agama, adalah pemahaman agama yang parsial, konflik pendirian tempat ibadah, dan ketidaksiapan antarumat beragama dan paham keagamaan untuk hidup berdampingan. Pada konteks ini dibutuhkan strategi baru dialog lintas agama dan paham keagamaan. Umumnya kita hanya mengenal dialog lintas agama yang dikemas dalam konteks perdebatan teologi.

Akibatnya pengalaman keagamaan yang diperoleh selalu bercorak oposisi biner; *in group-out group*, golongan kami (*minna*)-

golongan kamu (*minkum*), dan benar-salah. Keinginan untuk saling bertemu, bertegur sapa, dan memahami ajaran setiap agama pasti tidak dapat dicapai melalui dialog dengan pendekatan teologis. Akan lebih baik jika dialog itu dirancang secara informal sehingga antarumat beragama dan paham keagamaan saling bertegur sapa tanpa terbebani perbedaan latar belakang sosial, budaya, agama, dan mazhab.

Strategi ini diharapkan dapat mendekatkan jarak yang selama ini menjadi pemisah antarumat beragama. Cara ini juga terasa efektif untuk mengurangi prasangka negatif yang seringkali muncul di antara umat beragama. Pluralisme kini telah menjadi tantangan semua agama dan paham keagamaan. Di antara tantangan yang dihadapi umat beragama berkaitan dengan pluralisme adalah setiap agama dituntut untuk melahirkan ajaran yang inklusif dan toleran terhadap keragaman. Sementara pada saat yang bersamaan agama mewajibkan pemeluknya untuk meyakini bahwa doktrin yang diajarkan memiliki kebenaran mutlak dan bersifat eksklusif.

Problem ini juga dialami penganut paham keagamaan dalam suatu agama. Dalam menghadapi problem tersebut, mayoritas tradisi keberagamaan mengambil sikap bahwa kebenaran hanya menjadi milik mazhab dan agamanya. Sementara mazhab dan agama lain dianggap salah. Akibatnya, setiap pemeluk agama atau penganut paham keagamaan mengklaim ajarannya paling benar. Klaim kebenaran ini pasti meniadakan keinginan untuk saling memahami tradisi keberagamaan.

Karena itu, perlu ditumbuhkan nilai-nilai pluralisme hingga menjadi gerakan aksi yang melibatkan antarumat beragama dan paham keagamaan. Nilai-nilai pluralisme yang harus dikembangkan adalah sikap keberagamaan yang mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda. Pluralisme juga menuntut setiap orang terlibat aktif untuk mewujudkan tata kehidupan yang toleran dalam masyarakat yang majemuk. Penegasan ini penting karena pluralisme terkadang dipahami secara negatif. Pluralisme disamakan dengan paralelisme dan relativisme.

Pluralisme bahkan disamakan dengan nihilisme dan ateisme. Akibatnya, dalam fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2005, pluralisme bersama

sekularisme dan liberalisme divonis sesat. Diana L Eck dalam *What is Pluralism* (1993) menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami aneka perbedaan. Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang harus dilakukan secara tulus sehingga menghadirkan komitmen untuk *sharing*, saling mengkritik, dan bersedia untuk dikritik.

Jika pluralisme dipahami secara positif, akan melahirkan pandangan keagamaan yang terbuka (*outward looking, open-minded*), toleran, dan optimistik. Pemahaman keagamaan yang demikian pasti menumbuhkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, dan agama. Untuk menyikapi gejala radikalisme yang melibatkan pengikut paham keagamaan, yang perlu dikembangkan adalah sikap saling menghargai. Sepanjang paham keagamaan itu masih bersepakat tentang ajaran-ajaran yang fundamental, mereka harus tetap dihormati. Meminjam istilah Mukti Ali (1989), sudah waktunya kita bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*).

Keragaman jika dipahami secara positif justru menjadi ujian bagi setiap penganut agama dan paham keagamaan. Ujiannya adalah seberapa besar kita telah memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan umat. Karena itulah, semua agama atau paham keagamaan dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik (*fastabiqul khairat*). Allah berfirman; Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji Kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali Kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah Kamu perselisihkan itu (QS. al-Maidah: 48).

Spirit ajaran al-Qur'an dalam menyikapi perbedaan ini perlu dikemukakan karena pluralitas agama dan paham keagamaan merupakan rencana Allah. Pada konteks inilah perintah *fastabiqul khairat* perlu menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat yang plural.

MENGEMBANGKAN PLURALISME POSITIF

Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2011. Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian tatkala memasuki tahun baru adalah gejala radikalisme agama. Radikalisme dalam berbagai bentuknya jelas bertentangan dengan ajaran agama yang memerintahkan untuk menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan menggunakan bahasa yang menyentuh hati nurani, Allah berfirman bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (QS. al-Maidah: 32). Ajaran ini penting dijadikan rujukan untuk memelihara kehormatan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memedulikan latar belakang etnis, budaya, dan agama.

Fenomena radikalisme agama yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk terorisme dan pengusiran penganut paham keagamaan yang berbeda, meniscayakan kita untuk mengembangkan pluralisme dalam pengertian yang lebih positif. Pada konteks ini jelas dibutuhkan strategi baru dalam dialog lintas agama dan paham keagamaan.

Umumnya kita mengenal dialog lintas agama yang dikemas dalam konteks perdebatan teologi. Akibatnya pengalaman keagamaan yang diperoleh selalu bercorak oposisi biner; *inside-outside*, kami-kamu, dan benar-salah. Keinginan untuk saling bertemu, bertegur sapa, dan memahami ajaran setiap agama jelas tidak akan dicapai melalui dialog yang menggunakan pendekatan teologis.

Menjadi lebih baik jika dialog itu dirancang untuk saling bertegur sapa dan mengucapkan selamat. Misalnya, saat umat Kristiani sedang

merayakan natal. Meski ada pandangan yang melarang untuk mengucapkan selamat natal, namun sejauh ucapan itu tidak memengaruhi keyakinan seseorang maka sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, ucapan itu harus dipahami sebatas penghormatan pada umat Kristiani yang sedang merayakan natal.

Strategi lain yang patut dicoba adalah saling mengunjungi tempat ibadah. Pengalaman keagamaan yang diperoleh saat mengunjungi tempat ibadah pasti akan memberikan kesan yang mendalam. Strategi ini diharapkan dapat mendekatkan jarak yang selama ini menjadi pemisah antar umat agama. Cara ini juga sangat efektif untuk mengurangi persepsi dan prasangka negatif yang seringkali muncul diantara umat beragama. Jika terus ditradisikan maka budaya saling mengunjungi tempat ibadah dapat menumbuhkan spirit bagi setiap umat beragama untuk mewujudkan pluralisme yang lebih positif.

Karena itulah perlu ditumbuhkan nilai-nilai pluralisme hingga menjadi gerakan aksi yang melibatkan antar umat beragama dan paham keagamaan. Kuntowijoyo (2001) membagi corak pluralisme menjadi dua; pluralisme positif dan pluralisme negatif. Pluralisme positif adalah sikap keberagaman yang mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda dari dirinya. Tegasnya, pluralisme adalah paham yang sangat menghargai keberagaman.

Sementara pluralisme negatif dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama dan benar. Pandangan ini dianut kelompok yang menamakan diri paralelisme. Pluralisme negatif juga mengakui adanya relativisme kebenaran agama. Pandangan ini mengakibatkan orang tidak perlu memegang teguh ajaran agamanya. Bahkan orang dapat dengan mudah berpindah agama, kapan pun dikehendaki. Sikap mudah pindah agama ini jelas bukan contoh yang baik dalam beragama.

Pluralisme sejauh ini dipahami sebagian orang dalam perspektif yang negatif. Pluralisme disamakan dengan paralelisme dan relativisme. Bahkan lebih ekstrim, pluralisme juga disamakan dengan nihilisme dan ateisme. Padahal Diana L. Eck dalam *What is Pluralism* (1993) menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan diversitas (pluralitas), relativisme, dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami aneka perbedaan. Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang harus

dilakukan secara tulus sehingga menghadirkan komitmen untuk *sharing*, saling mengkritik, dan kesediaan untuk dikritik.

Dalam menghadapi tantangan keagamaan era kontemporer jelas dibutuhkan pemeluk agama yang inklusif dan pluralis. Pluralitas budaya, etnis, dan agama, harus disadari telah menjadi ketetapan Tuhan (*summatullah*). Ini berarti sudah saatnya energi kita tidak dihabiskan untuk memperdebatkan hal-hal yang memang jelas berbeda. Semua tradisi keberagamaan harus dikembalikan pada Allah. Menjadi tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan semua perbedaan. Kita tidak boleh mengambil alih otoritas Tuhan dengan cara apa pun, termasuk pemberian fatwa. Apalagi jika fatwa keagamaan itu menghukum kelompok-kelompok yang berbeda dengan vonis sesat.

Sudah waktunya kita harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sebab, keragaman jika dipahami secara positif justru menjadi ujian. Seberapa besar kita telah memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan umat. Untuk itu semua agama atau paham keagamaan dituntut berlomba-lomba menjadi umat yang terbaik.

MENYIKAPI PERBEDAAN PAHAM BERAGAMA

Pluralitas paham keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu sikap terbaik yang harus dikembangkan adalah saling menghormati. Dengan meminjam istilah Bapak Perbandingan Agama, Mukti Ali, kita harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sebab, perbedaan jika dipahami secara positif justru menjadi ujian. Pada konteks inilah kita akan menyaksikan kelompok mana yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa setiap pengikut paham keagamaan harus berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik (QS. al-Maidah: 48). Kalam Ilahi ini penting direnungkan sebagai kerangka etik ajaran ukhuwah. Perbincangan mengenai ukhuwah sebagai pilar penting menyikapi perbedaan harus terus disemai dalam masyarakat plural. Sebab, konflik sosial terutama yang berlatar belakang perbedaan paham keagamaan masih sering terjadi.

Yang mutakhir adalah insiden berdarah kelompok Sunni-Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Apa pun alasannya dan siapa pun pelakunya, kekerasan atas nama agama jelas tidak dapat dibenarkan. Budaya agama NU, seperti diutarakan alm. Gus Dur, juga banyak mengadopsi tradisi Syiah. Ini berarti ada faktor lain yang menjadikan kelompok Sunni (khususnya nahdliyin) dan Syiah terlibat konflik.

Mengingat pentingnya ajaran ukhuwah maka kita harus mempersaudarakan berbagai paham keagamaan. Sejarah Islam yang dihitamkan oleh peperangan bersaudara dan sikap saling

mengkafirkan, terutama oleh kaum Khawarij, harus dijadikan pelajaran. Dengan pikiran yang jernih kita harus merumuskan sikap menghadapi perbedaan. Apalagi dalam sebuah hadits Nabi menyatakan bahwa perbedaan di kalangan umatku (yang terpelajar) adalah rahmat. Itu berarti perbedaan akan menjadi rahmat sepanjang dialami oleh orang-orang yang berilmu.

Jalaluddin Rahmad dalam *Islam dan Pluralisme* (2006), menawarkan sikap yang perlu dikedepankan untuk menyikapi perbedaan paham keagamaan. *Pertama*, kita harus bersepakat pada ajaran yang *qath'i* dan siap berbeda dengan yang *dzanni*. Sikap ini perlu dikembangkan karena ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua; *qath'i* dan *dzanni*. Ajaran *qath'i* berkaitan dengan aqidah dan muamalah yang telah disepakati. Sementara ajaran *dzanni* berkaitan dengan masalah *furu'* (cabang) dari yang pokok. Dalam ajaran *furu'* inilah perbedaan di kalangan umat sering terjadi.

Dalam perspektif ini perbedaan Sunni-Syiah sejatinya berkaitan dengan persoalan *furu'* (cabang), bukan ajaran pokok. Dua aliran ini berbeda dalam memandang kepemimpinan (*imamah*). Kaum Sunni berpandangan kepemimpinan *al-Khulafa al-Rasyidun*, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah adalah sah. Sementara Syiah memandang bahwa hanya Ali dan keturunannya yang berhak menjadi pemimpin.

Karena perbedaan Sunni-Syiah lebih banyak dalam ranah politik, maka seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi Ali Abd Raziq, seorang pembaru Mesir, pernah menyatakan bahwa syariat secara eksplisit tidak pernah menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti umat Islam. Karena itu dalam kaitan dengan bentuk negara diserahkan pada ijtihad manusia. Karena bersifat ijtihadiyah maka setiap paham keagamaan harus siap berbeda dan saling menghargai.

Kedua, menggunakan prinsip *tarjih* dan membudayakan dialog. Para ahli fikih bersepakat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Tetapi, harus diakui bahwa jumlah ayat al-Qur'an yang langsung menunjuk materi hukum sangat terbatas. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (1972), ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah jumlahnya hanya berkisar 230-250 ayat. Itu berarti hanya sekitar 3-4 persen dari jumlah ayat al-Qur'an.

Dari jumlah ayat hukum itu dibagi lagi menjadi dua; *qath'i al-dalalah* (ayat-ayat yang tegas penunjukannya) dan *dzanni al-dalalah* (ayat-ayat yang penunjukannya tidak tegas). Jika diselidiki, ayat-ayat hukum kategori kedua ternyata lebih banyak dibanding yang pertama. Itu berarti wilayah ijtihad sangat luas sehingga meniscayakan terjadinya perbedaan pendapat antar mujtahid. Jika terjadi perbedaan paham yang bersifat *dzanni* maka kita harus mengujinya dengan dalil *naqli* dan *aqli*. *Naqli* mengharuskan kita menilai perbedaan paham berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Sedang *aqli* digunakan untuk menilai kekuatan alasan rasionalnya. Di sinilah fungsi dialog yang tulus penting dilakukan untuk memahami perbedaan.

Pengujian dengan menggunakan dalil *naqli* dan *aqli* ini memungkinkan kita dapat menentukan pendapat yang lebih kuat (*rajih*). Proses memilih pendapat yang lebih kuat inilah yang disebut *tarjih*. Yang perlu diingat, betapapun kuat pendapat itu kualifikasinya tetap *dzanni*. Ini karena semua hasil ijtihad bersifat relatif dan temporer. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi gejala memutlakkan pendapat sendiri sebagai yang paling benar. Sebab, bermula dari klaim kebenaran (*truth claim*) inilah pertikaian antar pengikut paham keagamaan sering terjadi.

Menarik disimak kisah Imam Syafii yang pernah tidak membaca qunut saat shalat Subuh karena ingin menghormati makam Abu Hanifah yang berada tidak jauh dari tempatnya shalat. Tela dan Imam Syafii ini penting dikemukakan sebagai pelajaran betapa tokoh-tokoh mazhab fikih saling menghormati. Itu berarti sudah saatnya kita membudayakan sikap saling menghargai.

Semua tradisi keberagaman harus dikembalikan pada Allah. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk memutuskan persoalan perbedaan paham keagamaan. Kita tidak boleh mengambil alih otoritas itu dengan cara apapun, termasuk pemberian fatwa. Apalagi jika fatwa itu menvonis kelompok yang berbeda sebagai aliran sesat. Yang tidak pernah diperhitungkan adalah bahwa fatwa sesat tersebut berpotensi dijadikan pembenar melakukan kekerasan pada orang atau kelompok yang berbeda. Karena itulah elit agama dan institusi keagamaan harus berhati-hati dalam memberikan fatwa.

MENUMBUHKAN CIVIC VALUES MELALUI DAKWAH

Konflik berlatar belakang perbedaan paham keagamaan masih menjadi persoalan serius. Peristiwa berdarah di Sampang, Madura (2011 dan 2012), menjadi contoh betapa perbedaan paham keagamaan telah memicu konflik sosial yang massif. Di beberapa daerah juga masih terjadi penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah. Itu berarti konflik bernuansa agama sejatinya bersifat laten dan akan menjadi manifes jika ada faktor pemicunya. Pada konteks inilah pemerintah, tokoh masyarakat, dan elit agama, harus berkomitmen untuk menanamkan ajaran agama yang toleran, moderat, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini dalam sudut pandang kehidupan bermasyarakat tentu sangat dibutuhkan, terutama jika dihadapkan pada realitas kemajemukan paham keagamaan.

Upaya menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi substansi ajaran agama diantaranya dapat dilakukan melalui gerakan dakwah (*tabligh*) dari masjid ke masjid. Menempatkan masjid sebagai media dakwah Islam moderat ini penting karena diakui atau tidak jaringan kelompok Islam radikal secara perlahan juga telah menanamkan pengaruh dengan mengajarkan paham keagamaan yang intoleran, ekstrim, dan tidak memberikan ruang bagi perbedaan. Kondisi ini jelas sangat mengganggu ikhtiar untuk menampilkan ajaran Islam yang mampu memberi rahmat bagi keseluruhan alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, sebagai pilar *civil society* sejauh ini telah berupaya untuk mengajarkan Islam moderat. Dengan menampilkan wajah Islam moderat, dakwah

Muhammadiyah dan NU pun diterima mayoritas umat. Bahkan perkembangan Islam Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dua ormas tersebut. Karena itu, ketika ada gerakan dari kelompok tertentu yang berusaha menampilkan wajah Islam yang radikal dan intoleran, maka Muhammadiyah dan NU perlu duduk bersama untuk mencari solusi. Dua ormas ini pasti menyadari betapa besar fungsi masjid sebagai media untuk menghegemoni pandangan masyarakat melalui materi dakwah yang disajikan mubaligh.

Dalam sejarah Islam, masjid merupakan pusat aktivitas umat. Masjid oleh Nabi Muhammad dan para sahabat bukan hanya dijadikan pusat peribadatan, tapi juga pusat pendidikan dan penanaman nilai-nilai keislaman, kegiatan ekonomi, dan pelatihan tentara untuk kepentingan ketahanan negara. Hampir sama dengan fungsi awalnya, saat ini masjid juga dijadikan pusat kegiatan umat. Yang berubah hanya fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelatihan tentara. Masjid juga menjadi simbol ideologi dan paham keagamaan umat. Karena itu, jika ada kasus perebutan masjid, maka yang diperebutkan sejatinya bukan hanya masjid, tapi ideologi dan paham keagamaan.

Selain sebagai pusat peribadatan, masjid sesungguhnya penting dijadikan sarana menumbuhkan nilai-nilai budaya yang positif dalam kehidupan bermasyarakat (*civic values*). Contoh *civic values* yang sangat penting dikemukakan dalam konteks kekinian adalah nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Berkaitan dengan keinginan untuk menanamkan *civic values* ini, para mubaligh dapat didorong untuk mentransformasikan ajaran Islam yang lebih ramah. Melalui materi khutbah, pengajian, dan diskusi di masjid, mubaligh memegang posisi penting untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme.

Berkaitan dengan usaha menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, maka harus diakui bahwa istilah ini masih menimbulkan pro dan kontra. Masih banyak paham keagamaan yang menyatakan bahwa demokrasi adalah kafir karena dianggap produk Barat. Akibatnya, kelompok ini tidak mau terlibat dalam berbagai proses politik, termasuk pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun. Kelompok yang

berpandangan trans-nasional ini mengatakan bahwa produk politik yang dilaksanakan melalui demokrasi harus ditolak karena dianggap tidak islami. Pikiran ini tentu sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penolakan terhadap demokrasi juga bertabrakan dengan ajaran musyawarah (*syura*). Apalagi sejarah Islam telah mencontohkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dipraktikkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Penanaman nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme juga sangat penting karena realitas masyarakat dari sudut budaya, etnik, dan agama, menunjukkan kemajemukan yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa pluralitas merupakan keniscayaan dan bagian dari ketentuan Allah (*sunatullah*). Maka, yang dibutuhkan dalam kaitan dengan kondisi masyarakat yang plural adalah sikap hidup toleran dan saling menghormati. Dengan meminjam istilah Mukti Ali, Bapak Perbandingan Agama dan mantan Menteri Agama RI, umat Islam harus bersikap *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan).

Pikiran Mukti Ali tersebut sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa perbedaan di kalangan umatku (yang terpelajar) adalah rahmat. Ajaran ini menyatakan bahwa perbedaan akan membawa rahmat jika melibatkan orang-orang yang terdidik. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat dialami orang-orang yang tidak berilmu, yang terjadi adalah sikap saling menyalahkan dan memunculkan klaim kebenaran (*truth claim*). Akibatnya, paham keagamaan yang tidak sejalan dengan diri dan kelompoknya dianggap salah. Sikap menyalahkan kelompok yang berbeda -apalagi sampai menggunakan istilah kafir, musyrik, jahiliyah, masuk neraka, dan lainnya- tentu tidak dibenarkan karena akan menyulut emosi keagamaan seseorang.

Pada konteks inilah kita menyadari betapa penting posisi elit agama dan mubaligh untuk menumbuhkan *civic values* di kalangan umat. Elit agama dan mubaligh harus menghentikan model dakwah yang menghasut dan menanamkan kebencian. Karena memang prinsip dakwah seharusnya bersifat merangkul, dikemas dengan mudah, dialogis, dan tidak menakut-nakuti. Ini penting agar tercipta kehidupan yang ramah terhadap keragaman.

PEMBAURAN SEBAGAI BAGIAN KETAHANAN BANGSA: BELAJAR DARI PERAYAAN AGUSTUSAN

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mengatasi problema pluralitas (kemajemukan) masyarakat. Dalam hal ini, pengertian masyarakat majemuk menurut Furnivall (1949) dicirikan sebagai orang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnis, politik, dan agama, mereka hidup dalam keadaan terpisah dan tidak tergabung dalam suatu komunitas atau unit politik. Kategori masyarakat majemuk terutama dapat diamati di perkotaan karena keadaan masyarakatnya sangat heterogen. Sementara masyarakat di pedesaan cenderung bersifat homogen sehingga tidak banyak melahirkan persoalan.

Jika faktor kemajemukan masyarakat kota diklasifikasikan, maka dapat ditemukan dua kategori penting, horisontal dan vertikal. Faktor horisontal dapat berupa etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat/perilaku, agama, dan pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Sementara faktor vertikal berupa penghasilan (ekonomi), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik.

Faktor kemajemukan horisontal merupakan faktor-faktor yang diterima seseorang sebagai warisan (*ascribed factors*). Sedangkan faktor kemajemukan vertikal lebih banyak diperoleh dari hasil usahanya sendiri (*achievement factors*). Dalam tingkat tertentu kemajemukan jelas merupakan tantangan yang harus dicari solusi. Sebab, jika kemajemukan tidak dikelola dengan baik, pasti akan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Banyak kasus terjadi di tanah air yang menunjukkan adanya relasi konflik sosial yang diakibatkan oleh kemajemukan masyarakat. Yang masih hangat dalam ingatan kita adalah problem hubungan antaragama yang melibatkan komunitas Ahmadiyah, para pendukungnya, dan para penentangannya. Penentangan yang disertai kekerasan sosial yang menimpa pengikut Ahmadiyah menunjukkan betapa masyarakat belum memiliki “habit” untuk hidup secara “koeksisten” dengan komunitas yang berbeda agama dan keyakinan.

Agak ke belakang sedikit, tepatnya pada Mei 1998, kita juga menyaksikan kekerasan sosial yang melibatkan penduduk “pribumi” dan “non-pribumi” dalam posisi yang berhadap-hadapan. Beberapa kasus tersebut merupakan contoh dari ketidaksiapan individu dan komunitas untuk hidup secara damai dalam masyarakat yang majemuk.

Menurut Syafrin Sairin (1992) setidaknya ada tiga sumber konflik sosial yang dapat menimbulkan ketidakserasian sosial; *Pertama*, perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); *Kedua*, perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (*social and cultural border line expansions*); *Ketiga*, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*).

Sumber konflik pertama merupakan bentuk konflik yang sering kali terjadi. Pemenang konflik ini biasanya adalah individu atau kelompok yang memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia maupun teknologi. Motto; *Only the fittest will survive*, menjadi hukum yang lumrah berlaku dalam pertarungan memperebutkan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi.

Sumber konflik kedua biasanya muncul dalam masyarakat majemuk, utamanya dialami masyarakat urban di perkotaan. Adanya perbedaan kultur, bahasa, hukum, dan identitas sosial, dapat menyatu dalam kepentingan politik sehingga memicu konflik. Sebagai contoh, pemakaian bahasa tertentu dalam interaksi sosial di hadapan etnis lain dapat dianggap sebagai ekspansi suatu kelompok pada kelompok lain karena dianggap melanggar tapal batas (*boder line*).

Sumber konflik ketiga merupakan benturan antara struktur

yang mapan terhadap kebudayaan, sistem nilai, ideologi, dan agama yang berkembang. Konflik jenis ini biasanya muncul dalam format; penguasa-rakyat, majikan-buruh, dan *patron-client*. Konflik karena kepentingan politik, ideologi, dan agama ini dalam rentang sejarah Indonesia misalnya muncul dalam bentuk percobaan kudeta G30S/PKI dan DI/TII. Dalam bentuk yang lebih kecil konflik juga muncul dalam wujud demonstrasi Pekerja Kaki Lima (PKL), pemogokan buruh, demonstrasi, dan tawuran antarpelajar.

Ketiga jenis konflik tersebut dapat terjadi secara simultan dan melahirkan benturan keras antarindividu dan komunitas di masyarakat. Akibatnya orang sering kesulitan mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik di Ambon yang terjadi dalam kurun 1999-2004 merupakan jenis konflik yang sangat sulit diidentifikasi. Demikian juga konflik di Sampit (Kalimantan Tengah) dan konflik di Sambas (Kalimantan Barat). Berbagai faktor tampak terlibat dalam konflik ini seperti agama, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Biasanya untuk jenis konflik yang multifaktor ini sangat sulit diselesaikan.

Makna Agustusan

Perayaan tujuh belasan (Agustusan) yang diperingati setiap tahun sesungguhnya dapat dijadikan media untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang sosial. Pada acara tersebut semua warga masyarakat hadir, saling menyapa, mengenal, dan tertawa bahagia. Mereka berbaur tanpa mempedulikan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama. Padahal mereka dalam aktivitas sehari-hari barangkali jarang bertemu dan bahkan ada yang tidak saling mengenal.

Melalui Agustusan mereka seakan dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan aneka jenis permainan. Mereka merasa bahwa perjumpaan-perjumpaan informal dalam bentuk permainan ternyata dapat melupakan status sosial yang seringkali menjadi jarak yang memisahkan antarwarga. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tradisi Agustusan dapat digunakan sebagai salah satu sarana yang sangat bermanfaat untuk menciptakan pembauran antarwarga (*melting pot*).

Melalui Agustusan ini hubungan antarwarga dapat mencair dan terbebas dari segala bentuk prasangka (*prejudice*). Warga kota dengan berbagai latar belakang sosial dipertemukan dalam suatu jenis permainan yang membuat mereka bergembira dan terlepas dari berbagai kegiatan rutin. Ternyata berbagai acara dalam perayaan Agustusan telah menjadi perjumpaan berbagai budaya yang memungkinkan setiap orang dapat saling mengenal identitas budayanya.

Dengan dasar ini sesungguhnya perayaan Agustusan juga dapat digunakan untuk menghadapi persoalan multikulturalisme yang saat ini juga sedang dialami bangsa Indonesia. Pada konteks ini, multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan terhadap adanya pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui (W. Kymlika, 1989).

Dengan pengertian tersebut berarti multikulturalisme terumuskan dalam bentuk sejumlah prinsip, kebijakan, dan praksis untuk mengakomodasi keberagaman sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari suatu masyarakat. Jadi, arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Terdapat beberapa alasan mengapa kesadaran terhadap multikulturalisme perlu ditumbuhkan. Menurut Haryatmoko (2007) paling tidak ada tiga hal yang menjadikan kesadaran multikulturalisme mutlak diperlukan. *Pertama*, adanya penindasan atau penafian atas dasar kepemilikan etnis, agama, atau bentuk minoritas lainnya. Dikotomi antara “kita” (kelompok dominan) dan “mereka” (di luar anggota kelompok dominan) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas secara budaya atau etnis ditekan dan dianggap tidak berhak sehingga kehilangan harga diri (*self-worth*).

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memojokkan ke posisi marginal dengan memberi label “tidak terlalu penting” dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri dan tidak berdaya semakin terpatri dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Karena itu, semangat multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan dasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kelompok urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak Undang-undang tentang Otonomi Daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap warga asli daerah.

Adanya kesadaran terhadap multikulturalisme dapat menyebabkan setiap orang saling memahami kekhasan yang dimiliki dan meneguhkan identitasnya. Dalam hal ini kekhasan tidak dapat disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial, etnis, dan agama. Dalam memahami kekhasan budaya, termasuk agama, kiranya dapat dipertimbangkan teori Levinas (1971) mengenai “penampakan wajah”. Dikatakannya, penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain tidak melahirkan kekerasan. Jadi, kehadiran yang lain justru akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan struktur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Orang dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga dinamisnya tidak hanya berhenti pada persepsi, melainkan mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Melalui teori Levinas kita dapat memahami bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditan-

dai kepedulian dan *nir*-kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain, tanpa menuntut yang lain melakukan hal yang sama. Ini berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula dominasi. Fenomena inilah yang dapat diamati dari hampir semua warga kota yang merayakan Agustusan. Semua warga berbaur menjadi satu sehingga tidak tampak adanya budaya yang mendominasi. Meskipun memang harus diakui bahwa sejatinya mereka memiliki perbedaan budaya.

Menyadari begitu penting makna sebuah perjumpaan, terutama perjumpaan-perjumpaan informal untuk mempercepat proses pembauran, maka dengan demikian sarana yang memungkinkan dilakukan perjumpaan informal harus diperbanyak. Perjumpaan informal yang melibatkan antarwarga dan antarkomunitas jelas jauh dari kesan formal. Dalam hal ini perjumpaan informal dapat berupa olahraga bersama, permainan (*game*), teater, kesenian, musik, film, dan lain sebagainya. Melalui berbagai analogi permainan itulah seseorang akan terbebas dari ketakutan terhadap norma sosial, keseriusan hidup, dan hirarki sosial.

Sangat disayangkan jika perjumpaan-perjumpaan informal tersebut hanya terjadi dalam peringatan hari besar nasional, seperti halnya perayaan Agustusan. Padahal di dalam perjumpaan-perjumpaan informal inilah masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial budaya dapat saling bertemu dan bertegur sapa. Karena itu, menjadi tugas kita semua untuk menciptakan perjumpaan-perjumpaan informal antarwarga sehingga masyarakat dapat hidup damai, saling menghargai dan menghormati setiap bentuk perbedaan. Jika masyarakat telah memiliki kultur untuk hidup dalam keragaman, maka ketahanan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini pun dapat diwujudkan.

MEMBUBARKAN ORMAS ANARKISTIS

Tuntutan sebagian kelompok masyarakat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anarkistis harus segera direspons pemerintah. Tuntutan itu jelas ditujukan pada ormas yang selama ini sering terlibat aksi kekerasan dalam kasus-kasus bernuansa agama.

Front Pembela Islam (FPI) menduduki peringkat pertama ormas yang dituntut untuk dibubarkan karena dianggap sering terlibat aksi kekerasan. Kasus penolakan delegasi FPI oleh masyarakat Kalimantan Tengah (11/2/12) harus dipahami sebagai wujud dari keinginan membubarkan ormas anarkistis. Beberapa komponen masyarakat di Jakarta juga telah melakukan demo anti-FPI (14/2/12).

Sangat mungkin demo anti-FPI akan terus menggelinding di beberapa daerah. Jika ini terjadi, pemerintah harus segera bertindak. Ini karena FPI dengan jaringan yang dimiliki dan ormas pendukungnya sangat mungkin tidak akan tinggal diam. Keinginan pemerintah untuk membubarkan ormas anarkistis pernah mengemuka seiring dengan meningkatnya gejala radikalisme sosial bernuansa agama.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian nasional adalah kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di Pandeglang, Banten. Kekerasan sosial bernuansa agama juga pernah terjadi di Temanggung dan Pasuruan. Kasus mutakhir adalah kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang yang juga menjadi atensi nasional. Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata belum siap dengan perbedaan paham keagamaan.

Masyarakat juga begitu mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Ironisnya, aparat keamanan yang seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman bagi warga terkesan kurang tegas. Secara yuridis pemerintah sejatinya memiliki sandaran hukum untuk menertibkan ormas anarkistis seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Keormasan. persoalannya, beranikah pemerintah menertibkan atau bahkan membubarkan ormas anarkistis? Jawaban terhadap persoalan ini tentu tidak sederhana karena jika pemerintah salah mengambil langkah, pasti akan dikatakan telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Wajah Islam Indonesia

Diakui atau tidak, wajah Islam di Indonesia telah diwarnai perdebatan dan persaingan antara kelompok Islam fundamental dan Islam moderat. Fenomena tersebut memang bukan sesuatu yang baru. Jika dilihat secara historis, pergumulan kelompok Islam fundamental versus Islam moderat telah terjadi sejak 1970-an. Saat itu kelompok Islam moderat melalui tokoh utamanya, Nurcholish Madjid (Cak Nur) terlibat perdebatan dengan kelompok Islam fundamental.

Kelompok Islam fundamental adalah penentang gagasan Cak Nur tentang sekularisasi, Islam yes partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (*inklusivisme*). Perkembangan Islam fundamental sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari krisis yang hampir merata di dunia Islam.

Krisis tersebut bersifat menyeluruh; sosial-ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan spiritual. Situasi krisis multidimensi ini telah menghadirkan semangat baru bagi kelompok Islam fundamental dengan berbagai variannya. Meski bervariasi, jika diamati, dapat dikatakan bahwa umumnya kelompok Islam fundamental selalu menekankan ajaran Islam yang bersifat formal-simbolik.

Salah satu ciri yang menonjol dari kelompok Islam fundamental ditunjukkan melalui cara berpakaian dan tampilan fisik lainnya. Islam fundamental juga menekankan prinsip kesatuan agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*). Fenomena ormas keislaman bercorak radikal juga menunjukkan ada karakteristik *polycentrism* (banyak pusat). Karakter ini dapat diamati dari banyaknya

organisasi keagamaan yang menunjukkan ideologi fundamental seperti FPI, Laskar Jihad, Jama'ah Islamiyyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Ikhwanul Muslimin.

Yang menarik, setiap ormas ini secara organisatoris tidak saling berhubungan. Karakter lain yang patut didalami adalah sikap yang militan, gigih, ulet, dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Dalam fase tertentu kelompok Islam fundamental ini bahkan membenarkan perjuangan secara fisik (jihad). Dalam perkembangannya, terutama sejak era reformasi, tampak sekali ada upaya dari sebagian kelompok Islam fundamental untuk memperluas wilayah dakwah dengan terjun dalam ranah politik praktis.

Inilah fenomena yang menarik diamati dari kelompok Islam fundamental karena mereka telah berupaya untuk menyinergikan perjuangan melalui jalur kultural dan politik kekuasaan. Karena telah bercampur dengan kepentingan politik kekuasaan inilah, kelompok Islam fundamental berubah menjadi kian radikal dan reaksioner.

Alternatif Solusi

Berkaitan dengan keinginan untuk membubarkan ormas anarkistis, yang terpenting untuk dilakukan adalah jangan sampai pemerintah memberikan kesempatan (*window of opportunity*) bagi munculnya tindakan anarkistis. Keinginan membubarkan ormas anarkistis akan sia-sia jika pemerintah tidak berusaha untuk meminimalisasi faktor-faktor pemicunya (*triggering factors*).

Termasuk dalam kategori faktor pemicu di sini adalah ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum, tersumbatnya partisipasi politik, tersedianya persenjataan, serta kepentingan elit politik. Selain itu, pemerintah juga harus meminimalkan faktor sosial-budaya yang berpotensi untuk membentuk karakter seseorang/kelompok menjadi fanatik dan militan.

Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat guna membina umat sehingga memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan terbuka. Peran ini sejatinya dapat dimainkan ormas seperti Muhammadiyah dan NU yang telah teruji menjalankan tugas sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar.

JALAN TENGAH PEMIKIRAN ISLAM

Diakui atau tidak, wajah Islam akhir-akhir ini telah diwarnai perdebatan dan persaingan di antara kelompok Islam fundamentalis dan Islam liberal. Fenomena tersebut hampir merata di semua kota besar di Indonesia. Harus diakui bahwa fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam tradisi pemikiran keagamaan di Indonesia. Seperti dikatakan Charles Kurzman dalam *Liberal Islam: A Sourcebook* (1998) bahwa pergumulan kelompok Islam fundamentalis versus Islam liberal telah terjadi sejak 1970-an. Pada saat itu, Nurcholish Madjid, salah seorang tokoh sentral pembaharuan pemikiran Islam, telah terlibat perdebatan sengit dengan kelompok Islam fundamentalis.

Tengoklah beberapa gagasan segar Cak Nur tentang sekularisasi, Islam yes, partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (inklusivisme), telah menjadi perdebatan di kalangan umat Islam saat itu. Karena kontribusi Cak Nur yang denikian penting dalam pembaharuan pemikiran keislaman, kelompok Islam liberal menjadikannya sebagai Bapak Islam Liberal. Meski Cak Nur tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal dalam keseluruhan karyanya, tetapi melihat substansi pemikiran yang dikembangkan tampaknya figur Cak Nur sangat layak dijadikan rujukan kelompok Islam liberal.

Seperti kita ketahui, gagasan Cak Nur kemudian banyak dirujuk oleh beberapa kelompok dari kalangan muda Islam liberal. Kelompok yang dimaksud di antaranya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) di NU dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) di Muhammadiyah. Bahkan dengan dukungan

media, JIL dan JIMM telah memainkan peran cukup penting dalam dialektika pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Secara kontinyu mereka telah mewacanakan beberapa tema pokok Islam liberal, seperti demokrasi, hubungan agama dan negara, pluralisme, hak-hak perempuan, dan kebebasan berpikir. Jika dicermati tema-tema tersebut sesungguhnya berpijak pada kebebasan berpikir. Melalui kebebasan berpikir inilah corak berpikir rasional sebagaimana tampak dalam ajaran tentang pentingnya ijtihad dapat ditumbuhkembangkan.

Sementara kelompok Islam fundamentalis melalui beberapa tokoh dan jaringan institusinya juga tidak mau kalah. Mereka terus mengampanyekan penolakan terhadap gagasan kelompok Islam liberal. Menurut Dekmejian dalam *Islamic Revival* (1988) dikatakan bahwa meski kelompok Islam fundamentalis memiliki banyak kelompok, tetapi secara umum persoalan yang diwacanakan kelompok ini meliputi: (1) Ajaran yang menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal kompatibel dan dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dengan doktrin ini berarti pemisahan agama dan urusan dunia (misalnya saja negara) adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan (*inconceivable*). Bagi kelompok Islam fundamentalis, Islam itu meliputi pengertian agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*).

Kedua, anjuran untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan dasar ini berarti umat Islam harus kembali menengok praktek ajaran Islam periode awal dan memurnikan ajarannya untuk mencapai keselamatan hidup; (3) Ajaran tentang puritanisme dan keadilan sosial (*puritanism and social justice*); (4) Ajaran tentang kedaulatan hanya ada pada Allah dan kekuasaan tunduk pada syari'ah (*Allah's sovereignty and the rule syari'ah*); (5) jihad sebagai sarana perjuangan untuk mencapai tujuan. Kelima doktrin ini dapat ditemukan dalam berbagai kelompok Islam fundamentalis.

Kelompok Islam fundamentalis juga terus berusaha meletakkan pengaruh. Dengan didorong oleh keinginan keluar dari krisis yang menyeluruh (*comprehensiveness*) di segala bidang; sosial-ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, dan militer, kelompok ini berusaha bangkit. Krisis multidimensi tersebut telah menghadirkan semangat baru. Seiring dengan meningkatnya

peran kelompok Islam fundamentalis itulah, kelompok Islam liberal kurang dapat memberikan pengaruh. Bahkan kelompok Islam liberal tampak lebih sering menjadi korban ketimbang jadi pemenang. Mereka umumnya menjadi pihak yang tersudutkan. Kenyataan tersebut jelas melahirkan sikap pesimisme pada sebagian kalangan Islam liberal. Maka pada konteks inilah kelompok Islam liberal dapat dikatakan sedang menghadapi kehidupan yang mustahil (*impossible life*).

Selanjutnya, Dekmejian (1988), seorang pakar kajian tentang gerakan Islam (*Islamic movement*) menjelaskan tiga sifat utama Islam fundamentalis, meliputi: merata (*pervasiveness*), memiliki banyak pusat (*polycentrism*), dan gerakannya dilakukan secara terus-menerus (*persistence*). Seperti dapat kita amati, gerakan Islam fundamentalis yang menonjolkan simbol-simbol identitas keislaman merupakan fenomena yang merata di hampir semua komunitas Islam. Bahkan gerakan ini dapat dikatakan bersifat *trans-nasional*, artinya menembus batas-batas wilayah negara. Situasi demikian dapat diamati di negara-negara, tidak peduli apakah peta kekuatan umat Islam di negara tersebut mayoritas atau minoritas.

Sementara karakter *polycentrism* berarti bahwa dalam rangka memperjuangkan ideologinya, kelompok Islam fundamentalis menggunakan banyak pusat, masing-masing bertumpu pada seorang pemimpin kharismatik. Anehnya, meski secara umum yang diperjuangkan relatif sama, tetapi di antara mereka tidak saling berhubungan secara organisatoris. Fenomena ini dapat diamati dari berbagai organisasi yang dapat dikelompokkan dalam Islam fundamentalis, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Islamiyah (JI), Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berkaitan dengan karakter *polycentrism* ini peranan pemimpin lokal menjadi sangat menonjol dalam melakukan rekrutmen dan indoktrinasi terhadap anggota baru untuk mendukung perjuangan mereka.

Sementara karakter *persistence* dari Islam fundamentalis tampak dalam usaha tokoh-tokoh dan para pengikutnya yang tidak pernah mengenal kata lelah. Mereka akan terus memperjuangkan keyakinannya. Bahkan dalam tingkat tertentu perjuangan tersebut dilakukan dengan cara radikal dan reaksioner. Di

sinilah tampak ada kecenderungan militanisme yang luar biasa dari gerakan tersebut. Harus diakui, memang tidak semua kelompok tersebut melakukan protes sosial dengan cara kekerasan. Tetapi, protes dengan melibatkan massa dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus setidaknya telah menunjukkan betapa kelompok-kelompok tersebut bersifat sangat reaksioner dalam merespon situasi yang berkembang.

Sesuatu yang barangkali cukup menggelitik dipertanyakan adalah apakah kelompok Islam fundamentalis yang sebagian besar bersifat radikal-reaksioner tersebut akan terus mengambil peran? Jawabannya tentu tidak mudah. Tetapi melihat *trend* yang berkembang akhir-akhir ini besar kemungkinan kelompok ini akan tetap memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Apalagi jika melihat kecenderungan Islam fundamentalis yang kini sedang mengalami peningkatan *syahwat* politik.

Jika ini yang terjadi, menjadi benar hipotesis William Liddle, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, yang pernah menyatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis. Sebaliknya, semakin otoriter suatu negara, semakin kecil pula kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis.

Agar dialektika Islam fundamentalis dan Islam liberal secara diametral tidak senantiasa berhadap-hadapan, kiranya penting dicari jalan tengah yang kira-kira dapat dikatakan sebagai jalan ketiga pemikiran Islam. Langkah ini penting ditempuh sebab pada masing-masing kelompok jelas memiliki kelemahan mendasar. Misalnya, Islam fundamentalis yang kerap kali menampilkan wajah pemikiran yang khas radikal dan reaksioner pada tingkat tertentu jelas kurang kondusif jika dihadapkan pada persoalan-persoalan keislaman era kontemporer.

Sementara kelompok Islam liberal, dengan meminjam istilah Kuntowijoyo (2001) juga masih sering tampak mengalami gejala "sawan kekanak-kanakan." Fenomena kekanak-kanakan biasanya berupa cara berpikir "sok liberal" atau "kekiri-kirian (sok radikal)". Bahkan jika mengamati pemikiran yang diwacanakan seringkali kurang mendalam, parsial, terputus dari khazanah masa lampau, dan bukan sesuatu yang baru sama sekali.

Sebagai upaya untuk merintis jangam tengah pemikiran Islam tersebut, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganggap pemikiran kelompok Islam fundamentalis dan Islam liberal sebagai bagian khazanah yang tidak perlu disakralkan. Maka berkaitan dengan hal ini penting dikemukakan pendapat Mohammad Arkoun yang pernah menyatakan agar jangan sampai terjadi pensakralan pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniyy*). Dengan menempatkan produk pemikiran seseorang sebagai khazanah berarti akan menghilangkan sebagian "beban" sejarah sehingga kita dapat secara lebih kritis memberikan pendapat.

Langkah kedua yang menurut saya penting adalah dengan menampilkan corak pemikiran Islam yang mampu menggabungkan aspek modernitas dan tradisionalitas. Dalam bahasa pesantren terdapat ungkapan bijak; *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Dengan cara ini berarti modernitas harus juga tetap mengakomodasi aspek tradisionalitas. Sikap ini penting agar pembaruan pemikiran keislaman memiliki kesinambungan sejarah dan tidak tercerabut dari akar tradisi yang ada pada masa lalu. Melalui cara inilah kita dapat keluar dari dua ekstrimitas, fundamentalis dan liberalis.

REVITALISASI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Tanggal 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah Muhammadiyah genap berusia satu abad berdasarkan kalender qamariah. Sebagai gerakan sosial keagamaan, meminjam istilah Nurcholish Madjid (Cak Nur), Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi Islam modern yang terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi mana pun di dunia Islam. Dilihat dari kelebagaannya, Muhammadiyah juga sangat mengesankan, lebih dari organisasi Islam di mana pun dan kapan pun. Karena itu, menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan Islam, tidak saja secara nasional melainkan juga internasional.

Selain menerima pujian dan menjadi harapan, Muhammadiyah juga banyak dikritik. Misalnya, terkaitan keabsahan label sebagai gerakan pembaru (*tajdid*). Masyarakat umumnya menerima begitu saja (*taken for granted*) labelisasi Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*. Hampir tidak ada yang mempersoalkannya karena Muhammadiyah senantiasa mengaitkan gerakan dan pemikirannya pada para pembaru Muslim seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridla.

Padahal, menurut Azyumardi Azra dan Djohan Efendi, Muhammadiyah dalam bidang pemikiran keagamaan lebih tepat disebut gerakan salafiyah, neo-salafiyah, dan bahkan ortodoks. Hal ini dikarenakan tekanan ideologi gerakan Muhammadiyah adalah menghendaki pemurnian (purifikasi) di bidang aqidah dan ibadah. Cerminan dari usaha purifikasi Muhammadiyah

tampak sangat menonjol dalam kegiatan dakwah untuk memberantas takhayul, bid'ah, dan churafat (anti-TBC).

Pada level praksis Muhammadiyah sesungguhnya layak disebut gerakan pembaru. Melalui teologi al-Ma'un (*al-Ma'unisme*) Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal shaleh. Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip *a faith with action*. Dalam bahasa warga Muhammadiyah prinsip ini dikenal dengan dakwah *bil hal* (menjajak dengan amalan dan tindakan konkrit).

Muhammadiyah juga mempraktikkan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, berdisiplin, bekerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi. Khusus mengenai ajaran tanggung jawab pada organisasi ini barang kali dapat disebut sebagai yang orisinal dari Muhammadiyah. Sebab, pada konteks itu bentuk pertanggungjawaban umumnya dilakukan secara individual. Berkat beberapa ajaran tersebut Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari umat sehingga mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.

Tetapi, justru dengan amal usaha yang semakin banyak Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya, energi nyaris habis hanya untuk kegiatan rutin mengurus amal usaha. Meminjam istilah beberapa intelektual muda, Muhammadiyah tampak seperti gajah gemuk yang semakin lamban dalam merespon tantangan zaman. Akibatnya, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa sangat kurang.

Pada konteks inilah Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi ideologi agar mampu menampilkan diri sebagai gerakan amal sekaligus gerakan ilmu. Buya Syafii Maarif merupakan salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan agar Muhammadiyah mampu menyandingkan gerakan praksisme dan gerakan intelektualisme. Menampilkan diri sebagai gerakan intelektual, di samping gerakan praksis, akan sangat menentukan arah dan perjuangan Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua. Intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa, terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan

an keberagaman di Indonesia. Sebab, diakui atau tidak wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah diwarnai persaingan yang sangat tajam kelompok Islam fundamentalis dan liberalis.

Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Meski beberapa identitas ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, namun menyederhanakan Islam dengan hal-hal yang bersifat kategoris seperti itu jelas melenceng dari substansi ajaran Islam.

Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Penerjemahan kalimat *thayyibah*; *la ilaha illallah* dengan tiada tuhan selain Tuhan, merupakan salah satu contoh kreasi para pembaru Muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan.

Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran Islam yang senantiasa memutlakkan kebenaran kelompoknya, Muhammadiyah sesungguhnya dapat menampilkan diri sebagai mediator dengan menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran. Yang perlu pada berbagai mazhab pemikiran adalah mengajak untuk bergerak ke posisi tengah. Ajakan ini akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran. Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan maka pada saatnya kita akan menyaksikan wajah Islam Indonesia yang sangat moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman.

Jika Muhammadiyah berhasil menjadi mediator yang baik bagi berbagai mazhab pemikiran keagamaan maka hal ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan Islam Indonesia. Untuk kepentingan ini jelas dibutuhkan seperangkat ilmu. Karena itulah penting dilakukan revitalisasi ideologi Muhammadiyah agar mampu menjadi gerakan praksis dan gerakan intelektual.

MENEGUIKAN SEMANGAT MODERNISASI DAN PURIFIKASI

Mulai 1-4 April 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-27. Acara Munas dipusatkan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai agenda resmi organisasi, Munas kali ini layak ditunggu bukan hanya oleh keluarga besar Muhammadiyah, melainkan juga masyarakat luas. Sebab, akhir-akhir ini MTT menjadi perbincangan dikarenakan telah memutuskan beberapa fatwa keagamaan yang kontroversial. Yang paling heboh tentu saja fatwa hukum merokok yang dipublikasikan secara luas oleh media massa sejak 8 Maret 2010. Secara tegas, MTT berpandangan bahwa hukum merokok adalah haram karena termasuk perbuatan yang *khabaits* (buruk).

Fatwa tersebut jelas mengundang perdebatan karena mayoritas umat Islam memahami bahwa hukum merokok adalah makruh. Bahkan keputusan resmi Muhammadiyah sebelumnya juga menyatakan hukum merokok adalah *ibahah* (boleh). Belum reda fatwa hukum merokok, MTT menggulirkan wacana waktu shalat Subuh yang dianggap terlalu pagi. Dengan berseloroh, Prof. Syamsul Anwar, Ketua MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa jika waktu shalat Subuh diputuskan agak lebih siang maka akan semakin banyak orang yang menuaikannya. Dua topik tersebut jelas akan menjadi pusat perbincangan peserta Munas. Di samping itu, beberapa persoalan sosial keagamaan yang aktual seperti penentuan arah kiblat, infotain-

men, perbankan, kesehatan dan kedokteran, juga layak dibicarakan.

Masyarakat pasti akan bertanya, persoalan sosial keagamaan apa lagi yang akan difatwakan oleh MTT. Hal ini karena Muhammadiyah sudah terlanjur dikenal masyarakat sebagai organisasi modernis. Layaknya organisasi modernis maka segala persoalan sosial keagamaan pasti akan diperbincangkan secara interkoneksi, dengan mempertimbangkan banyak aspek kehidupan. Pada konteks inilah Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan kiprah MTT untuk mendorong terjadinya dinamika pembaruan pemikiran bidang sosial keagamaan.

Sebagai pembantu pimpinan terasa sekali kiprah MTT kalah bersinar dengan majelis lain, terutama yang membidangi amal usaha. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Muhammadiyah memang layak disebut pembaru di bidang amal usaha, tapi tidak untuk pemikiran keagamaan. Bahkan dalam bidang keagamaan Muhammadiyah lebih menampilkan diri sebagai gerakan salafiyah. Ciri utama gerakan salafiyah adalah adanya penekanan pada doktrin kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (*al-ruju' ilal Qur'an wassunnah*).

Tetapi, seperti dikatakan Mitsuo Nakamura (1976), Muhammadiyah adalah organisasi yang berwajah banyak (*dhu wujuh*). Dikatakannya, Muhammadiyah itu tampak eksklusif jika dilihat dari luar meski sesungguhnya sangat terbuka dan toleran. Dalam bidang budaya, Muhammadiyah dikesankan anti kebudayaan, meski sesungguhnya telah banyak memasukkan nilai-nilai Jawa. Muhammadiyah juga tampak sebagai organisasi yang sangat disiplin, meski tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran setiap individu.

Kesan Muhammadiyah berwajah banyak ini muncul dikarenakan adanya usaha aktivisnya untuk mensintesakan ajaran modernisme Muhammad Abduh dan konservatisme Rasyid Ridla, yang dapat diamati melalui pragmatisme KH Ahmad Dahlan dan formalisme KH Mas Mansur. Maka, tidak mengherankan jika persoalan modernisasi dan purifikasi selalu berdialektis sepanjang sejarah perkembangan Muhammadiyah. Persoalannya, ada kesan bahwa Muhammadiyah kurang mampu mem-

posisikan modernisme dan puritanisme secara proporsional. Se-jauh ini modernisme Muhammadiyah dalam ranah muamalah duniawiyah telah menunjukkan hasil yang memuaskan melalui gerakan amal usaha. Bahkan dalam urusan pengelolaan amal usaha, Muhammadiyah layak dijadikan teladan organisasi mana pun. Muhammadiyah berhasil menunjukkan prestasi yang luar biasa sebagai gerakan amal melalui kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Di luar prestasi mengembangkan amal usaha, Muhammadiyah banyak dikritik karena dianggap sangat puritan. Semangat *al-ruju' ilal Qur'an wassunnah* yang diterjemahkan aktivisinya seringkali mengabaikan khazanah intelektual Islam yang demikian banyak. Pertanyaannya terletak pada bagaimana kita kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (*kayfa narja'*). Tampaknya, dalam kaitan dengan persoalan ini Muhammadiyah masih menghadapi persoalan epistemologis dan metodologis sebagai kerangka untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Modernisasi dan Purifikasi

Sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*) Muhammadiyah tampak membatasi diri pada wilayah muamalah duniawiyah. Sementara untuk urusan akidah dan ibadah, Muhammadiyah melakukan purifikasi (pemurnian). Dalam hal akidah dan ibadah, Muhammadiyah merasa sudah cukup dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, Muhammadiyah akan bersikap tegas terhadap segala upaya yang berkaitan dengan modernisasi di bidang akidah dan ibadah.

Jika terjadi *tajdid* di bidang akidah dan ibadah biasanya Muhammadiyah menghukumi bid'ah. Sementara dalam urusan muamalah dan duniawiyah, Muhammadiyah berprinsip; *antum a'lamu biumuridunyakum* (kamu lebih mengetahui terhadap urusan duniamu). Hal ini berarti sangat terbuka peluang untuk melakukan *tajdid* dalam urusan sosial kemasyarakatan.

Sangat disayangkan usaha Muhammadiyah menyeimbangkan modernisme dan puritanisme belum sepenuhnya berhasil. Ada kesan, puritanisme di Muhammadiyah terlalu menonjol. Kesan ini jelas bukan kesimpulan yang tiba-tiba. Jauh hari, James

L. Peacock (1986) telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah memang sangat menonjol sebagai gerakan purifikasi.

Kesan demikian juga dikemukakan *insider* Muhammadiyah seperti Moeslim Abdurrahman. Kritik Moeslim didasarkan pada sikap Muhammadiyah yang dianggap kurang berempati terhadap seni dan budaya lokal. Semestinya, persoalan seni dan budaya lokal termasuk dalam wilayah muamalah duniawiyah. Tetapi, Muhammadiyah justru melakukan purifikasi (*tajrid*) terhadap seni dan budaya lokal. Akibat purifikasi dalam ranah muamalah duniawiyah ini Muhammadiyah terkesan anti seni dan budaya lokal. Bahkan di kalangan aktivis muncul guyonan, bahwa satu-satunya seni yang dimiliki Muhammadiyah adalah seni bela diri tapak suci.

Beberapa kritik tersebut kemudian direspon oleh pimpinan Muhammadiyah yang ditunjukkan melalui keinginan untuk menggunakan strategi baru dalam berdakwah. Strategi baru ini berkeinginan untuk mencoba melihat budaya lokal dari dalam (*from within*). Hasilnya, disepakati untuk mengubah orientasi strategi dakwah dengan menjadikan budaya sebagai media. Maka, di kalangan aktivis Muhammadiyah kemudian mengenal konsep dakwah kultural. Strategi dakwah kultural jelas dimaksudkan agar dakwah Muhammadiyah memiliki jangkauan yang lebih luas. Dengan demikian maka kesan bahwa Muhammadiyah hanya cocok bagi warga perkotaan menjadi terbantahkan.

Tantangan yang kini dihadapi MTT adalah menyeimbangkan modernisasi dan purifikasi (*al-tawazun bayna tajdid wa tajrid*). Ini berarti Muhammadiyah harus terus meneguhkan diri sebagai gerakan pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Sementara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah harus dilakukan purifikasi. Yang penting, jangan sampai terjadi kesalahan dalam meletakkan program modernisasi dan purifikasi.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KERUKUNAN UMAT

Pada tanggal 27 Maret 2006, bertempat di Hotel Inna Simpang, pernah diadakan seminar nasional dengan tema yang menarik; *Peran Perempuan dalam Kerukunan Umat Beragama*. Seminar ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Seminar ini diikuti oleh mayoritas kaum perempuan lintas agama, aktivis LSM, profesional, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Selain menghasilkan beberapa rumusan penting mengenai peranan perempuan dalam kerukunan hidup umat beragama, seminar ini menyepakati terbentuknya sebuah forum yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Perempuan Lintas Agama (FKPLA). Bagi bola salju (*snowball*), forum ini diharapkan dapat menyebar hingga terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Forum ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga serupa yang sebelumnya telah eksis, seperti Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Kegiatan FKUB yang dilaksanakan sejak 1998 telah mendapat *support* dana dari APBD dan kini memiliki jaringan yang kuat hingga ke seluruh daerah kabupaten/kota.

Persoalan kerukunan hidup umat beragama memang telah menjadi perhatian yang utama dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini dapat dimaklumi, sebab kekerasan sosial seringkali berawal dari adanya pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Kekerasan sosial tersebut dapat melibatkan antarpeme-

luk agama, atau bahkan antaraliran/mazhab dalam satu agama.

Apalagi provinsi Jawa Timur dikenal sebagai daerah dengan tingkat pluralitas yang sangat kompleks. Misalnya saja, jika dilihat secara vertikal pluralitas itu dapat diamati dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Sementara secara horizontal pluralitas masyarakat terjadi akibat perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografi, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Pluralitas masyarakat Jawa Timur baik secara vertikal maupun horizontal tentu dapat menjadi sumber persoalan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik sosial.

Perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sebenarnya dapat dipandang sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009, di antaranya menyebutkan pentingnya program peningkatan kerukunan umat beragama. Persoalannya yang berkembang kemudian adalah di manakah relevansi program kerukunan umat beragama dengan kaum perempuan?

Memperbincangkan peran kaum perempuan dalam usaha menciptakan kerukunan umat beragama telah memunculkan banyak persoalan yang menarik. Misalnya saja ditanyakan; mengapa perempuan yang dijadikan subyek dalam membicarakan kerukunan antarumat beragama. Bukankah perempuan selama ini sering ditampilkan dalam posisi yang termarginalkan, tersubordinasi, dan inferior, jika dibandingkan dengan laki-laki. Sudut pandang yang *patriarkhi* seperti ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, konstruk kaum perempuan dalam kaitan dengan usaha membangun relasi antarumat beragama ternyata perlu diberdayakan. Perempuan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki diyakini dapat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Dengan mengambil peran seperti ini, berarti perempuan akan memainkan peranan di ranah publik (*public sphere*).

Di sini aktivitas perempuan dapat didorong sedikit demi sedikit untuk tidak hanya berkiprah di wilayah domestik (*domestic sphere*) dalam rumah tangga, melainkan dapat mengambil peran di bidang

sosial, politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Apalagi kaum perempuan telah diberikan anugerah oleh Allah berupa struktur biologis dan psikologis yang berbeda dengan kaum laki-laki. Bermodal dari kelebihan yang dimiliki inilah diharapkan dapat membantu tugas-tugas kaum perempuan. Bahkan dengan kelembutannya, kaum perempuan dapat dikatakan memiliki kekuatan lunak (*soft power*) yang sangat dasyat pengaruhnya.

Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, memaparkan argumentasi tentang kelebihan yang dimiliki kaum perempuan jika dijadikan pendorong kerukunan hidup antarumat beragama. *Pertama*, perempuan relatif lebih banyak berada dalam urusan domestik rumah tangga sehingga memiliki waktu dan kesempatan untuk turut serta mewarnai pembentukan karakter keluarga. Di sini seorang ibu akan sangat menentukan perannya dalam membentuk sikap hidup yang demokratis bagi anak-anaknya, termasuk dalam urusan kehidupan beragama.

Kedua, bahwa telah terbukti kaum perempuan memiliki kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi kaum laki-laki. Di sini kaum perempuan dapat menjadi pusat perhatian bagi lawan jenisnya. Faktanya, dalam banyak kegiatan periklanan selalu saja kaum perempuan digunakan jasanya sebagai model. *Ketiga*, dalam kenyataannya total populasi kaum perempuan jauh melebihi kaum laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai sensus penduduk.

Keempat, bahwa sedikit sekali kaum perempuan yang berpikir individualistik. Mereka umumnya memiliki sikap hidup yang sangat komunalistik. Perempuan biasanya sangat mudah dikenali melalui keterlibatannya dalam perubahan mode sesuai dengan perkembangan *style* dan *fashion*. Meski tidak saling mengenal, perempuan sesungguhnya telah berkenalan dan saling menyapa melalui *fashion* tersebut. Kaum perempuan juga memiliki tabiat senang berkumpul dan berorganisasi.

Kelima, bahwa sekarang ini telah terjadi perkembangan sikap hidup yang mendorong terwujudnya egalitarianisme dan kesetaraan peran kaum perempuan dan laki-laki. Dalam posisi seperti ini kaum perempuan juga memiliki peranan yang penting untuk ikut serta menentukan perubahan sosial. Beberapa alasan inilah yang barangkali dapat menjelaskan pentingnya melibatkan kaum perempuan dalam program kerukunan hidup umat beragama.

Sebagai subyek dalam kerukunan hidup antar umat beragama, peranan kaum perempuan dapat diberdayakan melalui beberapa kegiatan, misalnya dialog antariman, dialog budaya, resolusi konflik (*conflict resolution*), aksi sosial, dan upaya membangun keluarga berwawasan kerukunan. Barangkali kegiatan dialog antariman hanya akan diikuti oleh kelompok elit dari masing-masing agama. Tetapi, untuk kegiatan dialog budaya dan aksi sosial sesungguhnya dapat dilakukan secara massif. Apalagi jika dalam kegiatan aksi sosial itu dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, bantuan untuk anak yatim dan lansia, pengentasan kemiskinan, dan persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya.

Kegiatan aksi sosial juga dapat berupa pemberian advokasi dan terapi psikologis kepada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sering dilakukan kelompok LSM perempuan seperti halnya WWC (*Women Crisis Center*). Tentu program-program seperti ini manfaatnya akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas jika dilakukan kepada kaum perempuan tanpa memandang latar belakang sosial budaya, termasuk di dalamnya agama. Di samping itu, perempuan juga dapat mengambil peranan sebagai bagian dari upaya resolusi konflik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Di sinilah arti penting kehadiran FKPLA. Agar forum yang baru terbentuk ini tidak hanya formalitas belaka, maka perlu segera dirumuskan program kerja yang berkelanjutan (*sustainable*), bukan program yang *sporadis*. Masih banyak persoalan sosial di sekitar kita, terutama yang berkenaan dengan problem kerukunan hidup umat beragama, yang membutuhkan kehadiran sentuhan dan kelembutan hati kaum perempuan.

MEMERANGI IDEOLOGI TERORISME

Setiap gerakan pasti memiliki ideologi yang dijadikan nilai-nilai dasar dalam berjuang. Sebagai manifestasi gerakan sosial keagamaan yang bercorak radikal, terorisme juga memiliki ideologi yang senantiasa diperjuangkan.

Pada konteks inilah perhatian kita harus diarahkan untuk mencermati ideologi yang diperjuangkan terorisme. Ini penting karena terorisme terus menunjukkan perkembangan dengan merekrut banyak kalangan, terutama pemuda. Jaringan terorisme menunjukkan betapa pemuda menjadi sasaran indoktrinasi. Mereka dibidik karena dianggap labil dan sedang mencari jati diri sehingga berpotensi untuk dijadikan kader.

Melalui para pemuda inilah ideologi terorisme terus disemai sehingga gerakan terorisme sulit dilumpuhkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa aksi terorisme belum berakhir (SINDO, 10/9/12). Aksi terorisme memang tidak akan pernah berakhir sepanjang ideologi geraknya tidak diperangi. Karena terorisme terus bermetamorfosa, hal yang perlu dilakukan adalah melawan ideologinya.

Ikhtiar ini harus melibatkan seluruh elemen *civil society* dan dilakukan tanpa kenal lelah. Sebagai langkah awal, usaha melawan ideologi terorisme harus dimulai dengan memahami faktor yang menyebabkan kemunculannya. Di samping itu perlu pula dipahami karakter gerakan terorisme. Hal ini jelas bukan pekerjaan mudah karena terorisme telah menjadi fenomena sosial keagamaan yang berakar kuat.

Faktor munculnya terorisme dapat dijelaskan dengan tiga teori. *Pertama*, melalui teori struktural yang mengaitkan terorisme dengan

sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. *Kedua*, melalui teori psikologi yang menjelaskan motivasi seseorang hingga tertarik untuk bergabung dengan organisasi teroris. Bahkan dengan motivasi tinggi mereka menyiapkan diri sebagai “pengantin” untuk melakukan bom bunuh diri. *Ketiga*, melalui teori pilihan rasional yang menjelaskan adanya kalkulasi untung-rugi yang dijadikan pertimbangan pelaku terorisme.

Penjelasan teori struktural mengaitkan latar belakang terorisme dengan dua faktor. *Pertama*, faktor prakondisi, berupa penyebab tidak langsung terorisme. Faktor ini berupa akumulasi kekecewaan kelompok teroris, terutama yang berkaitan dengan kegagalan dalam merealisasikan cita-cita politik Islam. Ini dapat dipahami karena gerakan keagamaan yang bercorak radikal selalu memiliki agenda di bidang politik.

Watak politik gerakan radikal dapat diamati melalui perjuangan tokoh-tokohnya dalam konteks kekuasaan seperti keinginan mendirikan negara Islam, formalisasi syariah, serta memahami agama dan politik sebagai satu kesatuan (*din wa al-dawlah*). Hanya saja, cita-cita politik ini baru sebatas imajinasi karena belum berhasil untuk diwujudkan. Karena itulah Oliver Roy (1994) menyebut cita-cita kelompok Islam politik ini sebagai Islamic political imagination (imajinasi politik Islam).

Kedua, faktor pemercepat (*triggering factor*), yaitu pemicu langsung gerakan terorisme. Termasuk dalam faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial ekonomi, tiadanya penegakan hukum (*law enforcement*), tersumbatnya partisipasi politik sehingga masyarakat mengalami tuna kuasa (*powerless*), dan tersedianya persenjataan. Adapun teori psikologi menjelaskan aspek kejiwaan pelaku teroris, mulai dari rekrutmen, pengenalan, kepribadian, penanaman ideologi, dan motivasi anggotanya.

Melalui penjelasan psikologi dapat diketahui latar belakang sosial pelaku teroris. Misalnya, ditemukan fakta bahwa pelaku terorisme adalah mereka yang mengalami keterasingan sosial. Kemudian teori pilihan rasional menjelaskan bahwa terorisme dilakukan dengan pertimbangan untung-rugi. Melalui teori ini diperoleh penjelasan mengenai faktor *cost and benefit* yang menjadi pertimbangan pelaku.

Misalnya, ditemukan fakta bahwa pelaku bom bunuh diri

adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Fakta ini menunjukkan sesungguhnya ada alasan ekonomi di balik keberanian mereka melakukan teror. Ada juga individu yang tergoda masuk jaringan terorisme dengan pertimbangan keagamaan. Mereka berharap mati syahid dan masuk surga. Spirit keagamaan ini terbangun berdasarkan pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam mengenai jihad.

Padahal, jihad tidak hanya berkaitan dengan perjuangan fisik. Buya Sutan Mansur, mantan Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahkan memaknai jihad dengan “berkerja sepenuh hati”. Pemaknaan ini menarik karena sama sekali tidak menyinggung kata perang.

Dengan salah satu cirinya yang berupa *persistence*, gerakan radikal bergerak terus-menerus, pantang menyerah, dan berani mengambil risiko apa pun asal tujuan tercapai. Dengan karakter ini maka tokoh terorisme diharuskan merekrut kader yang akan melanjutkan perjuangannya.

Melalui cara ini ideologi terorisme terus ditanamkan sehingga mengakar kuat dalam diri pengikutnya. Berkaitan dengan keinginan berjihad untuk melawan ideologi terorisme, maka yang harus dilakukan adalah tidak memberikan kesempatan terhadap munculnya tindakan radikal. Dan, keinginan ini akan tercapai jika faktor-faktor yang menjadi pemicu terorisme diminimalkan.

Termasuk dalam kategori faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kepentingan elit. Dalam kaitan ini, penanganan kasus korupsi, terutama yang menjadi perhatian publik, harus segera diselesaikan dengan menjunjung asas keadilan.

Jika ini tidak dilakukan, maka persoalan ketidakadilan dalam penanganan korupsi juga sangat berpotensi untuk memicu aksi teroris. Hal ini penting dijadikan atensi pemerintah dan elite politik agar bahaya laten terorisme dapat dicegah.

MENJAGA SPIRIT INTELEKTUALISME KANG MOESLIM

Muhammadiyah telah kehilangan salah satu kader terbaiknya. Dia adalah Doktor Moeslim Abdurrahman. Tokoh asal Lamongan yang akrab dipanggil Kang Moeslim ini wafat dalam usia 64 tahun pada 6 Juli 2012 karena serangan jantung. Rasanya bukan hanya Muhammadiyah yang kehilangan, karena Moeslim selama ini dikenal sebagai intelektual yang sangat dekat dengan kalangan NU dan tokoh lintas agama.

Kedekatan ini tidak dapat dilepaskan dari buah pikiran Moeslim yang tiada henti menyuarakan pentingnya usaha untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme. Bagi Moeslim, pluralitas budaya, etnis, dan agama, merupakan sebuah keniscayaan. Pluralitas bahkan dipandang sebagai bagian dari rencana Tuhan (*sunmatullah*). Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali harus menyiapkan diri untuk hidup dalam suasana saling menghargai di tengah keragaman.

Di internal Muhammadiyah, Moeslim bersama dengan Buya Syafii Maafif, dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan kaum muda yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Dalam banyak kesempatan Moeslim bahkan menjadi pembela nomor wahid terhadap berbagai kritik yang dialamatkan pada JIMM. Itu dilakukan karena dalam pandangan Moeslim, kaum muda yang berpikiran progresif dapat dijadikan sumber harapan bagi pembaruan (*tajdid*) pemikiran Muhammadiyah di masa mendatang.

Untuk merealisasikan dukungannya, Moeslim beberapa kali menyelenggarakan workshop pemikiran Islam yang diikuti kaum muda Muhammadiyah. Bahkan Moeslim pun mendirikan

Al-Maun Foundation, tempat berhimpunnya kaum muda Muhammadiyah yang berpikiran progresif. Ikhtiar Moeslim untuk menumbuhkan intelektualisme itu tentu harus terus disemai.

Sejak awal 2000 gairah intelektualisme di kalangan kaum muda Muhammadiyah mulai menggeliat. Itu terjadi seiring dengan munculnya beberapa intelektual muda seperti Abd Rohim Ghozali, Abd Mu'thi, Zuly Qodir, Sukidi, Ahmad Najib Burhani, Zakiyuddin Baidhawiy, Ahmad Fuad Fanani, dan Pradana Boy. Mereka telah menunjukkan eksistensinya sebagai energi baru Muhammadiyah. Mereka telah menulis beberapa buku dan artikel di banyak media. Mereka juga mewacanakan berbagai tema pemikiran keislaman era kontemporer. Bahkan tidak jarang beberapa tulisan mereka juga memberikan kritik konstruktif terhadap gejala konservatisme di Muhammadiyah.

Karena itu tidak mengherankan jika beberapa pemikiran sosial keagamaan mereka telah menjadi perdebatan publik. Tentu saja kemunculan kaum muda ini patut disyukuri karena berarti bahwa spirit *tajdid* yang dikatakan telah mulai redup seperti terlahir kembali. Eksistensi kaum muda yang progresif ini seakan meneguhkan kembali label Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*.

Tetapi, harus diakui bahwa tidak semua warga Muhammadiyah menunjukkan apresiasi yang positif terhadap kiprah intelektual muda. Wacana kaum muda Muhammadiyah yang progresif dianggap telah dihinggapi virus "sawan kekanak-kanakan", seperti sok liberal, sok radikal, dan kekiri-kirian. Beberapa tema yang diwacanakan seperti Islam liberal, Islam proletar, Islam kiri, Islam borjuis, dan pendidikan yang membebaskan model Paulo Freire, dikritik habis.

Dalam situasi ini, Moeslim hadir dan memberikan pembelaan. Bersama Buya Syafii, Moeslim berpesan agar warga Muhammadiyah tidak cepet marah dan menuduh sesat ketika membaca pikiran kaum muda. Menurut Moeslim, selama mereka masih menjalankan prinsip ajaran agama seperti shalat dan puasa, maka mereka tidak perlu dimusuhi. Pembelaan Moeslim ini menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah intelektual bagi berbagai mazhab pemikiran (*school of thoughts*).

Moeslim patut bersyukur karena Din Syamsuddin, Ketua Umum

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga memberikan dukungan terhadap kiprah kaum muda. Dalam beberapa kesempatan Din mengakui bahwa sering ada pertanyaan mengenai eksistensi komunitas yang berpandangan liberal di Muhammadiyah. Pertanyaan ini pun dijawab dengan menyatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Seperti, ada yang bilang mereka sudah tidak lagi beragama. Sebab, kenyataannya mereka masih shalat. Mereka juga masih berpuasa dan bahkan dengan sangat lancar mengutip ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi ketika menyampaikan pandangannya. Karena itu menurut Din, kalau mereka masih shalat, puasa, dan meyakini kebenaran al-Qur'an dan Hadits, maka itu jelas bukan liberal.

Pembelaan Moeslim dan beberapa elit Muhammadiyah terhadap kaum muda yang berpandangan progresif jelas menunjukkan keinginan kuat untuk mendorong agar intelektualisme terus tumbuh dan berkembang. Intelektualisme ini penting ditradisikan untuk mengimbangi kecenderungan praksisme di Muhammadiyah. Sebab, jika watak kepraksisan sebuah organisasi tampak menonjol, maka akan berimplikasi pada kurangnya wawasan. Padahal wawasan mutlak diperlukan untuk memberikan kesadaran menyeluruh pada kegiatan amaliah. Wawasan juga diperlukan sebagai sumber energi bagi pengembangan yang dinamis dan kreatif dari keseluruhan kegiatan amaliah.

Pada konteks inilah penting ditekankan usaha untuk menyeimbangkan watak praksisme dan intelektualisme. Apalagi Muhammadiyah kini telah berusia lebih dari satu abad. Muhammadiyah pun diibaratkan sebagai organisasi yang sudah tua dengan beban yang sangat berat sehingga mungkin mengalami kelambanan dalam merespon berbagai persoalan. Di sinilah dibutuhkan sumber energi, yakni intelektualisme, agar kiprah amal sosial Muhammadiyah tetap eksis.

Akhirnya, selamat jalan Kang Moeslim. Semoga virus intelektualisme yang telah ditularkan pada kaum muda dapat menjadi amal shaleh. Bukankah sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dikatakan Nabi sebagai amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Saya yakin ilmu bermanfaat yang telah diwariskan Kang Moeslim termasuk kategori amal shaleh. *Wallahu a'lam.*

BAGIAN EMPAT
KORUPSI MENGORUPSI
INDONESIA

KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA

Judul tulisan ini meminjam istilah yang digunakan Frans Magnis Suseno ketika menggambarkan praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, praktik korupsi telah begitu rupa mengorupsi Indonesia sehingga mengakibatkan bangsa ini kian rapuh dan terpuruk. Meski satu persatu kasus tindak pidana korupsi berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun yang menyedihkan kasus serupa justru bermunculan.

Ibarat satu kasus berhasil diselesaikan, seribu kasus yang lain menunggu proses pengadilan. Maka, tidak mengherankan jika ada begitu banyak mantan pejabat publik dan pejabat publik aktif dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditangkap dan ditahan akibat melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan kultur korupsi pun mulai menjalar ke NGO berbasis sosial keagamaan. Fenomena ini jelas menunjukkan betapa praktik korupsi telah tumbuh subur di lembaga-lembaga publik.

Kasus Gayus Tambunan (GT), staf golongan III/A di Dirjen Pajak, yang begitu menghebohkan publik bisa jadi ibarat fenomena gunung es. Artinya, meski hanya tampak satu kasus tetapi sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang belum terendus media massa dan publik. Jadi, apa yang dialami GT hanya sekedar contoh praktik makelar kasus (markus) di lembaga publik. Dengan berkedok konsultan pajak, GT mampu mengorganisir berbagai kegiatan yang diduga kuat telah melanggar hukum dan kode etik jabatan.

Yang memprihatinkan, GT berhasil mengembangkan jejaring dengan melibatkan beberapa pejabat Ditjen Pajak dan perwira tinggi di lingkungan Polri. Bahkan jika kasus kasus GT ini

berhasil dijadikan *entry point* untuk mengungkap praktik korupsi maka tidak tertutup kemungkinan akan memakan begitu banyak korban pejabat lintas departemen.

Kasus mafia pajak tersebut juga memberikan pelajaran berharga pada kita bahwa pemberantasan korupsi merupakan usaha jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat dilihat dalam sekejap mata. Apalagi praktik korupsi di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa praktik korupsi telah mengakar kuat dalam seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat pun telah mengenal praktik korupsi dalam berbagai budaya. Dalam konteks budaya yang beragam masyarakat telah menyamakan praktik korupsi dengan beberapa istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, dan uang lelah. Beberapa istilah tersebut sering dijumpai, terutama ketika ada orang yang sedang berperkara. Bahkan ketika ada anggota masyarakat mengurus keperluan di level RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi pun beberapa istilah tersebut acap kali digunakan.

Yang ironis, ternyata budaya korupsi di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan persoalan kehidupan. Bahkan untuk urusan kematian pun seseorang harus menjumpai praktik korupsi. Sekedar gambaran dapat diamati ketika seseorang sedang antri mengurus pembuatan akte kelahiran dan prosesi pemakaman. Bayangkan, dalam urusan yang berkaitan dengan awal dan akhir kehidupan ini seseorang harus bernegosiasi dengan para pelaku tindak korupsi. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa korupsi dalam berbagai modus telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat.

Dalam sudut pandang Lord Acton, apa yang dilakukan GT dan jaringannya termasuk bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dua abad silam, dalam surat yang ditulis pada Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pernah menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dan kekuasaan. Dikatakannya; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini

berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya. Dan, sekali lagi kasus GT telah menunjukkan kebenaran hukum aksiomatis Lord Acton tersebut.

Karena praktik korupsi telah begitu rupa menggrogoti bangsa ini maka semangat memberantas korupsi perlu terus dikobarkan. Para pejuang antikorupsi tidak boleh pesimis hanya karena melihat begitu banyak kasus korupsi. Ini berarti perang melawan korupsi harus tetap menjadi agenda besar bangsa ini. Sebab, korupsi merupakan salah satu penyakit peradaban yang dapat melumpuhkan bangunan sebuah bangsa dan negara. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, agar keinginan untuk memberantas korupsi tercapai maka yang harus dilakukan para pejuang antikorupsi adalah menggunakan strategi dan ilmu yang tepat.

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina pernah menyatakan bahwa memerangi korupsi bukan sebatas menggellorakan gemuruh perlawanan dan pekik antikorupsi. Dikatakannya, memerangi korupsi itu jelas memerlukan ilmu. Bangsa Indonesia harus membasmi praktik korupsi dengan penuh semangat, idealisme, serta ilmu pengetahuan strategis dan sistematis sebagaimana saat para pendiri republik ini menuliskan janji setia agar masyarakat adil dan sejahtera.

Pernyataan Anies Baswedan tersebut jelas benar adanya. Apalagi jika kita melihat realitas begitu lambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu faktor yang sangat mungkin mempengaruhi lambatnya kinerja lembaga-lembaga antikorupsi adalah dikarenakan belum menggunakan strategi dan ilmu yang tepat.

Salah satu pilihan strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan. Argumen yang dibangun adalah bahwa lembaga pendidikan memiliki dua keunggulan yang dapat dijadikan modal untuk pemberantasan korupsi. *Pertama*, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) untuk memberikan pencerahan ter-

hadap kesalahan dalam pemberantasan praktik korupsi. Sejauh ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara praktik korupsi dalam berbagai bentuk yang telah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat belum terjangkau. Akibatnya, budaya korupsi pun tetap tumbuh subur.

Bahkan sebagian orang menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan, pihak penyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan. Sepintas jalan pikiran ini memang benar. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh maka dapat dikemukakan bahwa dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke suluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Apalagi jika dalam gerakan tersebut seluruh sumber daya institusi pendidikan dapat dilibatkan mulai pimpinan, dosen/guru, mahasiswa/siswa, karyawan, dan *stakeholders* yang dimiliki.

Melalui strategi tersebut lembaga-lembaga pendidikan dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik. Hanya saja, yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka, hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam jangka waktu pendek.

MEWASPADAI PENYAKIT MORAL ILLITERACY

Prof. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernah berujar bahwa negeri ini telah terjangkit penyakit *moral illiteracy* (buta aksara moral). Ungkapan ini terasa relevan untuk melukiskan budaya korupsi yang kian meningkat. Padahal pemerintah telah membentuk begitu banyak lembaga *ad hoc* untuk pemberantasan korupsi. Ini berarti pembentukan sejumlah komisioner pemberantasan korupsi ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan.

Peningkatan jumlah kasus korupsi setidaknya dapat dibaca melalui pengumuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa selama kurun 2004-2012 ada 173 dari 524 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antara mereka telah dinyatakan bersalah dan dimasukkan penjara. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita telah mengalami buta aksara moral secara berjamaah.

Umumnya praktik korupsi yang melibatkan kalangan eksekutif dilakukan dengan cara suap-menyuap, *mark up* dan *mark down* anggaran, serta penyalahgunaan jabatan. Praktik korupsi di instansi pemerintahan pun dianggap sebagai fenomena yang biasa dengan dalih sudah sesuai "prosedur". Budaya ini juga terjadi di lembaga-lembaga publik seperti legislatif dan yudikatif.

Bahkan bukan hanya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sistem sosial di masyarakat pun menunjukkan sikap yang permisif dan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Karena itulah tidak berlebihan jika Mochtar Lubis (1988) mengatakan

bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak budaya. Korupsi dikatakan telah bermetamorfosis dalam banyak wajah (*multifaces*). Ekspresi korupsi dapat berbentuk tindakan menerima uang sogokan, uang kopi, uang lelah, uang rokok, salam tempel, uang semir, dan uang pelancar atau pelumas. Untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan terkadang tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya.

Budaya sogok atau suap merupakan salah satu ekspresi korupsi yang paling mudah dijumpai di masyarakat. Budaya ini tumbuh subur karena masyarakat menyikapi fenomena suap dengan cara yang berbeda. Sebagian menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji resmi. Pihak yang menyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan. Sepintas jalan pikiran ini benar.

Tetapi, jika direnungkan maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap yang paling dirugikan adalah sistem. Budaya suap pada saatnya dapat merusak sistem sehingga tidak berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya, hanya orang beruang yang dapat menikmati pelayanan publik. Sementara mereka yang tidak memiliki uang harus memperoleh perlakuan berbeda.

Di antara faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program pemberantasan korupsi adalah dikarenakan gerakan antikorupsi dinilai belum memiliki konsep yang jelas. Pemberantasan korupsi juga belum menjadi ideologi bersama bagi seluruh komponen bangsa. Ideologi dalam hal ini dapat dipahami seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan. Tegasnya, gerakan pemberantasan korupsi mengalami kevakuman ideologi. Ini dapat diamati dari fakta bahwa banyak orang ketika berada di luar sistem berteriak lantang untuk memberantas korupsi. Tetapi, tatkala berada dalam sistem pemerintahan mereka tidak tahan godaan sehingga larut dalam budaya korupsi.

Praktik korupsi dengan berbagai ekspresinya ternyata tidak hanya dilakukan kelompok elit. Masyarakat di akar rumput juga mengenal berbagai budaya korupsi. Yang menyedihkan, praktek korupsi itu tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat sejak masa kelahiran hingga kematian. Ini dapat diamati dalam proses kegiatan yang melibatkan

warga dan pejabat pemerintah pada saat mengurus akte kelahiran dan akte kematian. Semua tahap itu pasti tidak dilalui dengan lancar, melainkan disertai negosiasi yang dapat dikategorikan praktek suap.

Persoalannya, mengapa masyarakat begitu mudah terpengaruh dalam budaya suap? Pertanyaan ini kiranya dapat dijawab dengan merujuk pada hasil survei Universitas Paramadina Jakarta bekerjasama dengan lembaga Pride Indonesia (2010). Hasil survei menyatakan bahwa tipologi orang Indonesia termasuk yang paling mudah disuap. Survei ini dilakukan secara spesifik guna menjawab pertanyaan mengapa praktek *money politics* dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sulit diberantas. Hasil survei menunjukkan bahwa 60 persen orang Indonesia ternyata senang disuap.

Budaya senang disuap inilah yang menjadikan praktik korupsi dengan segala ekspresinya sulit diberantas. Maka, tidak mengherankan jika bangsa ini mengalami gejala *moral illiteracy* akut. Bahkan menurut Taufiq Abdullah, bangsa ini telah mengalami *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan, mulai rakyat jelata hingga elit kekuasaan). Substansi istilah ini terasa relevan untuk menggambarkan kasus-kasus mutakhir yang menunjukkan bahwa telah terjadi buta aksara moral yang melibatkan begitu banyak pihak.

Meski korupsi telah begitu merajalela, tetapi karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya, maka usaha memberantasnya pun harus tetap digelorakan. Ini berarti, para pejuang antikorupsi tidak boleh bersikap fatalis, dengan menyatakan bahwa karena korupsi sudah begitu akut maka usaha memberantasnya akan menjadi sia-sia.

Agar budaya korupsi dapat diberantas maka para pejuang antikorupsi harus konsisten menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*). Inilah spirit ideologis yang harus terus ditanamkan dalam hati sanubari para pejuang antikorupsi. Bahkan seluruh komponen masyarakat juga harus dilibatkan dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Strategi ini penting agar masyarakat tercerahkan sehingga terhindar dari wabah *moral illiteracy* berjamaah.

HEDONISME DAN KEHANCURAN NEGARA

Ada dua sifat buruk yang layak disorot dari sebagian pejabat publik negeri ini, baik eksekutif maupun legislatif, yaitu serakah dan hedonistis. Sifat serakah ditunjukkan melalui cara mereka mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Coba bayangkan, pejabat publik yang masih berkuasa sekalipun sudah memikirkan cara mempertahankan kekuasaan itu untuk periode mendatang. Jadi ibarat makan satu piring belum habis, sudah berencana mengambil piring yang lain. Yang ada dalam benak pejabat publik yang serakah jelas hanya kekuasaan. Mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Jika terkendala perundang-undangan sehingga tidak dapat mencalonkan lagi --seperti karena sudah menjabat dua periode--, pejabat itu tidak segan mencalonkan istri, anak, kerabat, atau orang yang dianggap mampu melindungi dirinya setelah tidak berkuasa. Pendek kata, pejabat incumbent yang serakah akan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu cara efektif yang umum digunakan adalah meluncurkan program-program politik untuk menarik hati rakyat. Padahal anggaran program itu jelas dialokasikan dari APBN/D. Sementara sifat hedonistis pejabat ditunjukkan melalui pola hidup mewah dan boros dalam membelanjakan kekayaan.

Pola hidup hedonistis ini pun telah lama menjadi gunjingan. Yang paling sering disorot adalah kebiasaan pejabat publik memamerkan kekayaan seperti rumah, perabotan, kendaraan,

makanan, dan cara berpakaian. Sejatinya tidak ada yang salah dengan kekayaan pejabat, apalagi jika diperoleh dengan cara benar. Tetapi dalam sudut pandang kepatutan, kebiasaan memamerkan kekayaan jelas layak dikritisi. Terasa sangat tidak elok dilihat jika pejabat publik memamerkan kemewahan dan kekayaan di tengah kehidupan sebagian rakyat yang serba kekurangan.

Karena itu, kita patut mengimbau pejabat publik untuk lebih berempati pada kesengsaraan yang dialami sebagian rakyat. Pejabat publik di negeri ini harus diingatkan agar tidak serakah dan bergaya hidup hedonistis. Pola hidup serakah dan hedonistis itu dapat menyebabkan kehancuran negara. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, *The Muqaddimah an Introduction to History* (1989), mengingatkan bahwa tabiat kekuasaan itu jika tidak dikelola dengan baik, pasti akan membawa pada kehancuran. Melalui teori siklus peradaban, Ibnu Khaldun menjelaskan proses kehancuran negara dalam tiga fase.

Pertama, tabiat kekuasaan itu selalu menghendaki berada di satu tangan (*the royal authority, by its very nature, must claim all glory for it self*). Meski awalnya kekuasaan itu diperjuangkan dengan susah payah bersama seluruh anggota kelompok (*ashabiyah*), namun secara perlahan akan dimonopoli oleh segelintir orang. Anggota solidaritas yang lain secara perlahan akan disingkirkan. Tahap ini adalah awal dari terjadi monopoli kekuasaan. Kekuasaan dan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang.

Dalam kondisi ini kekuatan negara menjadi rapuh karena solidaritas kelompok mulai berkurang. *Kedua*, tabiat kekuasaan itu menghendaki kemewahan (*the royal authority, by its very nature, requires luxury*). Para pejabat negara mulai menunjukkan pola hidup mewah dan bermalas-malasan. Jumlah rakyat miskin dan pengangguran semakin banyak. Sementara pejabat dengan vulgar membelanjakan kekayaannya untuk memperoleh kemewahan. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kemewahan itu pada saatnya dapat merusak akhlak dan menimbulkan kejahatan.

Peringatan tersebut seakan menjelaskan realitas terus meningkatnya jumlah pejabat negeri ini yang tersangkut kasus korupsi. Itu berarti sejalan dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan bahwa selama 2004-2012 ada

173 dari 524 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antaranya telah dinyatakan bersalah dan dipenjara.

Sangat mungkin di antara mereka yang melakukan korupsi itu karena sifat serakah, bermewah-mewahan, dan ingin mengembalikan modal saat turut *running* Pilkada. *Ketiga*, tabiat kekuasaan menghendaki kestabilan dan ketenangan (*the royal authority, by its very nature, requires tranquility and rest*). Tabiat ketiga ini menjelaskan bahwa pola hidup mewah itu dapat menghilangkan keberanian, perjuangan, kejujuran, dan kerja keras. Yang tersisa hanya kemalasan dan kebiasaan menghamburkan kekayaan.

Dalam situasi ini pola hidup boros menjadi tren pejabat. Akibatnya, moral pejabat negara pun terus tergerus. Jika kondisi sudah demikian, kehancuran negara menjadi tak terelakkan. Ini berarti tidak ada lagi kekuatan yang dapat menolong negara dari kehancuran. Agar negeri ini tidak terus tergelincir dan menjadi hancur, pejabat publik perlu juga berkaca pada kisah terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Dikisahkan bahwa keduanya terusir karena tergoda bujuk rayu setan yang memiliki sifat iri.

Setan pun berusaha mencari jalan untuk menggoda Adam. Setan lantas menemukan jalan dengan merayu Adam dan Hawa untuk makan buah dari *syajarah al-khuldi* (pohon keabadian). Menurut bisikan setan, jika keduanya makan, akan merasakan nikmat surga dalam waktu yang sangat lama dan memperoleh kekuasaan yang tak pernah binasa. Adam dan Hawa pun akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Akibatnya, keduanya harus menerima kenyataan terusir dari surga (QS Thaha: 120-121).

Kisah Adam dan Hawa serta peringatan Ibnu Khaldun terasa penting dikemukakan agar menjadi pelajaran bagi pejabat publik untuk tidak berperilaku serakah dan hedonistis. Pola hidup serakah dan hedonistis bukan hanya bertentangan dengan realitas kehidupan mayoritas rakyat. Lebih dari itu, pola hidup serakah dan hedonistis juga dapat mengakibatkan kehancuran sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah beberapa pengamat pernah mensinyalir bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi negara gagal (*the failed state*)?

OASE PEMBERANTASAN KORUPSI

Sedikit demi sedikit kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai terungkap. Tidak tanggung-tanggung, dugaan kasus suap ini menyeret Sekretaris Menpora, Wafid Muharam. Ibarat bola salju kasus ini kian memanas karena diduga melibatkan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Bahkan Menpora Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng, saudara kandung Andi dan pemilik lembaga konsultan Fox Indonesia, mulai dikaitkan dengan kasus suap di Kemenpora (*Jawa Pos*, 23/5). Karena melibatkan banyak pihak dari petinggi partai politik penguasa, maka kasus ini menjadi bola panas. Partai politik koalisi pasti akan menyikapi persoalan ini dengan berhati-hati. Tetapi, tidak demikian dengan partai oposisi. Mereka dapat menjadikan kasus di lingkungan Kemenpora ini sebagai senjata untuk menyerang partai penguasa.

Adanya nuansa politis jelas menjadi ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks ini KPK dituntut bekerja secara profesional tanpa terpengaruh dengan tarik-menarik kepentingan partai politik. KPK harus bekerja dengan tetap melakukan penyelidikan dalam ranah hukum

Proses hukum kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom terus bergulir. Indikatornya adalah keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap “geng suap” yang melibatkan 19 anggota DPR. Langkah KPK ini patut diapresiasi karena dapat menjadi *oase* bagi pemberantasan korupsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *oase* diartikan dengan ta-

nah yang subur atau sumber mata air di padang pasir. Dengan demikian, keseriusan KPK ini jelas menjadi harapan di tengah minimnya kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

Keseriusan KPK juga diyakini dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum di mata publik. Sebab, publik rasanya kehabisan kata-kata ketika harus melukiskan lembeknya aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Kasus-kasus besar seperti skandal Bank Century dan mafia pajak Gayus Tambunan menjadi indikator bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini masih “termehek-mehek”. Dalam konteks ini, penahanan 19 anggota DPR menunjukkan KPK telah bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Sejatinya publik juga terheran-heran dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebab, meningkatnya jumlah kasus korupsi ini jelas menjadi antitesa keinginan pemerintah memberantas korupsi. Apalagi sepanjang era reformasi pemerintah sudah banyak membentuk lembaga antikorupsi. Tetapi, faktanya pemberantasan korupsi masih berjalan lamban.

Kejadian yang menimpa anggota dewan dalam kasus dugaan suap saat pemilihan DGS BI pada 2004 dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Artinya, kejadian ini hanya sekedar contoh dari sedikit kasus yang tercium publik. Sangat mungkin masih banyak kasus serupa yang luput dari pantauan publik. Sebab, korupsi di negeri ini diyakini telah berkembang secara sistematis. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum karena telah dilakukan sesuai “prosedur”.

Contoh lain perbuatan suap dalam konteks kekinian adalah serangan fajar yang dilancarkan calon pada saat pemilihan kepala daerah. Demikian juga dengan sumbangan partai politik atau pejabat negara pada lembaga sosial seperti masjid, madrasah, panti asuhan, dan pesantren. Berbagai bentuk sumbangan ini dapat dikategorikan suap jika pemberinya memiliki agenda terselubung untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Apalagi jika sumbangan tersebut ternyata tidak berasal dari uang pribadi, melainkan bersumber dari

uang rakyat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Jika ini yang terjadi maka jelas sekali telah terjadi korupsi terhadap anggaran untuk kepentingan politik diri sendiri. Fenomena ini layak menjadi perhatian masyarakat, terutama pada saat menjelang pemilu.

Dalam konteks inilah masyarakat perlu diajak “melek anggaran” agar apa yang diputuskan lembaga eksekutif dan legislatif sesuai dengan harapan. Lebih dari itu, masyarakat perlu diajak terlibat dalam gerakan antipolitik anggaran yang marak dilakukan oknum di eksekutif dan legislatif. Gebrakan KPK yang telah menahan “geng suap” yang melibatkan para legislator harus dijadikan inspirasi. Karena itu yang penting dilakukan adalah menjaga semangat agar gerakan pemberantasan korupsi tetap berkobar.

SANKSI SOSIAL PADA KORUPTOR

Desakan agar hukuman terhadap koruptor diperberat terus bergulir. Di samping dihukum berdasarkan peraturan-undang-undangan, koruptor juga harus diberi sanksi sosial. Itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera pada siapa pun yang berniat korupsi. Beberapa tokoh yang pernah mengutarakan gagasan ini adalah Prof. Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Prof. Said Aqil Siraj (Ketua PBNU), Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), dan Tondung Mulya Lubis (praktisi hukum).

Wacana mengenai pentingnya sanksi sosial ini sekaligus menjadi sindiran bagi aparat penegak hukum. Pasalnya, aparat penegak hukum sepertinya tidak berdaya jika berhadapan dengan koruptor, terutama koruptor kelas kakap. Sebaliknya pada koruptor kelas teri, aparat hukum kelihatan sangat tegas. Akibatnya muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum itu jika ke bawah sangat tajam, tetapi jika ke atas tumpul sekali.

Jika mengacu pada fikih (hukum Islam), memang belum ditemukan padanan kata yang tepat untuk korupsi. Hal ini disebabkan korupsi muncul dalam budaya masyarakat modern. Sementara itu, khazanah yang berkembang dalam fikih masih banyak yang merujuk pada era klasik. Tetapi karena substansi korupsi adalah perbuatan melanggar hukum dan norma agama, maka dapat dianalogikan dengan perbuatan yang dikenal dalam khazanah fikih.

Beberapa istilah dalam hukum Islam yang dapat dianalogikan perbuatan korupsi adalah *ghulul* (mengambil harta secara tersembunyi), *risywah* (suap-menyuap), *saraqah* (pencurian), *ghasab* (mengam-

bil dengan cara paksaan), dan *hirabah* (perbuatan yang merusak tatanan masyarakat). Berdasarkan pengertian korupsi dalam hukum positif dan konsep kejahatan terhadap harta benda, dalam hukum Islam dapat ditemukan beberapa kesamaan.

Pertama, adanya *tasharruf* yaitu perbuatan yang berarti menerima, memberi, dan mengambil. *Kedua*, adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan. *Ketiga*, adanya kerugian yang ditanggung masyarakat. Berdasarkan hal itu maka tidak berlebihan jika dalam perspektif fikih dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan menyalahi hukum dan bentuk pengkhianatan atas amanah yang dapat menimbulkan kerugian publik.

Salah satu ekspresi perbuatan korupsi adalah suap. Contoh perbuatan yang masuk kategori suap dalam konteks kekinian adalah pemberian uang yang dilakukan para calon saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Demikian juga dengan sumbangan pimpinan partai politik atau pejabat negara pada lembaga sosial seperti masjid, madrasah, panti asuhan, dan pesantren. Berbagai bentuk sumbangan ini dapat dikategorikan suap, jika pemberinya memiliki agenda terselubung untuk memperoleh posisi strategis di legislatif dan eksekutif.

Apalagi jika sumbangan itu ternyata bukan berasal dari uang pribadi, melainkan dari uang rakyat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Karena dampak yang ditimbulkan begitu berbahaya, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan *fasad* (merusak). Tindakan korupsi juga dapat mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi dapat mengakibatkan kesengsaraan warga seperti kelaparan, kebodohan, tidak tegaknya hukum, dan buruknya pelayanan publik.

Hal ini terjadi karena anggaran yang semestinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik telah dikorupsi. Begitu dahsyatnya akibat perbuatan korupsi, sehingga tidak mengherankan jika tokoh agama dan praktisi hukum mendorong agar hukuman koruptor diperberat. Tambahan hukuman itu dapat berupa sanksi sosial. Termasuk kategori sanksi sosial dalam konteks politik adalah tidak memilih pelaku korupsi sebagai pejabat publik, baik untuk jabatan di legislatif maupun eksekutif.

Karena korupsi juga termasuk dalam kategori berkhianat terhadap amanat rakyat, kesaksian mereka dapat ditolak dalam proses pembuktian hukum di pengadilan. Dalam hal ini, ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa kesaksian pengkhianat itu tidak dapat diterima. Bentuk lain sanksi sosial adalah agar koruptor muslim tidak dishalati saat meninggal dunia. Pandangan ini mendapatkan justifikasi ajaran Islam. Sebuah riwayat mengisahkan bahwa ada seseorang wafat dalam Perang Khaibar.

Para sahabat pun memberi tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda: "Salatilah teman kalian!" Maka berubahlah wajah para sahabat karena Rasul ternyata enggan untuk menyalatinya. Selanjutnya, Nabi bersabda: "Sesungguhnya teman kalian telah menggelapkan harta rampasan perang". Para sahabat pun menggeledah barang-barangnya dan menemukan perhiasan dari orang Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham (HR. Abu Daud).

Riwayat ini dapat menjadi rujukan untuk tidak menshalati jenazah koruptor, terutama bagi tokoh agama. Para koruptor sesungguhnya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan telah merugikan masyarakat. Karena itu, guna mengurangi beban mereka, terkadang menggunakan harta hasil korupsi untuk kepentingan ibadah. Tentu saja cara ini tidak akan mengubah status hukum perbuatan dan harta hasil korupsi.

Dikatakan dalam sebuah kaidah ushul fikih bahwa sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Ajaran ini perlu dikemukakan agar tidak muncul pemahaman parsial, bahwa dosa korupsi dapat terhapus melalui perbuatan menyedekahkan sebagian harta korupsi.

Untuk memberikan efek jera pada koruptor, maka pimpinan organisasi sosial keagamaan, tokoh masyarakat, serta pengelola pendidikan dan pelayanan sosial harus berkomitmen untuk menolak sumbangan yang bersumber dari harta hasil korupsi. Sikap tegas ini penting untuk memberikan pelajaran pada pelaku korupsi.

EKSPOSE KUNKER PEJABAT PUBLIK

Tuntutan beberapa elemen masyarakat agar hasil kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jatim ke luar negeri dipertanggungjawabkan pada publik kian menguat. Proses pertanggungjawaban itu bisa dinamakan dengan tahap ekspose pasca kunker. Pada kesempatan inilah pejabat publik yang melaksanakan kunker dituntut menyampaikan laporan kegiatan dan hasil yang dicapai selama perjalanan untuk kemudian dijadikan referensi dalam setiap mengambil kebijakan. Kegiatan ekspose ini penting dilakukan dikarenakan pejabat pelaksana kunker telah menggunakan uang rakyat untuk keperluan transportasi, akomodasi, honorarium, dan lain-lain selama perjalanan.

Seperti diberitakan koran ini bahwa beberapa elemen kritis seperti Barisan Muda PAN Jatim, LBH Surabaya, Citices, Parliament Watch, dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) telah mendatangi gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut agar diberikan kesempatan melakukan *hearing* dengan Komisi A, Komisi B, dan Komisi D, yang dianggap telah banyak melakukan kunker ke luar negeri. Sebagian kunker itu disinyalir terlalu mengada-ada dan hanya menghamburkan uang rakyat. Bahkan beberapa elemen tersebut telah mengancam akan menggugat secara *class action* komisi-komisi di DPRD Jatim.

Salah satu kunker yang dikritisi adalah kepergian anggota dewan dari Komisi A ke Belanda. Di antara tujuan utama yang ingin dicapai adalah menentukan hari jadi Provinsi Jatim. Kegiatan kunker ke Belanda dilakukan oleh sembilan anggota dewan dengan estimasi alokasi anggaran Rp. 50 juta per orang. Kesembilan anggota dewan tersebut adalah Lutfie Abdul Hadi, A.

Firdaus (FKB), Sabron Djamil Pasaribu, Heri Sugiono, Sudibyo (FPG), Kusnadi (FPDIP), Suharto, Reni Irawati (FDK), dan Suli Daim (FPAN). Dalam perkembangannya, Sabron Djamil Pasaribu tidak jadi berangkat karena pernah pergi ke Belanda dengan tujuan yang sama.

Jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai kunker tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Ini dikarenakan persoalan hari jadi Provinsi Jatim tinggal menetapkan saja. Karena Tim Pemprov yang beranggotakan para pakar dan sejarawan ternama telah memberikan alternatif hari jadi Jatim, yakni; 28 Desember 1255 (masa Kerajaan Singosari), 14 Agustus 1636 (masa Kerajaan Mataram), 1 Januari 1929 (masa Hindia Belanda), dan 19 Agustus 1945 (masa pasca kemerdekaan).

Dari alternatif tersebut, Tim Pemprov Jatim juga telah menyampaikan naskah akademik bahwa hari jadi Povinsi Jatim adalah 19 Agustus 1945. Tetapi, faktanya delapan anggota dewan dari Komisi A tetap berangkat ke Belanda meskipun protes telah dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat.

Harus diakui bahwa tidak semua kunker Anggota DPRD Jatim mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Misalnya, kunker Komisi D ke Jerman untuk studi banding dalam hal pengelolaan air dianggap penting. Ini dikarenakan Provinsi Jatim menghadapi problem pengadaan air bersih. Berdasar hal ini, sesungguhnya kunker ke luar negeri tetap diperlukan anggota dewan. Bahkan para eksekutif pun berhak melakukan kunker sepanjang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada di Jatim. Sebab, untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat terkadang dibutuhkan pengalaman dari negara-negara yang notabene lebih maju.

Yang terpenting dilakukan adalah adanya kemauan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kunker pada publik dalam bentuk ekspose. Misalnya, pejabat pelaksana kunker menjelaskan secara transparan pada publik mengenai apa yang dilakukan, hasil, dan *follow-up* dari kegiatan kunker tersebut. Maka di sinilah lembaga eksekutif dan legislatif dapat memanfaatkan jasa *public relation* dan humas untuk memaparkan hasil selama kunker.

Jika kegiatan ekspose telah menjadi tradisi, maka hal itu

jelas akan sangat bermanfaat bagi upaya membangun citra pejabat publik di hadapan rakyat. Lebih dari itu, melalui tradisi ekspose itulah prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedikit demi sedikit akan dapat direalisasikan. Sebab, jika kita menengok persyaratan bagi perwujudan pengelolaan negara yang bersih dan baik (*clean and good governance*) setidaknya dapat ditemukan empat elemen penting.

Pertama, adanya pengakuan publik (*legitimacy*). Masalah legitimasi ini berkaitan erat dengan penerimaan masyarakat terhadap otoritas pejabat publik yang telah dipilih. *Kedua*, adanya pertanggungjawaban (*accountability*) dari pejabat publik. *Ketiga*, efektifitas manajemen (*management effectiveness*) terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik (*public service*). *Keempat*, ketersediaan informasi yang memadai tentang hukum, prosedur, dan hasil (*availability of information about laws, procedures, and results*). Maka berdasarkan hal inilah kita dapat menyatakan bahwa pertanggungjawaban menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan negara.

Sangat disayangkan jika banyak pejabat publik di eksekutif dan legislatif belum memiliki kemauan untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pada rakyat. Salah satu wujud pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui kegiatan ekspose setiap selesai kunker. Yang selama ini dilakukan pemerintah adalah menyampaikan naskah pertanggungjawaban tahunan dalam sidang paripurna di hadapan para anggota DPRD. Para anggota DPRD juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan pada rakyat. Ini karena para anggota DPRD umumnya lebih merasa mewakili partai daripada rakyat atau konstituen yang telah memilihnya.

Di legislatif memang telah ada institusi yang bernama Badan Kehormatan (BK) Dewan. Tetapi lembaga ini belum memiliki taring dan hanya sebagai penegak etika para anggota dewan. Akibatnya, dalam menyikapi kunker anggota Komisi A ke Belanda, BK menjadi tak berdaya. Padahal menurut Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dikatakan bahwa setiap kunjungan harus mem-

bawa hasil. Semestinya dengan perangkat hukum seperti ini BK dapat bertindak lebih tegas terhadap anggota dewan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena Ketua BK (Lutfie Abdul Hadi) juga turut berangkat ke Belanda bersama anggota dewan lainnya. Hal ini jelas akan menimbulkan konflik kepentingan di antara anggota dewan.

Maka berkaitan dengan kontroversi kunker para anggota DPRD Jatim itulah perlu ditradisikan kegiatan ekspose setiap usai kunker. Dengan melakukan ekspose, publik akan mengetahui apakah perjalanan para wakil rakyat bermanfaat atau sekedar menghamburkan APBD yang sejatinya adalah uang rakyat.

Tradisi ekspose juga perlu dilakukan oleh para pejabat publik di eksekutif. Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta pejabat di bawahnya perlu menyampaikan ekpose setiap selesai melakukan kunker. Kegiatan ekspose ini perlu ditradisikan agar aspek akuntabilitas lembaga tetap terjaga. Selama ini pejabat publik banyak yang merasa tidak perlu menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat karena belum ada peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut.

MARILAH BERKATA JUJUR

Abraham Lincoln, Bapak Kemerdekaan dan Presiden Amerika Serikat ke-16, pernah berujar; *You can make fool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time* (Anda dapat menipu semua orang untuk sementara waktu, sebagian orang untuk sepanjang waktu, tetapi Anda tidak mungkin menipu semua orang untuk sepanjang waktu).

Substansi pernyataan ini terasa relevan untuk mengingatkan Nunun Nurbaeti dan pihak-pihak yang terlibat kasus suap cek perjalanan (*traveler cheque*) dalam pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI). Selain Nunun, kasus ini melibatkan Miranda Goeltom dan sejumlah anggota DPR. Setiap oknum yang terlibat dalam skandal ini sepertinya ingin menyelamatkan diri. Untuk itu dibuatlah pengakuan yang menunjukkan seolah-olah dirinya tidak saling mengenal. Itu dapat dilihat dari pengakuan Miranda Goeltom yang menyatakan tidak mengenal dekat Nunun. Padahal menurut Adang Darajatun, suami Nunun, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat (*Jawa Pos, 13/12*).

Skandal suap pemilihan DGS BI hanya satu di antara kasus besar di negeri ini yang menunjukkan ketakjujuran antar pelaku. Yang paling heboh tentu kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Silang pendapat yang menunjukkan ketakjujuran antar oknum pun terjadi begitu rupa.

Beberapa kasus suap yang menyita perhatian publik ini melengkapi daftar kasus besar yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Salah satunya adalah pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini tergolong heboh karena meli-

batkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Berdasarkan bukti selama persidangan, Antasari pun diganjar hukuman 18 tahun penjara. Karena merasa telah diberlakukan tidak adil, Antasari pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sejumlah pihak memberikan dukungan moral pada Antasari untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya. Menurut Antasari, dirinya sengaja dijadikan target karena posisinya sebagai ketua KPK. Apalagi semasa dirinya memimpin KPK, banyak kasus besar yang ditangani seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pengadaan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2009. Bahkan Aulia Pohan, besan Presiden SBY, sempat dijebloskan ke penjara.

Sangat mungkin keberanian Antasari ini telah menimbulkan ketakutan banyak pihak. Karena itulah diatur skenario yang memungkinkan Antasari terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. Selama masa persidangan, publik pun diberi tontonan berupa drama pembunuhan dengan bumbu cinta segi tiga yang melibatkan Antasari, Nasrudin, dan Rani Juliani.

Masih banyak peristiwa besar di negeri ini yang menyisakan tanda tanya. Contohnya, mega skandal Bank Century yang hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan. Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR agar aparat menyelidiki pihak-pihak yang terlibat seakan berjalan di tempat. Penyelesaian kasus ini cenderung politis, padahal dana trilyunan rupiah telah digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century. Banyak dugaan yang menyertai skandal ini, seperti ada oknum dan partai politik tertentu yang turut menikmati aliran dana Century. Ini berarti ada oknum yang merekayasa sehingga pemerintah mengucurkan dana talangan yang tidak lazim ke Century.

Peristiwa lain yang juga layak mendapat perhatian adalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Sebagai pegawai negeri golongan III/a, Gayus telah bermain dengan beberapa pengusaha hitam. Pengusaha nakal ini umumnya minta tolong agar kewajiban membayar pajaknya kecil atau bahkan dibebaskan. Sayang sekali, mitra Gayus ini belum juga terungkap. Padahal jika ada kemauan, aparat penegak hukum dapat menjadikan kasus Gayus sebagai *entry point* untuk memberantas praktik mafia pajak.

Dari beberapa contoh yang dipaparkan tampak sekali bahwa ada kebohongan yang dilakukan oknum tertentu. Mereka inilah sesungguhnya sutradara dibalik rekayasa sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik. Dengan skenario yang telah dirancang, untuk sementara waktu mereka berhasil membohongi publik. Sehingga tanpa sadar, publik pun masuk dalam alur cerita yang menyesatkan.

Ibarat sebuah permainan berbahaya, sang sutradara dapat dikatakan sedang bermain api. Sang sutradara mungkin tidak menyadari bahwa ada hukum yang tak terelakkan, bahwa siapa yang bermain api maka pasti akan terbakar. Peribahasa mengatakan; barangsiapa menanam, mengetam. Ini berarti, siapa yang telah berbohong dalam kasus-kasus besar di negeri ini maka pasti akan ketahuan. Kalau tidak hari ini, mungkin esok, atau kapan pun waktunya. Sejarah yang akan menjawab kapan kebenaran itu terungkap. Yang pasti, cepat atau lambat kebohongan akan terbongkar.

Dalam ajaran agama dikatakan bahwa kejujuran itu adalah sifat yang sesuai dengan hati nurani. Sebaliknya, kebohongan dikatakan bertentangan dengan hati nurani. Karena itu, siapa pun orangnya dan apa pun agamanya, seharusnya berperilaku jujur. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad bersabda bahwa kejujuran itu akan menyebabkan ketenangan, sementara kebohongan membuat pelakunya senantiasa ragu-ragu (HR. Tirmidzi). Karena itu kita harus menjadikan kejujuran sebagai sendi kehidupan agar tercapai ketenangan.

Yang menarik, kebohongan ternyata berkaitan erat dengan keragu-raguan. Kebohongan akan menjadikan kehidupan tidak tenang karena pelakunya senantiasa ragu-ragu. Itu berarti jika ada seseorang yang senantiasa ragu-ragu dalam memutuskan suatu perkara maka patut diduga ia telah melakukan kebohongan. Tentu akan sangat berbahaya jika yang melakukan kebohongan itu pejabat publik. Ini karena mereka pasti terlalu lama mengambil keputusan. Padahal kebutuhan publik sudah sangat mendesak. Karenanya, marilah bersikap jujur dan meninggalkan segala bentuk kebohongan.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Mulai tahun ajaran 2011/2012, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) memberlakukan kurikulum pendidikan antikorupsi. Menurut rencana materi antikorupsi akan diberikan sejak tingkat pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mengenalkan sejak dini perbuatan yang dikategorikan korupsi. Tujuan akhirnya adalah agar para pelajar dan mahasiswa turut aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Ikhtiar pemerintah itu patut dihargai. Sebab, praktik korupsi telah begitu rupa menggurita di lembaga-lembaga publik. Dalam sudut pandang Lord Acton, korupsi yang dilakukan pejabat publik ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lord Acton menyatakan; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti menyalahgunakannya.

Lembaga pendidikan seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam program memberantas korupsi. Yang harus disadari, pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu hasilnya tidak dapat dilihat dalam sekejap. Apalagi pengalaman menunjukkan bahwa program kantin kejujuran yang mulai dirintis sejak Desember 2008 kini banyak berguguran alias gulung tikar. Fenonema kebangkrutan kantin kejujuran di sekolah jelas sangat ironis. Pertanyaannya, apakah kejadian ini dikarenakan kurangnya sosialisasi guru pada siswa atau tiadanya monitoring dari pemerintah.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, usaha memberantas korupsi dilakukan dengan membangun kultur kejujuran yang melibatkan peserta didik, guru, dan pimpinan sekolah. Pada tahap awal, unsur-unsur di sekolah perlu diperkenalkan pada bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan korupsi.

Langkah selanjutnya, mengenalkan bentuk-bentuk pemberantasan korupsi, mulai persoalan sederhana hingga kompleks. Misalnya, peserta didik diajak membangun kejujuran akademik sehingga tidak melakukan kecurangan dalam setiap ujian. Dalam konteks tersebut, patut didukung ajakan gubernur Jatim kepada peserta didik SD, SMP, dan SMA untuk berperilaku jujur dan melakukan gerakan antikorupsi. Untuk merealisasikan program itu, Pemerintah Provinsi Jatim berencana membangun 380 kantin kejujuran di 38 kabupaten/kota. Asumsinya, akan ada 10 kantin kejujuran di setiap kabupaten/kota.

Selain melalui praktik berperilaku jujur, usaha menumbuhkan budaya antikorupsi bisa dilakukan melalui pembelajaran di kelas atau menyisipkan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pembelajaran itu, peserta didik diajak menganalisis persoalan yang menghambat usaha pemberantasan korupsi sekaligus merumuskan solusinya.

Langkah serupa juga bisa dilakukan di pendidikan tinggi. Mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi didorong untuk turut membangun integritas publik dan budaya antikorupsi. Melalui mata kuliah yang relevan, berbagai kegiatan kemahasiswaan, dan kebijakan pimpinan, penanaman nilai-nilai integritas publik dan antikorupsi diharapkan dilakukan dengan efektif.

Dengan demikian, pelibatan lembaga pendidikan mutlak diperlukan untuk membangun generasi masa depan yang memiliki integritas moral dan akademis. Sebab, lembaga pendidikan pun dipastikan akan memproduksi individu yang berintegritas baik dan mampu memberantas korupsi. Bukankah lembaga-lembaga publik yang ada sekarang akan diisi oleh anak-anak yang kini sedang belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi?

Sebagai investasi jangka panjang rasanya kita masih layak berharap pada lembaga pendidikan. Tantangan kita sekarang adalah menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai kedisiplinan dan kejujuran dalam sistem pendidikan. Ada dua strategi yang dapat dilakukan. *Pertama*, menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai materi yang mandiri. Ini berarti ada mata pelajaran pendidikan antikorupsi tersendiri yang diterapkan mulai pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. *Kedua*, melalui strategi penyisipan (*inserting*) materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran yang relevan.

Karena bodi kurikulum kita sudah demikian gemuk maka pilihan strategi penyisipan rasanya paling tepat. Melalui strategi *inserting* ini penyampaian materi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lebih fleksibel. Jadi, tidak harus ada mata pelajaran pendidikan antikorupsi tersendiri. Yang penting adalah nilai-nilai antikorupsi dapat dipraktikkan seluruh komponen lembaga pendidikan. Ini berarti pendidikan antikorupsi dapat disinergikan dengan seluruh kegiatan pembelajaran seperti program kantin kejujuran.

Yang harus diingat, pendidikan antikorupsi tidak boleh sekedar transfer pengetahuan. Jika ini yang terjadi maka pendidikan antikorupsi hanya akan menjadi ilmu. Padahal tujuan jangka panjang pendidikan antikorupsi adalah mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki spirit antikorupsi. Karena itu aspek keteladanan seluruh komponen di sekolah dalam mempraktikkan nilai-nilai kejujuran (*honesty*) sangat penting.

Dengan mengajarkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini maka diharapkan akan terlahir generasi masa depan yang bersikap jujur, berdisiplin, dan berintegritas. Bukankah pendidikan seharusnya diorientasikan untuk membangun karakter anak bangsa?

PENCITRAAN NO, KINERJA YES

Bermula dari pertemuan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 10 Januari 2011, sejumlah tokoh lintas agama mencanangkan tahun tanpa kebohongan. Di antara tokoh terlibat adalah Din Syamsuddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Buya Syafii Maarif (mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Salahuddin Wahid (tokoh NU), Martinus Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia), Andreas Yewangoe (Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia), Franz Magnis Suseno (rohaniawan), dan Sri Pannyavaro.

Ikrar tahun tanpa kebohongan ini jelas merupakan sindiran pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam perspektif tokoh lintas agama, selama ini pemerintahan SBY telah melakukan kebohongan publik. Karena itu, mereka menuntut agar Presiden SBY berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan di sisa periode dengan tanpa kebohongan. Tampaknya, inilah substansi yang ingin disuarakan oleh tokoh lintas agama.

Mereka jelas memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan agar pemerintah senantiasa melaksanakan tugas dengan bersandar pada moral keagamaan. Bencana alam yang datang silih berganti seharusnya menjadi peringatan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu salah satunya ditandai oleh kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.

Sekilas tidak ada yang aneh dengan seruan moral yang diutarakan tokoh lintas agama. Yang menjadi masalah adalah pilihan kata “kebohongan publik” yang digunakan tokoh lintas agama. Karena itu, tidak mengherankan jika pro dan kontra pun bermunculan di tengah-tengah

masyarakat. Pemerintah dan kalangan yang dekat dengan kekuasaan jelas tidak setuju dengan kritik tokoh lintas agama tersebut. Sebaliknya, kelompok yang selama ini menempatkan diri sebagai kekuatan *civil society* dan oposisi menunjukkan sikap yang sejalan.

Kritik tokoh lintas agama tersebut jelas harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Bukan hanya berkaitan dengan substansi materi kritik. Lebih dari itu, yang perlu diperhitungkan adalah mereka yang memberikan kritik. Sebab, mereka adalah para tokoh lintas agama yang memiliki otoritas dan pengikut hingga ke basis massa.

Jika para tokoh lintas agama telah turun gunung berarti memang ada persoalan kebangsaan yang perlu segera diselesaikan. Bukankah selama ini konsentrasi mereka banyak dihabiskan untuk membina umat? Tetapi, tiba-tiba saja mereka turun gunung dan memberikan kritik yang sangat sensitif. Kini, wacana tentang kebohongan publik yang diutarakan tokoh lintas agama terus bergulir dan menjadi bola liar. Jika situasi ini terus terjadi, maka dalam tingkat tertentu akan dapat mendegradasi kehormatan pemerintahan yang sah.

Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa penggunaan kata "kebohongan publik" secara sistematis dapat merongrong kehormatan pemerintah. Seakan ingin menjernihkan persoalan, Presiden SBY pun berinisiatif untuk mengundang tokoh lintas agama. Harapannya adalah agar terbangun ruang komunikasi yang dialogis, jujur, tulus, dan saling membangun antara pemerintah dan tokoh agama. Sebab, disadari atau tidak, hubungan timbal balik antara tokoh agama (*ulama*) dan pemerintah (*umara*) sangat penting dalam pembangunan bangsa. Fakta sejarah juga telah menunjukkan betapa besar peran tokoh-tokoh agama dalam menentukan perjalanan bangsa.

Jika dicermati substansi kritik yang diutarakan tokoh lintas agama sesungguhnya dapat dipahami. Apalagi jika kita menyaksikan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum (*law enforcement*), pemberantasan kemiskinan, penanganan TKI, dan jaminan terhadap kebebasan beragama. Meski pemerintah mengklaim telah banyak berhasil, namun realitas sesungguhnya masih jauh dari harapan.

Contoh paling riil adalah kinerja aparat penegak hukum dalam menangani skandal Bank Century dan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Untuk kasus Gayus Tam-

bunan, Presiden SBY memang telah memberikan instruksi pada aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas dan cepat. Tetapi, jika melihat integritas institusi aparat penegak hukum rasanya efektifitas instruksi tersebut layak dicermati

Kritik tokoh lintas agama seharusnya tidak disikapi secara berlebihan. Bahkan pemerintah seharusnya berterima kasih pada kritik tersebut karena diutarakan oleh tokoh lintas agama yang jauh dari berbagai kepentingan jangka pendek. Tokoh agama jelas memiliki otoritas untuk mengingatkan pemerintah agar berkomitmen pada sumpah seperti yang diikrarkan saat menerima amanah rakyat. Kritik ini harus dipahami bahwa tokoh lintas agama sedang menjalankan tugas *amar makruf nahi munkar* (memerintah yang baik dan mencegah yang munkar).

Respon Presiden SBY terhadap kritik dengan cara mengundang tokoh lintas agama dapat dinilai sebagai langkah yang tepat. Presiden harus mendengar secara langsung masukan tokoh lintas agama tanpa terjebak dengan penggunaan kata “kebohongan publik”. Sekali lagi, yang terpenting adalah substansi kritik itu. Sebab, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi yang tumbuh subur sejak era reformasi maka posisi kritik yang konstruktif jelas sangat bermanfaat. Dalam konteks inilah organisasi-organisasi sosial keagamaan yang direpresentasikan oleh tokoh-tokohnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang (*checks and balances*).

Jika Presiden SBY mau mengambil pelajaran maka berbagai kritik yang diutarakan tokoh lintas agama dapat dijadikan penyeimbang untuk meningkatkan kinerja. Tidak seperti yang dikesankan tokoh lintas agama dan banyak pengamat, bahwa pemerintahan Presiden SBY hanya berhasil dalam hal pencitraan.

Karena itu, Presiden SBY harus meninggalkan politik pencitraan dan menggantinya dengan bekerja sepenuh hati. Sejarah pasti akan mencatat dengan tinta emas semua prestasi yang dicapai pemerintahan Presiden SBY. Jika Presiden SBY tidak segera berubah maka gerakan anti kebohongan akan terus berkembang. Inilah saat yang tepat untuk beranjak dari politik pencitraan menuju pada berbasis kinerja.

MENGHABISKAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN

Tahun anggaran 2010 akan segera berakhir. Seiring dengan itu kita sering menyaksikan fenomena menumpuknya kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di kabupaten/kota dan provinsi Jatim. Meningkatnya intensitas kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiasati agar anggaran dapat dicairkan sebelum akhir tahun. Maka, dapat dibayangkan betapa sibuk instansi pemerintahan di kabupaten/kota dan provinsi Jatim.

Dalam situasi seperti ini rasanya menjadi tidak relevan jika kita mempertanyakan kualitas kegiatan. Sebab, bagi instansi pemerintahan yang penting adalah terlaksanakannya berbagai kegiatan dengan disertai bukti-bukti administratif. Tujuannya adalah untuk mencairkan anggaran sehingga tidak sampai hangus, apalagi harus dikembalikan ke kas negara.

Tentu saja fenomena penumpukan kegiatan di akhir tahun sangat menyedihkan. Hal ini berarti tidak ada perencanaan yang matang dalam penyusunan program kegiatan. Dengan kata lain, semangat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya didasarkan pada orientasi kerja yang jelas dan terukur. Padahal program yang disusun semestinya telah disepakati waktu dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dan legislator di DPRD.

Dengan model penganggaran berbasis kinerja diharapkan tidak terjadi penumpukan program kegiatan di penghujung tahun. Intensitas kegiatan yang meningkat di akhir tahun juga menunjukkan minimnya daya serap instansi pemerintahan terhadap anggaran. Padahal jika anggaran tidak banyak terserap

untuk kegiatan maka rakyat pasti yang dirugikan. Hal ini berarti rakyat akan kehilangan banyak kesempatan menikmati program pemerintah.

Kesibukan melaksanakan kegiatan di akhir tahun ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif. Kalangan legislatif di DPRD kabupaten/kota dan provinsi juga sibuk melaksanakan kegiatan. Salah satu kegiatan yang kerap dilaksanakan menjelang tutup tahun adalah kunjungan kerja (kunker). Bagi anggota dewan, kunker penting dilaksanakan untuk mempersiapkan pembahasan APBD 2011.

Para legislator dapat berkelit dengan mengatakan bahwa kunker tersebut telah diagendakan dan sangat dibutuhkan agar diperoleh pengalaman dari berbagai daerah untuk membuat kebijakan yang relevan dengan kebutuhan setiap kabupaten/kota dan provinsi Jatim. Tetapi, masyarakat sudah terlanjur memberikan perpsepsi yang negatif terhadap kunker anggota dewan. Apalagi dalam realitanya kunker yang dilakukan sering kali kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan daerah sehingga tidak memberikan manfaat pada masyarakat.

Seakan tidak mau belajar dari protes masyarakat, anggota legislatif kabupaten/kota dan provinsi Jatim tetap mengagendakan beberapa kunker. Karena itu tidak mengherankan jika muncul stigma negatif terhadap program kunker anggota dewan. Misalnya, dikatakan bahwa kunker hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran. Sama seperti yang dilakukan dinas-dinas di pemerintahan, para anggota legislatif juga sangat menyayangkan jika sampai harus mengembalikan dana ke kas negara.

Mereka barangkali juga berpikir apa susahnya membuat kegiatan yang dapat menyerap anggaran. Bermula dari sinilah terjadi praktik manipulasi kegiatan. Praktik manipulatif dan koruptif ini didukung oleh begitu banyak jasa perhotelan dan travel yang mudah diajak “bermain” dalam membuat laporan kegiatan. Realita ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan pelaporan setiap kegiatan yang hanya menekankan aspek administrasi, dan cenderung mengabaikan mutu kegiatan.

Untuk menghindari kebiasaan menumpuk pelaksanaan kegiatan di akhir tahun yang terjadi di lembaga eksekutif dan legis-

latif, maka perlu dilakukan beberapa langkah. Misalnya, perencanaan kegiatan yang matang dengan mempertimbangkan aspek prioritas kebutuhan, target yang terukur, alokasi anggaran, dan waktu yang jelas. Penentuan skala prioritas kegiatan dapat ditempuh dengan terlebih dulu melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*). Tentu saja, untuk meraih hasil yang sempurna maka instansi pemerintahan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga penelitian yang dimiliki perguruan tinggi dan beberapa LSM yang kredibel. Lembaga legislatif juga dapat memanfaatkan tim ahli yang dimiliki untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk dianggarkan dalam APBD. Jika hal ini dilakukan maka program yang dicanangkan akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Di samping itu, perlu juga ditekankan komitmen dari lembaga-lembaga publik untuk melaksana kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang juga tidak boleh dilupakan adalah tahapan ekspose terhadap hasil akhir dari setiap kegiatan sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ekspose pasca pelaksanaan kegiatan inilah yang seringkali dilupakan kalangan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks inilah lembaga-lembaga di eksekutif dan legislatif perlu mentradisikan ekspose pada publik mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.

Di samping mencanakan program yang berbasis pada analisis kebutuhan, lembaga-lembaga publik juga harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Persoalan transparansi dan akuntabilitas ini penting dilakukan karena merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Untuk menciptakan kondisi yang transparan dan akuntabel memang tidak mudah. Hal ini disebabkan lembaga-lembaga publik, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pada masyarakat karena memang tidak ada perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

Yang terjadi selama ini adalah pertanggungjawaban dinas terkait dan kepala daerah dalam rapat resmi di legislatif. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya kontrol beberapa ele-

men di masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Karena adanya persepsi yang keliru dari pejabat publik, bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan penyampaian laporan pada masyarakat, maka peranan berbagai komponen masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan mutlak diperlukan. Bahkan terasa perlu dibentuk sarana rembuk warga (*civic forum*) untuk mengawal pembahasan anggaran di seluruh kabupaten/kota dan provinsi Jatim.

Melalui *civic forum* inilah masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan anggaran, penentuan program, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Melalui cara ini kegiatan yang diprogramkan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jika pada akhirnya kegiatan tidak dapat direalisasikan karena ada sesuatu hal maka harus ada kesadaran untuk mengembalikan anggaran kepada kas negara. Bukankah anggaran yang tidak digunakan tahun ini akan dapat dimanfaatkan tahun depan?

KIPRAH ORMAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Ibarat rayap, praktik korupsi telah menggerogoti tiang-tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada lembaga publik yang benar-benar bersih dari budaya korupsi. Karena itu tidak berlebihan jika Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berujar bahwa praktik korupsi di negeri ini nyaris sempurna.

Buya Syafii sering mencontohkan tiga kementerian yang seharusnya berperan besar membangun karakter bangsa, yakni Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Agama (Kemenag), dan Kesehatan (Kemenkes). Tetapi seperti diketahui, korupsi di tiga kementerian ini terjadi begitu rupa. Bahkan terjadi praktik korupsi yang sangat memalukan di Kemenag, yaitu korupsi pengadaan mushaf al-Qur'an.

Meski praktik korupsi telah begitu merajalela, namun kita harus tetap menggelorakan semangat untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi jelas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya mengandalkan lembaga yudikatif, kepolisian, dan beberapa komisioner yang dibentuk pemerintah. Apalagi integritas lembaga-lembaga penegak hukum tersebut kini dipertanyakan seiring dengan adanya oknum yang terlibat kasus korupsi dan suap.

Seiring dengan berkurangnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum maka pemberantasan korupsi, penting melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti

NU dan Muhammadiyah. Dua ormas ini layak dilibatkan karena memiliki sumber daya yang memadai. Keduanya juga memiliki jaringan organisasi yang mapan mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Jika sumber daya ini dimobilisasi maka pasti menjadi gerakan pemberantasan korupsi yang massif.

Potret pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum sejauh ini dapat dikatakan sangat lamban. Sangat mungkin kelambanan tersebut dikarenakan belum menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Karena itu, pelibatan ormas diperlukan untuk menambah daya dobrak pemberantasan korupsi. Apalagi sejauh ini ormas belum menunjukkan kiprah yang menonjol dalam pemberantasan korupsi. Program yang dijalankan lebih banyak menekuni kegiatan rutin berupa dakwah dan mengelola amal usaha.

Pada Oktober 2003, NU dan Muhammadiyah pernah bekerjasama dalam pemberantasan korupsi. Saat itu, ikrar kesepakatan melibatkan Ketua Umum PBNU Drs. A. Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Ahmad Syafii Maarif. Poin penting ikrar yang saat itu bernama *Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi* adalah keprihatinan dua ormas tersebut terhadap maraknya praktik korupsi. Tetapi sangat disayangkan, ikrar yang begitu ideal ternyata sebatas seruan moral, belum mewujudkan dalam gerakan aksi yang strategis dan sistematis.

NU bekerjasama dengan beberapa partnership telah menyusun buku pemberantasan korupsi berjudul *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh* (2006). Muhammadiyah juga menerbitkan buku serupa berjudul *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (2006). Buku ini jelas merupakan modal yang sangat berharga dalam usaha pemberantasan korupsi. Buku tersebut dapat menjadi panduan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui buku tersebut, NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Salah satu cara yang layak dilakukan untuk memberantas korupsi adalah membangun integritas publik (*public integrity*).

Persoalan integritas publik ini penting karena menjadi salah satu prasyarat terwujudnya *good governance*. Prinsip *good governance* menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pilar *civil society*, NU dan Muhammadiyah memiliki pengalaman berharga dalam membangun integritas publik. Indikatornya, dua ormas ini secara berkala telah memberikan laporan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pada *stakeholders*-nya. Keduanya juga telah melakukan banyak kegiatan advokasi penggunaan APBN/APBD.

Di level provinsi, Pimpinan Wilayah NU (PWNU) Jatim melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya (Lakpesdam) memiliki program “APBD for Poor”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawal penggunaan anggaran hingga benar-benar bermanfaat bagi rakyat. PWNU Jatim juga *me-launching* program “Forum Nahdliyin Peduli Anggaran”. Melalui beberapa kegiatan ini berarti NU telah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam rencana penyusunan anggaran melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Sementara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) telah mengangkat berbagai isu aktual, terutama tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Muhammadiyah Jatim juga telah melakukan dakwah anggaran dengan cara mengawal APBD dari bencana korupsi, kolusi, dan manipulasi. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar “melek APBD” sehingga tidak terjadi politik penganggaran untuk kepentingan pribadi pejabat publik.

Beberapa kegiatan yang dijalankan NU dan Muhammadiyah Jatim dapat menjadi *best practices*. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari keprihatinan ormas terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi APBD. Apalagi selama ini pemerintah selalu menempatkan APBD layaknya dokumen rahasia sehingga publik dianggap tidak perlu mengetahuinya.

Sepanjang Orde Baru, pihak yang paling mengetahui rincian APBN/APBD hanya legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam

pelaksanaannya hanya eksekutif yang mengontrol implementasi APBN/ABPD. Kondisi ini terjadi karena legislatif hanya berfungsi tukang stempel.

Sepanjang era reformasi, alam keterbukaan merambah ke lembaga-lembaga publik. Kesadaran politik masyarakat kian membaik. Berbagai elemen masyarakat menuntut agar ada transparansi dan akuntabilitas di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Termasuk dalam hal ini adalah transparansi APBN/APBD karena berkaitan dengan penganggaran untuk keperluan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sumber daya yang dimiliki, ormas mutlak dilibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Ormas dapat terlibat aktif dalam penyusunan, pengimplementasian, dan pengontrolan APBN/APBD. Ini penting karena APBN/APBD rawan diselewengkan untuk kepentingan politik, baik anggota legislatif maupun eksekutif.

INTEGRITAS DEPARTEMEN “SUCI” DIPERTANYAKAN

Transparansi pengelolaan dana tabungan calon jamaah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) sedang menjadi sorotan. Persoalan transparansi tabungan haji ini penting karena berkaitan dengan dana umat yang menurut hitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menembus angka Rp 38 triliun.

Dana sebesar ini jelas sangat berpotensi untuk diselewengkan. Karena itulah, KPK mengusulkan untuk menghentikan sementara waktu (moratorium) pendaftaran haji. Sayangnya, usulan KPK itu ditolak Kemenag dengan alasan belum memiliki mekanisme selain sistem antrean bagi calon jamaah haji. Apalagi tren pendaftaran haji terus meningkat sehingga menyebabkan antrean yang sangat lama.

Di sejumlah daerah daftar antrean haji bahkan telah mencapai 10 tahun. Kalau ada orang mendaftar tahun ini, 10 tahun mendatang baru bisa menunaikan ibadah haji. Karena pendaftar haji semakin meningkat, tantangan Kemenag adalah memberikan laporan yang *well audited* dalam mengelola dana haji yang kian menggunung. Ini penting agar label “agama” yang melekat dalam Kemenag benar-benar menjadi spirit. Dengan memberikan laporan yang transparan terhadap pengelolaan dana haji, Kemenag benar-benar akan menjadi departemen berwajah agama, bukan agama yang berwajah departemen.

Persoalan transparansi tampaknya harus menjadi perhatian karena menurut survei integritas yang dilakukan KPK pada November 2011, Kemenag diposisikan pada peringkat paling buncit. Survei integritas yang dilakukan KPK itu dilakukan di 88 instansi;

22 instansi pusat, 7 instansi vertikal, dan 69 instansi pemerintah daerah. Hasilnya, nilai indeks integritas Kemenag hanya 5,37, jauh di bawah integritas pusat yang mencapai 7,07.

Dengan nilai integritas yang sangat rendah, budaya suap berarti masih banyak terjadi. Tidak hanya tingkat pusat, di level kecamatan pun praktik gratifikasi dengan mudah dapat dijumpai. Di antara indikatornya dapat diamati dari besaran biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang seringkali tidak menentu.

Dana jamaah haji yang melimpah sejauh ini telah menjadikan Kemenag sebagai sorotan publik. Apalagi jika menengok biaya haji yang ditetapkan pemerintah ternyata paling tinggi jika dibandingkan negara lain. Padahal pelayanan yang diberikan masih sangat standar sehingga banyak dikeluhkan jamaah.

Dugaan penyelewengan dana haji dan hasil survei integritas KPK itu tentu saja telah mencoreng institusi Kemenag. Sebagai institusi yang menekankan motto “Ikhlash Beramal”, Kemenag sesungguhnya diharapkan banyak pihak dapat menjadi benteng dari kebobrokan moral bangsa. Tetapi, fakta malah menunjukkan terjadi beberapa kasus korupsi di lingkungan Kemenag.

Orang-orang di Kemenag yang setiap hari mengurus agama ternyata tidak mampu menjadi agen pemberantasan korupsi. Mereka justru terlibat dalam banyak kasus suap dan korupsi. Menurut catatan almarhum Rosihan Anwar, mantan menteri yang pertama kali berstatus terpidana dalam kasus korupsi adalah Wahib Wahab.

Pada Oktober 1962, mantan menteri agama dan putra sulung Abdul Wahab Hasbullah ini dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Publik juga masih ingat kasus penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) yang menyeret mantan Menteri Agama Said Agil Hussein al-Munawar, yang akhirnya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Sejauh ini keberadaan DAU yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 telah menjadi kontroversi. Bagi yang setuju menyatakan bahwa DAU dapat menjadi sumber dana yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan umat. Tetapi, justru di sinilah sumber

persoalannya karena pemanfaatan DAU seringkali tidak disertai pertanggungjawaban yang memadai.

Karena itulah, pihak-pihak yang tidak setuju menuntut agar kepres yang mengatur keberadaan DAU dicabut. Lebih dari itu, DAU dianggap tidak produktif. Selama menjadi dana abadi, akan sulit dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk kepentingan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana triliunan rupiah DAU yang dihimpun dari efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu pun sangat rawan disalahgunakan. Apalagi mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DAU belum jelas. Sebagai dana umat, pertanggungjawaban DAU juga seharusnya kepada umat. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan Kemenag. DAU juga seharusnya lebih banyak dimaksimalkan pemanfaatannya untuk perbaikan pelayanan ibadah haji.

Tetapi, fakta menunjukkan pelayanan ibadah haji dari tahun ke tahun terus menjadi sorotan jamaah. Pertanyaannya, mengapa di Kemenag yang sejatinya dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama masih muncul budaya korup sehingga integritasnya dianggap rendah? Salah satu jawaban yang sangat mungkin relevan adalah karena mereka belum sepenuhnya memahami kriteria tindakan yang dapat dikategorikan korupsi. Apalagi modus operandi korupsi sangat bervariasi.

Untuk itulah, Kemenag harus terus berkaca sehingga budaya integritas dapat melekat dalam diri setiap pegawai dan pejabatnya. Jika budaya integritas ini telah tumbuh, pada saatnya kita akan menyaksikan Kemenag benar-benar menjadi departemen "suci". Kemenag bahkan bisa menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan korupsi dan perwujudan nilai-nilai integritas di negeri ini. Karena itu, jangan menunggu KPK untuk menjadikan Kemenag sebagai institusi yang berintegritas.

BAGIAN LIMA
PUDARNYA
IDEALISME POLITIK

MASA DEPAN PARTAI ISLAM

Meski menggunakan “simbol” Islam, ternyata tidak sedikit partai politik yang tidak kebal terhadap konflik. Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dilanda konflik internal. Ini terkait laporan Yusuf Supendi, salah satu deklarator dan pendiri PKS, pada Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura), Luthfi Hasan Ishaq (Presiden), dan Anis Matta (Sekretaris Jenderal). Tiga elit PKS ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan dugaan penggelapan dana sumbangan calon gubernur DKI Jakarta, Adang Darajatun, pada saat mengikuti pemilihan gubernur 2007. Hilmi Aminuddin juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR dengan tuduhan melakukan fitnah.

Pertarungan yang melibatkan elit PKS ini menimbulkan beberapa tafsiran. Internal PKS yang kini sedang berkuasa menuduh Yusuf Supendi diperalat partai politik lain. Targetnya adalah merusak citra PKS. Tapi, tuduhan ini dibantah oleh Yusuf Supendi. Ia menyatakan bahwa langkahnya untuk memerkarakan elit PKS karena murni persoalan kode etik. Sementara kalangan di luar PKS menilai fenomena ini sebagai bentuk pertarungan kelompok idealis versus kelompok pragmatis dalam tubuh PKS. Kelompok idealis ini disebut sebagai faksi keadilan. Sementara kelompok pragmatis yang kini sedang berkuasa di PKS dinamakan faksi sejahtera. Pertarungan dua kelompok ini sesungguhnya telah berlangsung lama. Dalam konteks ini laporan Yusuf Supendi dapat menjadi pembenar adanya faksi-faksi di PKS.

Apa pun motivasi yang melatarbelakangi pelapor, fenomena ini jelas dapat menjadi potret buruk perilaku politisi Muslim.

Yang lebih menyedihkan, dugaan praktik kotor dalam politik ini dilakukan elit PKS yang dicitrakan bersih. Karena perilaku elitnya tidak mencerminkan nilai-nilai moral agama, maka jangan heran jika partai Islam kurang diminati masyarakat. Akibatnya, partai Islam tidak pernah menjadi besar.

Realitas bahwa partai Islam kurang diminati dapat diamati dalam pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2009 memang melahirkan harapan bagi partai Islam melalui perolehan suara PKS. Pada pemilu 2009, PKS berhasil meraih 57 kursi di DPR. Capaian ini mengalahkan partai berplatform Islam (PPP) dan partai berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman (PAN dan PKB).

Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman kurang diminati masyarakat sehingga tidak dapat menjadi besar? Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan pertanyaan ini. *Pertama*, perjalanan sejarah umat Islam Indonesia selalu diwarnai munculnya kecenderungan militerisasi. Akibatnya, umat Islam mengalami trauma politik yang luar biasa karena harus berhadapan dengan kolaborasi kekuasaan dan kekuatan militer.

Fenomena ini dapat diamati pada awal era Orde Baru hingga pertengahan 1980-an. Pada masa itu banyak tokoh Muslim yang menjadi korban politik kekuasaan Orde Baru melalui isu “Komando Jihad”. Kondisi ini kemudian turut membentuk lahirnya masyarakat yang bercorak kosmopolit di kalangan umat Islam. Artinya, umat Islam tidak lagi menempatkan politik dan kekuasaan sebagai satu-satunya orientasi perjuangan.

Sebagian elit Muslim pun mulai berkonsentrasi untuk menempuh perjuangan melalui jalur kultural. Misalnya, dengan mengembangkan institusi pendidikan, ekonomi-bisnis, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Perjuangan melalui jalur kultural ini telah mulai dapat dirasakan hasilnya. Tengoklah berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang siap mencetak generasi masa depan bangsa; lembaga ekonomi-bisnis yang mampu menjadi tumpuan dan memberdayakan potensi sosial-ekonomi umat; serta lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang siap memberikan pelayanan. Pilihan berjuang melalui jalur

kultural telah menghadirkan *blessing in disguise* (rahmat tersembunyi). Ini disebabkan tidak semua potensi umat tersedot untuk kepentingan politik.

Faktor *kedua* dikarenakan tema-tema yang wacanakan elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman banyak yang tidak berkaitan dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Tema seperti pemberlakuan syariat Islam dan pembentukan negara Islam, dipandang sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat. Tema ini hanya akan melahir romantisme sejarah tentang kejayaan umat Islam masa silam dan tidak mampu menjawab persoalan yang kini dihadapi umat.

Faktor *ketiga* yang juga penting dipertimbangkan berkaitan dengan performansi elit partai Islam. Rasanya, sudah banyak elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman yang tidak menunjukkan karakter sebagai politisi Muslim. Saat ini terasa sulit sekali menemukan politisi Muslim berkarakter seperti Moh. Natsir (Partai Masyumi). Salah satu buktinya, Natsir pernah dengan tegas menolak bergabung dalam kabinet pemerintahan Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI) pada masa demokrasi liberal karena merasa ada perbedaan prinsipil dengan kebijakan pemerintah.

Marilah kita bandingkan fenomena tersebut dengan sikap politik yang ditunjukkan elit partai Islam. Mereka yang pada saat kampanye menjanjikan akan memperjuangkan sesuatu yang dipandang ideal menurut ajaran Islam ternyata harus tunduk pada proses tawar-menawar politik.

Hal ini dapat dilihat dari kebingungan elit politik partai Islam dalam menentukan sikap terhadap pemerintah. Terkadang tampak sekali mereka ingin memosisikan diri sebagai oposisi yang kritis. Sementara pada saat bersamaan mereka juga tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap mendua ini jelas menunjukkan memudarnya idealisme dalam berpolitik.

Pertanyaannya; masih adakah peluang bagi partai-partai Islam untuk memperkuat basis konstituennya? Jawabannya tentu berpulang pada aktivis partai, legislator, dan eksekutif dari partai-partai Islam. Mampukah mereka memperbaiki citranya dari politisi yang berorientasi politik-kekuasaan menjadi politisi berkarakter?

Satu lagi yang perlu diperhatikan agar partai Islam menjadi besar adalah tema yang diwacanakan. Berkaitan dengan inilah tema seputar simbol keislaman jelas kurang relevan dan bahkan dapat memunculkan resistensi di kalangan Muslim nominalis. Karena itu, penting dipertimbangkan agar elit partai Islam terlibat mewacanakan persoalan sosial, ekonomi, dan melakukan program riil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika beberapa strategi ini dilakukan maka peluang partai berplatform Islam dan partai berbasis ormas keislaman untuk mendulang suara dalam pemilu 2014 akan tetap besar.

IMAGINASI MENDIRIKAN NEGARA ISLAM

Kasus pencucian otak yang dialami beberapa mahasiswa oleh aktivis jaringan Negara Islam Indonesia (NII) layak menjadi perhatian. Ini karena korban pencucian otak ternyata telah menyebar di beberapa perguruan tinggi. Bukan hanya pencucian otak, korban juga mengaku telah membayar sejumlah uang. Bahkan untuk membayar uang yang dikatakan sebagai “sedekah” itu korban diperbolehkan untuk berbohong pada orang tua. Kejadian ini menunjukkan bahwa aktivis NII telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mendirikan negara Islam.

Gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut sebagian pemikir Muslim juga dikatakan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Ali Abd Raziq, seorang pembaru Mesir, menyatakan bahwa syariat Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti kaum Muslim. Karena itu dalam kaitan dengan bentuk negara diserahkan pada konstruksi pemikiran manusia.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama juga tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah sepeninggal beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Buktinya, khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dipilih melalui cara yang berbeda. Ini berarti yang ditentukan dalam Islam hanya dasar-

dasar moral yang harus diikuti para pemimpin. Nilai-nilai moral keagamaan itu meliputi keadilan, musyawarah, kebebasan, dan persamaan.

Dengan mengikuti alur berpikir tersebut berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar. Bahkan dalam konteks kekinian cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan dunia modern. Realitas juga menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang bercorak lintas batas atau trans-nasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita ini baru sebatas imajinasi karena tidak pernah berhasil diwujudkan dalam kenyataan. Karena itu Oliver Roy (1994) menyebut cita-cita kelompok Islam politik ini sebagai *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam).

Gagasan mendirikan negara Islam juga dapat dinilai bertentangan dengan prinsip ajaran mengenai kebangsaan atau nasionalisme. Secara historis gagasan kebangsaan di dunia Islam berkembang sejak ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada akhir abad XVIII. Sebelum ekspedisi Napoleon, konsep kebangsaan dalam Islam masih sangat kabur. Paham kebangsaan hanya ditentukan melalui ajaran persaudaraan (*ukhuwah*) berdasarkan kesamaan agama. Yang dikenal saat itu adalah konsep "umat" yang berarti persatuan universal berdasarkan ikatan keimanan. Praktiknya, seluruh umat Islam dipersaudarakan berdasarkan kesamaan agama.

Paham kebangsaan yang dibawa Napoleon ini kemudian menginspirasi banyak pemikir Muslim. Salah satunya adalah Al-Thahthawi, seorang pembaru Mesir, yang mengenalkan konsep cinta tanah air pada bangsa Mesir. Gagasan cinta tanah air inilah yang kemudian mendorong suatu bangsa untuk membangun masyarakatnya. Sejak itulah dunia Islam yang sedang berada dalam kekuasaan bangsa asing satu-persatu membebaskan diri. Dengan demikian konsep umat yang didasarkan pada kesamaan agama mulai bergeser pada kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu bangsa.

Harus juga diakui, bahwa sebagian pemikir Muslim belum sepenuhnya menerima gagasan kebangsaan. Mereka masih te-

robsesi mewujudkan kesatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia berdasarkan kesamaan agama. Dalam konteks ini gagasan *Pan-Islamisme* al-Afghani dan *Jam'iyah Islamiyah* Rasyid Ridla dapat dijadikan contoh. Dua gagasan ini memiliki keprihatinan yang sama, yakni membangun solidaritas politik berdasarkan kesamaan aqidah. Hal ini dimaksudkan untuk menentang dominasi Barat terhadap dunia Islam. Bahkan Rasyid Ridla secara tegas berkeinginan untuk membangun kembali sistem kekhalifahan seperti periode *al-kulafa' al-rasyidun*. Gagasan bercorak trans-nasional ini tentu bertentangan dengan semangat nasionalisme yang digelorakan sebagian besar pemikir Muslim yang lain.

Wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini juga menunjukkan perkembangan paham keagamaan yang bercorak trans-nasional. Identifikasi paham keagamaan ini dapat ditemukan dalam beberapa gerakan keagamaan yang senantiasa memperjuangkan Islam simbolik. Beberapa gerakan ini secara demonstratif juga menonjolkan atribut yang dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam seperti berjubah, bercelak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Budaya Arabisme ini umumnya ditampilkan gerakan salaf di mana pun berada.

Meski gerakan Islam fundamental ini sangat bervariasi, tetapi umumnya memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (*din wa daulah*). Karenanya kelompok ini berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal. Yakni, Islam pada masa Nabi dan periode sahabat.

Cita-cita politik tersebut kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan trans-nasional. Bagi kelompok Islam politik, khilafah Islamiyah merupakan solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat Islam. Dengan mencitakan dunia Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki

tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara imajinasi mendirikan negara Islam yang bercorak kekhalifahan dibangun berdasarkan kesamaan agama dan seringkali mengabaikan batas-batas wilayah negara-bangsa (*nation state*).

Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam fundamental maka umat Islam harus menunjukkan jati diri ajaran yang lebih substantif. Cita-cita politik Islam harus dipahami bukan hanya pada bentuk pemerintahan. Yang jauh lebih penting adalah bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan itu harus senantiasa didasarkan pada moral keagamaan.

NASIONALISME VERSUS GERAKAN TRANS-NASIONAL

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional. Peringatan ini merujuk pada pendirian gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter. Meski pada awalnya lebih menunjukkan sifat-sifat Jawa, namun sejak 1930 Budi Utomo mulai membuka diri bagi orang yang berasal dari luar Jawa. Tanggal pendirian Budi Utomo pun diakui banyak pihak sebagai permulaan kebangkitan nasional atau gerakan kebangsaan.

Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Budi Utomo merupakan permulaan dari siklus 20 tahunan yang sangat menentukan perjalanan Indonesia. Seperti diketahui, pasca berdirinya Budi Utomo terjadi beberapa peristiwa yang sangat melegenda. Sumpah Pemuda pada 1928 merupakan episod kedua yang menunjukkan semangat kaum muda untuk menyatu sebagai suatu bangsa melalui ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Selanjutnya pada 1945 terlahir angkatan 45 yang sangat berperan dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pada 1966 ditandai dengan munculnya angkatan 66 yang berperan dalam menyelamatkan bangsa dari pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Era Orde Baru yang menggantikan Orde Lama juga ditandai gerakan bernada protes sejak 1988. Meski demikian, gerakan ini baru menunjukkan hasil spektakuler pada 21 Mei 1998 tatkala Presiden Suharto

menyatakan mundur. Sejak Orde Baru tumbang pada 1998, kita pun mengenal era reformasi hingga kini.

Sebagai gerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis-Jawa, Budi Utomo telah menunjukkan sifat terbuka. Ini dapat diamati melalui penerimaan anggota Budi Utomo terhadap kelompok dari luar. Dalam hal ini patut dikemukakan hubungan baik tokoh-tokoh Budi Utomo dengan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bahkan Dahlan berkesempatan untuk memberikan pelajaran agama pada anggota Budi Utomo. Tujuan jangka panjangnya adalah agar Dahlan dapat mengajar agama di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi faktanya banyak anggota Budi Utomo yang bekerja di pemerintahan dan sekolah yang didirikan pemerintah.

Saat Budi Utomo menyelenggarakan kongres pada 1917, Dahlan diundang secara khusus untuk memberikan ceramah. Hebatnya lagi, kongres itu ternyata diselenggarakan di rumah Dahlan. Peserta kongres sangat tertarik dengan ceramah Dahlan sehingga beberapa di antara mereka meminta untuk memberikan pengajian sekaligus membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya.

Data sejarah ini terasa penting karena dapat memberikan pelajaran bahwa telah terjadi sinergi antara pelopor gerakan nasionalisme dengan tokoh agama. Sinergi ini dimungkinkan karena di antara mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni ingin mengantar bangsa menjadi lebih maju, berdaulat, dan terbebas dari segala penindasan.

Pertemuan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis juga menunjukkan bahwa cita-cita gerakan kebangsaan itu sejalan dengan ajaran agama. Melalui gerakan kebangsaan, tokoh-tokoh nasionalis berjuang dengan sepenuh hati untuk mencapai kedaulatan bangsa. Sementara agama juga mengajarkan beberapa prinsip yang senada. Misalnya, ajaran tentang kemerdekaan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), dan kesamaan derajat (*al-musawa*).

Nilai-nilai agama ini tampak sangat relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan agar negeri ini merdeka, berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain.

Melalui kesamaan persepsi inilah tokoh-tokoh pergerakan, baik yang berlatar belakang nasionalis maupun agamis, bersatu untuk mewujudkan suatu organisasi politik yang dalam konteks modern disebut negara bangsa (*nation state*).

Kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan suatu bangsa jelas membutuhkan pengorbanan. Apalagi jika kita berkaca pada realitas kemajemukan bangsa Indonesia yang multietnik, agama, dan budaya. Dalam konteks inilah kita perlu merenungkan pernyataan teoretikus Perancis Ernest Renan (1823-1892) ketika mendefinisikan bangsa. Menurut Renan, bangsa adalah suatu perwujudan solidaritas tingkat tinggi yang dibangun oleh kesediaan berkorban pada masa lalu berikut kesiapan untuk menghadapi masa depan. Ini berarti agar kita tetap menjadi suatu bangsa maka dibutuhkan adalah kemampuan merawat solidaritas dan semangat rela berkorban.

Untuk merawat nilai-nilai solidaritas dan pengorbanan yang menjadi ikatan suatu bangsa ternyata tidak mudah. Apalagi saat ini keinginan untuk memperkuat gagasan tentang kebangsaan memperoleh tantangan seiring dengan menguatnya posisi gerakan keagamaan yang bercorak trans-nasional. Identifikasi gerakan keagamaan ini dapat ditemukan dalam beberapa kelompok Islam yang senantiasa memperjuangkan simbol-simbol keislaman.

Meski gerakan keagamaan ini sangat bervariasi, tetapi umumnya mereka memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, ajaran Islam itu mencakup agama dan negara (*Islam al-din wa al-dawlah*). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Bagi gerakan keagamaan yang bersifat fundamental, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan.

Kelompok fundamental ini juga berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal, yakni pada masa nabi dan sahabat. Cita-cita kelompok Islam politik ini kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan trans-nasional dalam bentuk khilafah.

Bagi kelompok ini, sistem khilafah merupakan solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat.

Dengan mencitakan dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan nasionalisme juga mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara gagasan trans-nasional yang dicitakan berbagai gerakan fundamental bersifat lintas batas dan didasarkan kesamaan agama. Pandangan ini jelas bertabrakan dengan gagasan nasionalisme dan hukum internasional yang mengatur batas wilayah suatu bangsa. Karena itu, tugas kita adalah mengajak kelompok-kelompok fundamental untuk terus berdialog. Kita harus yakinkan bahwa kesadaran berbangsa itu sejalan dengan ajaran agama dan keinginan para pendiri negeri ini.

MENYOAL IDEALISME BERPOLITIK

Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 oleh KPU kini sedang berlangsung. Yang menarik, di antara partai yang turut mendaftar ternyata banyak dibidani “pemain lama”. Mereka sebelumnya dikenal aktivis partai tertentu dan kini telah berganti baju dengan partai baru.

Jika kita telisik lebih jauh, fenomena orang berpindah partai ini ternyata menjadi tren, terutama sejak era reformasi. Apalagi era ini telah memberikan ruang kebebasan yang luar biasa seiring dengan kebijakan multipartai. Mereka yang berganti partai pun mengajukan alasan seperti perbedaan idealisme, visi dan misi, serta rasa kecewa karena tidak memiliki kesempatan tampil dalam pemilihan calon anggota legislatif dan kepala daerah.

Apa yang menarik disorot dari fenomena mudahnya seseorang berganti partai pada setiap menjelang pelaksanaan pemilu? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa ternyata idealisme dalam berpartai telah mengalami penurunan kadar. Jika dulu orang masuk partai bertujuan untuk memperjuangkan idealisme demi kepentingan rakyat, terutama konstituen yang diwakili.

Sebaliknya, kini orang mendirikan partai lebih banyak dilatarbelakangi kepentingan pragmatis-jangka pendek sehingga terasa sekali idealisme dalam berpartai itu tergerus secara tajam. Aktivis parpol dijadikan sebagai profesi dan lahan pekerjaan. Jika kepentingan ini tidak tercapai, mereka pun dengan mudah berganti baju dengan mendirikan parpol baru.

Fenomena ini sekaligus menegaskan kebenaran doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*.

Ditegaskan bahwa politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam politik juga dikenal hukum yang tak terelakkan bahwa tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Aktivistis parpol juga sering menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu biasa.

Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan. Akibatnya, fenomena perpecahan pun sering terjadi dalam dunia politik. Kultur “memecah” dan “berpecah” dalam partai pun seakan menjadi pemandangan umum. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak aktivis partai yang karena perbedaan pendapat atau pendapatan dengan mudah menyatakan keluar dari partai lama dan mendirikan partai baru.

Fenomena memudarnya idealisme dalam berpartai juga dapat diamati melalui pendirian partai baru oleh pemain lama karena partainya tidak lolos *electoral threshold*. Pemilu sepanjang era reformasi memang memberlakukan sistem *electoral threshold* sebagai instrumen untuk mengeliminasi fragmentasi politik yang terus bertambah. Lalu melalui mekanisme *parliamentary threshold* realitas multipartai dapat diminimalkan.

Hanya, mekanisme ini ternyata tidak mampu meminimalisasi hasrat orang untuk mendirikan parpol. Realitas bahkan menunjukkan bahwa syahwat politik aktivis partai menunjukkan tren yang meningkat. Kenyataan bahwa orang begitu mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru menunjukkan bahwa mayoritas mereka adalah pekerja politik. Parpol dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan segala sesuatu dengan lebih mudah.

Mereka terpesona dengan godaan kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan, yang dikiranya dapat diraih secara instan. Akibatnya, saat ini sangat susah menemukan aktivis partai yang memiliki idealisme jempolan. Mereka para aktivis partai idealis ini adalah praktisi politik yang berniat dengan sepenuh hati untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dianggap fundamental.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah budaya politik bermoral, bermartabat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka biasanya tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kekuasaan dan kepentingan politik jangka pendek. Mereka ini jelas termasuk politisi yang berkarakter dan berpendirian teguh. Tipologi politisi idealis ini

tentu sangat dibutuhkan di tengah buruknya pandangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, termasuk parpol. Politisi idealis biasanya selalu menyatukan kata dan perbuatan.

Mereka menjadi aktivis parpol dengan visi, misi, dan nilai-nilai kejuangan yang jelas. Politik bagi mereka adalah jalan panjang untuk memperjuangkan sebuah idealisme. Namun, sangat disayangkan kebanyakan aktivis parpol biasanya hanya mampu berpidato lantang dalam kampanye dan mengumbar janji-janji politik. Jika kekuasaan telah dicapai, janji-janji politik pun tidak akan pernah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan.

Karakter ini telah menjadi kecenderungan mayoritas aktivis politik. Tidak peduli parpol Islam maupun parpol sekuler. Mereka telah larut dalam tawar-menawar kekuasaan dan kepentingan politik. Sementara perbaikan nasib rakyat dan komitmen pada nilai-nilai moral politik yang pernah dijanjikan diabaikan begitu saja. Beberapa peristiwa seperti kasus suap, korupsi, dan perempuan/laki-laki, yang melibatkan anggota legislatif dan aktivis parpol, menunjukkan bahwa idealisme dalam berpartai telah benar-benar tergerus.

Rasanya, dunia perpolitikan saat ini sangat merindukan ideolog-ideolog politik semacam Soekarno dan Ali Sastroamijoyo (PNI), Mohammad Roem dan Moh. Natsir (Masyumi), serta KH Idham Chalid dan Sunarjo (NU). Mereka layak dijadikan teladan dalam berpolitik. Bukan saja dalam membangun hubungan baik ketika sedang dilanda perbedaan, melainkan juga idealis dalam perjuangan dan kesederhanaan yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konteks ini rasanya penting dipesankan pada aktivis parpol yang kini sedang mendaftarkan partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Marilah meneladani ideolog politik yang pernah dimiliki negeri ini. Parpol harus dijadikan wadah memperjuangkan idealisme. Dengan begitu, aktivis parpol yang akan *running* dalam pemilu mendatang adalah pribadi-pribadi yang berkarakter sehingga tidak mudah tergiur kepentingan pragmatis jangka pendek.

TATKALA ORANG BEREBUT KEKUASAAN

Pemilu 2014 untuk presiden dan anggota legislatif masih lama. Tetapi persiapan untuk meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif telah dimulai. Kandidat presiden dan calon anggota legislatif mulai rajin melakukan survei untuk mengetahui popularitas dan elektabilitasnya.

Tidak hanya itu, mereka pun semakin intensif menyapa calon pemilih dengan cara turun langsung, melalui media massa, dan pemasangan baliho di beberapa tempat strategis. Karena itu jangan heran jika kita sering menyaksikan mereka memasang iklan di televisi, radio, dan gambar diri yang ditempatkan di beberapa sudut kota. Meski sangat mengganggu pemandangan kota dan bahkan menyakitii pepohonan, namun mereka seakan tak mau peduli.

Dalam situasi ini jurus tebar pesona sebagai bagian dari investasi politik untuk pemilu mendatang semakin marak. Bahkan saat ini beberapa calon juga telah membentuk tim sukses mulai tingkat pusat hingga basis massa. Tentu bukan hanya tim sukses yang disiapkan. Semua kebutuhan mulai finansial hingga logistik lainnya telah diperhitungkan dengan matang. Dalam era pemilu langsung ini persoalan “gizi” wajib disediakan calon jika ingin sukses.

Persiapan untuk pemenangan pemilu ternyata bukan hanya dilakukan elit politik tingkat pusat, melainkan juga mereka yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Pertanyaannya, mengapa dalam proses meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif mereka harus bersusah payah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita berka-ca pada kisah pengusiran Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kedu-anya terusir karena tergoda oleh bujuk rayu setan dengan ma-kan buah dari *syajarah al-khuldi* (pohon keabadian). Menurut bisikan jahat setan, jika Adam-Hawa mau makan buah itu, keduanya akan merasakan kenikmatan surga dalam waktu yang sangat lama dan memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa. Singkat kisah, keduanya memakan buah khuldi sehingga terusir dari surga (QS. Thaha: 120-121).

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah pengusiran Adam dan Hawa? Menurut saya, paling tidak ada dua pelajaran pent-ing yang dapat diambil. *Pertama*, ternyata manusia sangat mudah tergoda kekuasaan yang dipersepsi akan dapat membawa pada kenikmatan hidup di dunia. Orang yang memiliki syahwat poli-tik tinggi akan selalu berpikir untuk dapat menikmati kekuasaan di dunia ini dalam waktu yang sangat lama.

Kedua, bahwa keinginan orang untuk mempertahankan kekuasaan itu dikarenakan tidak ingin jika kekuasaan yang telah diraih dengan susah payah harus berpindah tangan pada orang lain. Karena itu kekuasaan yang telah diraih harus dipertahankan selama mungkin. Jika misalnya kekuasaan harus berpindah ta-ngan maka diusahakan agar kekuasaan itu jatuh pada istri, anak, menantu, kerabat, dan teman dekatnya. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang tidak boleh maju lagi karena sudah berkuasa dua periode kemudian mencalonkan orang-orang terdekatnya.

Selain bertujuan agar kekuasaan tidak berpindah tangan, strategi mencalonkan orang-orang terdekat dalam pemilu ada-lah untuk menjamin dirinya selamat dari persoalan hukum pas-ca tidak lagi berkuasa. Itu dapat dimaklumi karena ada sekian banyak mantan pejabat publik yang harus berurusan dengan hukum hingga harus rela meringkuk di tahanan setelah purna tugas. Dengan demikian dapat dipahami penyebab orang saling berebut kekuasaan. Bahkan terkadang dalam persaingan mem-perebutkan kekuasaan itu seseorang harus melakukan kampanye hitam (*black campaign*) pada kompetitornya.

Jelas tidak ada larangan bagi seseorang untuk memperebut-kan kekuasaan. Apalagi jika dalam perebutan kekuasaan itu di-

lakukan secara *fair* dengan persaingan yang sehat dan bermartabat. Sebab, berjuang melalui jalur politik dan kekuasaan itu merupakan hak setiap warga negara. Apalagi jika tujuan yang ingin dicapai adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Yang penting, jika kekuasaan telah berhasil diraih maka yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Seorang yang berhasil meraih kekuasaan berarti sedang berada dalam puncak karir politik. Dalam kondisi ini usaha membangun kedekatan rohani pada Tuhan mutlak diperlukan agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kekuasaan.

Kandidat presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan calon anggota legislatif yang sedang melakukan persiapan untuk *running* dalam pemilu harus berhati-hati dengan bujuk rayu kekuasaan. Pesan ini penting karena, seperti diutarakan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam semua jabatan publik yang dikompertisikan secara terbuka mayoritas digunakan sebagai ajang mencari pekerjaan.

Pernyataan tersebut memang dikemukakan untuk merespon keterlibatan beberapa pejabat publik yang bersifat *ad hoc* dalam kasus korupsi dan suap. Tetapi substansi pernyataan ini layak dijadikan peringatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk meraih kekuasaan. Sebab fakta menunjukkan telah banyak pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang terlibat kasus korupsi, suap, dan perempuan, hingga harus berurusan dengan aparat.

Penting dipesankan pada mereka yang sedang antri di bawah pohon khuldi, agar dalam berkompetisi meraih kekuasaan mampu memberikan teladan pada rakyat. Sebab kekuasaan yang diraih dengan cara terhormat pasti akan melahirkan pemimpin dan pejabat publik yang dicintai rakyat. Jika ini yang dilakukan maka mereka berarti turut menyemai nilai-nilai demokrasi di negeri tercinta.

MEMAHAMI BUDAYA KONTRAK POLITIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) jatuh pada 8 Juli 2009. Jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun sudah ditentukan pada 10-16 Mei 2009. Ibarat berpacu dengan waktu, elit partai pun kian agresif melakukan berbagai pertemuan untuk membangun kesepahaman politik. Karena itu tidak mengherankan jika perkembangan politik berlangsung begitu cepat. Partai Golkar yang sebelumnya mengalami hubungan putus-sambung dengan Partai Demokrat akhirnya benar-benar menyatakan berpisah.

Melalui mekanisme rakernas Partai Golkar akhirnya memberikan mandat penuh pada Jusuf Kalla (JK) untuk membangun silaturahmi politik dengan pimpinan partai lain. Bahkan lebih dari itu, JK telah mendeklarasikan diri sebagai capres dengan menggandeng Wiranto sebagai cawapres. Deklarasi JK sebagai capres tentu akan menambah bursa persaingan dalam pilpres nanti. Sebelumnya, SBY dan Megawati telah memastikan diri akan ambil bagian untuk *running* dalam pilpres. Bahkan sangat mungkin akan muncul capres alternatif yang sangat lantang mengusung tema perubahan, seperti digelindingkan Rizal Ramli dan Prabowo Subianto.

Perkembangan politik yang kian dinamis tersebut menyebabkan elit partai seperti beradu lari melakukan safari politik dengan elit partai lain untuk menjajagi kemungkinan membangun koalisi. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan para pimpinan partai pun tidak segan melakukan kesepahaman politik dan kemudian mempublikasikan ke media massa. Usaha elit partai untuk mem-

bangun kesepahaman politik inilah yang kini populer disebut kontrak politik.

Sebagai tren baru dalam budaya politik di Indonesia kontrak politik sesungguhnya telah menjadi fenomena sejak pemilu 2004. Kontrak politik menjadi semakin intensif dilakukan seiring dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung mulai presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Bahkan saat berkampanye pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, para calon anggota legislatif (caleg) banyak yang melakukan kontrak politik dengan calon pemilihnya. Misanya, ada caleg yang berani meneken kontrak politik untuk memberikan seluruh gaji yang akan diperoleh pada rakyat jika terpilih menjadi legislator.

Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan antarelit partai, antara caleg dengan calon pemilih, antara elit partai dengan calon pejabat pemerintahan yang akan didukung, atau rakyat dengan pemimpinnya. Yang harus dicermati, dalam kasus kontrak politik yang dilakukan elit partai dengan calon pejabat pemerintah, posisi rakyat seringkali hanya sebagai pemandu sorak (*cheer leaders*) dan alat mobilisasi. Dalam posisi ini rakyat tetap akan mengalami marginalisasi baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan secara politik rakyat dapat mengalami tuna kuasa (*powerlessness*).

Di era reformasi ini semua orang berpeluang menjadi pelaku kontrak politik. Termasuk dalam hal ini adalah elit agama (kyai) yang pada masa sebelumnya hanya berjuang di ranah kultural. Apalagi saat ini banyak elit agama yang telah menjadi pejabat publik. Kondisi ini tentu sangat memungkinkan mereka menjadi pemain dalam budaya kontrak politik. Sebagian elit agama bahkan telah sedemikian jauh bermain dalam ranah politik praktis. Realitas ini kemudian menyebabkan munculnya suara sumbang pada hampir setiap ada kontrak politik. Dalam hal ini kontrak politik sering dianggap permainan di tingkat elit.

Dalam tradisi Islam, kontrak politik kurang lebih dapat disamakan dengan konsep bai'at (*al-bay'ah*). Konsep ini dapat dipahami bahwa asal sebuah negara disebabkan adanya keinginan bersama kelompok masyarakat untuk mendirikan negara dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang tunduk dan patuh

pada pimpinan. Dalam perspektif ini, negara dapat berdiri dikarenakan adanya kontrak sosial (*al-'aqd al-ijtima'iy*) yang terjadi antara pemimpin dan rakyat dalam bentuk bai'at.

Ibn Khaldun, sosiolog Muslim kenamaan, menyatakan bahwa bai'at adalah perjanjian atas dasar ikatan kesetiaan rakyat dengan pemimpinnya. Hampir sama dengan tradisi Islam, di Barat juga dikenal konsep kontrak sosial (*social contract*) seperti dikemukakan J. J. Rousseau (1712-1778). Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antarunsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama (*public good*).

Perbincangan mengenai kontrak politik berikut implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai sesungguhnya dapat dijelaskan dengan meminjam kerangka pikir Peter Blau mengenai teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa pertukaran dan kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan bahwa transaksi dan kekuasaan adalah akibat dari pertukaran yang membentuk tekanan sosial sehingga harus dipelajari dari dimensi pertukaran itu sendiri.

Ketika seseorang menggunakan kekuasaan terhadap yang lain, berarti ia telah menekan dan menarik ongkos dari orang yang dibebani kekuasaan tersebut. Proses pertukaran dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak menonjol. Maka tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai "siapa mendapatkan apa" biasanya menjadi perhatian utama.

Dengan penjelasan tersebut berarti upaya elit partai untuk membangun budaya kontrak politik harus dipahami dalam konteks teori pertukaran. Tetapi, kita tentu tidak boleh berburuk sangka terlebih dulu. Karena jika benar dalam kontrak politik terdapat kalkulasi sosial, ekonomi, dan politik, maka hal itu harus dipahami dalam konteks yang lebih proporsional. Misalnya, pada setiap kontrak politik meniscayakan adanya ongkos politik. Hanya saja akan lebih elegan jika tujuan kontrak politik adalah untuk memberikan jaminan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), kepastian hukum (*law enforcement*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nah, persoalannya kini berpulang pada komitmen elit partai yang sedang dan akan melakukan kontrak politik. Adakah dalam kontrak politik ini dilandasi kepentingan pragmatis jangka pendek. Atau sebaliknya, motivasi melakukan kontrak politik adalah kepentingan jangka panjang dalam rangka membangun bangsa dan negara menjadi lebih kuat, sejahtera, dan bermartabat. Publik tentu berharap agar komitmen jangka panjang ini yang dijadikan dasar melakukan kontrak politik.

Terakhir, kontrak politik juga harus dilakukan secara transparan, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal ini elit partai tentu berkewajiban mendewasakan dan bahkan memberikan pencerahan pada publik agar tidak selamanya tereksploitasi oleh kepentingan elit yang melakukan kontrak politik.

MENDAMBAKAN LEGISLATIF WELL EDUCATED

Kontroversi pembangunan tol tengah kota terus menggelinding. Berbagai komponen masyarakat yang mengatasnamakan Warga Surabaya Menggugat secara resmi telah menyuarakan aspirasinya ke DPRD Surabaya. Intinya mereka menentang pembangunan tol tengah kota. Penolakan terhadap mega proyek tersebut semakin menguat seiring dengan sikap warga yang bakal terkena dampak akibat pembangunan tol tengah kota. Mereka bersepakat menolak untuk menjual lahan yang akan dilewati proyek tersebut.

Tanggapan di internal anggota DPRD Surabaya juga terbelah. Sebagian besar mereka setuju dan sebagian yang lain masih menunjukkan sikap mengambang. Tetapi kalangan akademisi dan profesional tetap pada pendiriannya, bahwa tol tengah kota akan berdampak buruk terhadap pembangunan Surabaya.

Akademisi dan ahli tata ruang kota, Profesor Johan Silas, termasuk yang paling aktif menyuarakan penolakan terhadap pembangunan tol tengah kota. Menurutnya, jalan lingkaran barat dan timur dianggap lebih efektif untuk mengurai kemacetan di jantung kota. Pakar transportasi dari ITS, Haryo Sulistyarsa, juga telah memberikan pendapat senada. Jika para akademisi yang sangat berkompeten telah menyuarakan pendapat, pertanyaannya: apa lagi yang hendak diperjuangkan anggota DPRD Surabaya?

Jika DPRD Surabaya tetap berkeras hati memaksa pemerintah kota untuk membangun tol tengah kota maka patut diduga ada motif tertentu di balik sikap tersebut. Bahkan DPRD dapat dikatakan telah melampaui tugas dan wewenangnya karena persoalan pembangunan

berada dalam ranah eksekutif. Karena itulah maka kita patut mengajak anggota DPRD untuk berpikir yang terbaik bagi warga Surabaya, bukan untuk kepentingan siapa pun, termasuk investor.

Bukankah pada saat ikut pemilu calon anggota legislatif telah berikrar untuk membela kepentingan warga? Karena itu, semua program yang diputuskan pemerintah kota dan legislatif harus benar-benar bermanfaat untuk warga. Peringatan kelompok akademisi dan profesional rasanya cukup untuk dijadikan dasar dalam mengambil sikap mengenai kontroversi pembangunan tol tengah kota.

Di samping mendapat penolakan dari akademisi dan profesional, rencana pembangunan jalan tol tengah kota dapat dianggap mengganggu salah satu *branding* Surabaya sebagai kota yang hijau dan bersih (*green and clean*). Ruangan terbuka dan hijau sebagai sarana berkumpul warga untuk melepas kepenatan dan menikmati udara segar terancam hilang. Instansi lain, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), juga telah mengingatkan potensi kerusakan pipa yang telah ditanam di sepanjang jalan yang akan dilewati proyek tol tengah kota.

Ini belum termasuk ongkos sosial ekonomi yang harus ditanggung warga dan pemerintah. Kalau semua peringatan ini belum juga mengubah pola pikir sebagian anggota DPRD Surabaya rasanya kita telah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Tetapi, kita yakin bahwa dinamika politik akan berkembang dengan cepat. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah kota dan legislatif.

Warga kota yang telah memercayakan sebagian urusan publik pada legislatif layak berharap agar para legislator lebih bersikap *well educated*. Apalagi realita menunjukkan bahwa *resources* anggota dewan juga terkadang sangat terbatas. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan kota yang begitu kompleks perlu ada kesadaran dengan cara banyak mendengar, termasuk masukan dari kalangan akademisi, profesional, dan warga. Harapan ini tidak hanya penting disuarakan pada legislatif, melainkan juga eksekutif.

Penelitian Profesor Eko Prasjo dari Universitas Indonesia tentang *Otonomi Daerah dan Perwujudan Good Governance* (2007) menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat seringkali tidak menguasai persoalan dengan baik. Bahkan dalam banyak hal DPRD sering terjebak dengan pendekatan teknokratis pemerintah daerah (eksekutif). Juga dikatakan

bahwa alokasi anggaran dalam penentuan program yang disepakati legislatif dan eksekutif terkadang belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mayoritas masyarakat. Maka, tidak heran jika sering terjadi kesenjangan dalam merumuskan dan melaksanakan program kegiatan, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

Berkaitan dengan keberadaan sebagian anggota DPRD Surabaya yang tidak mau menunjukkan empatinya terhadap pemikiran yang disuarakan akademisi dan profesional, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan hukuman dengan tidak memilih kembali pada pemilu mendatang. Hukuman ini memang tidak memuaskan karena berarti ada masa tunggu yang cukup lama. Tetapi inilah resiko dari pilihan politik warga kota yang pada pemilu lalu memberikan suaranya pada calon anggota legislatif yang kini telah berhasil menjadi legislator.

Harus diingat, bahwa dalam politik berlaku hukum yang bersifat *irreversible*. Artinya, jika pilihan politik telah dijatuhkan maka konsekuensinya dukungan itu tidak dapat ditarik begitu saja sebelum saatnya tiba. Mekanisme politik melalui pemilu mengharuskan kita untuk mengevaluasi pilihan setiap lima tahun sekali. Pada saat itulah kita berkesempatan memilih orang-orang terbaik untuk menjadi wakil rakyat. Mekanisme ini juga berlaku bagi pejabat publik dari eksekutif yang dipilih melalui pemilu.

Rendahnya kompetensi anggota legislatif juga dikarenakan kesalahan elit partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota, terutama pada saat pencalonan anggota legislatif. Rekrutmen calon anggota legislatif seringkali lebih mengedepankan popularitas dan kemampuan finansial dibanding kompetensi yang dimiliki. Akibatnya, mereka yang berhasil lolos sebagai legislator adalah orang-orang yang populer dan beruang.

Kita memang tidak dapat menyalahkan begitu saja anggota dewan yang terpilih. Sebab, orang yang memiliki kompetensi di bidang yang sangat dibutuhkan lembaga legislatif seringkali ragu-ragu jika harus terjun di dunia politik. Pada konteks inilah rasanya kita menyadari betapa penting berjuang melalui ranah politik praktis. Ini berarti harus ada kesediaan dari sebagian akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam politik. Dengan cara ini maka semua produk kebijakan yang lahir dari lembaga-lembaga publik seperti eksekutif dan legislatif diharapkan akan berorientasi pada kepentingan rakyat.

PENCALONAN FIGUR NON KADER DALAM PILKADA

Ada fenomena yang menarik diamati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan di 18 kabupaten/kota Jatim sepanjang 2010. Fenomena yang dimaksud adalah munculnya banyak calon non kader yang diusung partai politik atau gabungan partai politik (parpol). Salah satunya, pasangan calon walikota (cawali) dan calon wakil walikota (cawawali) yang akan *running* dalam pilkada Surabaya. Sejauh ini setidaknya terdapat lima pasangan cawali dan cawawali, yakni: Tri Rismaharini-Bambang DH (PDIP), Arif Afandi-Adies Kadir (Demokrat dan Golkar), Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansyur (PKB dan Gerindra), Fandi Utomo-Yulius Bustomi (PKS, PDS, PKNU, dan PPP), dan Fitra Djaja-Naen Soeryono (independen).

Jika ditelisik lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa tidak semua pasangan calon yang diberangkatkan parpol atau gabungan parpol tersebut merupakan kader partai pengusung. Misalnya, Tri Rismaharini yang diusung PDIP. Selama ini Tri Rismaharini lebih dikenal sebagai profesional dan birokrat yang memiliki karir cemerlang. Sebelum mencalonkan diri, Tri Rismaharini adalah pejabat karir yang sangat sukses menahkodai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Balitbang, dan Bappeko Surabaya. Demikian halnya dengan Bagio Fandi Sutadi (Pak Tadi) jelas bukan kader PKB dan Gerindra. Pak Tadi adalah pejabat yang memulai karir dari bawah dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Walikota Surabaya.

Ada juga nama Fandi Utomo yang menjadi aktivis partai Demokrat tetapi diusung gabungan parpol lain. Selain sebagai

aktivis partai, mantan tim pemenang Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya ini juga dikenal pengusaha sukses. Bahkan keberhasilan Fandi Utomo menyandingkan PKS, PKNU, dan PPP dengan PDS dapat dianggap sebagai capaian yang luar biasa. Hal ini karena gabungan parpol pengusung pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustomi sangat pluralis. Ada perbedaan ideologis yang sangat menonjol di antara gabungan parpol pengusung.

Catatan khusus layak diberikan pada PKS yang mau bergabung dengan PDS untuk mengusung pasangan calon non kader. Bukan hanya publik yang dibuat terhenyak. Kader dan simpatisan PKS pun tidak pernah memperkirakan sebelumnya. Tidak mengherankan jika pilihan politik PKS ini dianggap aneh. Akibatnya, PKS harus menerima kenyataan dicemooh konstituen dan simpatisannya. Apalagi terdengar suara miring yang menyatakan bahwa pilihan tersebut sesungguhnya tidak gratisan. Jika kabar ini benar adanya maka tentu saja tabiat politik aktivis PKS ini sangat tidak sesuai dengan citra yang selama ini ditampilkan di depan publik.

Sebelumnya PKS telah mensosialisasi Yulyani, kader terbaik dan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2004-2009, untuk diusung sebagai cawali atau cawawali. Tim pemenang Yulyani pun telah dibentuk dan bekerja. Tetapi, tiba-tiba elit PKS mengalihkan dukungan pada Fandi Utomo-Yulius Bustomi. Kader dan simpatisan PKS yang terkenal militan pun dibuat terkejut. Bahkan hingga kini belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai pilihan politik PKS.

Padahal dalam pemilu 2009, PKS merupakan partai pemenang ketiga bersama PKB dan Golkar, yang sama-sama memperoleh lima kursi di DPRD Surabaya. Artinya, PKS sesungguhnya memiliki modal sosial yang cukup untuk mengusung calon sendiri. Tetapi, dinamika politik terkadang memang berkembang begitu cepat. Publik pun harus mulai terbiasa dengan kejutan-kejutan yang kerap terjadi dalam politik.

Fenomena pencalonan figur non kader dalam pilkada rasanya patut mendapat penjelasan. Menurut saya, ada beberapa alasan yang kiranya dapat menjelaskan ketertarikan parpol atau gabungan parpol mengusung calon non kader. *Pertama*, dalam era pilkada langsung oleh rakyat memang dibutuhkan figur yang

populer. Karena itu, sebelum partai membuat keputusan senantiasa didahului dengan mengadakan survei mengenai popularitas dan elektabilitas calon.

Figur yang disurvei biasanya merupakan tokoh yang populer atau mereka yang mendaftar melalui parpol tersebut. Berdasar hasil survei inilah calon akan diputuskan. Karena parpol biasanya membuka pendaftaran secara terbuka, maka banyak calon non kader yang mendaftar. Dengan demikian sangat dimungkinkan hasil survei dimenangkan calon non kader yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Dengan mengandalkan figur yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak peduli kader atau non kader, maka peluang memenangkan pilkada akan terbuka.

Kedua, jujur harus diakui bahwa parpol seringkali tidak mempersiapkan secara serius kader terbaiknya untuk maju dalam pilkada. Bisa juga dikatakan bahwa parpol sesungguhnya mengalami kekurangan kader yang berkualitas, populer, dan memiliki elektabilitas tinggi. Kondisi ini jelas harus menjadi otokritik bagi parpol dalam menyelenggarakan kaderisasi. Di samping itu, minimnya kader berkualitas juga diakibatkan oleh buruknya sistem perekrutan keanggotaan dalam parpol. Faktor ini penting menjadi perhatian karena seringkali kader partai yang memiliki loyalitas tinggi, kredibel, dan dukungan basis massa riil harus kalah bersaing dengan calon baru yang memiliki kekuatan modal finansial.

Fenomena ini dapat diamati dalam setiap pemilihan ketua partai, rekrutmen calon anggota legislatif, dan pencalonan kepala daerah. Dalam proses pemilihan beberapa even politik tersebut seringkali terjadi marginalisasi kader yang telah berkeringat, menunjukkan loyalitas, dan bahkan berdarar-darah dalam memperjuangkan parpol. Para kader itu dipaksa harus mengalah pada pendatang baru yang belum banyak berjuang tetapi memiliki modal dan kedekatan dengan elit parpol. Budaya ini jelas sekali terjadi pada saat penentuan calon yang akan berlaga dalam pilkada.

Ketiga, pilihan parpol terhadap figur non kader sering kali didasarkan pada kalkulasi untung-rugi. Tegasnya, ada hitung-hitungan ekonomi yang melatarbelakangi pilihan parpol ketika mengusung calon dalam pilkada. Maka, tawar-menawar harga antara calon dan parpol pengusung dan pendukung menjadi

fenomena yang lumrah terjadi. Para calon jelas membutuhkan parpol sebagai kendaraan politik untuk dapat ikut berkompetisi dalam pilkada. Parpol pengusung pun tidak akan memberikan kendaraan secara gratisan.

Dengan dalih untuk membesarkan partai, biaya sosialisasi, biaya logistik, dan kepentingan tim pemenangan, maka parpol biasanya mengajukan penawaran harga. Jadilah para calon itu ibarat sapi perahan parpol. Akibat budaya politik yang *high cost* ini para calon pun harus menyiapkan modal yang besar untuk maju dalam pilkada. Barangkali karena merasa telah mengeluarkan modal, maka yang ada dalam benak pikiran calon adalah mengembalikan modal secepat mungkin ketika memenangkan pilkada. Dari sinilah praktik penyelewengan jabatan itu dimulai. Maka, tidak mengherankan jika upaya pemberantasan budaya korupsi seringkali harus menghadapi jalan berliku nan terjal.

Dari beberapa alasan tersebut tampaknya penjelasan yang begitu dominan dipahami oleh publik adalah argumentasi yang ketiga. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian publik pun mengenal istilah mahar politik, ongkos politik, *money politic*, dan bahkan sedekah politik. Intinya, bahwa fenomena pencalonan figur non kader itu banyak berkaitan dengan masalah finansial. Apalagi tabiat di kalangan politisi selalu menekankan politik kepentingan. Juga ada guyonan di kalangan politisi, bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.

Budaya tersebut jelas selaras dengan doktrin politik yang menyatakan: "who gets what, when, and how". Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik itu berkaitan dengan persoalan mengenai "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya." Dalam politik juga dikenal pernyataan bahwa tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Artinya, jika kepentingan sudah ketemu, maka segala persoalan dapat dibicarakan.

PERLU REKONSILIASI PASCA PILWALI

Hasil pemilihan walikota (pilwali) Surabaya mengantarkan pasangan Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono sebagai pemenang. Pasangan dengan panggilan akrab Ridho ini mengungguli Arif Afandi-Adies Kadir (Cacak), Fandi Utomo-Yulius Bustami (FuYu), Bagio Sutadi-Mazlan Mansyur (Dimaz), dan Fitrajaja Purnama-Naen Suryono (Fitra-Naen). Seperti diperkirakan banyak pengamat bahwa persaingan yang sesungguhnya dalam pilwali Surabaya terjadi antara pasangan Ridho dan Cacak. Bahkan menjelang pilwali, banyak pengamat mengestimasikan akan terjadi dua putaran yang mempertemukan dua pasangan tersebut.

Tetapi, realitas politik menunjukkan bahwa pasangan Ridho unggul. Hasil rekapitulasi suara di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menunjukkan kemenangan Ridho dengan perolehan suara 358.187 (38,52 persen). Sementara Cacak memperoleh suara 327.516 (35,23 persen). Ini berarti terjadi selisih suara 30.671 untuk kemenangan Ridho. Rekapitulasi suara di level PPK oleh KPU ini hampir sama dengan hasil *quick count* yang dirilis oleh beberapa lembaga survei sehari setelah pilwali.

Tahap selanjutnya yang dilakukan KPU Surabaya adalah menetapkan hasil pilwali, melaporkan pada gubernur, dan menunggu proses pelantikan. Jika semua proses ini lancar maka Surabaya dalam lima tahun mendatang dipastikan akan dipimpin Tri Rismaharini (Bu Risma). Ini berarti Bu Risma telah berhasil mencetak sejarah sebagai walikota perempuan pertama yang memimpin Surabaya. Hebatnya lagi, sejarah itu diukir hampir bersamaan dengan hari ulang tahun Surabaya yang ke-717.

Pasangan Cacak memang masih berpeluang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, melihat realitas politik dan selisih suara yang begitu besar, rasanya usaha Tim Sukses Cacak untuk membawa sengketa pilwali ke MK akan sia-sia. Berdasarkan realitas politik itu, beberapa mantan calon walikota seperti Bagio Sutadi dan Fitrajaja Purnama telah mengambil langkah positif dengan bersikap legowo mengakui kemenangan Bu Risma. Sikap dua mantan calon walikota ini tentu layak diapresiasi. Sebab, meski sempat bersitegang karena sama-sama menjadi kompetitor, namun realitas politik menunjukkan bahwa mereka berdua kurang didukung oleh rakyat. Karena itu, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengakui kemenangan calon lain.

Bersikap Legowo

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU Surabaya jelas menjadi ujian yang sangat berat bagi pasangan Cacak. Sebab, dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga menjelang pilwali menunjukkan bahwa pasangan Cacak masih sangat dominan. Tetapi, dunia politik memang selalu menghadirkan kejutan. Apalagi perilaku politik pemilih dalam era pemilihan langsung ini juga sangat sulit diprediksi.

Besarnya angka golongan putih (golput) juga diindikasikan turut mempengaruhi perolehan suara pasangan Cacak. Kekalahan pasangan Cacak dalam pilwali juga menjadi pelajaran berharga karena calon yang didukung partai-partai besar ternyata harus tumbang. Hal ini karena konteks pilwali sangat berbeda dengan pemilihan anggota legislatif.

Publik Surabaya kini menunggu sikap resmi dari Arif Afandi dan Fandi Utomo untuk dengan elegan menerima kekalahan dan mengakui kemenangan Bu Risma. Jika ini dilakukan oleh keduanya maka pasti akan menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga. Sebab, harus diakui bahwa warga Surabaya sudah sangat lelah mengikuti berbagai hajatan demokrasi mulai pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, hingga pilwali.

Seluruh sumber daya, pikiran, dan anggaran, telah banyak terkuras untuk penyelenggaraan hajatan demokrasi. Karena itu, setiap pasangan calon harus diingatkan pada janji setia untuk siap

menang dan siap kalah sebagaimana yang diikrarkan menjelang pelaksanaan pilwali. Setiap pasangan calon harus legowo dengan apa pun pilihan rakyat. Inilah substansi dari sistem demokrasi yang menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat.

Persoalannya, kesiapan untuk menang dan kalah dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya berkaitan dengan pasangan calon yang berlaga. Lebih dari itu, sikap siap menang dan siap kalah juga harusnya ditunjukkan partai pengusung, partai pendukung, dan tim sukses. Justru kesiapan berbagai kelompok inilah yang seringkali menyebabkan ikrar damai sulit direalisasikan. Karena itu tidak mengherankan jika dalam pilkada sering terjadi perang klaim kemenangan oleh setiap tim sukses. Fenomena ini memang dapat dipahami. Sebab, setiap tim sukses pasti menginginkan pasangan yang didukung keluar sebagai pemenang.

Jika sikap siap menang dan siap kalah tidak secara konsisten dijalankan maka konflik politik akan terus memanas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan dendam politik pasangan yang menang terhadap pasangan yang kalah. Masyarakat tentu tidak mengharapkan hal ini terjadi. Karena itulah pasangan yang kalah secepatnya harus mengucapkan selamat pada pasangan yang menang.

Perlu Rekonsiliasi

Meski hanya diusung PDIP, tetapi sejatinya kemenangan Bu Risma dalam pilwali harus dilihat sebagai kemenangan warga Surabaya. Seluruh warga Surabaya telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kekhawatiran sebagian orang yang menduga bahwa kerusuhan sosial di Mojokerto dapat menjalar ke Surabaya akibat sentimen ideologi dan kepentingan politik ternyata tidak terjadi.

Kita layak bersyukur karena warga Surabaya mampu melakukan pesta demokrasi dengan cara yang sangat beradab. Masyarakat juga layak memberikan apresiasi terhadap semua calon walikota (cawali) dan calon wakil walikota (cawawali) yang turut berkompetisi dalam pilwali. Semua cawali dan cawawali jelas telah memberikan kontribusi bagi pendidikan demokrasi, khususnya bagi warga Surabaya.

Yang perlu dilakukan oleh pasangan pemenang pilwali Surabaya adalah merangkul seluruh komponen masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah pasangan calon yang pernah menjadi kompetitornya. Pasangan Ridho harus diingatkan bahwa masyarakat Surabaya sangat plural.

Bahkan dalam konteks pluralitas ini Surabaya layak dikatakan “Indonesia Mini”. Pluralitas etnik, agama, dan budaya, terjadi di Surabaya. Sepanjang dilihat secara positif maka pluralitas pasti akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun Kota Surabaya. Sentimen ideologi, konflik politik, dan kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi selama proses pilwali tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan dendam politik.

Pada konteks inilah pasangan Ridho harus didorong melakukan rekonsiliasi dengan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat. Hanya dengan cara ini, pasangan Ridho akan dapat merealisasikan program yang dijanjikan selama masa kampanye. Posisi kelompok-kelompok di masyarakat akan menjadi saksi sekaligus kekuatan *check and balances* pemerintahan yang akan dipimpin pasangan Ridho. Akhirnya, diucapkan selamat pada warga Kota Surabaya karena telah menuntaskan proses pilwali yang melelahkan ini secara demokratis dan berkeadaban.

Bu Risma yang akan menjadi nahkoda Surabaya lima tahun mendatang selama ini memang telah dikenal dengan *brand* sebagai kreator tata kota Surabaya sehingga menjadi nan hijau dan segar. Publik tentu akan menjadi saksi gebrakan Bu Risma selanjutnya. Masih banyak persoalan Kota Surabaya yang membutuhkan perhatian. Itu berarti Bu Risma harus bekerja keras untuk berbuat yang terbaik sehingga mampu mencetak sejarah sebagaimana tema kampanye yang digelorkan pada saat pilwali.

MENENTUKAN BRANDING KOTA SURABAYA

Pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dan Bambang DH (Bambang) telah resmi dilantik Gubernur Jawa Timur. Yang membanggakan, Risma berhasil mencatatkan diri sebagai walikota perempuan pertama dalam sejarah Kota Surabaya. Ini berarti tema mencetak sejarah yang senantiasa digelorakan Risma-Bambang pada saat kampanye pemilihan wali kota (pilwali) sebagian telah menjadi kenyataan. Warga Kota Surabaya kini bersiap menjadi saksi lahirnya kebijakan-kebijakan yang men-sejarah dalam era kepemimpinan Risma. Tentu saja, sejarah yang harus dicatat adalah prestasi yang membanggakan warga kota.

Pada konteks inilah Risma-Bambang perlu banyak belajar pada walikota terdahulu, terutama mereka yang telah berhasil menjadikan era kepemimpinannya dicatat sejarah dengan tinta emas. Jika diteliti, maka ada di antara walikota terdahulu yang telah berhasil menentukan *branding* (labelisasi) Kota Surabaya sehingga begitu dikenang publik. Nama pertama yang layak disebut adalah R. Soekotjo yang memimpin Surabaya era 1967-1974. Soekotjo dikenal sebagai peletak dasar modernisasi Kota Surabaya. Sejumlah gagasan besar telah berhasil diwujudkan pada era kepemimpinannya.

Pasar Turi yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada 1971 merupakan proyek prestisius Soekotjo. Dalam perkembangannya kita menyaksikan Pasar Turi pun telah menjadi pusat grosir terbesar di Surabaya, bahkan Jawa Timur. Karena itu tidak berlebihan jika Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, ketika

melantik Risma-Bambang berpesan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Turi. Pembangunan Pasar Turi harus menjadi atensi Risma-Bambang karena dapat dijadikan ikon Kota Surabaya.

Soekotjo juga dikenang warga kota karena telah menetapkan Hari Jadi Kota Surabaya pada 31 Mei 1929. Hingga kini tanggal 31 Mei selalu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Surabaya. Dalam buku Agus Wahyudi berjudul *Sketsa Tokoh Surabaya* (2006) telah dikemukakan sejumlah karya besar Soekotjo seperti, pembangunan Pasar Atom, Terminal Joyoboyo, *Surabaya Industrial Estate Rungkut* (PT SIER), dan Perumahan YKP (Yayasan Kas Pembangunan). Yang luar biasa, Soekotjo juga telah membuat *Masterplan* Surabaya 2000. Ini berarti Sukotjo merupakan tipikal pemimpin visioner dengan gagasan besar karena telah memikirkan Surabaya 25 tahun ke depan.

Walikota terdahulu yang juga perlu dijadikan inspirasi adalah Poernomo Kasidi, yang akrab dipanggil Pak Poer. Kiprah Pak Poer sebagai Walikota Surabaya periode 1984-1994 layak dijadikan teladan. Ia dikenal sebagai manager Kota Surabaya yang handal karena berhasil menangani masalah banjir. Pak Poer menyadari bahwa banjir tidak mungkin dapat dihilangkan. Karena itu yang dilakukannya adalah meminimalkan waktu genangan air tatkala terjadi banjir.

Beberapa cara pun ditempuh seperti menjaga kebersihan, perbaikan saluran, dan penyudetan saluran agar terhubung satu dengan yang lain. Pak Poer pun dikenal dengan *branding* "walikota got," karena begitu perhatian terhadap saluran air dan gorong-gorong yang ada di seluruh penunjur kota. Prestasi lain yang ditorehkan Pak Poer adalah membentuk Pasukan Kuning untuk menjadikan Surabaya bersih dan bebas banjir.

Perlu Branding Kota

Sebagai pemimpin baru kota metropolis, Risma-Bambang tentu sudah ditunggu dengan pekerjaan yang sangat berat. Sejumlah persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, telah menunggu sentuhan tangan keduanya. Warga Surabaya tentu berharap banyak pada keduanya. Apalagi Risma telah menunjukkan kinerja yang cemerlang ketika menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Kepala Badan Perencanaan Kota

Surabaya. Bambang DH juga menunjukkan *track record* yang baik ketika menjadi Walikota Surabaya.

Salah satu yang perlu segera dirumuskan oleh Risma-Bambang dalam menjalankan tugas adalah menentukan label atau merek Kota Surabaya. Dengan meminjam istilah Hermawan Kartajaya, Risma-Bambang harus menentukan *branding* Surabaya untuk diterjemahkan dalam berbagai kebijakan pembangunan kota. Banyak alternatif *branding* yang dapat dipilih. Misalnya, menentukan *branding* Surabaya sebagai kota pendidikan. Dengan *branding* ini berarti pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi, harus dipersiapkan menjadi lembaga yang kredibel dan bermutu.

Berkaitan dengan mempersiapkan pendidikan bermutu, Surabaya juga berpeluang dijadikan kota vokasi. Jika ini yang dipilih maka pendidikan di Surabaya harus diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya yang terampil. Usaha ini akan berhasil jika pemerintah mampu mesinergikan pendidikan dengan dunia usaha dan industri untuk menyiapkan sebanyak mungkin peluang kerja. *Branding* kota vokasi ini tentu sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Surabaya.

Branding lain yang dapat dipilih adalah kota wisata. Sejumlah sarana seperti, Jembatan Suramadu, Pantai Kenjeran, Kebun Binatang, Makam Sunan Ampel, Masjid al-Akbar, Tugu Pahlawan, berbagai situs sejarah, dan taman kota, jelas dapat dijadikan modal yang berharga. Apalagi di Surabaya tersedia layanan hotel berbintang, pusat perbelanjaan, makanan khas, fasilitas peribadatan, akses jalan raya, dan hutan kota yang dapat menjadi daya tarik. Yang perlu dipikirkan adalah membangun budaya masyarakat sehingga lebih ramah menyambut wisatawan.

Keunggulan manajemen tata pemerintahan yang efektif dan efisien juga dapat menjadi *branding*. Dengan semangat menerapkan reformasi birokrasi, para pejabat publik harus didorong untuk meningkatkan layanan. Jadikan Surabaya sebagai model layanan publik di segala bidang. Layanan birokrasi yang memuaskan pasti akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Para investor pun akan berdatangan jika layanan birokrasi memuaskan.

GOLPUT, PEMENANG PILGUB JATIM

Masyarakat Jawa Timur (Jatim) melaksanakan hajatan besar: pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung pada 23 Juli 2008. Pilgub Jatim diikuti lima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur: Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji), Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Achmady-Suhartono (Achsan), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Yang patut disyukuri, pesta demokrasi tersebut berlangsung sukses, aman, dan damai. Sebelumnya, masyarakat sempat khawatir karena yang bersaing dalam pilgub ini adalah tokoh yang memiliki basis massa yang fanatik. Apalagi, tiga kandidat adalah tokoh penting di organisasi NU, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan antarwarga nahdliyin. Ketiganya adalah Khofifah (ketua umum PP Muslimat), Ali Maschan Moesa (PW NU Jatim), dan Saifullah Yusuf (ketua umum PP GP Ansor). Belum termasuk Achmady yang didukung langsung Gus Dur.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pilgub ini menunjukkan masyarakat Jatim semakin dewasa dalam memahami demokrasi dan menyikapi perbedaan pilihan. Pilgub Jatim berlangsung sangat ketat dan menegangkan, terutama dilihat dari perolehan suara setiap pasangan calon. Perolehan suara pasangan calon, terutama Karsa, Kaji, SR, dan Salam, saling mengejar di basis daerah masing-masing.

Sementara itu, pasangan Achsan, sebagaimana diprediksi banyak pengamat, tidak mampu berbuat banyak, meski diusung PKB yang merupakan partai pemenang Pemilu 2004 di Jatim. Hal itu bisa dilihat dari hasil quick count sejumlah lembaga survei maupun hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Mayoritas lembaga survei menyatakan hasil quick count menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara hingga 30 persen. Begitu pula hasil penghitungan KPU Jatim. Karena itu, pilgub Jatim harus dilanjutkan ke putaran kedua, sebagaimana diatur dalam UU No 12/2008. Pilgub putaran kedua tersebut akan diikuti dua pasangan peraih suara terbanyak, Karsa dan Kaji.

KPUD Jatim pun mempersiapkan diri menyusun skenario pilgub putaran kedua. Pilgub putaran kedua harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan hasil pilgub putaran pertama. Itu berarti Karsa dan Kaji harus kembali berkampanye, meski dalam waktu singkat, untuk merebut simpati masyarakat Jatim.

Hasil putaran pertama pilgub Jatim juga memberikan pelajaran berharga pada partai-partai besar seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Ternyata, partai-partai tersebut, meski menunjukkan kekuatan pada Pemilu 2004, harus mengakui keunggulan figur yang lebih populer semacam Soekarwo dan Khofifah. Keduanya mampu mengungguli ketua partai dan tokoh-tokoh yang didukung partai mapan seperti Sutjipto (PDIP), Soenarjo (Golkar), dan Achmady (PKB).

Kemenangan Golput

Selain menempatkan Karsa dan Kaji sebagai dua pasangan peraih suara terbanyak, pesta demokrasi masyarakat Jatim menghadirkan fakta bahwa pemenang pilgub adalah golongan putih (golput). Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat Jatim mencapai 61,49 persen. Itu berarti angka golput mencapai 38,51 persen. Bahkan, hasil *quick count* Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mematok angka 42,28 persen untuk golput.

Fenomena golput memang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana pemilihan kepala daerah, baik di level kota/kabupaten maupun provinsi. Itu berarti KPU Jatim sebagai lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan pilgub harus mengevaluasi kinerjanya agar angka golput tidak semakin tinggi.

Berkaitan dengan hal itu, KPU Jatim perlu lebih massif menyosialisasikan pilgub, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh KPU Jatim adalah memberikan kemudahan bagi warga urban un-

tuk bisa menggunakan hak pilih di tempat mereka bekerja. Jadi, untuk mencoblos, warga urban tidak harus pulang ke daerah asal.

Memang, banyak alasan yang dikemukakan orang, sehingga memilih golput. Misalnya, mereka merasa pilgub tidak bermanfaat karena tidak akan pernah mampu mengubah kehidupan jadi lebih baik. Juga, ada orang yang berpandangan bahwa pilgub dan pemilihan kepala daerah yang lain hanya menguntungkan calon penguasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Sementara nasib kebanyakan orang tidak pernah terurus.

Ada juga alasan yang menunjukkan idealisme seseorang, sehingga memilih golput. Misalnya, mereka menyatakan tidak ada calon yang layak dipilih karena perbedaan ideologi, visi dan misi, serta masalah-masalah fundamental lain. Tentu, bersikap golput merupakan pilihan yang harus dihormati karena dilindungi Undang-undang. Tapi, yang harus selalu diingat, biaya pesta demokrasi ini ternyata sangat besar.

Menurut perhitungan KPU Jatim, untuk pilgub putaran pertama saja, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 425 miliar. Anggaran yang demikian besar tentu sangat tidak sebanding dengan tingginya angka golput. Karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, KPUD, serta berbagai elemen masyarakat adalah memberikan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Sebab, dana yang digunakan menggelar pilgub bersumber dari APBD yang sejatinya adalah uang rakyat.

Jika penganut golput berargumentasi bahwa tidak ada calon terbaik yang bisa dipilih, itu menjadi tantangan pasangan calon yang lolos ke putaran kedua. Itu berarti Karsa dan Kaji harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat dengan mengusung program-program riil yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Penganut golput harus diyakinkan bahwa ada harapan hidup lebih baik dengan memilih salah satu di antara dua pasangan tersebut. Menggunakan hak pilih itu berarti memberikan harapan, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih pasti tidak memiliki harapan apa pun. Cara itu diharapkan bisa menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat Jatim dalam pilgub.

MAKNA PENGHAPUSAN NOMOR URUT CALEG

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan penting berkaitan dengan sistem pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009. Dalam amar keputusan MK dikatakan bahwa caleg terpilih akan ditentukan melalui mekanisme suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Putusan ini ditetapkan untuk merespon permohonan uji materiil yang dilakukan beberapa pihak yang berkeberatan dengan sistem nomor urut dalam menentukan lolos dan tidaknya caleg. Menurut tafsiran MK, mekanisme penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut seperti tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214, bertentangan dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Inti dari pasal 214 menyatakan bahwa caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih ditentukan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika calon yang memenuhi syarat melebihi jumlah kursi yang diperoleh partai politik (parpol) peserta pemilu, maka kursi akan diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil.

Ketentuan pasal 214 inilah yang dibatalkan MK dan mengganti dengan mekanisme penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Menurut UUD 1945 keputusan MK dikatakan sudah final. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah MK memberikan keputusan. Hal ini berarti mekanisme penentuan caleg terpilih dalam pemilu 2009 harus

didasarkan pada perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut sebagaimana pemilu sebelumnya. Selanjutnya menjadi tugas KPU sebagai lembaga independen pelaksana pemilu untuk menjalankan amar keputusan MK ini.

Putusan MK tersebut jelas merupakan berkah bagi caleg yang ditempatkan di nomor besar oleh partainya. Sebab, peluang mereka menjadi legislator masih terbuka lebar asalkan mampu memperoleh suara terbanyak. Sebaliknya, bagi caleg yang bernomor kecil, keputusan MK dapat mengurangi ekspektasi untuk memudahkan jalan menjadi legislator.

Bahkan keputusan MK bisa menjadi musibah bagi caleg bernomor urut kecil. Sebab, diakui atau tidak, selama ini telah terjadi praktik jual-beli nomor urut yang dilakukan sebagian besar parpol. Hal ini berarti keputusan MK telah menyebabkan caleg yang terlanjur membeli nomor urut menjadi rugi besar. Drajat H. Wibowo, anggota DPR dari FPAN, mengibaratkan caleg yang memperoleh nomor kecil dengan cara membeli ini seperti sedang bermain saham yang harganya tiba-tiba anjlok akibat keputusan MK.

Keputusan MK juga memperkecil harapan caleg titipan pimpinan partai tingkat pusat, baik dengan pertimbangan politis maupun dikarenakan ada hubungan kekeluargaan. Mereka biasanya diberi nomor urut jadi di daerah pemilihan (dapil) yang gemuk dengan harapan agar lolos dengan mudah. Tetapi, dengan keputusan MK berarti caleg titipan partai harus bersaing ketat dengan caleg produk lokal.

Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah bagi caleg yang di-drop dari pusat meskipun mereka memiliki modal besar. Sebab, caleg produk lokal biasanya lebih populer karena telah lama bekerja dan membina konstituen di dapil-nya. Pada konteks inilah menarik diamati pertarungan caleg yang bermodal tetapi elitis *versus* caleg yang miskin modal tetapi populis.

Sebenarnya, putusan MK yang menekankan suara terbanyak sebagai mekanisme penentuan caleg terpilih telah ditetapkan secara internal oleh beberapa parpol. Sebut saja misalnya PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Bahkan untuk menindaklanjuti kebijakan partai ini beberapa caleg telah melakukan perjanjian di depan notaris untuk tidak saling menggugat pasca pemilu.

Tetapi, keputusan internal partai ini masih sangat rawan dengan gugatan dari caleg, terutama mereka yang bernomor kecil tetapi tidak terpilih. Mereka berpeluang menggugat karena peraturan internal partai bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Keputusan MK menurut UU tentang MK bersifat mengikat. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi parpol peserta pemilu kecuali menerima. Beberapa partai besar, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS, telah menunjukkan komitmen untuk menerima keputusan MK. Persoalannya sekarang berpulang pada masing-masing caleg. Sebab, keputusan MK ini sekaligus mengharuskan setiap caleg bekerja lebih keras untuk mendekati diri dan mengenalkan visi misinya pada rakyat. Hanya dengan cara inilah caleg berpotensi terpilih karena mendapat dukungan mayoritas dari rakyat.

Terdapat pesimisme di kalangan pengamat dan praktisi politik terhadap putusan MK. Misalnya, dikatakan bahwa putusan MK hanya akan melapangkan jalan caleg yang bermodal besar. Modal dana yang besar jelas akan memungkinkan caleg memainkan kekuatannya dengan gencar berpromosi dan melakukan *money politics*. Sementara caleg dengan sumber dana terbatas memiliki peluang lebih kecil.

Tentu saja pemikiran ini tidak salah. Sebab, dana merupakan salah satu kekuatan yang dapat memainkan peran penting sehingga caleg dapat lebih dikenal rakyat. Tetapi, pengalaman dalam beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan dana sesungguhnya bukan satu-satunya variabel yang menentukan kesuksesan seseorang untuk terpilih. Ini berarti caleg yang kekurangan modal pun berpeluang terpilih asalkan mampu meyakinkan konstituen bahwa dirinya layak menjadi legislator.

Selain itu, kalangan politisi perempuan juga berkeberatan dengan keputusan MK. Mereka menganggap keputusan MK dapat menggembosi perjuangan kaum perempuan. Bahkan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2008 sangat mungkin tidak tercapai. Sebab setiap caleg harus bertarung bebas, termasuk caleg perempuan, untuk mendapatkan suara terbanyak. Tetapi, inilah resiko pilihan menggunakan sistem demokrasi.

Dalam alam demokrasi kedaulatan rakyat harus dihargai. Seperti dikemukakan dalam beberapa referensi politik bahwa ada dua variabel penting dalam demokrasi, yakni keterlibatan rakyat (*participation*) dan persatuan dalam pemilihan (*contestation*). Justru di sinilah caleg perempuan akan diuji kualitas dan akseptabilitasnya. Jika mereka terpilih, maka pilihan itu bukan semata karena perbedaan biologis. Tetapi, dikarenakan kapasitasnya memang memadai untuk menjadi legislator.

Karena itulah keputusan MK dapat disebut sebagai pelajaran berharga bagi penanaman nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Sebab, substansi demokrasi yang sesungguhnya memang terletak pada kedaulatan rakyat. Maka menjadi aneh jika ada caleg dengan perolehan suara terbanyak tidak terpilih karena kebetulan bernomor urut besar. Sebaliknya, dapat dikatakan menipu rakyat jika ada caleg yang memperoleh suara lebih kecil terpilih karena bernomor urut kecil. Padahal penentuan nomor urut pasti dilakukan oleh parpol berdasarkan pertimbangan yang terkadang sangat politis.

Selain itu, keputusan MK juga membuka peluang yang seluas-luasnya bagi kader non-parpol yang memiliki basis kuat di akar rumput dengan kualifikasi moral dan akademis baik untuk menjadi legislator. Orang dengan tipologi seperti ini jelas tidak perlu antre berlama-lama karena telah memiliki modal sosial yang dibutuhkan politisi. Syarat yang perlu dilakukan adalah masuk menjadi anggota parpol sehingga berkesempatan dicalonkan sebagai caleg.

BANGUN KOALISI STRATEGIS, MENCARI FIGUR ALTERNATIF

Wacana membangun koalisi strategis untuk mendorong munculnya pemimpin baru yang lebih segar terus digelorkan banyak pihak. Beberapa strategi pun diwacanakan seperti anjuran agar partai politik (parpol) Islam dan parpol berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman bergabung menjadi satu kekuatan politik. Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi salah satu tokoh yang sangat bersemangat menggagas koalisi strategis ini.

Ibarat bola salju, gagasan ini pun terus menggelinding dan memicu pro-kontra. Bagi yang setuju, koalisi strategis yang melibatkan partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman dianggap dapat menjadi kekuatan alternatif untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Sementara kelompok yang menolak menyatakan bahwa wacana koalisi strategis yang didasarkan pada sentimen ideologis-agama dianggap tidak lagi relevan dan dapat menafikan kemajemukan bangsa. Bahkan wacana ini dianggap hanya akan melahirkan romantisme sejarah.

Secara taktis, koalisi strategis yang digagas beberapa pemikir dan politisi Muslim ini dimaksudkan untuk memecah kebuntuan sehingga dapat dimunculkan pemimpin alternatif di luar dua kandidat utama; SBY dan Mega. Sebab, sejauh ini rasanya baru kedua sosok ini saja yang benar-benar telah siap untuk bertarung dalam Pilpres 2009. Bahkan keduanya juga telah ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh partai pendukungnya masing-masing.

Tidak ingin hanya ada dua figur yang bersaing, penggagas koalisi strategis berupaya melakukan penjajagan aliansi yang melibatkan beberapa partai Islam dan partai yang berbasis ormas keislaman. Koalisi strategis PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB, dinilai cukup prospektif untuk memunculkan capres alternatif. Pengalaman Pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan perolehan suara partai-partai tersebut relatif stabil. Bahkan kalau dihitung perolehan suaranya mencapai 38 persen.

Sementara itu, Partai Hanura juga berencana membangun koalisi strategis pada Pemilu 2009. Koalisi ini akan melibatkan beberapa partai menengah. Target yang diinginkan juga sama, yaitu menemukan figur alternatif. Partai medioker seperti PPP, PBR, PAN, PKB, PKS, Hanura, dan Gerindra, dijadikan sebagai kekuatan utama. Berdasarkan kalkulasi politik kekuatan partai menengah ini dapat mencapai 35 persen.

Jika koalisi strategis yang digagas tokoh-tokoh partai Islam dan partai menengah tersebut solid, maka berarti telah melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu. Seperti diketahui, persyaratan yang ditetapkan UU Pemilu untuk pencalonan presiden dan wakil presiden adalah perolehan suara minimal 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional. Dengan demikian keinginan penggagas koalisi strategis untuk mengusung capres alternatif berarti bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

Keinginan membangun koalisi strategis juga dilakukan Dewan Integrasi Bangsa (DIB), ormas yang baru-baru ini mengadakan konvensi capres. Koalisi DIB ini dimotori oleh Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Oleh karena masih berbentuk ormas, maka koalisi DIB pun berencana menggandeng beberapa partai sebagai kendaraan politik. Bahkan dalam konvensi capres versi DIB ini turut berpartisipasi beberapa figur ternama yang sebelumnya telah mendeklarasikan diri sebagai capres seperti Sri Sultan HB X, Yuddy Chrisnandi, Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim, dan Rizal Ramli.

Pertanyaannya, seberapa besar peluang capres alternatif ini untuk menantang dua capres utama, SBY dan Mega? Jawabannya adalah seperti pernah dikemukakan Sunardi Rinakit, Koordinator Tim Pelangi Perubahan, yang kini menjadi Ketua Tim Sukses Sri Sultan HB X. Menurut Sunardi Rinakit, politik meru-

pakan ilmu yang bersifat *post factum* atau tidak dapat diprediksi. Artinya, semua kemungkinan dapat terjadi.

Apalagi dalam sistem Pilpres langsung di mana suara rakyat memegang peranan penting. Pengalaman pemilihan kepala daerah di beberapa tempat juga menunjukkan peranan partai politik tidak lagi menjadi kekuatan utama. Bahkan pilihan orang terhadap partai politik pun seringkali berbeda dengan pilihan figur calon kepala daerah. Hal ini berarti seseorang dapat memilih partai tertentu, tetapi tidak mendukung calon kepala daerah yang diusung partai tersebut.

Kekuatan Alternatif

Usaha beberapa pihak untuk membangun koalisi strategis sangat mungkin dapat menjadi kekuatan alternatif. Meski harus disadari bahwa dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset menunjukkan popularitas SBY dan Mega masih menduduki posisi tertinggi. Tetapi, kemapanan posisi dua capres ini dapat terancam kalau capres alternatif terus bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan cara ini *rating* popularitas capres alternatif akan terus meningkat. Apalagi pengalaman politik juga menunjukkan bahwa perilaku politik (*political behaviour*) masyarakat selalu berubah dari waktu ke waktu. Kondisi ini jelas merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para penggagas koalisi strategis.

Tantangan bagi penggagas koalisi strategis terletak pada kemampuannya untuk melakukan manajemen konflik partai-partai politik pendukung. Sebab, sudah bukan menjadi rahasia lagi beberapa partai yang ada jelas memiliki agenda masing-masing. Tegasnya, setiap partai pasti memiliki kalkulasi politik. Apalagi dalam politik dikenal doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*. Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Tantangan lebih berat akan dirasakan penggagas koalisi strategis ketika sudah sampai pada tahap penentuan nama capres dan cawapres alternatif. Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase paling krusial. Pengalaman politik partai-partai Islam dan partai-partai berbasis ormas keislaman barangkali dapat dijadikan pela-

jaran. Partai-partai ini biasanya begitu mudah menyatukan visi dan misi dalam membangun masyarakat yang Islami, tetapi akan berpecah-belah menjadi beberapa kelompok ketika sudah sampai pada tahap menentukan *sharing* kekuasaan.

Peluang perpecahan kelompok yang tergabung dalam koalisi startegis ini akan semakin mendekati kenyataan apabila belum ditemukan figur yang dapat diterima semua kelompok. Padahal untuk sampai pada kesepakatan penentuan figur alternatif ini jelas membutuhkan proses yang panjang.

Persoalannya sekarang berpulang pada para penggagas koalisi strategis. Figur manakah yang representatif diusung menjadi capres alternatif. Apalagi saat ini telah tersedia beberapa figur yang potensial dijadikan capres alternatif. Sebut saja misalnya Jusuf Kalla (Golkar), Sri Sultan HB X (dicalonkan Partai Republikan), Hidayat Nur Wachid (PKS), Prabowo Subianto (Gerindra), Wiranto (Hanura), Sutiyoso (dicalonkan Partai Indonesia sejahtera), dan Din Syamsuddin (dicalonkan PMB). Jika mencermati keragaman latar belakang sosial, ideologi, dan politik beberapa tokoh ini rasanya penentuan figur alternatif yang disepakati tampaknya masih menjadi masalah besar bagi penggagas koalisi strategis.

Jika figur alternatif telah berhasil disepakati, langkah penting yang lain adalah mencari kendaraan politik. Dalam hal menentukan kendaraan politik ini yang perlu dipertimbangkan adalah membangun koalisi pelangi yang melibatkan sebanyak mungkin partai dari berbagai latar belakang ideologi. Persoalan ideologi politik ini tampaknya masih menjadi variabel yang penting dipertimbangkan dalam menentukan koalisi strategis.

Salah satu alternatif yang dapat dikemukakan adalah bahwa partai politik pendukung harus merepresentasikan gabungan ideologi nasionalis-religius. Politik representasi ideologi ini penting untuk menghindari tarik-menarik kepentingan ideologi yang masih menjadi kultur dalam sistem politik di Indonesia. Politik representasi kekuatan Jawa dan non-Jawa juga penting dipertimbangkan. Maka pada konteks inilah perlu dicari figur alternatif yang dapat merepresentasikan perpaduan kekuatan ideologi dan kepentingan pemerataan pembangunan.

Terakhir yang juga penting digarap penggagas koalisi strategis adalah menyiapkan program-program strategis dan pragmatis yang pro rakyat. Justru dalam aspek penyiapan program ini figur yang disepakati menjadi capres alternatif tidak boleh hanya berbekal cek kosong. Figur alternatif harus sudah menyiapkan *blue print* Indonesia lima tahun mendatang. Ini berarti para penggagas koalisi strategis perlu bekerja sama menentukan prioritas program yang akan ditawarkan. Kemasan tema kampanye yang lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu tema tentang penyediaan kebutuhan pokok yang murah, lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan, penting diutamakan.

Jika langkah ini dilakukan para penggagas koalisi strategis, rasanya kemunculan figur alternatif bukan sekedar berfungsi sebagai pemecah kebuntuan. Tetapi, lebih dari itu akan dapat menjadi kekuatan alternatif yang solutif untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.

INDEKS

A

Abd al-Wahhab Khallaf 129
 Abd Mu'thi 163
 Abdurrazaq Fakhruddin 65
 Abraham Lincoln 187
 Abu Bakar 213
 Abu Hanifah 130
 Abu Sangkan 19, 22
 Adam Smith 106
 Agus Mustofa 19, 22, 24
 Agus Wahyudi 243
 Ahmad Dahlan 30, 77, 152, 218
 Ahmad Erani Yustika 79
 Ahmad Fuad Fanani 163
 Ahmadiyah 36, 131, 135, 140
 Ahmad Najib Burhani 163
 Akal Sehat 51, 53, v
 Ali Abd Raziq 129, 213
 Ali Maschan Moesa 245
 Alimin 107
 Airan Aboge 117
 Airan Sesat 36, v
 Ali Sastroamijoyo 211, 223
 Allen Bergin 19
 Al-Maun Foundation 163
 Al-Maunisme 77
 Alternatif 63, 142, 252, 254, vii
 Al-Thahthawi 214
 Amal Sosial 7, v
 Ambon 136

Amil 99
 Andi Mallarangeng 177
 Andreas Yewangoe 193
 Andre Moller 34
 Anggito Abimanyu 42, 44
 Anies Baswedan 169
 Antasari Azhar 188
 Antikorupsi 190, 201, vi
 A. N. Wilson 18, 257
 APBD 101, 103, 155, 186, 196-198,
 202-203, 247
 APBN 174, 179, 181, 202-203
 Arie Batubara 79
 Arkoun 147
 Arukat Djaswadi 109
 Ary Ginanjar Agustian 19
 AS. Hikam 57
 Aulia Pohan 188
 Azyumardi Azra 148

B

Badar 91-92
 Bangsa 90, 134, 169, 253, vi
 BAZ 99
 Baznas 99
 Bima Aria Sugiharto 79
 BIN 159
 BPS 99, 102
 Branding 242-244, vii
 BTI 108

- Buaya 59
 Budaya 35, 61, 128, 171-173, 215, 227, 236-237, vii
 Budi Utomo 87, 217-218
 Buya Syafii 66, 69, 149, 162-163, 193, 200
- C**
 Century 60, 112, 178, 188, 194
 Choel Mallaranggeng 177
 Cicak 59
 Civic Values 131, vi
 Civil Society 55, 57, v
- D**
 Dakwah 31-32, 131, vi
 Daniel Goleman 21-22
 Darsono 107
 David Cores 20
 Dekmejian 144-145
 Demokrat 65, 95, 107, 177, 227, 234, 249-250
 Deny J. A. 79
 Dialog 22, 118
 Diana L. Eck 118, 120, 126
 Din Syamsuddin 29, 65, 68-70, 72-73, 163, 171, 180, 193, 252, 255
 Djohan Efendi 148
- E**
 Effe Findiarti 94
 Eko Prasajo 232
 Elit 79, 88, 133
 Emile Durkheim 19
 Empati 46
 Emy Susanti 94
 Engels 106
 Entrepreneur 21-22, v
 Ernest Renan 219
 Erving Guffman 64
 ESQ 17, 19, 22
 Esti Martiana Rachmie 94
- F**
 Fairuz Ahmad 94
 Fathi Usman 120
 Fatwa 36, 111-112, 151, vi
 Fikih 201
 FKUB 155
 F. Nietzsche 18
 FPI 140, 142, 145
 Frans Magnis Suseno 167
- G**
 G 30S/PKI 107
 Gerindra 234, 253, 255
 Gerwani 108
 GI 2000 73
 Golkar 70, 95, 227, 234-235, 246, 249-250, 255
 Golput 245-246, vii
 Gubernur 96, 101, 177, 186, 242
 Gus Dur 27, 128, 245
- H**
 Hadits 32, 40, 112, 130, 164
 Haji 42, 45, 48, 206, v
 HAM 37, 141
 Hanura 253, 255
 Hari Akhir 49-50
 Harvey Cox 119
 Haryatmoko 137
 Haryono 19
 Haryo Sulistyarso 231
 Hasyim Muzadi 201
 Hedonisme 174, vi
 Hermawan Kartajaya 244
 Hidayat Nur Wachid 255
 Hijrah 15
 HIV/AIDS 83-86, vi
 HTI 117, 145
 Huston Smith 119
- I**
 Ian Marshall 21-22
 Ibnu Khaldun 175-176
 Ibrahim 25, 43, 46, 48-49, 57,

253, v
 Idealisme 207, 221, vii
 Ideologi 106, 108, 148, 159, 172, vi
 Imaginasi 213, vii
 Imam Sugema 79
 Imam Syafii 130
 Indra J. Piliang, Fadhil Hasan 79
 Inklusif 117, vi
 Integritas 204, vii
 ISDV 107
 Ismail 49

J

Jalaluddin Rahmad 129
 Jalan Tengah 143, vi
 Jamaah al-Nadzir 117
 Jama'ah Islamiyyah 142
 Jamaluddin al-Afghani 148
 Jihad 142, 144-145, 161, 210
 JIL 143-144
 Jimly Asshiddiqie 226
 JIMM 143-144, 162
 JK 66, 79, 81, 227
 John Hick 119
 John Naisbitt 18
 Jusuf Kalla 66, 227, 255

K

Kang Moeslim 162, 164, vi
 Kapasitas 94
 Kaum Muda 87, vi
 Keadilan 209
 Keberagamaan 17
 Kebohongan 189
 Kemanusiaan 10, v
 Kemenag 42, 44, 200, 204-206
 Kemenakertrans 187
 Kemendikbud 200
 Kemenkes 83, 200
 Kemenpora 177, 187
 Kemerdekaan 90, 187, vi
 Kemiskinan 101-102, vi
 Keyakinan 50
 Khofifah 96, 245-246

Kiai Dahlan 77-78
 KIB 73
 Kinerja 193, vi
 Koalisi 252-253, vii
 Komando Jihad 210
 Komodifikasi 22
 Komunisme 106, 110, vi
 Konflik 131, 136
 Konsistensi 76
 Kontrak Politik 227, vii
 Korupsi 59, 177, 188, 200, 204, 209, vi
 KPK 59, 177-179, 188, 204-206, 209
 KPU 94, 188, 221, 227, 238-239, 245-247, 249
 Kritik 66, 68, 154, 194-195, v
 KUA 205
 Kunker 183, vi
 Kuntowijoyo 126, 146

L

Laskar Jihad 142, 145
 Legislatif 231, vii
 Legowo 239
 Lekra 108
 Liberal 143
 Lord Acton 168-169, 190
 LSM 11, 69, 79, 102-104, 155, 158, 198

M

Madinah 14-15, 44, 72, 91, 118
 Mahasiswa 191
 Mahfud MD 180
 Mahmud Syaltut 85
 Majelis Tarjih 31, 111, 151
 Makkah 14-15, 44, 91
 Malik Badri 85-86
 Manifestasi 20, 69-70
 Marciano Norman 159
 Martinus Situmorang 193
 M. Asfar 107
 Masyumi 107, 211, 223

- Maulana Malik Ibrahim 25
 Mazhab 31, 38, 123, 130, 150, 156, 163
 Metropolis 17, 94
 Mike Featherstone 21
 Miqdad bin Amir 92
 Miranda Goeltom 177, 187
 Mitsuo Nakamura 30, 152
 MK 239, 248-251
 MMI 142, 145
 M. Nazaruddin 177
 Mochtar Lubis 171
 Modernisasi 151, 153, vi
 Moeslim Abdurrahman 79, 154, 162
 Mohammad Roem 223
 Mohammad Sholeh 22, 24
 Monoteisme 48
 Moral Illiteracy 171, vi
 M. Prakosa 79
 M. Ridwan Lubis 157
 Mubah 31
 Muhammad Abduh 148, 152
 Muhammad Arifin Ilham 19
 Muhammadiyah vi, iv, 19, 29-32, 38, 59, 61, 65-78, 111-113, 117, 131-132, 142-143, 148-154, 161-164, 171, 180, 193, 200-202, 218, 252, v
 MUI 36-38, 110, 113, 117-118, 120-121, 123
 Muktamar 72
 Mukti Aji 118, 124, 128, 133
 Munawar A. Fattah 27
 Muso 107
 Musyawarah 31, 111-112, 151, 202
- N**
 Napoleon 214
 Naqli 130
 Nasionalisme 217, vii
 Nasrudin Zulkarnaen 187
 Natsir 211, 223
 Negara Islam 213, vii
 NII 213
 NKRI 213
 Nomor Urut 248, vii
- Non Kader 234, vii
 NU 19, 27, 38, 59, 61, 65-67, 107, 117, 128, 131-132, 142-143, 162, 193, 201-202, 223, 245, v
 Nunun 187
- O**
 Oase 177, vi
 Oliver Roy 160, 214
 Orde Baru 5, 65-66, 87, 109-110, 202, 210, 217-218
 Ormasvi, 61, 140, 200, 203, v
- P**
 Pak AR 65-66
 Pak Poer 243
 PAN 183, 210, 249-250, 253
 Partai 107, 109, 177, 209, 211, 217, 227, 249-250, 253, 255, vii
 Partai Islam 209, vii
 Pasar Spiritual 21, v
 Patricia Aburdene 18
 Paulo Freire 163
 PBNU 66, 180, 201
 PDIP 95, 234, 240, 246, 250
 Pembauran 134, vi
 Pemikiran 143, vi
 Pemuda Rakyat 108
 Penampakan 138
 Pencitraan 193, vi
 Pengadilan 109
 Pengajian 9
 Perang Khaibar 182
 Perempuan 93, 95, 97, 155-157, vi
 Peter Corrigan 22
 Pilgub 104, 245-246, vii
 Pilkada vii, 61, 176, 234, v
 Pilpres 79, 252, 254, vi
 Pilwali 238, vii
 PKB 95, 210, 234-235, 245-246, 250, 253
 PKI 107-110, 136, 217
 PKNU 234-235
 Pluralisme 117-118, 122-126,

- 129, vi
 PMB 255
 Poernomo Kasidi 243
 Politik 62, 207, 223, 227, 255, vii
 Politisi 223
 Ponari 51-54
 Positif 125, vi
 PPP 210, 234-235, 250, 253
 Prabowo Subianto 227, 255
 Pradana Boy 163
 Presiden 65-66, 69, 72, 156, 187-188, 193-195, 205, 209, 217, 252
 Prestasi 14, 243, v
 Prita Mulyasari 59-60
 Produktifitas 98, vi
 Purifikasi 151, 153, vi
- Q**
 Quraish Shihab 48, 90
- R**
 Ramadan vi, 9, 33-35, 39-41, 90-92, 98-99, v
 Rasyid Ridha 148
 Rasyid Ridla 152, 215
 Rekonsiliasi 238, 240, vii
 Rene Descartes 16
 Ritual v, iii, 1, 3-4, 7
 Rizal Ramli 227, 253
 Rosihan Anwar 205
 Rousseau 229
- S**
 Sachedina 120
 Said Agil Hussein al-Munawar 205
 Said Aqil Siraj 66, 180
 Saifullah Yusuf 245
 Sambas 136
 Sampit 136
 Sanksi Sosial 180, vi
 Saudagar 76, 78, v
 SBY 65-67, 69, 72-73, 79, 81, 188, 193-195, 227, 252-254
- Semaun 107
 Seni 31
 Sesat 36, v
 Siklus 20 tahunan 87
 Sipilis 117
 SOBSI 108
 Soekarwo 242, 245-246
 Soekotjo 242-243
 Spiritual 17, 21, v
 Sri Pannyavaro 193
 Sri Sultan 253, 255
 Sudi Silalahi 194
 Suharto 66, 184, 217
 Sukarno-Hatta 90
 Sukidi 163
 Sunan Ampel 25, 155, 244
 Sunan Bonang 25
 Sunan Drajat 25
 Sunan Giri 25
 Sunarjo 223
 Sunni 128-129
 Surabaya ii, iii, iv, 17, 19-20, 25, 94-95, 183, 231-235, 238-244, vii
 Sweeping 39, v
 Syafril Sairin 135
 Syiah 128-129, 140
- T**
 Tajdid 111, 151
 Tarjih 31, 111, 151
 Tasawuf 22
 Taufiq Abdullah 173
 TBC 29-30, 32, 149
 Tembakau 113-114
 Terorisme 159, vi
 Todung Mulya Lubis 180
 Tradisi 27, 186
 Trans-Nasional 217, vii
 Tri Rismaharini 94, 234, 238, 242
- U**
 Ulama 36, 40, 110, 113, 117, 120, 123, 201
 Umar 14, 213
 Umrah 42

Urban Sufism 17, 23, v
Utsman 213

W

Wahib Wahab 205
Wahidin Sudirohusodo 87, 217
Wali 193
Walikota 234, 243-244
Well Educated 231, vii
Wilfred Cantwell Smith 119
William Liddle 146
Wisata Rohani 25, v

Y

Yulyani 94, 235

Z

Zakat 98-99, vi
Zakiyuddin Baidhawy 163
ZIS 98-99
Zuly Qodir 163

BIODATA



Dr. Biyanto, M.Ag, lahir pada 10 Oktober 1972 di Desa Gampang Sejati, Laren, Lamongan. Pendidikan dasar ditempuh di MI Hidayatul Ummah Gampang Sejati (lulus 1983) dan SDN Gampang Sejati (lulus 1985). Melanjutkan pendidikan menengah di SMPN Laren (lulus 1988), dan SMAN Paciran, Lamongan (lulus 1991). Pernah belajar mengaji di Pesantren Al-Fatah, Siman,

Lamongan (1983) dan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran (1989-1991). Menyelesaikan S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1995), S2 IAIN Sumatera Utara (1996-1998), dan S3 dengan predikat Cumlaude di IAIN Sunan Ampel (2005-2008).

Sejak mahasiswa aktif dalam dunia pergerakan. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom IAIN Sunan Ampel (1994-1995). Pada periode 2005-2010 dipercaya menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Periode berikutnya, 2010-2015, dipercaya sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur.

Sejak tahun 1996 hingga sekarang, tercatat sebagai pengajar di IAIN Sunan Ampel. Juga tercatat sebagai pengajar di Universitas Widya Kartika (2007-sekarang), Institut Informatika Indonesia (2008-sekarang), dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2009). Pernah pula menjadi Tim Pengembangan

Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel (1999-2006), serta Ketua Program Studi Politik Islam di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel (2005-2010). Pada tahun 2007 memperoleh predikat Dosen Teladan IAIN Sunan Ampel.

Karya tulis yang telah terpublikasikan di antaranya *Mewujudkan Pendidikan Unggul* (2012), *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (2009), *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibn Khaldun* (2004), *Pergumulan Tokoh Muhammadiyah Menuju Sufi: Catatan Pemikiran Abdurrahim Nur* (bersama A. Fatichuddin & Sufyanto, 2003), *Menembus Benteng Tradisi* (kontributor, 2005), *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (kontributor, 2007), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme* (kontributor dan penyunting, 2007), dan *Penegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (kontributor, 2008).

Beberapa tulisan untuk Jurnal Ilmiah juga pernah dimuat di *Paramedia*, *Qualita Ahsana*, *Istiqro'*, *Ijtima'*, *Akademika*, *Islamica*, *al-Afkar*, dan lain-lain. Selain itu, juga aktif menulis opini di berbagai media massa: *Jawa Pos*, *Seputar Indonesia*, *Kompas*, *Surya*, *Radar Surabaya*, *Surabaya Post*, dan lain-lain. Korespondensi dapat melalui email: mr_abien@yahoo.com.